



Buku Induk Statistik Pekerjaan Umum (BIS PU) | 2010



PEKERJAAN UMUM
http://www.pu.go.id/info_statistik/

Pusat Pengolahan Data (PUSDATA) Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia
Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta 12110 - Telp: 021-7392262



B u k u I n d u k
STATISTIK
Pekerjaan Umum
http://www.pu.go.id/publik/ind/produk/info_statistik/



DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PENGOLAHAN DATA (PUSDATA)

KATA PENGANTAR

Penyediaan dan penyebarluasan data dan informasi statistik infrastruktur PU dalam berbagai bentuk penyajian yang meliputi perkembangan kependudukan, ketenaga kerjaan dan ekonomi, serta data pendukung lainnya dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur Pekerjaan Umum, sangat diperlukan. Oleh sebab itu disusun Buku Induk Statistik Infrastruktur ke-PU-an yang selanjutnya disebut sebagai “Buku Induk Statistik Pekerjaan Umum (BIS-PU)”.

Data dan informasi yang disajikan diupayakan berupa data terpilah yang berasal dari berbagai sumber, baik dari dalam maupun dari luar lingkungan Kementerian PU, serta memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Dalam Penyusunan BIS-PU ini, disajikan data dan informasi tingkat Nasional yang dirinci menurut jenis kelamin, wilayah, status sosial ekonomi, dan waktu, per Provinsi. Bentuk penyajian dibuat sederhana, mudah dan menarik untuk dibaca serta informatif, sehingga dapat diketahui posisi, kondisi dan kebutuhan masyarakat perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan infrastruktur.

Kami menyadari bahwa didalam penyusunan BIS-PU ini, masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu saran dan masukan yang konstruktif dari para pengguna buku ini sangat diharapkan guna penyempurnaan penyusunan selanjutnya.

Jakarta, Oktober 2010



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	xii
Daftar Singkatan	xx
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Tujuan dan Manfaat	I-2
1.3 Ruang Lingkup Kegiatan	I-3
BAB II : KONDISI UMUM INDONESIA	
2.1 Wilayah Indonesia	II-1
2.1.1 Luas Wilayah	II-1
2.1.2 Wilayah Administrasi	II-2
2.2 Kependudukan dan Ketenagakerjaan	II-2
2.2.1 Kependudukan	II-2
2.2.2 Ketenaga Kerjaan	II-6
2.3 Ekonomi	II-10
2.3.1 Produk Domestik Bruto (PDB)	II-10
2.3.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	II-12
2.3.3 Perkembangan Penanaman Modal	II-12



BAB III : INFORMASI STATISTIK PENDUKUNG PEMBANGUNAN

3.1	Konstruksi	III-1
3.2	Potensi Lahan Sawah	III-2
3.3	Angkutan Darat (Transportasi)	III-2
3.4	Perumahan dan Lingkungan Permukiman	III-3
3.4.1	Perumahan	III-3
3.4.2	Lingkungan Permukiman	III-7
3.5	Bencana Alam	III-11

BAB IV : INFORMASI STATISTIK KE-PU-AN

4.1	Infrastruktur Sumber Daya Air	IV-1
4.1.1	Sungai	IV-2
4.1.2	Danau dan Situ	IV-4
4.1.3	Rawa	IV-5
4.1.4	Air Tanah	IV-6
4.1.5	Bendungan/ Waduk.....	IV-7
4.1.6	Embung.....	IV-8
4.1.7	Bendung	IV-9
4.1.8	Kinerja SDA	IV-10
4.1.9	Analisis Statistik Bidang Sumber Daya Air.....	IV-11
4.2	Infrastruktur Bina Marga	IV-16
4.2.1	Jalan Tol	IV-16
4.2.2	Jalan	IV-18
4.2.3	Jembatan	IV-21
4.2.4	Analisis Statistik Bidang Bina Marga	IV-27
4.3	Infrastruktur Cipta Karya	IV-42
4.3.1	Penyediaan Air Minum	IV-42
4.3.2	Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman	IV-45



4.3.3	Pengembangan Permukiman	IV-49
4.3.4	Analisis Statistik Bidang Cipta Karya	IV-52
4.4	Penataan Ruang	IV-59
4.4.1	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).....	IV-60
4.4.2	Pengembangan Kawasan.....	IV-63
BAB V	: Data Gender Kementerian PU	V-1
5.1	Komposisi PNS dan CPNS Kementerian PU	V-2
5.1.1	Analisis Per Satminkal PU	V-2
5.1.2	Analisis Keseluruhan PU	V-7
5.2	Komposisi Peserta Pelatihan di Kementerian PU	V-14
5.2.1	Bidang Konstruksi	V-15
5.2.2	Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi ..	V-16
5.3	Komposisi Pengguna PU-net (Hasil Survei)	V-17



DAFTAR TABEL

I. KONDISI UMUM INDONESIA

1. Wilayah Indonesia

Tabel 2.1	: Luas Wilayah dan Jumlah Pulau Menurut Provinsi Di Indonesia, Tahun 2008	A-1
Tabel 2.2	: Jumlah Kabupaten, Kota, Kecamatan, Desa Menurut Provinsi di Indonesia, Tahun 2004 – 2008	A-2

2. Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Tabel 2.3	: Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Provinsi, Tahun 2000 - 2009	A-3
Tabel 2.4	: Distribusi Prosentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Provinsi, Tahun 2000 - 2009	A-4
Tabel 2.5.1	: Jumlah Penduduk dan Keluarga di Indonesia, Tahun 2008...	A-5.1
Tabel 2.5.2	: Jumlah Penduduk Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Hasil Sensus Penduduk 2010	A-5.2
Tabel 2.6	: Rumah Tangga dan Rata-Rata Banyaknya Anggota Rumah Tangga Menurut Provinsi, Tahun 2000 – 2009	A-6
Tabel 2.7	: Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi, Tahun 2008 – 2009	A-7
Tabel 2.8	: Penduduk Usia Kerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Tahun 2008 - 2009	A-8
Tabel 2.9	: Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Tahun 2008 – 2009	A-9



3. Ekonomi

Tabel 2.10.1 : Distribusi Prosentase Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2004 – 2008	A-10.1
Tabel 2.10.2 : Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha (%), Tahun 2006 – 2009	A-10.2
Tabel 2.11 : Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi, Tahun 2005 - 2008 (Miliar Rupiah)	A-11
Tabel 2.12 : Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Provinsi, Tahun 2005 - 2008 (Miliar Rupiah)	A-12
Tabel 2.13 : Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi, Tahun 2005 - 2008 (Ribu Rupiah)	A-13
Tabel 2.14 : Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Provinsi, Tahun 2005 - 2008 (Ribu Rupiah).....	A-14
Tabel 2.15 : Distribusi Prosentase Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi, Tahun 2005 - 2008 (Ribu Rupiah)	A-15
Tabel 2.16 : Perkembangan Realisasi Investasi PMDN Menurut Sektor, Tahun 2005 – 2008	A-16
Tabel 2.17 : Perkembangan Realisasi Investasi PMA Menurut Sektor, Tahun 2005 – 2008	A-17
Tabel 2.18 : Perkembangan Realisasi Investasi PMDN Menurut Lokasi, Tahun 2005 – 2008	A-18
Tabel 2.19 : Perkembangan Realisasi Investasi PMA Menurut Lokasi, Tahun 2005 – 2008	A-19



II. INFORMASI STATISTIK PENDUKUNG PEMBANGUNAN

1. Konstruksi

Tabel 3.1 : Jumlah Perusahaan Konstruksi Menurut Provinsi dan Jenis Golongan, Tahun 2007 dan 2008 B-1

Tabel 3.2 : Nilai Konstruksi yang Diselesaikan Menurut Provinsi dan Jenis Pekerjaan (juta rupiah) Tahun 2007 dan 2008 B-2

2. Potensi Lahan Sawah

Tabel 3.3 : Luas Panen Padi Menurut Provinsi, Tahun 2005 – 2009 (Ha) B-3

Tabel 3.4 : Luas Lahan Sawah Menurut Jenis Pengairan dan Provinsi, Tahun 2005, (Ha) B-4

3. Angkutan Darat (Transportasi)

Tabel 3.5 : Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Provinsi dan Jenis Kendaraan Tahun 2005 – 2007, (Unit)..... B-5

4. Perumahan, Lingkungan Permukiman, dan Bencana Alam

Tabel 3.6 : Permukiman Kumuh di Indonesia Tahun 2005 dan 2008 B-6

Tabel 3.7 : Banyaknya Stok Akhir Rumah¹ yang Dibangun oleh Perum Perumnas, Tahun 2008, (Unit)..... B-7

Tabel 3.8 : Jumlah Pembangunan Rumah oleh Perum Perumnas Menurut Jenis Rumah, Tahun 2008, (Unit) B-8

Tabel 3.9 : Rencana dan Realisasi Pembangunan Rumah Siap Huni (RSH) oleh Perum Perumnas, Tahun 2008, (Unit) B-9

Tabel 3.10 : Kinerja Pembangunan Perumahan Rakyat, Tahun 2005 – 2009 B-10



Tabel 3.11	: Kualitas Bangunan Rumah/ Tempat Tinggal di Indonesia, Tahun 2008	B-11
Tabel 3.12	: Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Sumber Air Minum, Tahun 2008	B-12
Tabel 3.13	: Indikator Penting Perusahaan Air Minum (PAM), Tahun 2004 – 2008	B-13
Tabel 3.14	: Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Fasilitas Buang Air Besar, Tahun 2008	B-14
Tabel 3.15.1	: Rekapitulasi Kejadian Bencana Alam Musim Hujan 2009 (Status 01 November – 31 Desember 2009)	B-15.1
Tabel 3.15.2	: Rekapitulasi Kejadian Bencana Alam Musim Hujan 2009 – 2010 (Status 01 November 2009 – 30 April 2010)	B-15.2

III. INFORMASI STATISTIK KE-PU-AN

1. Sumber Daya Air

Tabel 4.1	: Data Inventarisasi Sungai di Indonesia	C-1
Tabel 4.2	: Daftar Danau dan Situ Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2009	C-2
Tabel 4.3	: Jumlah Rawa Berdasarkan Provinsi di Indonesia	C-3
Tabel 4.4	: Jumlah Air Tanah Berdasarkan Provinsi di Indonesia	C-4
Tabel 4.5	: Inventarisasi Bendungan Berdasarkan Provinsi di Indonesia, Tahun 2010	C-5
Tabel 4.6	: Jumlah Embung Potensi Berdasarkan Provinsi di Indonesia	C-6
Tabel 4.7	: Jumlah Embung Berdasarkan Provinsi di Indonesia	C-7
Tabel 4.8	: Jumlah Bendung Berdasarkan Provinsi di Indonesia, Tahun 2010	C-8
Tabel 4.9	: Hasil-Hasil Pembangunan Bidang Sumber Daya Air, Tahun 2005 - 2009	C-9



Tabel 4.10 : Data Bencana (Banjir dan Tanah Longsor) dan Bangunan Sumber Daya Air (Status Bencana 1 November 2009 – 30 April 2010)	C-10
--	------

2. Bina Marga

Tabel 4.11.1 : Fungsi Jalan Arteri Jalan Tol Pulau Sumatera	C-11.1;C-11.2
Tabel 4.11.2 : Fungsi Jalan Arteri Jalan Tol Pulau Sulawesi	C-11.1;C-11.2
Tabel 4.11.3 : Fungsi Jalan Arteri Jalan Tol Pulau Jawa	C-11.3
Tabel 4.12.1 : Status Jalan Nasional Jalan Tol Pulau Sumatera	C-12.1;C-12.2
Tabel 4.12.2 : Status Jalan Nasional Jalan Tol Pulau Sulawesi	C-12.1;C-12.2
Tabel 4.12.3 : Status Jalan Nasional Jalan Tol Pulau Jawa	C-12.3
Tabel 4.13 : Data Investasi Jalan Tol Per Provinsi, Akhir Tahun 2009	C-13
Tabel 4.14 : Jalan Tol Yang Beroperasi	C-14
Tabel 4.15 : Panjang Jalan Menurut Provinsi dan Tingkat Kewenangan Pemerintahan (Km) Tahun 2005 – 2007	C-15
Tabel 4.16.1 : Kondisi Jalan Nasional Hasil Survai Tahun 2009 (Km), (Berdasarkan Pengelompokan 4 Kondisi Menurut IRI Dalam Satu Ruas Jalan) <i>National Road Condition 2009</i>	C-16.1
Tabel 4.16.2 : Kondisi Jalan Nasional Hasil Survai Tahun 2009 (%), (Berdasarkan Pengelompokan 4 Kondisi Menurut IRI Dalam Satu Ruas Jalan) <i>National Road Condition 2009</i>	C-16.2
Tabel 4.17.1 : Kondisi Jalan Nasional Hasil Survai Tahun 2009 (Km), (Berdasarkan Kondisi Rata-Rata SDI Per Ruas Jalan)	C-17.1
Tabel 4.17.2 : Kondisi Jalan Nasional Hasil Survai Tahun 2009 (%), (Berdasarkan Kondisi Rata-Rata SDI Per Ruas Jalan)	C-17.2
Tabel 4.18.1 : Klasifikasi Jalan Nasional Tahun 2009 (Km), (Menurut PP Jalan No. 34 Tahun 2006)	C-18.1
Tabel 4.18.2 : Klasifikasi Jalan Nasional Tahun 2009 (%), (Menurut PP Jalan No. 34 Tahun 2006).....	C-18.2



Tabel 4.19 : Fungsi Jalan Arteri Dan Kolektor I Bukan Jalan Tol (Menurut Kepmen Jalan No. 630 Tahun 2009)	C-19
Tabel 4.20.1 : Status Jalan Nasional Bukan Jalan Tol (Menurut Kepmen Jalan No. 631 Tahun 2009)	C-20.1
Tabel 4.20.2 : Perbandingan Panjang Ruas Jalan Nasional Antara SK Menteri PU Tahun 2004 dan SK Menteri PU Tahun 2009	C-20.2
Tabel 4.21 : Daftar Ruas Jalan Nasional Kota Metropolitan	C-21
Tabel 4.22 : Monitoring Data IRMS Berdasarkan Roughness, Tahun Anggaran 2010	C-22
Tabel 4.23 : Data Jalan Nasional Per Provinsi, Akhir Tahun 2009	C-23
Tabel 4.24.1 : Rekapitulasi Jumlah Jembatan Nasional Menurut BMS Tahun 2009 (Unit), Berdasarkan Panjang Jembatan (Hasil Filterisasi Dengan Ruas Jalan Nasional Menurut Kepmen No. 376/KPTS/M/2004)	C-24.1
Tabel 4.24.2 : Rekapitulasi Jumlah Jembatan Nasional Menurut BMS Tahun 2009 (%), Berdasarkan Panjang Jembatan (Hasil Filterisasi Dengan Ruas Jalan Nasional Menurut Kepmen No. 376/KPTS/M/2004)	C-24.2
Tabel 4.25.1 : Rekapitulasi Panjang Jembatan Nasional Menurut BMS Tahun 2009 (m), Berdasarkan Panjang Jembatan (Hasil Filterisasi Dengan Ruas Jalan Nasional Menurut KEPMEN 376/KPTS/M/2004)	C-25.1
Tabel 4.25.2 : Rekapitulasi Panjang Jembatan Nasional Menurut BMS Tahun 2009 (%), Berdasarkan Panjang Jembatan (Hasil Filterisasi Dengan Ruas Jalan Nasional Menurut KEPMEN 376/KPTS/M/2004)	C-25.2
Tabel 4.26.1 : Rekapitulasi Kondisi Jumlah Jembatan Nasional Menurut BMS Tahun 2009 (Unit), Berdasarkan Kondisi Jembatan Secara Umum (Hasil Filterisasi Dengan Ruas Jalan Nasional Menurut KEPMEN 376/KPTS/M/2004)	C-26.1



Tabel 4.26.2: Rekapitulasi Kondisi Jumlah Jembatan Nasional Menurut BMS Tahun 2009 (%), Berdasarkan Kondisi Jembatan Secara Umum (Hasil Filterisasi Dengan Ruas Jalan Nasional Menurut KEPMEN 376/KPTS/M/2004)	C-26.2
Tabel 4.27.1: Rekapitulasi Kondisi Panjang Jembatan Nasional Menurut BMS Tahun 2009 (m), Berdasarkan Kondisi Jembatan Secara Umum (Hasil Filterisasi Dengan Ruas Jalan Nasional Menurut KEPMEN 376/KPTS/M/2004)	C-27.1
Tabel 4.27.2: Rekapitulasi Kondisi Panjang Jembatan Nasional Menurut BMS Tahun 2009 (%), Berdasarkan Kondisi Jembatan Secara Umum (Hasil Filterisasi Dengan Ruas Jalan Nasional Menurut KEPMEN 376/KPTS/M/2004)	C-27.2
Tabel 4.28.1: Rekapitulasi Jumlah Jembatan Nasional Menurut BMS Tahun 2009 (Unit), Berdasarkan Jenis Konstruksi Jembatan (Hasil Filterisasi Dengan Ruas Jalan Nasional Menurut KEPMEN 376/KPTS/M/2004)	C-28.1
Tabel 4.28.2: Rekapitulasi Jumlah Jembatan Nasional Menurut BMS Tahun 2009 (%), Berdasarkan Jenis Konstruksi Jembatan (Hasil Filterisasi Dengan Ruas Jalan Nasional Menurut KEPMEN 376/KPTS/M/2004)	C-28.2
Tabel 4.29.1: Rekapitulasi Panjang Jembatan Nasional Menurut BMS Tahun 2009 (m), Berdasarkan Jenis Konstruksi Jembatan (Hasil Filterisasi Dengan Ruas Jalan Nasional Menurut KEPMEN 376/KPTS/M/2004)	C-29.1
Tabel 4.29.2: Rekapitulasi Panjang Jembatan Nasional Menurut BMS Tahun 2009 (%), Berdasarkan Jenis Konstruksi Jembatan (Hasil Filterisasi Dengan Ruas Jalan Nasional Menurut KEPMEN 376/KPTS/M/2004)	C-29.2



Tabel 4.30.1 : Rekapitulasi Jumlah Jembatan Nasional Menurut BMS Tahun 2009 (Unit), Berdasarkan Tahun Dibangun (Hasil Filterisasi Dengan Ruas Jalan Nasional Menurut KEPMEN 376/KPTS/M/2004)	C-30.1
Tabel 4.30.2 : Rekapitulasi Jumlah Jembatan Nasional Menurut BMS Tahun 2009 (%), Berdasarkan Tahun Dibangun (Hasil Filterisasi Dengan Ruas Jalan Nasional Menurut KEPMEN 376/KPTS/M/2004)	C-30.2
Tabel 4.31.1 : Rekapitulasi Panjang Jembatan Nasional Menurut BMS Tahun 2009 (m), Berdasarkan Tahun Dibangun (Hasil Filterisasi Dengan Ruas Jalan Nasional Menurut KEPMEN 376/KPTS/M/2004)	C-31.1
Tabel 4.31.2 : Rekapitulasi Panjang Jembatan Nasional Menurut BMS Tahun 2009 (%), Berdasarkan Tahun Dibangun (Hasil Filterisasi Dengan Ruas Jalan Nasional Menurut KEPMEN 376/KPTS/M/2004)	C-31.2
Tabel 4.32 : Monitoring Data IRMS Berdasarkan Roughness (%), Tahun Anggaran 2010	C-32
Tabel 4.33 : Rekapitulasi Jumlah Jembatan Nasional Menurut BMS Tahun 2009 (%), Berdasarkan Kondisi Jembatan Secara Umum (Hasil Filterisasi Dengan Ruas Jalan Nasional Menurut KEPMEN 376/KPTS/M/2004)	C-33

3. Cipta Karya

Tabel 4.34 : Pembangunan SPAM IKK, 2005 - 2009	C-34
Tabel 4.35 : Program PAMSIMAS dan Target Desa Per Kabupaten/Kota.	C-35
Tabel 4.36 : Pencapaian Sasaran RPJM 2005-2009 Bidang Cipta Karya Pengelolaan Air Limbah	C-36



Tabel 4.37	: Pencapaian Sasaran RPJM 2005-2009 Bidang Cipta Karya Pengelolaan Persampahan	C-37
Tabel 4.38	: Pencapaian Sasaran RPJM 2005-2009 Bidang Cipta Karya Penanganan Drainase	C-38
Tabel 4.39	: Pengelolaan Air Limbah, Persampahan, dan Drainase Tahun 2009	C-39
Tabel 4.40	: Data Sanimas, Tahun 2003 – 2008	C-40
Tabel 4.41	: Program 3R (<i>Reuse, Reduce, Recycle</i>) Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan	C-41
Tabel 4.42	: Pencapaian Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), Tahun 2003 – 2008	C-42
Tabel 4.43	: Rekapitulasi Capaian Desa Sasaran PPIP, 2005 – 2009	C-43
Tabel 4.44	: Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Tahun 2009	C-44
Tabel 4.45	: Pengelolaan Air Limbah, Persampahan, dan Drainase Per Wilayah, Tahun 2009	C-45
Tabel 4.46	: Jumlah Jiwa Terlayani dalam Pencapaian Sasaran RPJM 2005 – 2008 Bidang Cipta Karya, Pengelolaan Air Limbah ..	C-46
Tabel 4.47	: Jumlah Jiwa Terlayani dalam Pencapaian Sasaran RPJM 2005 – 2008 Bidang Cipta Karya, Pengelolaan Persampahan	C-47
Tabel 4.48	: Luas Kota yang Dikelola dalam Pencapaian Sasaran RPJM 2005 – 2008 Bidang Cipta Karya, Penanganan Drainase	C-48

3. Penataan Ruang

Tabel 4.49	: Daftar Status Perda RTRW di Indonesia	C-49
Tabel 4.50	: Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau	C-50
Tabel 4.51	: Kawasan Andalan Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2008	C-51
Tabel 4.52	: Penetapan Kawasan Strategis Nasional	C-52
Tabel 4.53	: Penetapan Kawasan Lindung Nasional	C-53



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 : Jumlah Penduduk di Indonesia (000 Jiwa), Tahun 2005 - 2008	II-3
Gambar 2.2 : Persentase Penduduk Miskin di Indonesia (%) Tahun 2005 - 2008	II-6
Gambar 2.3 : Perkembangan Ketenagakerjaan di Indonesia (org/ juta), Tahun 2004 – 2009	II-7
Gambar 2.4 : Perkembangan Tingkat Kesempatan Kerja di Indonesia (%), Tahun 2004 – 2009	II-8
Gambar 2.5 : Perkembangan Penduduk Usia Kerja Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun 2005 – 2009	II-9
Gambar 2.6 : Perkembangan Penduduk Usia Kerja Menurut Umur dan Jenis Kelamin, Tahun 2005 – 2009	II-9
Gambar 2.7 : Perkembangan Angkatan Kerja Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun 2007 – 2009	II-10
Gambar 2.8 : Perkembangan Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin, Tahun 2007 – 2009	II-10
Gambar 2.9 : Tingkat Pengangguran ^{*)} di Indonesia (%), Tahun 2005 – 2008	II-11
Gambar 2.10 : Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha (%), Tahun 2006 – 2009	II-12
Gambar 3.1 : Produksi Kendaraan Bermotor Dalam Negeri (unit), Tahun 2005 – 2009*	III-3



Gambar 3.2 : Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Milik Sendiri Menurut Provinsi, Tahun 2006 - 2008	III-7
Gambar 3.3 : Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bukan Leding Menurut Provinsi, 2006 – 2008	III-8
Gambar 3.4 : Persentase Rumah Tangga dengan Tempat Pembuangan Berupa Tinja Tangki Menurut Provinsi, Tahun 2006 - 2008 ..	III-10
Gambar 3.5 : Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Buang Air Besar Sendiri Menurut Provinsi, Tahun 2006 – 2008	III-10
Gambar 3.6 : Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Indonesia, Tahun 2008	III-11
Gambar 4.1 : Grafik Biplot dari Data Tabel 4.10 untuk Pulau Sumatera	IV-12
Gambar 4.2 : Grafik Biplot dari Data Tabel 4.10 untuk Pulau Jawa, Bali	IV-13
Gambar 4.3 : Grafik Biplot dari Data Tabel 4.10 untuk Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan NTB	IV-13
Gambar 4.4 : Grafik Biplot dari Data Tabel 4.10 untuk Pulau Maluku, Papua, dan NTT	IV-14
Gambar 4.5 : Investasi Jalan Tol (%), Tingkat Pelayanan Akhir Tahun 2009	IV-16
Gambar 4.6 : Ruas Jalan Nasional, Tingkat Pelayanan Akhir Tahun 2009 .	IV-20
Gambar 4.7 : Jumlah dan Panjang Jembatan Berdasarkan Tipe Lintas Jembatan, Status : 5 Januari 2010	IV-24
Gambar 4.8 : Panjang Jembatan Berdasarkan Kondisi Jembatan Secara Umum, Tahun 2006 – 2008 (Status 29 Januari 2009)	IV-25
Gambar 4.9 : Jumlah Jembatan Berdasarkan Kondisi Jembatan Secara Umum, Tahun 2006 – 2008 (Status 29 Januari 2009)	IV-26
Gambar 4.10 : Grafik Biplot dari Data Tabel 4.32 untuk Pulau Sumatera	IV-28
Gambar 4.11 : Grafik Biplot dari Data Tabel 4.32 untuk Pulau Jawa, Bali	IV-29



Gambar 4.12 : Grafik Biplot dari Data Tabel 4.32 untuk Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan NTB	IV-30
Gambar 4.13 : Grafik Biplot dari Data Tabel 4.32 untuk Pulau Maluku, Papua, dan NTT	IV-30
Gambar 4.14 : Grafik Biplot dari Data Tabel 4.33 untuk Pulau Sumatera	IV-32
Gambar 4.15 : Grafik Biplot dari Data Tabel 4.33 untuk Pulau Jawa, Bali	IV-32
Gambar 4.16 : Grafik Biplot dari Data Tabel 4.33 untuk Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan NTB	IV-33
Gambar 4.17 : Grafik Biplot dari Data Tabel 4.33 untuk Pulau Maluku, Papua, dan NTT	IV-34
Gambar 4.18 : Jumlah Lokasi IKK dalam Pembangunan SPAM IKK, Tahun 2005 – 2009 *)	IV-36
Gambar 4.19 : Total Kapasitas (l/det) dalam Pembangunan SPAM IKK, Tahun 2005 – 2009 *)	IV-36
Gambar 4.20 : Jumlah Penduduk Terlayani (Jiwa) dalam Pembangunan SPAM IKK, Tahun 2005 – 2009 *)	IV-37
Gambar 4.21 : Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Air Limbah dan Persampahan (Kab/ Kota), Tahun Anggaran 2005 – 2009 ...	IV-39
Gambar 4.22 : Penduduk Terlayani dari Pengelolaan Air Limbah dan Persampahan (Jiwa) Tahun Anggaran 2005 – 2009	IV-39
Gambar 4.23 : Hasil Pencapaian Drainase (Ha) Tahun Anggaran 2005-2009	IV-40
Gambar 4.24 : Grafik Biplot dari Data Tabel 4.45 untuk Pulau Sumatera	IV-46
Gambar 4.25 : Grafik Biplot dari Data Tabel 4.45 untuk Pulau Jawa, Bali	IV-47
Gambar 4.26 : Grafik Biplot dari Data Tabel 4.45 untuk Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan NTB.....	IV-48
Gambar 4.27 : Grafik Biplot dari Data Tabel 4.45 untuk Pulau Maluku, Papua, dan NTT	IV-49
Gambar 4.28 : Grafik Biplot dari Data Tabel 4.46 untuk Pulau Sumatera	IV-50
Gambar 4.29 : Grafik Biplot dari Data Tabel 4.46 untuk Pulau Jawa, Bali	IV-51



Gambar 4.30 : Grafik Biplot dari Data Tabel 4.46 untuk Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan NTB.....	IV-51
Gambar 4.31 : Grafik Biplot dari Data Tabel 4.46 untuk Pulau Maluku, Papua, dan NTT	IV-52
Gambar 4.32 : Grafik Biplot dari Data Tabel 4.47 untuk Pulau Sumatera	IV-53
Gambar 4.33 : Grafik Biplot dari Data Tabel 4.47 untuk Pulau Jawa, Bali	IV-53
Gambar 4.34 : Grafik Biplot dari Data Tabel 4.47 untuk Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan NTB	IV-54
Gambar 4.35 : Grafik Biplot dari Data Tabel 4.47 untuk Pulau Maluku, Papua, dan NTT	IV-55
Gambar 4.36 : Grafik Biplot dari Data Tabel 4.48 untuk Pulau Sumatera.....	IV-56
Gambar 4.37 : Grafik Biplot dari Data Tabel 4.48 untuk Pulau Jawa, Bali	IV-57
Gambar 4.38 : Grafik Biplot dari Data Tabel 4.48 untuk Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan NTB	IV-57
Gambar 4.39 : Grafik Biplot dari Data Tabel 4.48 untuk Pulau Maluku, Papua, dan NTT	IV-58
Gambar 5.1 : Prosentase PNS dan CPNS Kementerian PU (%), April 2010	V-2
Gambar 5.2 : Prosentase Pegawai Kementerian PU Menurut Jenis Kelamin (%) Per Satminkal, April 2010	V-3
Gambar 5.3 : Prosentase Pejabat Kementerian PU di SIBB (%) Menurut Jenis Kelamin, April 2010	V-3
Gambar 5.4 : Prosentase Pejabat Kementerian PU di Ditjen (%) Menurut Jenis Kelamin, Per Satminkal, April 2010	V-4
Gambar 5.5 : Prosentase Pegawai Kementerian PU di SIBB (%) Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Sarjana Per Satminkal, April 2010	V-5



Gambar 5.6 : Prosentase Pegawai Kementerian PU di Ditjen (%) Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Sarjana Per Satminkal, April 2010	V-6
Gambar 5.7 : Prosentase Pegawai Kementerian PU di SIBB (%) Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Diploma Ke Bawah Per Satminkal, April 2010.....	V-6
Gambar 5.8 : Prosentase Pegawai Kementerian PU di Ditjen (%) Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Diploma Ke Bawah Per Satminkal, April 2010	V-7
Gambar 5.9 : Sebaran Prosentase Pegawai Kementerian PU Menurut Jenis Kelamin (%), April 2010	V-8
Gambar 5.10 : Sebaran Prosentase Pejabat Eselon I Kementerian PU Menurut Jenis Kelamin (%), April 2010	V-9
Gambar 5.11 : Sebaran Prosentase Pejabat Eselon II Kementerian PU Menurut Jenis Kelamin(%), April 2010	V-9
Gambar 5.12 : Sebaran Prosentase Pejabat Eselon III Kementerian PU Menurut Jenis Kelamin (%), April 2010	V-10
Gambar 5.13 : Sebaran Prosentase Pejabat Eselon IV Kementerian PU Menurut Jenis Kelamin(%), April 2010	V-10
Gambar 5.14 : Sebaran Prosentase Pegawai Tingkat Pendidikan S3 Kementerian PU Menurut Jenis Kelamin (%), April 2010	V-11
Gambar 5.15 : Sebaran Prosentase Pegawai Tingkat Pendidikan S2 Kementerian PU Menurut Jenis Kelamin (%), April 2010	V-11
Gambar 5.16 : Sebaran Prosentase Pegawai Tingkat Pendidikan S1 Kementerian PU Menurut Jenis Kelamin (%), April 2010	V-12
Gambar 5.17 : Sebaran Prosentase Pegawai Tingkat Pendidikan SM/ D3 Kementerian PU Menurut Jenis Kelamin (%), April 2010	V-12
Gambar 5.18 : Sebaran Prosentase Pegawai Tingkat Pendidikan SLTA Kementerian PU Menurut Jenis Kelamin (%), April 2010	V-13



Gambar 5.19 : Sebaran Prosentase Pegawai Tingkat Pendidikan SLTP Kementerian PU Menurut Jenis Kelamin (%), April 2010	V-13
Gambar 5.20 : Sebaran Prosentase Pegawai Tingkat Pendidikan SD Kementerian PU Menurut Jenis Kelamin (%), April 2010	V-14
Gambar 5.21 : Prosentase Peserta Pelatihan Konstruksi Menurut Jenis Kelamin (%), Tahun 2007 - 2009	V-15
Gambar 5.22 : Prosentase Peserta Pelatihan TIK Menurut Jenis Kelamin (%), Tahun 2006 - 2010	V-17
Gambar 5.23 : Prosentase Pengguna PU-Net di Kementerian PU Menurut Jenis Kelamin(%), Tahun 2005 dan 2010 ^{*)}	V-18
Gambar 5.24 : Prosentase Pengguna PU-Net Menurut Jenis Kelamin dan Satminkal (%) Tahun 2010 ^{*)}	V-18
Gambar 5.25 : Prosentase Pengguna PU-Net Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Kepuasan (%), Tahun 2010 ^{*)}	V-19



DAFTAR SINGKATAN

- 3R : *Reduce, Reuse, Recycle*
- A** AKPM : Akses, Kontrol, Partisipasi, dan Manfaat
- B** BIS-PU : Buku Induk Statistik Pekerjaan Umum
BKPM : Badan Koordinasi Penanaman Modal
BMS : *Bridge Management System*
BPS : Badan Pusat Statistik
- D** DAS : Daerah Aliran Sungai
DI : Daerah Irigasi
DPP/ KTP2D : Desa Pusat Pertumbuhan/ Kawasan Terpadu Pusat
Pertumbuhan Desa
- F** Fasum : Fasilitas Umum
- H** HU : Hidran Umum
- I** IKK : Ibu Kota Kecamatan
IPA : Instalasi Pengolahan Air
IPAL : Instalasi Pengolahan Air Limbah
IPLT : Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja
IRI : *International Roughness Index*
IRMS : *Interurban Road Management System*
- J** JDB : Jaringan Distribusi Bagi
JDL : Jaringan Distribusi Layanan
JDU : Jaringan Distribusi Utama



- K** Kementpera : Kementerian Perumahan Rakyat
 KK : Kepala Keluarga
 KSN : Kawasan Strategis Nasional
- M** MDGs : *Millenium Development Goals*
 MST : Muatan Sumbu Terberat
- P** Pakumis : Perkampungan Padat dan Kumuh serta Miskin
 PAM : Perusahaan Air Minum
 PDAM : Perusahaan Daerah Air Minum
 PDB : Produk Domestik Bruto
 PDRB : Produk Domestik Regional Bruto
 Perda : Peraturan Daerah
 Perumnas : Perumahan Nasional
 PKN : Pusat Kegiatan Nasional
 PKSN : Pusat Kegiatan Strategis Nasional
 PKW : Pusat Kegiatan Wilayah
 PLP : Penyehatan Lingkungan Permukiman
 PLTA : Pembangkit Listrik Tenaga Air
 PMA : Penanaman Modal Asing
 PMDN : Penanaman Modal Dalam Negeri
 PP : Peraturan Pemerintah
 PPIP : Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
 Prokasih : Program Kali Bersih
 PU : Pekerjaan Umum
 PUG : Pengarusutamaan Gender
 PUSDATA : Pusat Pengolahan Data
- R** RDTR : Rencana Detil Tata Ruang
 Renstra : Rencana Strategis



	RNPS	: Rawa Non Pasang Surut
	RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
	RPS	: Rawa Pasang Surut
	RS	: Rumah Sederhana
	RsH	: Rumah Sederhana Sehat
	RSH	: Rumah Siap Huni
	RTR	: Rencana Tata Ruang
	RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
	Rusun	: Rumah Susun
	Rusunami	: Rumah Susun Sederhana Milik
	Rusunawa	: Rumah Susun Sederhana Sewa
S	Sanimas	: Sanitasi Berbasis Masyarakat
	Satminkal	: Satuan Administrasi Pangkal
	SDA	: Sumber Daya Air
	SDI	: <i>Surface Distress Index</i>
	SIB	: Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan
	SK	: Surat Keputusan
	SPAM	: Sistem Penyediaan Air Minum
	SR	: Sambungan Rumah
T	TA	: Tahun Anggaran
	TPA	: Tempat Pemrosesan Akhir
U	UU	: Undang-Undang
W	WS	: Wilayah Sungai



DAFTAR SINGKATAN

	3R	: Reduce, Reuse, Recycle
A	AKPM	: Akses, Kontrol, Partisipasi, dan Manfaat
B	BIS-PU	: Buku Induk Statistik Pekerjaan Umum
	BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal
	BMS	: Bridge Management System
	BPS	: Badan Pusat Statistik
D	DAS	: Daerah Aliran Sungai
	DI	: Daerah Irigasi
	DPP/ KTP2D	: Desa Pusat Pertumbuhan/ Kawasan Terpadu Pusat Pertumbuhan Desa
F	Fasum	: Fasilitas Umum
H	HU	: Hidran Umum
I	IKK	: Ibu Kota Kecamatan
	IPA	: Instalasi Pengolahan Air
	IPAL	: Instalasi Pengolahan Air Limbah
	IPLT	: Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja
	IRI	: International Roughness Index
	IRMS	: Interurban Road Management System
J	JDB	: Jaringan Distribusi Bagi
	JDL	: Jaringan Distribusi Layanan
	JDU	: Jaringan Distribusi Utama
K	Kemenpera	: Kementerian Perumahan Rakyat
	KK	: Kepala Keluarga



	KSN	: Kawasan Strategis Nasional
M	MDGs	: Millenium Development Goals
	MST	: Muatan Sumbu Terberat
P	Pakumis	: Perkampungan Padat dan Kumuh serta Miskin
	PAM	: Perusahaan Air Minum
	PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
	PDB	: Produk Domestik Bruto
	PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
	Perda	: Peraturan Daerah
	Perumnas	: Pembangunan Perumahan Nasional
	PKN	: Pusat Kegiatan Nasional
	PKSN	: Pusat Kegiatan Strategis Nasional
	PKW	: Pusat Kegiatan Wilayah
	PLP	: Penyehatan Lingkungan Permukiman
	PLTA	: Pembangkit Listrik Tenaga Air
	PMA	: Penanaman Modal Asing
	PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri
	PP	: Peraturan Pemerintah
	PPIP	: Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
	Prokasih	: Program Kali Bersih
	PU	: Pekerjaan Umum
	PUG	: Pengarusutamaan Gender
	PUSDATA	: Pusat Pengolahan Data
R	RDTR	: Rencana Detil Tata Ruang
	Renstra	: Rencana Strategis
	RNPS	: Rawa Non Pasang Surut
	RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
	RPS	: Rawa Pasang Surut
	RS	: Rumah Sederhana
	RsH	: Rumah Sederhana Sehat
	RSH	: Rumah Siap Huni



RTR	:	Rencana Tata Ruang
RTRW	:	Rencana Tata Ruang Wilayah
Rusun	:	Rumah Susun
Rusunami	:	Rumah Susun Sederhana Milik
Rusunawa	:	Rumah Susun Sederhana Sewa
S		
Sanimas	:	Sanitasi Berbasis Masyarakat
Satminkal	:	Satuan Administrasi Pangkal
SDA	:	Sumber Daya Air
SDI	:	Surface Distress Index
SIB	:	Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan
SK	:	Surat Keputusan
SPAM	:	Sistem Penyediaan Air Minum
SR	:	Sambungan Rumah
T		
TA	:	Tahun Anggaran
TPA	:	Tempat Pemrosesan Akhir
U		
UU	:	Undang-Undang
W		
WS	:	Wilayah Sungai



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pusat Pengolahan Data (PUSDATA) Kementerian Pekerjaan Umum mendapat tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengelolaan dan penyediaan data infrastruktur bidang pekerjaan umum dan penyelenggaraan sistem informasi mendukung manajemen Kementerian PU. Dengan demikian dalam melaksanakan tugasnya Pusdata menyelenggarakan beberapa fungsi, antara lain penyusunan program pengolahan data beserta pembinaan dan pengembangannya, penyelenggaraan sistem informasi, pengelolaan dan penyediaan data spasial serta literal. Data literal disini meliputi data literal dan kestatistikan infrastruktur Pekerjaan Umum, serta data literal dan kestatistikan pendukung infrastruktur Pekerjaan Umum.

Program pembangunan Kementerian Pekerjaan Umum dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh, serta memberikan dukungan pada sektor-sektor lain secara maksimal. Aktivitas pembangunan yang ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum adalah bagian dari pelaksanaan program sektor lain. Dalam proses pembangunan bidang ke-PU-an tersebut perlu adanya informasi literal dan kestatistikan untuk mendukung perencanaan umum, disain, pelaksanaan, serta pemanfaatan pembangunan. Data serta informasi statistik sangat dibutuhkan terutama bila Pimpinan Kementerian PU atau Lembaga/ Instansi terkait ingin mengetahui data atau informasi statistik tentang prasarana dan sarana ke-PU-an dengan cepat.

Data serta informasi yang sesuai dengan bidang ke-PU-an ini dapat diperoleh dari Kementerian Pekerjaan Umum melalui Pusdata - Pekerjaan Umum. Data tersebut merupakan rekapitulasi data secara keseluruhan yang sudah terpilah



per wilayah atau per gender jika memungkinkan. Selain itu analisis data untuk bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Cipta Karya akan melengkapi informasi yang dibutuhkan.

Dalam kaitannya dengan fungsinya tersebut, maka Pusdata menyediakan data terpilah tentang ke-PU-an beserta pendukungnya yang diharapkan bisa memberi gambaran perkembangan pembangunan secara menyeluruh. Hal ini dimaksudkan supaya perencanaan yang dibuat dapat terlaksana dengan baik dan program kegiatan yang direncanakan dapat terwujud sesuai dengan yang diinginkan, sehingga pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana yang telah ada dapat diwujudkan. Diharapkan, dengan adanya dukungan data terpilah ini, pelaksanaan pembangunan prasarana tersebut dapat terwujud sesuai dengan kebutuhan per wilayah, dan dapat digunakan oleh laki-laki dan perempuan secara adil.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Buku Induk Statistik PU ini dibuat dengan tujuan menyediakan informasi statistik dibidang ke-PU-an serta informasi statistik tentang sektor-sektor terkait lainnya yang responsif gender dan diperuntukkan bagi para Pimpinan di dalam lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum maupun instansi lainnya serta untuk masyarakat pengguna.

BIS-PU dilengkapi dengan data statistik yang terdiri dari data statistik bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Penataan Ruang, dan data Bidang/ Sektor terkait lainnya yang terpilah menurut gender (jika memungkinkan). Selain itu akan disajikan analisis bidang ke-PU-an yang dihubungkan dengan data bidang/ sektor terkait. Dengan disusunnya buku ini, diharapkan dapat membantu kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan Kementerian Pekerjaan Umum, sehingga



perencanaan pembangunan dapat lebih tepat pada sasaran serta dapat dilaksanakan sesuai yang diharapkan.

Penerbitan BIS-PU secara garis besar memberikan gambaran umum tentang pelaksanaan pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum, sehingga diketahui kondisi dan kebutuhan untuk masa mendatang. Diharapkan masyarakat luas dapat mengetahui dan memanfaatkan data serta informasi yang tersaji melalui buku ini serta memberikan masukan bagi Kementerian Pekerjaan Umum.

1.3 Ruang Lingkup Kegiatan

Buku Induk Statistik PU ini menyajikan data terpilah dan informasi tentang hasil pembangunan infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan pendukungnya di seluruh provinsi di Indonesia yang dirinci menurut Provinsi. Ruang lingkup data dan informasi ke-PU-an adalah sebagai berikut :

1. Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air
2. Infrastruktur Bidang Bina Marga
3. Infrastruktur Bidang Cipta Karya
4. Bidang Penataan Ruang

Sedangkan untuk data terpilah (gender) dan informasi pendukung, meliputi :

1. Wilayah Indonesia
2. Kependudukan dan Ketenagakerjaan
3. Ekonomi
4. Konstruksi
5. Potensi Lahan
6. Angkutan Darat
7. Perumahan dan Permukiman
8. Bencana Alam

Penyajian data tersebut ditampilkan dalam bentuk tabulasi dan grafik, serta belum semua data terpilah yang responsif gender.

BAB II

KONDISI UMUM INDONESIA

2.1 Wilayah Indonesia

Indonesia adalah Negara Kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai ribuan pulau. Posisi strategis ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan sosial, kebudayaan, politik, dan ekonomi. Selain memiliki populasi penduduk besar dan kepadatan penduduk yang tinggi di beberapa wilayah, Indonesia juga memiliki wilayah alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia.

2.1.1 Luas Wilayah

Sebagai suatu negara kesatuan, Indonesia terletak antara $6^{\circ} 08'$ Lintang Utara sampai dengan $11^{\circ} 15'$ Lintang Selatan dan antara $94^{\circ} 45'$ sampai dengan $141^{\circ} 05'$ Bujur Timur, serta terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Luas daratan Indonesia sekitar $1.910.931,32 \text{ km}^2$, mempunyai ratusan gunung api dan sungai (Tabel 2.1). Wilayah Indonesia juga terbentang sepanjang 3.977 mil antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sehubungan dengan letak yang dikelilingi beberapa samudera, serta banyak terdapat gunung berapi yang masih aktif, menyebabkan Indonesia sering dilanda gempa.

Dalam Tabel 2.1 disebutkan, lima pulau besar di Indonesia adalah : Sumatera dengan luas $480.793,28 \text{ km}$ persegi, Jawa dan Bali dengan luas $135.218,34 \text{ km}$ persegi, Kalimantan (pulau terbesar ketiga di dunia) dengan luas $544.150,07 \text{ km}$ persegi, Sulawesi dengan luas $188.522,36 \text{ km}$ persegi, dan Papua dengan luas $416.060,32 \text{ km}$ persegi. Apabila perairan antara pulau-pulau itu digabungkan, maka luas Indonesia menjadi 1,9 juta mil persegi.

2.1.2 Wilayah Administrasi

Sampai tahun 2008, Indonesia terdiri atas 33 provinsi, 4 diantaranya memiliki status khusus, yaitu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Papua. Tahun 2007 (PP No.24/ 2007), menyebutkan bahwa Irian Jaya Barat berganti nama menjadi Papua Barat. Pada tahun 2008 dari jumlah provinsi tersebut terdapat 387 kabupaten, 96 kota, 6.520 kecamatan, serta 75.666 desa (Tabel 2.2).

2.2 Kependudukan Dan Ketenaga Kerjaan

2.2.1 Kependudukan

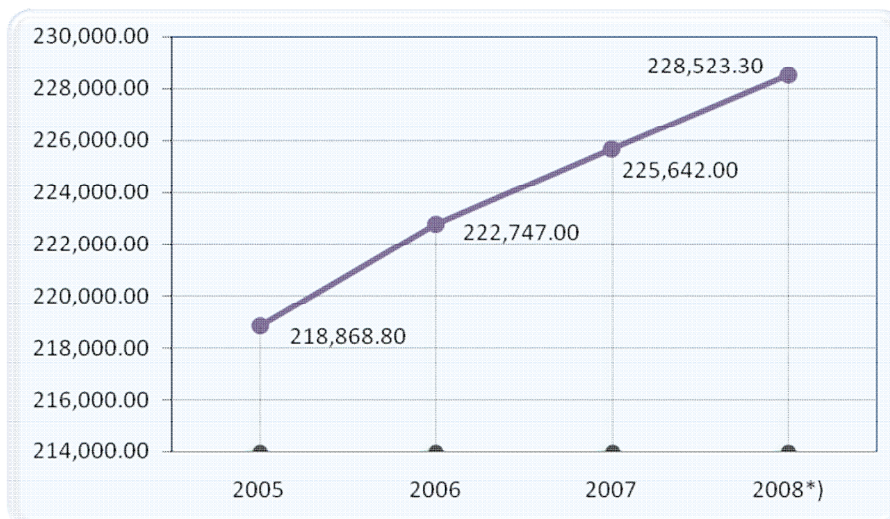
Sinergi yang kuat antara pembangunan dengan kependudukan harus terus dibangun, mengingat persoalan kependudukan dan pembangunan demikian kompleks. Permasalahan kependudukan yang masih harus diselesaikan adalah besarnya jumlah penduduk dan persebaran penduduk yang tidak merata. Disamping laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, angka kemiskinan dan pengangguran tinggi atau kesejahteraan penduduk kurang memadai. Untuk itu Pemerintah Pusat-Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat terus bekerja sama memperbaiki dan meningkatkan mutu kehidupan penduduk atau kualitas manusia Indonesia.

a. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2005 sebesar 219.852 juta jiwa dan berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Indonesia adalah sebesar 237.556.363 orang, yang terdiri dari 119.507.580 laki-laki dan 118.048.783 perempuan. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia periode 2000-2008 1,36 persen pertahun, turun menjadi 1,35 persen pertahun selama periode 2000-2009 (Tabel 2.3). Pada periode 2000-2009 tersebut, laju pertumbuhan penduduk per tahun tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau (4.27%) dan laju terendah di Provinsi Jawa Tengah (0.57%).



**Gambar 2.1 Jumlah Penduduk di Indonesia (000 Jiwa),
Tahun 2005 – 2008**



Sumber : Subdirektorat Layanan dan Promosi Statistik, BPS, 2009
Catatan : *) Angka Proyeksi Tahun 2005-2015

Gambar 2.1 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia periode 2005 - 2008 terus mengalami kenaikan. Kenaikan jumlah penduduk tahun 2005 – 2006 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2006 – 2007 dan 2007 –2008.

Secara nasional, berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 yang dilakukan oleh BPS Indonesia, laju pertumbuhan penduduk Indonesia per tahun selama sepuluh tahun terakhir sebesar 1,49 persen. Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Papua adalah yang tertinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia, yaitu sebesar 5,46 persen.

b. *Persebaran dan Kepadatan Penduduk*

Jumlah penduduk yang besar dan bertambah setiap tahun tidak diimbangi dengan pemerataan penyebaran penduduk, karena sebagian masih terpusat di Pulau Jawa dan Bali. Data tahun 2009 menunjukkan sekitar 59,52% penduduk tinggal di Pulau Jawa dan Bali. Dari jumlah tersebut, sekitar 17.94% penduduk tinggal di Provinsi Jawa Barat, 14.20% di Jawa Tengah, serta 16.12% di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan luas Pulau Jawa dan Bali sendiri

secara keseluruhan hanya 7,07% dari seluruh wilayah daratan Indonesia. Ironisnya pada gabungan Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua yang memiliki luas sekitar 25,91% dari luas total Indonesia hanya dihuni sekitar 2.23% penduduk. Hal tersebut menunjukkan tidak meratanya penyebaran penduduk, yang menggambarkan bahwa daya dukung lingkungan kurang seimbang di provinsi-provinsi Pulau Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali (Tabel 2.4).

Distribusi penduduk Indonesia 2010 masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, yaitu sebesar 58%, yang diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21%. Selanjutnya untuk pulau-pulau/ kelompok kepulauan lain berturut-turut adalah sebagai berikut : Sulawesi sebesar 7%; Kalimantan sebesar 6%; Bali dan Nusa Tenggara sebesar 6%; Maluku dan Papua sebesar 3%.

Besarnya jumlah penduduk di Pulau Jawa dan Bali menyebabkan kepadatan penduduk pulau tersebut menjadi sangat tinggi yaitu 17.530 penduduk per kilometer persegi (km^2) di tahun 2005 dan 18.069 penduduk per kilometer persegi (km^2) di tahun 2008 dan menjadi 18.238 penduduk per kilometer persegi (km^2) di tahun 2009. Untuk Provinsi DKI Jakarta sendiri pada tahun 2009 kepadatan penduduknya mencapai 12.459 penduduk per km^2 . Di sisi lain provinsi Papua yang luasnya 16,7 persen dari total luas Indonesia hanya dihuni 7 penduduk per km^2 (Tabel 2.4).

Dengan luas wilayah Indonesia yang sekitar 1.910.931 km^2 , maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Indonesia tahun 2010 adalah sebesar 124 orang per km^2 . Provinsi yang paling tinggi kepadatan penduduknya adalah Provinsi DKI Jakarta, yaitu sebesar 14.440 orang per km^2 . Sementara itu, provinsi yang paling rendah tingkat kepadatan penduduknya adalah Provinsi Papua Barat, yaitu sebesar 8 orang per km^2 (Hasil Sensus Penduduk 2010, BPS).



Dalam Pedoman Pencacah untuk Podes 2008, yang dinamakan Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di desa/ kelurahan/ nagari selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Sedangkan keluarga adalah semua orang yang tinggal bersama, dalam satu bangunan tempat tinggal karena mempunyai hubungan darah atau perkawinan (suami, istri, anak, sanak saudara). Pada Tabel 2.5.1 terlihat, bahwa persentase penduduk laki-laki di Indonesia tahun 2008 sebesar 49,91%, dan perempuan 50,09% dari total jumlah penduduk 231.640.960. Persentase jumlah keluarga Provinsi Jawa Barat paling besar dibandingkan dengan provinsi lainnya, yaitu 18,09% dari total jumlah keluarga di Indonesia, yaitu 60.566.705. Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk perempuan paling banyak dibandingkan provinsi lainnya, yakni sebesar 17,03%.

Secara nasional, *sex ratio* penduduk Indonesia tahun 2010 sebesar 101, yang artinya jumlah penduduk laki-laki satu persen lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan, atau jika ada 100 perempuan, maka terdapat 101 laki-laki. *Sex ratio* terbesar terdapat di Provinsi Papua yakni 113 dan yang terkecil terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 94 (Tabel 2.5.2).

c. *Perkembangan Jumlah Rumah Tangga*

Banyaknya rumah tangga pada tahun 2005 tercatat sebesar 55,12 juta rumah tangga, dengan rata-rata besarnya anggota rumah tangga 4,0 orang. Pada tahun 2009 tercatat jumlah rumah tangga sebesar 58,42 juta, sedangkan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga di tahun 2008 ini tidak mengalami perubahan. Dari tahun 2005 hingga tahun 2009, rata-rata besarnya anggota rumah tangga tidak mengalami perubahan (Tabel 2.6).

d. *Kemiskinan*

Secara umum, perkembangan jumlah penduduk miskin pada periode 2008 – 2009 menunjukkan kecenderungan turun (Tabel 2.7). Dari angka kemiskinan

tahun 2009 antar provinsi terlihat bahwa ada beberapa provinsi yang dapat dikategorikan memiliki penduduk miskin yang relatif rendah, yaitu Provinsi Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Bali, Kalsel, Kalteng dan Kaltim. Secara absolut penduduk miskin di Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Bali. Lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia berdomisili di Pulau tersebut. Provinsi yang memiliki persentase penduduk miskin terbesar pada tahun 2009 adalah Provinsi Papua (37,53%), Papua Barat (35,71%) dan Maluku (28,23%). Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2009 sebesar 32,53 juta jiwa (14,15%). Dibandingkan penduduk miskin tahun 2008 yang berjumlah 34,96 juta jiwa (15,42%), berarti penduduk miskin turun sebesar 2,43 juta jiwa (1,3%).

Persentase penduduk miskin tahun 2005–2008 dapat dilihat pada Gambar 2.2 yang menunjukkan grafik naik turun pada rentang waktu tersebut. Persentase penduduk miskin tahun 2006 mengalami kenaikan dari tahun 2005, setelah tahun 2006 persentase penduduk miskin mengalami penurunan.

Gambar 2.2 Persentase Penduduk Miskin di Indonesia (%), Tahun 2005 – 2008



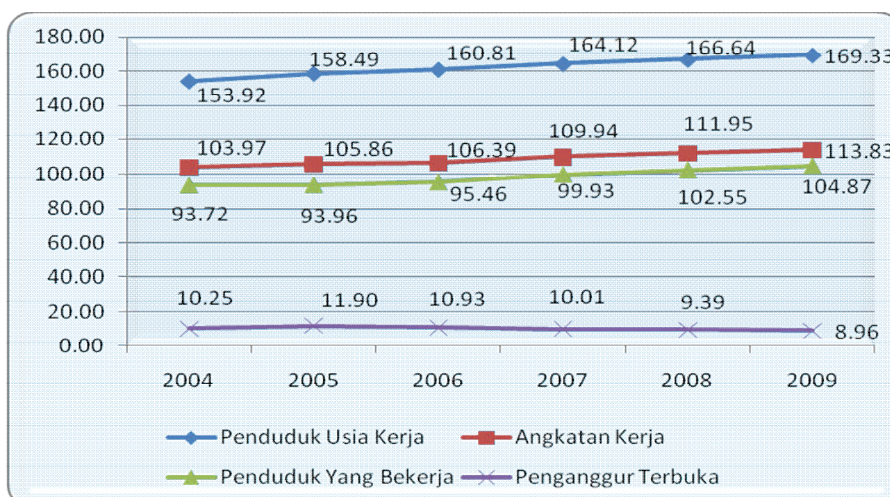
Sumber : Subdirektorat Layanan dan Promosi Statistik, BPS, 2009

2.2.2 Ketenaga Kerjaan

Pertumbuhan tenaga kerja yang kurang diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja akan menyebabkan tingkat kesempatan kerja cenderung turun. Meskipun demikian, jumlah penduduk bekerja tidak selalu menggambarkan jumlah kesempatan kerja yang ada. Hal ini dikarenakan sering terjadi ketidakcocokan antara keahlian dengan ketersediaan lapangan kerja di pasar kerja.

Jumlah dan komposisi angkatan kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi, demikian pula halnya dengan perkembangan ketenagakerjaan di Indonesia dari tahun 2004 - 2009. Untuk penduduk usia kerja, angkatan kerja, dan penduduk yang bekerja selalu mengalami kenaikan. Sedangkan tingkat penganggur terbuka mengalami naik turun pada rentang tahun tersebut, dimana tahun 2004–2005 mengalami kenaikan, sedangkan tahun 2005–2009 mengalami penurunan (Gambar 2.3). Secara keseluruhan jumlah penduduk usia kerja menempati posisi yang paling atas, sedangkan penganggur terbuka menduduki posisi yang paling bawah.

**Gambar 2.3 Perkembangan Ketenagakerjaan di Indonesia (org/ juta)
Tahun 2004 – 2009**



Sumber : <http://www.nakertrans.go.id/pusdatin.html.1.316.pnaker> (diolah oleh Pusdata, Kem. PU)

Seluruh kebijakan, usaha, dan kegiatan ekonomi pada akhirnya akan bermuara pada peluang bekerja atau kesempatan kerja. Berbagai masalah yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kesempatan kerja, karena berkaitan dengan kuantitas dan kualitas tenaga kerja. Adanya fluktuasi di sekitar pertumbuhan ekonomi karena situasi perekonomian secara makro mempengaruhi ketenagakerjaan di Indonesia. Tingkat kesempatan kerja di Indonesia sempat mengalami penurunan dari tahun 2004-2005, dan mulai ada peningkatan mulai tahun 2005-2009 (Gambar 2.4).

Gambar 2.4 Perkembangan Tingkat Kesempatan Kerja di Indonesia (%) tahun 2004 – 2009

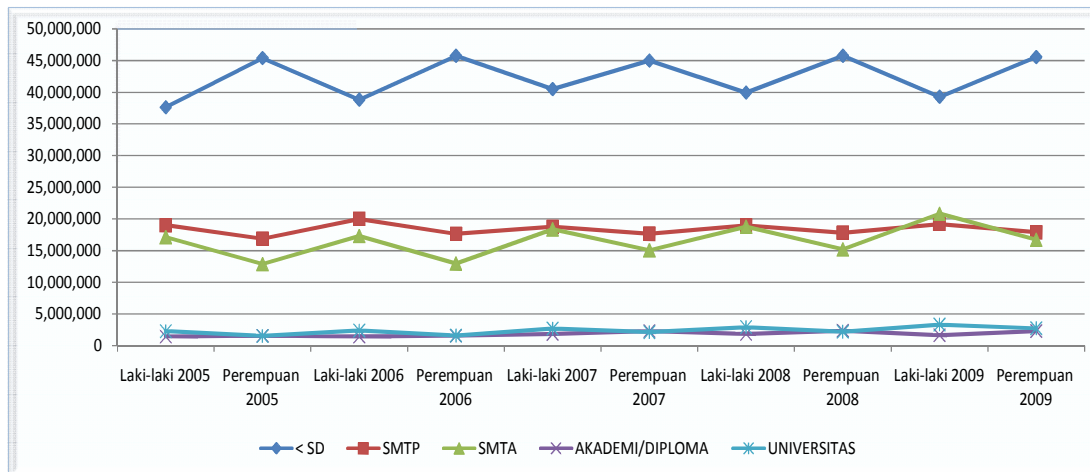


Sumber : <http://www.nakertrans.go.id/pusdatin.html,1.316.pnaker> (diolah oleh Pusdata, Kem. PU)

a. Penduduk Usia Kerja

Penduduk usia kerja adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja menurut provinsi dan jenis kelamin pada tahun 2008-2009 yang terdapat pada Tabel 2.8, menunjukkan adanya peningkatan jumlah yang membaik untuk laki-laki maupun perempuan. Penduduk usia kerja menurut pendidikan dan jenis kelamin pada tahun 2005-2009, menunjukkan tingginya jumlah penduduk yang berpendidikan di bawah SD (Gambar 2.5).

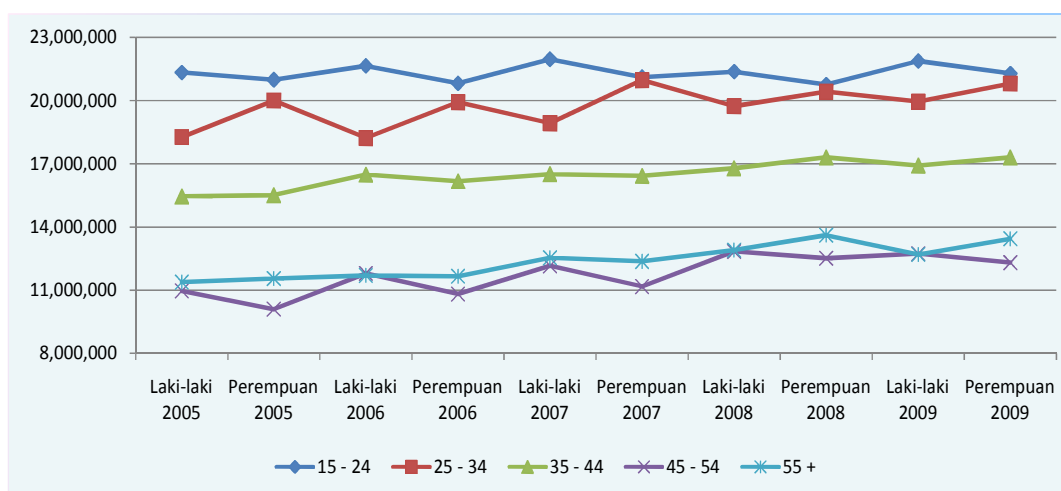
Gambar 2.5 Perkembangan Penduduk Usia Kerja Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2005 – 2009



Sumber : <http://www.nakertrans.go.id/pusdatin.html,3,253.pnaker>

Sedangkan penduduk usia kerja menurut golongan usia dan jenis kelamin pada tahun 2005-2009, menunjukkan golongan usia antara 15-24 tahun yang terbanyak, akan tetapi penduduk usia 55 tahun keatas lebih banyak dibanding dengan usia 45-54 tahun (Gambar 2.6).

Gambar 2.6 Perkembangan Penduduk Usia Kerja Menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2005 – 2009



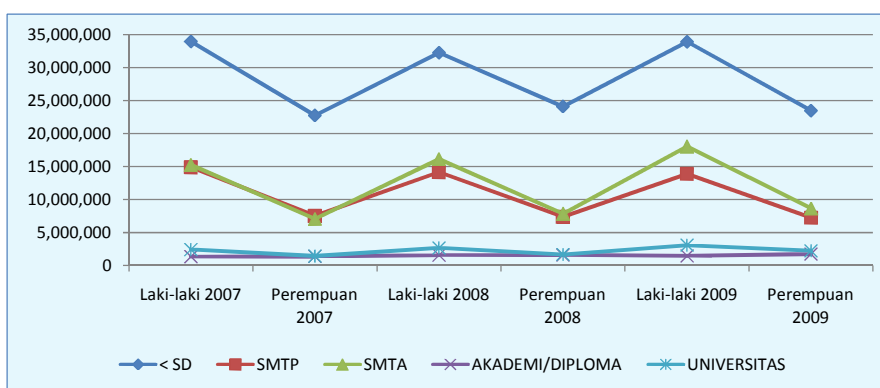
Sumber : <http://www.nakertrans.go.id/pusdatin.html,3,245.pnaker>



b. *Partisipasi Angkatan Kerja*

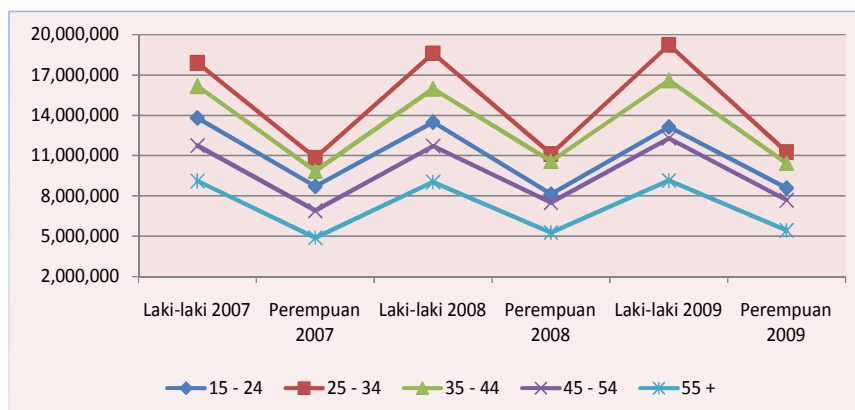
Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja (15 tahun ke atas) baik yang bekerja maupun yang mencari pekerjaan (pengangguran). Dari 113,833 juta angkatan kerja di Indonesia tahun 2009, sekitar 70,409 juta dari mereka adalah laki-laki, dan perempuan sekitar 43,424 juta (Tabel 2.9). Pada tahun 2007 - 2009, jumlah angkatan kerja terbesar berpendidikan SD ke bawah, baik laki-laki maupun perempuan (Gambar 2.7). Jika ditinjau dari golongan umur, maka jumlah angkatan kerja paling banyak pada rentang umur 25 – 34 tahun, adapun paling sedikit pada rentang umur di atas 55 tahun (Gambar 2.8).

Gambar 2.7 Perkembangan Angkatan Kerja Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2007 – 2009



Sumber : <http://www.nakertrans.go.id/pusdatin.html,4,258.pnaker>

Gambar 2.8 Perkembangan Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2007 – 2009

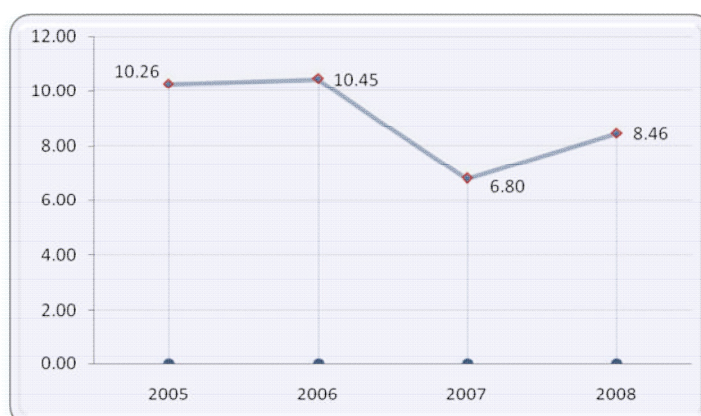


Sumber : <http://www.nakertrans.go.id/pusdatin.html,4,255.pnaker>

c. Penganggur

Yang dinamakan penganggur adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Dari data tingkat pengangguran dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008, terlihat bahwa tahun 2005-2006 paling tinggi tingkat penganggurannya dan mulai menurun di tahun 2007, kemudian naik lagi di tahun 2008 (Gambar 2.9).

Gambar 2.9 Tingkat Pengangguran*) di Indonesia (%) tahun 2005 – 2008



Sumber : Subdirektorat Layanan dan Promosi Statistik, BPS, 2009
 Catatan : *) Februari

2.3 Ekonomi

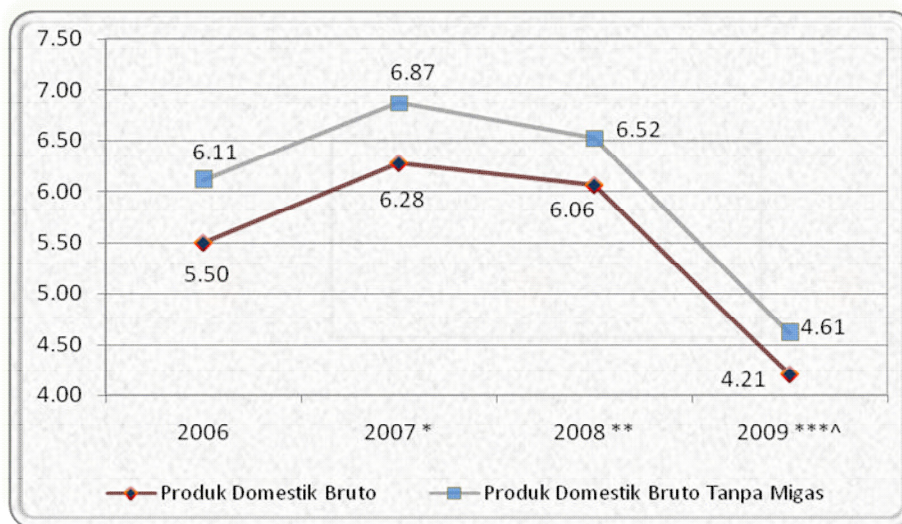
2.3.1 Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional menggambarkan kemampuan suatu wilayah secara nasional untuk menciptakan *output* (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Penyajian PDB menurut sektor dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup sektor Pertanian; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Listrik, Gas, dan Air

Bersih; Konstruksi; Perdagangan, Restoran, dan Hotel; Pengangkutan dan Komunikasi; Lembaga Keuangan; dan Jasa-Jasa. Pada tahun 2009 sumbangan Sektor Industri Pengolahan sekitar 26,92 persen, diikuti oleh Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi sekitar 15,63 persen, sedangkan sumbangan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran 13,34 persen (Tabel 2.10.1).

Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Berdasarkan perhitungan PDB atas dasar harga konstan 2000, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2009 adalah sekitar 4,21 persen dan pertumbuhan ekonomi tanpa migas adalah sekitar 4,61 persen (Tabel 2.10.2). Laju pertumbuhan produk domestik bruto atas dasar harga konstan 2000 menurut lapangan usaha tahun 2006-2009 dapat dilihat pada Gambar 2.10.

Gambar 2.10 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha (%), Tahun 2006 – 2009



Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2009

Catatan : * Angka sementara

** Angka sangat sementara

*** Angka sangat sangat sementara

^ Data sampai semester I, dihitung berdasarkan perubahan PDB Semester I-2009 terhadap PDB Semester I-2008



2.3.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dari 33 provinsi di Indonesia, ternyata DKI Jakarta merupakan provinsi yang mempunyai PDRB terbesar. Nilai PDRB DKI Jakarta atas dasar harga berlaku dengan Migas pada tahun 2008 sebesar 677,4 triliun rupiah dan 674,2 triliun rupiah tanpa Migas. Provinsi berikutnya adalah Jawa Timur dan Jawa Barat, sedangkan provinsi dengan PDRB terkecil adalah Maluku Utara dengan nilai PDRB 3,9 triliun rupiah masing-masing dengan Migas dan tanpa Migas (Tabel 2.11). Hal yang sama juga terjadi untuk PDRB atas dasar harga konstan 2000 (Tabel 2.12).

Besaran PDRB per kapita suatu daerah tergantung pada besaran PDRB dan jumlah penduduk. Berdasarkan PDRB Per Kapita atas dasar harga berlaku dengan migas maupun tanpa migas, Provinsi Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Riau dan Kepulauan Riau lebih tinggi dari pada Provinsi lain dari tahun 2005-2008 (Tabel 2.13). Hal demikian juga terjadi untuk PDRB atas dasar harga konstan 2000 (Tabel 2.14).

Distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku terbesar pada kurun waktu 2005-2008 di Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan distribusi persentase terkecil di Provinsi Maluku Utara. Distribusi persentase tertinggi Provinsi DKI Jakarta dan Maluku Utara terjadi pada tahun 2005 (Tabel 2.15).

2.3.3 Perkembangan Penanaman Modal

Dalam dekade terakhir, penanaman modal tidak saja merupakan kebutuhan penting bagi suatu Negara dalam pengembangan ekonomi. Namun juga merupakan sarana utama dalam pengembangan suatu Negara. Penanaman modal tidak hanya dibutuhkan oleh suatu Negara saja, tetapi dibutuhkan juga oleh daerah-daerah terutama daerah yang baru dimekarkan untuk menggali potensi yang terdapat di daerah tersebut.

Penanaman modal yang tercantum disini adalah Realisasi Investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) yang perijinannya diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sampai dengan tanggal 31 Desember 2008. Dengan demikian data penanaman modal disini tidak menggambarkan seluruh kegiatan investasi yang ada di Indonesia, sebab data penanaman modal tersebut tidak termasuk investasi di sektor Minyak dan Gas Bumi, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, Pertambangan dalam rangka Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara, investasi yang perizinannya dikeluarkan oleh teknis/ sektor, Investasi Porto Folio (Pasar Modal) dan investasi rumah tangga.

Realisasi investasi menurut sektor dan lokasi yang terdapat dalam Tabel 2.16 sampai Tabel 2.19 adalah data kegiatan investasi yang direalisasikan oleh perusahaan dalam bentuk kegiatan nyata yang sudah menghasilkan produksi barang/ jasa dan perusahaan sudah memperoleh Izin Usaha Tetap dari Pemerintah. Tabel 2.16 menunjukkan Perkembangan Realisasi Investasi PMDN menurut sektor, dimana realisasi investasi yang telah dikeluarkan oleh BKPM berdasarkan Izin Usaha Tetap PMDN pada periode 2008 sebanyak 239 proyek dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp. 20.363,4 miliar. Nilai realisasi investasi yang menonjol berdasarkan sektor periode tahun 2008 adalah industri makanan sebesar Rp. 8.192,9 miliar (49 proyek), Industri logam, mesin dan elektronika sebesar Rp. 2.381,1 miliar (31 proyek), Industri kertas dan percetakan sebesar Rp. 1.797,7 miliar (14 proyek), Tanaman pangan dan perkebunan sebesar Rp. 1.184,1 miliar (4 proyek) dan Konstruksi sebesar Rp. 881,2 miliar (8 proyek). Perbandingan dengan periode yang sama tahun 2008 terhadap tahun 2005-2007 dapat dirinci pada Tabel 2.16.

Tabel 2.17 menunjukkan Perkembangan Realisasi Investasi PMA menurut sektor, dimana realisasi investasi yang telah dikeluarkan oleh BKPM berdasarkan Izin Usaha Tetap PMA pada periode 2008 sebanyak 1.138

proyek dengan nilai realisasi investasi sebesar US\$. 14.871,4 juta. Nilai realisasi investasi yang menonjol berdasarkan sektor periode tahun 2008 adalah Transportasi, Gudang dan Komunikasi sebesar US\$. 8.529,9 juta (35 proyek), Industri logam, mesin dan elektronika sebesar US\$. 1.281,4 juta (141 proyek), Industri kendaraan bermotor dan transportasi lainnya sebesar US\$. 756,2 juta (47 proyek), Industri kimia dan farmasi sebesar US\$. 627,8 juta (42 proyek) dan Perdagangan dan reparasi sebesar US\$. 582,2 juta (375 proyek). Perbandingan dengan periode yang sama tahun 2008 terhadap tahun 2005-2007 dapat dirinci pada Tabel 2.17.

Ditinjau menurut lokasi, Tabel 2.18 menunjukkan Perkembangan Realisasi Investasi PMDN dari tahun 2005-2008. Nilai realisasi investasi yang menonjol berdasarkan lokasi tahun 2008 adalah terdapat di Jawa Barat sebesar Rp. 4.289,5 miliar (64 proyek), Jawa Timur sebesar Rp. 2.778,3 miliar (40 proyek), Banten sebesar Rp. 1.989,1 miliar (31 proyek), Riau sebesar Rp. 1.966,8 miliar (8 proyek) dan DKI Jakarta sebesar Rp. 1.837,3 miliar (34 proyek). Perbandingan dengan periode yang sama tahun 2008 terhadap tahun 2005-2007 dapat dirinci pada Tabel 2.18.

Tabel 2.19 menunjukkan realisasi investasi yang telah dikeluarkan oleh BKPM berdasarkan Izin Usaha Tetap PMA pada periode tahun 2008 sebanyak 1.138 proyek dengan nilai realisasi investasi sebesar US\$. 14.871,4 juta. Nilai realisasi investasi yang menonjol berdasarkan lokasi periode tahun 2008 adalah terdapat di DKI Jakarta sebesar US\$. 9.927,8 juta (434 proyek), Jawa Barat sebesar US\$. 2.552,1 juta (293 proyek), Banten sebesar US\$. 477,8 juta (99 proyek), Riau sebesar US\$. 460,9 juta (8 proyek), dan Jawa Timur sebesar US\$. 457,3 juta (73 proyek). Perbandingan dengan periode yang sama tahun 2008 terhadap tahun 2005-2007 dapat dirinci pada Tabel 2.19.

Tabel 2.1
Luas Wilayah dan Jumlah Pulau Menurut Provinsi Di Indonesia
Tahun 2008

No.	Provinsi	Luas ¹⁾ (Km ²)	Persentase Terhadap Luas Indonesia	Jumlah Pulau ²⁾	Ibu Kota Provinsi
1	2	3	4	5	6
1	Nanggroe Aceh Darussalam	57.956,00	3,03	663	Banda Aceh
2	Sumatera Utara	72.981,23	3,82	419	Medan
3	Sumatera Barat	42.012,89	2,2	391	Padang
4	Riau	87.023,66	4,55	139	Pekanbaru
5	Kep. Riau	8.201,72	0,43	2408	Tanjung Pinang
6	Jambi	50.058,16	2,62	19	Jambi
7	Sumatera Selatan	91.592,43	4,79	53	Palembang
8	Kep. Bangka Belitung	16.424,06	0,86	950	Pangkal Pinang
9	Bengkulu	19.919,33	1,04	47	Bengkulu
10	Lampung	34.623,80	1,81	188	Bandar Lampung
	Sumatera	480.793,28	25,15	5.277	
11	D.K.I Jakarta	664,01	0,03	218	Jakarta
12	Jawa Barat	35.377,76	1,85	131	Bandung
13	Banten	9.662,92	0,51	131	Serang
14	Jawa Tengah	32.800,69	1,72	296	Semarang
15	D.I. Yogyakarta	3.133,15	0,16	23	Yogyakarta
17	Jawa Timur	47.799,75	2,5	287	Surabaya
18	Bali	5.780,06	0,3	85	Denpasar
	Jawa dan Bali	135.218,34	7,07	1.171	
18	Nusa Tenggara Barat	18.572,32	0,97	864	Mataram
19	Nusa Tenggara Timur	48.718,10	2,55	1.192	Kupang
	Nusa Tenggara	67.290,42	3,52	2.056	
20	Kalimantan Barat	147.307,00	7,71	339	Pontianak
21	Kalimantan Tengah	153.564,50	8,04	32	Palangka Raya
22	Kalimantan Selatan	38.744,23	2,03	320	Banjarmasin
23	Kalimantan Timur	204.534,34	10,7	370	Samarinda
	Kalimantan	544.150,07	28,48	1.061	
24	Sulawesi Utara	13.851,64	0,72	668	Manado
25	Gorontalo	11.257,07	0,59	136	Gorontalo
26	Sulawesi Tengah	61.841,29	3,24	750	Palu
27	Sulawesi Selatan ³⁾	46.717,48	2,44	295	Makassar
28	Sulawesi Barat	16.787,18	0,88	-	Mamuju
29	Sulawesi Tenggara	38.067,70	1,99	651	Kendari
	Sulawesi	188.522,36	9,86	2.500	
30	Maluku	46.914,03	2,46	1.422	Ambon
31	Maluku Utara	31.982,50	1,67	1.474	Ternate
	Maluku	78.896,53	4,13	2.896	
32	Papua	319.036,05	16,7	598	Jayapura
33	Papua Barat	97.024,27	5,08	1.945	Manokwari
	Papua	416.060,32	21,78	2.543	
	Indonesia	1.910.931,32	100,00	17.504	

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2009 (Dari Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Departemen Dalam Negeri)

Catatan : ¹⁾ Berdasarkan Peraturan Mendagri No. 6 Tahun 2008 tanggal 31 Januari 2008

²⁾ Kondisi Tahun 2004

³⁾ Data jumlah pulau termasuk Sulawesi Barat

Tabel 2.2
Jumlah Kabupaten, Kota, Kecamatan, Desa Menurut Provinsi Di Indonesia
Tahun 2004 - 2008

No.	Provinsi	2004				2005				2006				2007				2008 ¹			
		Kab.	Kota	Kec.	Desa	Kab.	Kota	Kec.	Desa	Kab.	Kota	Kec.	Desa	Kab.	Kota	Kec.	Desa	Kab.	Kota	Kec.	Desa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Nanggroe Aceh Darussalam	17	4	241	5.965	17	4	243	6.378	17	4	243	6.378	18	5	266	6.260	18	5	276	6.424
2	Sumatera Utara	18	7	326	5.459	18	7	343	5.610	18	7	357	5.616	21	7	378	5.713	23	7	407	5.774
3	Sumatera Barat	12	7	158	892	12	7	157	901	12	7	157	902	12	7	160	918	12	7	166	924
4	Riau	9	2	124	1.426	9	2	144	1.482	9	2	144	1.482	9	2	149	1.551	9	2	152	1.622
5	Kep. Riau	4	2	41	249	4	2	42	245	4	2	42	245	4	2	52	294	5	2	59	351
6	Jambi	9	1	87	1.189	9	1	94	1.231	9	1	94	1.231	9	1	114	1.295	9	2	128	1.342
7	Sumatera Selatan	10	4	153	2.727	10	4	169	2.780	10	4	182	2.783	11	4	202	2.971	11	4	216	3.075
8	Kep. Bangka Belitung	6	1	36	320	6	1	36	321	6	1	36	321	6	1	36	325	6	1	40	342
9	Bengkulu	8	1	73	1.194	8	1	99	1.233	8	1	99	1.233	8	1	109	1.314	9	1	110	1.351
10	Lampung	8	2	164	2.131	8	2	180	2.193	8	2	180	2.193	9	2	198	2.265	9	2	204	2.339
	Sumatera	101	31	1.403	21.552	101	31	1.507	22.374	101	31	1.534	22.384	107	32	1.664	22.906	111	33	1.758	23.544
11	D.K.I Jakarta	1	5	44	267	1	5	44	267	1	5	44	267	1	5	44	267	1	5	44	267
12	Jawa Barat	16	9	560	5.778	16	9	592	5.808	16	9	592	5.808	17	9	602	5.832	17	9	620	5.871
13	Banten	4	2	132	1.484	4	2	135	1.483	4	2	135	1.483	4	3	152	1.504	4	3	154	1.504
14	Jawa Tengah	29	6	564	8.561	29	6	565	8.566	29	6	565	8.566	29	6	568	8.573	29	6	573	8.574
15	D.I. Yogyakarta	4	1	78	438	4	1	78	438	4	1	78	438	4	1	78	438	4	1	78	438
17	Jawa Timur	29	9	654	8.467	29	9	657	8.484	29	9	657	8.484	29	9	657	8.505	29	9	661	8.505
18	Bali	8	1	56	691	8	1	55	701	8	1	55	701	8	1	56	707	8	1	57	707
	Jawa dan Bali	91	33	2.088	25.686	91	33	2.126	25.747	91	33	2.126	25.747	92	34	2.157	25.826	92	34	2.187	25.866
18	Nusa Tenggara Barat	7	2	100	792	7	2	100	820	7	2	100	820	7	2	113	883	8	2	116	913
19	Nusa Tenggara Timur	15	1	194	2.599	15	1	203	2.742	15	1	203	2.742	19	1	242	2.780	19	1	285	2.805
	Nusa Tenggara	22	3	294	3.391	22	3	303	3.562	22	3	303	3.562	26	3	355	3.663	27	3	401	3.718
20	Kalimantan Barat	10	2	149	1.489	10	2	154	1.531	10	2	154	1.531	12	2	164	1.686	12	2	175	1.791
21	Kalimantan Tengah	13	1	91	1.348	13	1	105	1.395	13	1	107	1.395	13	1	117	1.432	13	1	119	1.457
22	Kalimantan Selatan	11	2	123	1.956	11	2	127	1.957	11	2	127	1.957	11	2	146	1.968	11	2	149	1.981
23	Kalimantan Timur	9	4	122	1.378	9	4	124	1.352	9	4	124	1.352	10	4	136	1.406	10	4	136	1.421
	Kalimantan	43	9	485	6.171	43	9	510	6.235	43	9	512	6.235	46	9	563	6.492	46	9	579	6.650

Lanjutan Tabel 2.2

No.	Provinsi	2004				2005				2006				2007				2008			
		Kab.	Kota	Kec.	Desa	Kab.	Kota	Kec.	Desa	Kab.	Kota	Kec.	Desa	Kab.	Kota	Kec.	Desa	Kab.	Kota	Kec.	Desa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
24	Sulawesi Utara	6	3	109	1.204	6	3	122	1.280	6	3	122	1.280	9	4	133	1.360	11	4	150	1.495
25	Gorontalo	4	1	40	450	4	1	47	476	4	1	47	476	5	1	47	491	5	1	65	584
26	Sulawesi Tengah	9	1	99	1.440	9	1	102	1.530	9	1	102	1.530	9	1	132	1.628	10	1	147	1.688
27	Sulawesi Selatan ³	20	3	244	2.580	20	3	279	2.866	20	3	279	2.866	20	3	299	2.893	21	3	304	2.946
28	Sulawesi Barat	5	-	44	359	5	-	51	491	5	-	51	491	5	-	58	507	5	-	66	542
29	Sulawesi Tenggara	8	2	117	1.613	8	2	133	1.705	8	2	133	1.705	10	2	173	1.816	10	2	184	2.031
	Sulawesi	52	10	653	7.646	52	10	734	8.348	52	10	734	8.348	58	11	842	8.695	62	11	916	9.286
30	Maluku	7	1	57	874	7	1	62	886	7	1	62	886	7	2	64	886	9	2	70	906
31	Maluku Utara	6	2	45	756	6	2	45	775	6	2	51	793	6	2	78	919	6	2	110	1.036
	Maluku	13	3	102	1.630	13	3	107	1.661	13	3	113	1.679	13	4	142	1.805	15	4	180	1.942
32	Papua	19	1	173	2.587	19	1	233	2.442	19	1	233	2.442	20	1	302	2.822	26	1	368	3.416
33	Papua Barat	8	1	79	1.195	8	1	101	1.166	8	1	101	1.166	8	1	106	1.199	8	1	131	1.244
	Papua	27	2	252	3.782	27	2	334	3.608	27	2	334	3.608	28	2	408	4.021	34	2	499	4.660
	Indonesia	349	91	5.277	69.858	349	91	5.621	71.535	349	91	5.656	71.563	370	95	6.131	73.408	387	96	6.520	75.666

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2009 (Dari Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Departemen Dalam Negeri)

Catatan : ¹⁾ Keadaan sampai dengan 21 Juli 2008 berdasarkan UU No.33/ 2008, Departemen Dalam Negeri

Secara administrasi, sejak tahun 1999 (Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999) telah terjadi pemekaran sejumlah provinsi di Indonesia seiring dengan tuntutan otonomi daerah, yaitu :

- Provinsi Maluku Utara dimekarkan dari Provinsi Maluku pada 4 Oktober 1999
- Provinsi Banten dimekarkan dari Provinsi Jawa Barat pada 17 Oktober 2000
- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimekarkan dari Provinsi Sumatera Selatan pada 4 Desember 2000
- Provinsi Gorontalo dimekarkan dari Provinsi Sulawesi Utara pada 22 Desember 2000
- Provinsi Papua Barat dimekarkan dari Provinsi Papua pada 21 November 2001
- Provinsi Sulawesi Barat dimekarkan dari Provinsi Sulawesi Selatan pada 5 Oktober 2004
- Provinsi Kepulauan Riau dimekarkan dari Provinsi Riau pada 25 Oktober 2004

Sampai tahun 2008, Indonesia memiliki 33 provinsi, 387 kabupaten, 96 kota, 6.520 kecamatan dan 75.666 desa.

Tabel 2.3
Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Provinsi
Tahun 2000 - 2009

No.	Provinsi	Penduduk (000)				Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)			
		2000 ¹⁾	2005 ²⁾	2008 ³⁾	2009 ³⁾	1999-2000	2000-2005	2000-2008	2000-2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nanggroe Aceh Darussalam	3.929,3	4.083,5	4.293,9	4.363,5	1,46	0,77	1,12	1,17
2	Sumatera Utara	11.642,6	12.418,0	13.042,3	13.248,4	1,32	1,30	1,43	1,45
3	Sumatera Barat	4.248,5	4.567,2	4.763,0	4.828,0	0,63	1,46	1,44	1,43
4	Riau	4.948,0	4.835,9	5.189,2	5.306,5	4,35	4,14	3,47	3,46
5	Kep. Riau	...	1.278,9	1.453,1	1.515,3	...	5,05	4,79	4,27
6	Jambi	2.407,2	2.650,5	2.788,3	2.834,2	1,84	1,94	1,85	1,83
7	Sumatera Selatan	6.210,8	6.815,9	7.121,8	7.222,6	1,28	1,88	1,73	1,69
8	Kep. Bangka Belitung	900,0	1.074,8	1.122,5	1.138,1	0,97	3,61	2,80	2,64
9	Bengkulu	1.455,5	1.566,1	1.641,9	1.666,9	2,20	1,48	1,52	1,52
10	Lampung	6.730,8	7.087,4	7.391,1	7.491,9	1,17	1,04	1,18	1,20
11	DKI Jakarta	8.361,0	8.892,3	9.146,2	9.223,0	0,17	1,24	1,13	1,10
12	Jawa Barat	35.724,0	39.150,6	40.918,3	41.501,5	2,03	1,85	1,71	1,68
13	Banten	8.098,1	9.071,1	9.602,4	9.782,8	2,21	2,30	2,15	2,12
14	Jawa Tengah	31.223,0	31.873,5	32.626,4	32.864,6	0,94	0,41	0,55	0,57
15	DI Yogyakarta	3.121,1	3.365,5	3.468,5	3.501,9	0,72	1,52	1,33	1,29
16	Jawa Timur	34.766,0	36.481,8	37.094,8	37.286,2	0,70	0,97	0,81	0,78
17	Bali	3.150,0	3.405,4	3.516,0	3.551,0	1,31	1,57	1,38	1,34
18	Nusa Tenggara Barat	4.008,6	4.149,1	4.363,8	4.434,0	1,82	0,69	1,07	1,13
19	Nusa Tenggara Timur	3.823,1	4.279,5	4.534,3	4.619,7	1,64	2,28	2,16	2,13
20	Kalimantan Barat	4.016,2	4.037,2	4.249,1	4.319,1	2,29	0,10	0,71	0,81
21	Kalimantan Tengah	1.855,6	1.969,7	2.057,3	2.085,8	2,99	1,20	1,30	1,31
22	Kalimantan Selatan	2.984,0	3.296,6	3.446,6	3.496,1	1,45	2,01	1,82	1,78
23	Kalimantan Timur	2.451,9	2.887,1	3.094,7	3.164,8	2,81	3,32	2,95	2,88
24	Sulawesi Utara	2.000,9	2.143,8	2.208,0	2.228,9	1,33	1,39	1,24	1,21
25	Gorontalo	833,5	936,3	972,2	984,0	1,59	2,35	1,94	1,86
26	Sulawesi Tengah	2.176,0	2.312,0	2.438,4	2.480,3	2,57	1,22	1,43	1,46
27	Sulawesi Selatan	8.050,8	7.489,7	7.805,0	7.908,5	1,49	1,03	1,16	1,11
28	Sulawesi Barat	...	985,7	1.032,3	1.047,7	...	1,03	1,23	1,80
29	Sulawesi Tenggara	1.820,3	1.945,1	2.075,0	2.118,3	3,15	1,34	1,65	1,70
30	Maluku	1.166,3	1.264,8	1.320,7	1.339,5	0,11	1,63	1,57	1,55
31	Maluku Utara	815,1	914,1	959,6	975,0	1,60	2,32	2,06	2,01
32	Papua	2.213,8	1.934,7	2.056,5	2.097,5	3,22	3,45	2,93	2,60
33	Papua Barat	...	688,2	730,0	743,9	...	3,45	2,90	3,43
	Indonesia	205.132	219.852	228.523	231.370	1,45	1,40	1,36	1,35

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2009

Catatan : 1) Hasil Sensus Penduduk (SP) 2000

2) Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) 2005; kecuali Prov NAD, Kab. Nias dan Nias Selatan (Sumut)

hasil Sensus Penduduk Aceh dan Nias (SPAN) 2005; Kab. Boven Digul dan Teluk Wondama (Papua) hasil estimasi

3) Hasil proyeksi penduduk, diolah dari hasil Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) 2005

Tabel 2.4
Distribusi Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Provinsi
Tahun 2000 - 2009

1	2	Persentase Penduduk				Kepadatan Penduduk per Km ²			
		2000 ¹⁾	2005 ²⁾	2008 ³⁾	2009 ³⁾	2000 ¹⁾	2005 ²⁾	2008 ³⁾	2009 ³⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nanggroe Aceh Darussalam	1,92	1,86	1,88	1,89	70	72	76	77
2	Sumatera Utara	5,68	5,65	5,71	5,73	161	171	180	182
3	Sumatera Barat	2,07	2,08	2,08	2,09	101	108	113	114
4	Riau	2,41	2,20	2,27	2,29	56	55	59	60
5	Kep. Riau	...	0,58	0,64	0,65	...	158	180	187
6	Jambi	1,17	1,21	1,22	1,22	53	58	61	62
7	Sumatera Selatan	3,03	3,10	3,12	3,12	103	113	118	120
8	Kep. Bangka Belitung	0,44	0,49	0,49	0,49	55	65	68	69
9	Bengkulu	0,71	0,71	0,72	0,72	74	79	83	84
10	Lampung	3,28	3,22	3,23	3,24	178	188	196	199
11	DKI Jakarta	4,08	4,04	4,00	3,99	11.294	12.012	12.355	12.459
12	Jawa Barat	17,42	17,81	17,91	17,94	967	1.060	1.108	1.124
13	Banten	3,95	4,13	4,20	4,23	898	1.006	1.065	1.085
14	Jawa Tengah	15,22	14,50	14,28	14,20	952	972	995	1.002
15	DI Yogyakarta	1,52	1,53	1,52	1,51	996	1.074	1.107	1.118
16	Jawa Timur	16,95	16,59	16,23	16,12	745	781	794	798
17	Bali	1,54	1,55	1,54	1,53	578	625	645	652
18	Nusa Tenggara Barat	1,95	1,89	1,91	1,92	203	211	221	225
19	Nusa Tenggara Timur	1,86	1,95	1,98	2,00	83	93	98	100
20	Kalimantan Barat	1,96	1,84	1,86	1,87	33	34	35	36
21	Kalimantan Tengah	0,90	0,90	0,90	0,90	12	13	13	14
22	Kalimantan Selatan	1,45	1,50	1,51	1,51	77	85	89	90
23	Kalimantan Timur	1,20	1,31	1,35	1,37	13	15	16	16
24	Sulawesi Utara	0,98	0,98	0,97	0,96	144	154	158	160
25	Gorontalo	0,41	0,43	0,43	0,43	69	77	80	81
26	Sulawesi Tengah	1,06	1,05	1,07	1,07	32	34	36	36
27	Sulawesi Selatan	3,92	3,41	3,42	3,42	175	162	169	171
28	Sulawesi Barat	...	0,45	0,45	0,45	...	59	61	63
29	Sulawesi Tenggara	0,89	0,88	0,91	0,92	50	53	56	58
30	Maluku	0,57	0,58	0,58	0,58	25	27	28	29
31	Maluku Utara	0,40	0,42	0,42	0,42	20	23	24	25
32	Papua	1,08	0,88	0,90	0,91	7	6	7	7
33	Papua Barat	...	0,31	0,32	0,32	...	6	6	6
	Indonesia	100,0	100,0	100,0	100,0	110	118	123	124

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2009

Catatan : 1) Hasil Sensus Penduduk (SP) 2000

2) Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) 2005; kecuali Prov NAD, Kab. Nias dan Nias Selatan (Sumut)

hasil Sensus Penduduk Aceh dan Nias (SPAN) 2005; Kab. Boven Digul dan Teluk Wondama (Papua) hasil estimasi

3) Hasil proyeksi penduduk, diolah dari hasil Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) 2005

Tabel 2.5.1
Jumlah Penduduk dan Keluarga Di Indonesia
Tahun 2008

No.	Provinsi	Penduduk		Jumlah Penduduk	Jumlah Keluarga
		Laki-Laki	Perempuan		
1	2	3	4	5	6
1	Nanggroe Aceh Darussalam	2.261.999	2.362.538	4.624.537	1.126.488
2	Sumatera Utara	6.622.029	6.805.210	13.427.239	2.989.384
3	Sumatera Barat	2.333.242	2.430.567	4.763.809	1.154.180
4	Riau	2.617.468	2.522.207	5.139.675	1.230.336
5	Jambi	1.490.793	1.479.422	2.970.215	763.386
6	Sumatera Selatan	3.743.434	3.788.788	7.532.222	1.826.918
7	Bengkulu	900.579	908.667	1.809.246	458.092
8	Lampung	3.813.317	3.739.367	7.552.684	1.909.355
9	Bangka Belitung	576.009	557.086	1.133.095	300.526
10	Kepulauan Riau	701.793	690.637	1.392.430	388.183
11	DKI Jakarta	3.890.408	3.651.756	7.542.164	2.035.846
12	Jawa Barat	19.971.570	19.765.470	39.737.040	10.955.436
13	Jawa Tengah	17.008.517	17.234.269	34.242.786	9.117.179
14	DI Yogyakarta	1.725.326	1.760.637	3.485.963	928.230
15	Jawa Timur	18.706.886	19.242.876	37.949.762	10.600.718
16	Banten	4.738.386	4.674.590	9.412.976	2.384.253
17	Bali	1.755.774	1.729.270	3.485.044	878.917
18	Nusa Tenggara Barat	2.243.777	2.352.033	4.595.810	1.314.372
19	Nusa Tenggara Timur	2.255.175	2.320.852	4.576.027	1.049.723
20	Kalimantan Barat	2.256.951	2.173.192	4.430.143	1.081.171
21	Kalimantan Tengah	1.061.496	1.020.394	2.081.890	545.425
22	Kalimantan Selatan	1.707.584	1.706.802	3.414.386	926.738
23	Kalimantan Timur	1.723.451	1.545.835	3.269.286	879.471
24	Sulawesi Utara	1.152.242	1.117.638	2.269.880	614.928
25	Sulawesi Tengah	1.269.764	1.240.734	2.510.498	625.107
26	Sulawesi Selatan	3.837.338	4.051.875	7.889.213	1.918.726
27	Sulawesi Tenggara	1.064.036	1.065.916	2.129.952	526.287
28	Gorontalo	502.142	505.163	1.007.305	265.513
29	Sulawesi Barat	585.356	598.833	1.184.189	276.228
30	Maluku	742.803	743.707	1.486.510	325.472
31	Maluku Utara	527.628	516.582	1.044.210	237.183
32	Irian Jaya Barat	446.975	428.779	875.754	261.833
33	Papua	1.370.663	1.304.357	2.675.020	671.101
Indonesia		115.604.911	116.036.049	231.640.960	60.566.705

Sumber : BPS, Podes 2008

Tabel 2.5.2 :
Jumlah Penduduk Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin
Hasil Sensus Penduduk 2010

No.	Provinsi	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
1	2	3	4	5	6
1	Nanggroe Aceh Darussalam	2.243.578	2.242.992	4.486.570	100
2	Sumatera Utara	6.479.051	6.506.024	12.985.075	100
3	Sumatera Barat	2.404.472	2.441.526	4.845.998	98
4	Riau	2.854.989	2.688.042	5.543.031	106
5	Jambi	1.578.338	1.510.280	3.088.618	105
6	Sumatera Selatan	3.789.109	3.657.292	7.446.401	104
7	Bengkulu	875.663	837.730	1.713.393	105
8	Lampung	3.905.366	3.690.749	7.596.115	106
9	Bangka Belitung	634.783	588.265	1.223.048	108
10	Kepulauan Riau	864.333	821.365	1.685.698	105
11	DKI Jakarta	4.859.272	4.728.926	9.588.198	103
12	Jawa Barat	21.876.572	21.145.254	43.021.826	103
13	Jawa Tengah	16.081.140	16.299.547	32.380.687	99
14	DI Yogyakarta	1.705.404	1.746.986	3.452.390	98
15	Jawa Timur	18.488.290	18.987.721	37.476.011	97
16	Banten	5.440.783	5.203.247	10.644.030	105
17	Bali	1.961.170	1.930.258	3.891.428	102
18	Nusa Tenggara Barat	2.180.168	2.316.687	4.496.855	94
19	Nusa Tenggara Timur	2.323.534	2.355.782	4.679.316	99
20	Kalimantan Barat	2.243.740	2.149.499	4.393.239	104
21	Kalimantan Tengah	1.147.878	1.054.721	2.202.599	109
22	Kalimantan Selatan	1.834.928	1.791.191	3.626.119	102
23	Kalimantan Timur	1.868.196	1.682.390	3.550.586	111
24	Sulawesi Utara	1.157.559	1.108.378	2.265.937	104
25	Sulawesi Tengah	1.349.225	1.284.195	2.633.420	105
26	Sulawesi Selatan	3.921.543	4.111.008	8.032.551	95
27	Sulawesi Tenggara	1.120.225	1.110.344	2.230.569	101
28	Gorontalo	520.885	517.700	1.038.585	101
29	Sulawesi Barat	581.284	577.052	1.158.336	101
30	Maluku	773.585	757.817	1.531.402	102
31	Maluku Utara	529.645	505.833	1.035.478	105
32	Papua Barat	402.587	358.268	760.855	112
33	Papua	1.510.285	1.341.714	2.851.999	113

Sumber : Hasil Sensus Penduduk 2010 Data Agregat per Provinsi, BPS Indonesia, 2010

Tabel 2.6
Rumah Tangga dan Rata-Rata Banyaknya Anggota Rumah Tangga Menurut Provinsi
Tahun 2000 - 2009

No.	Provinsi	Rumah Tangga				Rata-Rata Banyaknya Anggota Rumah Tangga			
		(000)							
		2000 ¹⁾	2005 ²⁾	2008 ³⁾	2009 ³⁾	2000	2005	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nanggroe Aceh Darussalam	921,9	898,8	957,0	972,5	4,3	4,5	4,5	4,5
2	Sumatera Utara	2.609,8	2.802,4	2.980,4	3.027,5	4,5	4,4	4,4	4,4
3	Sumatera Barat	1.020,4	1.091,4	1.141,0	1.156,6	4,2	4,2	4,2	4,2
4	Riau	1.202,5	1.068,8	1.215,1	1.242,6	4,1	4,5	4,3	4,3
5	Kep. Riau	...	345,0	395,0	411,9	...	3,7	3,7	3,7
6	Jambi	594,3	642,1	680,9	692,1	4,1	4,1	4,1	4,1
7	Sumatera Selatan	1.495,3	1.585,3	1.667,7	1.691,3	4,2	4,3	4,3	4,3
8	Kep. Bangka Belitung	214,2	257,2	276,8	280,7	4,2	4,2	4,1	4,1
9	Bengkulu	358,5	380,0	403,3	409,5	4,1	4,1	4,1	4,1
10	Lampung	1.633,4	1.745,4	1.815,9	1.840,7	4,1	4,1	4,1	4,1
11	DKI Jakarta	2.232,1	2.211,0	2.287,4	2.306,6	3,7	4,0	4,0	4,0
12	Jawa Barat	9.560,7	10.185,0	10.708,1	10.860,7	3,7	3,8	3,8	3,8
13	Banten	2.001,8	2.145,2	2.289,8	2.332,8	4,0	4,2	4,2	4,2
14	Jawa Tengah	7.900,3	8.361,3	8.551,5	8.613,9	4,0	3,8	3,8	3,8
15	DI Yogyakarta	923,4	999,9	1.048,1	1.058,2	3,4	3,4	3,3	3,3
16	Jawa Timur	9.499,8	9.845,2	10.121,2	10.173,4	3,7	3,7	3,7	3,7
17	Bali	799,8	859,4	894,6	903,5	3,9	4,0	3,9	3,9
18	Nusa Tenggara Barat	1.032,4	1.085,5	1.135,9	1.154,2	3,9	3,8	3,8	3,8
19	Nusa Tenggara Timur	793,7	909,2	970,6	988,9	4,8	4,7	4,7	4,7
20	Kalimantan Barat	901,3	907,6	954,1	969,8	4,5	4,4	4,5	4,5
21	Kalimantan Tengah	482,1	472,8	508,4	515,5	3,8	4,2	4,0	4,0
22	Kalimantan Selatan	785,2	866,6	912,7	925,8	3,8	3,8	3,8	3,8
23	Kalimantan Timur	613,1	682,1	741,9	758,7	4,0	4,2	4,2	4,2
24	Sulawesi Utara	544,7	564,0	586,9	592,5	3,7	3,8	3,8	3,8
25	Gorontalo	214,3	234,6	247,9	250,9	3,9	4,0	3,9	3,9
26	Sulawesi Tengah	503,5	545,7	580,9	590,8	4,3	4,2	4,2	4,2
27	Sulawesi Selatan	1.816,4	1.711,6	1.784,1	1.807,7	4,4	4,4	4,4	4,4
28	Sulawesi Barat	...	219,0	232,8	236,3	...	4,5	4,4	4,4
29	Sulawesi Tenggara	409,3	437,6	463,2	472,9	4,4	4,4	4,5	4,5
30	Maluku	242,7	269,6	285,1	289,1	4,8	4,7	4,6	4,6
31	Maluku Utara	149,1	188,5	205,0	208,3	5,5	4,8	4,7	4,7
32	Papua	552,4	451,1	494,8	504,7	4,0	4,3	4,2	4,2
33	Papua Barat	...	150,0	177,8	181,2	...	4,6	4,1	4,1
	Indonesia	52.008,4	55.118,9	57.715,9	58.421,8	3,9	4,0	4,0	4,0

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2009

Catatan : 1) Hasil Sensus Penduduk (SP) 2000

2) Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) 2005; kecuali Prov NAD, Kab. Nias dan Nias Selatan (Sumut) hasil Sensus Penduduk Aceh dan Nias (SPAN) 2005; Kab. Boven Digul dan Teluk Wondama (Papua) hasil estimasi

3) Hasil proyeksi penduduk, diolah dari hasil Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) 2005

Tabel 2.7
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi
Tahun 2008 - 2009

No.	Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin (000)		Persentase Penduduk Miskin (%)	
		2008	2009	2008	2009
1	2	3	4	5	6
1	Nanggroe Aceh Darussalam	959,7	892,8	23,53	21,80
2	Sumatera Utara	1.613,8	1.499,7	12,55	11,51
3	Sumatera Barat	477,2	429,3	10,67	9,54
4	Riau	566,7	527,5	10,63	9,48
5	Kep.Riau	136,4	128,2	9,18	8,27
6	Jambi	260,3	249,7	9,32	8,77
7	Sumatera Selatan	1.249,6	1.167,9	17,73	16,28
8	Kep.Bangka Belitung	86,7	76,6	8,58	7,46
9	Bengkulu	352,0	324,1	20,64	18,59
10	Lampung	1.591,6	1.558,3	20,98	20,22
11	DKI Jakarta	379,6	323,2	4,29	3,62
12	Jawa Barat	5.322,4	4.983,6	13,01	11,96
13	Banten	816,7	788,1	8,15	7,64
14	Jawa Tengah	6.189,6	5.725,7	19,23	17,72
15	DI Yogyakarta	616,3	585,8	18,32	17,23
16	Jawa Timur	6.651,3	6.022,6	18,51	16,68
17	Bali	215,7	181,7	6,17	5,13
18	Nusa Tenggara Barat	1.080,6	1.050,9	23,81	22,78
19	Nusa Tenggara Timur	1.098,3	1.013,1	25,65	23,31
20	Kalimantan Barat	508,8	434,8	11,07	9,30
21	Kalimantan Tengah	200,0	165,9	8,71	7,02
22	Kalimantan Selatan	218,9	176,0	6,48	5,12
23	Kalimantan Timur	286,4	239,2	9,51	7,73
24	Sulawesi Utara	223,5	219,6	10,10	9,79
25	Gorontalo	221,6	224,6	24,88	25,01
26	Sulawesi Tengah	524,7	489,8	20,75	18,98
27	Sulawesi Selatan	1.031,7	963,6	13,34	12,31
28	Sulawesi Barat	171,1	158,2	16,73	15,29
29	Sulawesi Tenggara	435,9	434,3	19,53	18,93
30	Maluku	391,3	380,0	29,66	28,23
31	Maluku Utara	105,1	98,0	11,28	10,36
32	Papua	733,1	760,3	37,08	37,53
33	Papua Barat	246,5	256,8	35,12	35,71
	Indonesia	34.963,1	32.529,9	15,42	14,15

Sumber : Diolah dari Susenas Panel, BPS

BPS, Statistik Indonesia 2009

Tabel 2.8
Penduduk Usia Kerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin
Tahun 2008 - 2009

No.	Provinsi	Jenis Kelamin		Jumlah 2008	Jenis Kelamin		Jumlah 2009
		Laki-Laki	Perempuan		Laki-Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nanggroe Aceh Darussalam	1.451.365	1.494.220	2.945.585	1.496.513	1.540.246	3.036.759
2	Sumatera Utara	4.319.505	4.475.299	8.794.804	4.490.457	4.618.281	9.108.738
3	Sumatera Barat	1.571.782	1.707.070	3.278.852	1.643.832	1.739.625	3.383.457
4	Riau	1.894.368	1.681.472	3.575.840	1.912.954	1.728.923	3.641.877
5	Jambi	987.216	944.750	1.931.966	1.020.773	981.584	2.002.357
6	Sumatera Selatan	2.491.551	2.456.599	4.948.150	2.544.865	2.520.877	5.065.742
7	Bengkulu	588.420	565.651	1.154.071	597.963	583.988	1.181.951
8	Lampung	2.664.587	2.525.561	5.190.148	2.734.602	2.617.333	5.351.935
9	Kep. Bangka Belitung	432.708	384.472	817.180	438.806	390.297	829.103
10	Kep. Riau	491.184	503.347	994.531	507.810	547.961	1.055.771
11	DKI Jakarta	3.399.651	3.516.556	6.916.207	3.417.520	3.621.561	7.039.081
12	Jawa Barat	15.033.546	14.738.634	29.772.180	15.164.089	15.018.100	30.182.189
13	Jawa Tengah	11.823.761	12.438.437	24.262.198	12.125.711	12.543.814	24.669.525
14	D.I. Yogyakarta	1.412.231	1.423.537	1.983.532	1.436.060	1.435.659	2.871.719
15	Jawa Timur	14.182.291	14.682.675	28.864.966	14.440.297	14.930.835	29.371.132
16	Banten	3.339.577	2.263.458	5.603.035	3.441.830	3.394.588	6.836.418
17	Bali	1.359.725	1.344.042	2.703.767	1.370.960	1.357.787	2.728.747
18	Nusa Tenggara Barat	1.385.873	1.585.691	2.971.564	1.430.474	1.626.137	3.056.611
19	Nusa Tenggara Timur	1.480.617	1.537.311	3.017.928	1.531.072	1.590.350	3.121.422
20	Kalimantan Barat	1.463.763	1.421.403	2.885.166	1.512.877	1.483.719	2.996.596
21	Kalimantan Tengah	1.147.197	1.020.569	2.167.766	770.535	700.173	1.470.708
22	Kalimantan Selatan	1.227.666	1.288.498	2.516.164	1.266.426	1.277.424	2.543.850
23	Kalimantan Timur	760.767	677.504	1.438.271	1.196.879	1.071.351	2.268.230
24	Sulawesi Utara	845.795	812.504	1.658.299	861.563	832.562	1.694.125
25	Sulawesi Tengah	867.356	826.726	1.694.082	894.890	860.075	1.754.965
26	Sulawesi Selatan	2.585.649	2.928.404	5.514.053	2.681.599	2.979.025	5.660.624
27	Sulawesi Tenggara	677.139	2.928.404	3.605.543	695.043	723.101	1.418.144
28	Gorontalo	340.453		340.453	351.614	349.881	701.495
29	Sulawesi Barat	364.697	88.632	453.329	374.326	376.618	750.944
30	Maluku	441.489	141.589	583.078	459.228	451.616	910.844
31	Maluku Utara	317.214	104.965	422.179	332.356	325.649	658.005
32	Papua Barat	261.615	97.226	358.841	272.171	242.122	514.293
33	Papua	730.931	192.544	923.475	758.027	692.824	1.450.851
Indonesia		82.341.689	82.797.750	164.287.203	84.174.122	85.154.086	169.328.208

Sumber : <http://www.nakertrans.go.id/pusdatin.html,3,276,pnaker>

Tabel 2.9
Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin
Tahun 2008 - 2009

No.	Provinsi	Jenis Kelamin		Jumlah 2008	Jenis Kelamin		Jumlah 2009
		Laki-Laki	Perempuan		Laki-Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nanggroe Aceh Darussalam	1.127.536	653.954	1.781.490	1.194.037	703.885	1.897.922
2	Sumatera Utara	3.545.480	2.385.412	5.930.892	3.743.204	2.554.866	6.298.070
3	Sumatera Barat	1.250.147	875.637	2.125.784	1.307.325	864.677	2.172.002
4	Riau	1.563.350	670.965	2.234.315	1.617.311	643.551	2.260.862
5	Jambi	822.291	434.604	1.256.895	862.360	472.136	1.334.496
6	Sumatera Selatan	2.110.434	1.343.877	3.454.311	2.152.515	1.307.850	3.460.365
7	Bengkulu	487.105	349.143	836.248	506.661	322.788	829.449
8	Lampung	2.293.481	1.365.691	3.659.172	2.343.117	1.284.038	3.627.155
9	Kep. Bangka Belitung	349.431	151.955	501.386	370.911	168.499	539.410
10	Kep. Riau	405.842	246.695	652.537	426.753	255.016	681.769
11	DKI Jakarta	2.751.061	1.808.047	4.559.108	2.833.062	1.854.665	4.687.727
12	Jawa Barat	12.455.572	5.971.670	18.427.242	12.609.053	6.372.207	18.981.260
13	Jawa Tengah	10.005.084	7.335.589	17.340.673	10.026.990	7.060.659	17.087.649
14	D.I. Yogyakarta	1.127.307	865.225	1.983.532	1.152.623	864.071	2.016.694
15	Jawa Timur	11.988.310	8.128.935	20.117.245	12.229.191	8.109.377	20.338.568
16	Banten	2.785.433	1.468.928	4.254.361	2.858.198	1.499.042	4.357.240
17	Bali	1.199.937	894.760	2.094.697	1.166.769	956.819	2.123.588
18	Nusa Tenggara Barat	1.186.535	886.862	2.073.397	1.181.891	916.747	2.098.638
19	Nusa Tenggara Timur	1.221.012	989.864	2.210.876	1.288.543	961.585	2.250.128
20	Kalimantan Barat	1.296.176	869.503	2.165.679	1.320.385	880.510	2.200.895
21	Kalimantan Tengah	683.956	393.875	1.077.831	675.781	371.621	1.047.402
22	Kalimantan Selatan	1.038.104	675.030	1.713.134	1.107.288	714.429	1.821.717
23	Kalimantan Timur	879.255	370.233	1.249.488	1.017.702	443.294	1.460.996
24	Sulawesi Utara	731.869	314.796	1.046.665	719.456	331.674	1.051.130
25	Sulawesi Tengah	761.272	458.185	1.219.457	774.750	440.977	1.215.727
26	Sulawesi Selatan	2.133.567	1.143.290	3.276.857	2.198.179	1.338.741	3.536.920
27	Sulawesi Tenggara	584.464	378.874	963.338	592.521	405.674	998.195
28	Gorontalo	283.320	140.056	423.376	297.547	149.766	447.313
29	Sulawesi Barat	320.124	157.712	477.836	315.647	195.497	511.144
30	Maluku	349.659	204.689	554.348	363.727	232.303	596.030
31	Maluku Utara	258.902	158.549	417.451	267.778	154.620	422.398
32	Papua Barat	223.943	120.262	344.205	229.006	123.379	352.385
33	Papua	605.122	448.499	1.053.621	658.806	469.230	1.128.036
	Indonesia	68.825.081	42.661.366	111.477.447	70.409.087	43.424.193	113.833.280

Sumber : <http://www.nakertrans.go.id/pusdatin.html,4,242,pnaker>

Tabel 2.10.1
Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha
Tahun 2006 - 2009

No.	Lapangan Usaha	2006	2007 ^x	2008 ^{xx}	2009 ^{xxx 1)}
1	2	3	4	5	6
1	Pertanian, peternakan, kehutanan , dan perikanan	12,97	13,71	14,40	15,63
2	Pertambangan dan penggalian	10,98	11,17	10,97	8,93
3	Industri pengolahan	27,54	27,06	27,87	26,92
4	Listrik, gas,dan air bersih	0,91	0,88	0,82	0,87
5	Konstruksi	7,52	7,73	8,46	9,88
6	Perdagangan,hotel,dan restoran	15,02	14,92	13,97	13,34
7	Pengangkutan dan komunikasi	6,93	6,69	6,31	6,42
8	Keuangan, Real estat, & Jasa perusahaan	8,06	7,73	7,43	7,44
9	Jasa-jasa	10,07	10,11	9,77	10,55
	PRODUK DOMESTIK BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00
	PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS	88,85	89,45	89,35	92,64

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2009

Catatan : ^x Angka sementara

^{xx} Angka sangat sementara

^{xxx} Angka sangat sangat sementara

¹⁾ Data sampai semester I

Tabel 2.10.2
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Lapangan Usaha (%)
Tahun 2006 - 2009

No.	Lapangan Usaha	2006	2007 ^x	2008 ^{xx}	2009 ^{xxx 1)}
1	2	3	4	5	6
1	Pertanian, peternakan, kehutanan , dan perikanan	3,36	3,43	4,77	3,75
2	Pertambangan dan penggalian	1,70	2,02	0,51	2,41
3	Industri pengolahan	4,59	4,67	3,66	1,50
4	Listrik, gas,dan air bersih	5,76	10,33	10,92	13,45
5	Konstruksi	8,34	8,61	7,31	6,34
6	Perdagangan,hotel,dan restoran	6,42	8,41	7,23	0,21
7	Pengangkutan dan komunikasi	14,23	14,04	16,69	17,31
8	Keuangan, Real estat, & Jasa perusahaan	5,47	7,99	8,24	5,8
9	Jasa-jasa	6,16	6,60	6,45	7,10
	PRODUK DOMESTIK BRUTO	5,50	6,28	6,06	4,21
	PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS	6,11	6,87	6,52	4,61

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2009

Catatan : ^x Angka sementara

^{xx} Angka sangat sementara

^{xxx} Angka sangat sangat sementara

¹⁾ Data sampai semester I, dihitung berdasarkan perubahan PDB Semester I-2009 terhadap PDB Semester I-2008

Tabel 2.11
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi
Tahun 2005 - 2008 (Miliar Rupiah)

No	Provinsi	Produk Domestik Regional Bruto				Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas			
		2005	2006	2007 ^x	2008 ^{xx}	2005	2006	2007 ^x	2008 ^{xx}
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nanggroe Aceh D.	56.951,6	69.353,3	71.093,4	73.530,7	35.449,3	43.465,8	49.718,2	54.193,1
2	Sumatera Utara	139.618,3	160.376,8	181.819,7	213.931,7	138.556,3	159.187,9	180.375,4	212.145,5
3	Sumatera Barat	44.674,6	53.029,6	59.799,0	71.233,0	44.674,6	53.029,6	59.799,0	71.233,0
4	Riau	139.019,0	167.068,2	210.002,6	276.400,1	79.065,4	94.815,6	117.035,0	149.125,2
5	Kep. Riau	40.984,7	46.216,1	51.826,3	59.207,6	37.414,6	41.950,5	47.420,4	54.441,1
6	Jambi	22.487,0	26.061,8	32.076,7	39.665,3	18.404,0	22.080,2	26.193,6	30.680,1
7	Sumatera Selatan	81.531,5	95.928,8	109.895,7	133.358,9	52.726,7	63.500,1	74.905,3	88.794,8
8	Kep. Bangka Belitung	14.171,6	15.920,5	17.895,0	21.720,6	13.535,5	15.299,6	17.369,4	21.221,2
9	Bengkulu	10.134,5	11.397,0	12.820,3	14.447,0	10.134,5	11.397,0	12.820,3	14.447,0
10	Lampung	40.906,8	49.119,0	60.922,0	74.490,6	39.407,3	47.706,4	59.485,5	73.031,8
11	DKI Jakarta	433.860,3	501.771,7	566.449,4	677.411,1	431.900,9	499.354,1	563.813,3	674.189,8
12	Jawa Barat	389.244,7	473.187,3	526.608,8	602.420,6	370.693,8	448.250,5	501.445,2	572.282,6
13	Banten	84.622,8	97.867,3	107.499,7	122.497,5	84.622,8	97.867,3	107.499,7	122.497,5
14	Jawa Tengah	234.435,3	281.996,7	312.428,8	364.895,4	203.097,8	243.041,7	272.614,7	313.305,5
15	DI. Yogyakarta	25.337,6	29.417,3	32.916,7	38.102,1	25.337,6	29.417,3	32.916,7	38.102,1
16	Jawa Timur	403.392,4	470.627,5	534.919,3	621.582,0	402.497,6	469.504,0	533.367,1	619.666,1
17	Bali	33.946,5	37.388,5	42.336,4	49.922,6	33.946,5	37.388,5	42.336,4	49.922,6
18	Nusa Tenggara Barat	25.682,7	28.596,9	33.522,2	35.261,7	25.682,7	28.596,9	33.522,2	35.261,7
19	Nusa Tenggara Timur	14.810,5	16.904,1	19.137,0	21.621,8	14.810,5	16.904,1	19.137,0	21.621,8
20	Kalimantan Barat	33.869,5	37.715,0	42.478,6	48.415,5	33.869,5	37.715,0	42.478,6	48.415,5
21	Kalimantan Tengah	20.983,2	24.480,0	27.920,1	32.350,8	20.983,2	24.480,0	27.920,1	32.350,8
22	Kalimantan Selatan	31.794,1	34.670,5	39.438,8	45.515,6	31.282,9	34.142,3	38.852,8	44.889,8
23	Kalimantan Timur	180.289,1	199.588,1	212.096,6	315.220,4	68.106,5	82.234,4	93.810,3	128.097,0
24	Sulawesi Utara	18.763,5	21.216,5	24.081,1	27.843,0	18.744,5	21.190,0	24.052,1	27.810,5
25	Gorontalo	3.480,6	4.062,3	4.760,7	5.899,8	3.480,6	4.062,3	4.760,7	5.899,8
26	Sulawesi Tengah	17.116,6	19.310,3	21.743,6	28.139,7	17.053,3	19.068,3	21.280,1	27.477,8
27	Sulawesi Selatan	51.780,4	60.902,8	69.271,9	85.143,2	51.650,6	60.756,4	69.107,1	84.966,3
28	Sulawesi Barat	4.422,9	5.124,8	6.192,8	7.778,0	4.422,9	5.124,8	6.192,8	7.778,0
29	Sulawesi Tenggara	12.981,0	15.270,4	17.953,1	22.173,9	12.981,0	15.270,4	17.953,1	22.173,9
30	Maluku	4.570,7	5.079,8	5.698,8	6.269,7	4.551,5	5.059,6	5.682,7	6.251,9
31	Maluku Utara	2.583,1	2.818,4	3.160,0	3.856,4	2.583,1	2.818,4	3.160,0	3.856,4
32	Papua	43.615,3	46.895,2	55.380,5	54.733,6	43.615,3	46.895,2	55.380,5	54.733,6
33	Papua Barat	7.913,8	8.945,5	10.369,8	12.471,6	5.427,9	6.367,6	7.452,2	8.735,9
	Jumlah 33 Provinsi	2.669.976,2	3.118.308,0	3.524.515,4	4.207.511,5	2.380.711,2	2.787.941,8	3.169.857,5	3.719.599,7
	Indonesia	2.774.281,1	3.339.216,8	3.949.321,4	4.954.028,9	2.458.234,3	2.967.040,3	3.532.807,7	4.426.384,7

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2009

Catatan : ^x Angka Sementara

^{xx} Angka sangat sementara

Tabel 2.12
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Provinsi
Tahun 2005 - 2008 (Miliar Rupiah)

No	Provinsi	Produk Domestik Regional Bruto				Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas			
		2005	2006	2007 ^x	2008 ^{xx}	2005	2006	2007 ^x	2008 ^{xx}
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nanggroe Aceh D.	36.287,9	36.853,9	35.983,1	34.085,5	22.531,8	24.267,8	26.022,2	26.510,6
2	Sumatera Utara	87.897,8	93.347,4	99.792,3	106.172,4	87.240,3	92.699,0	99.085,7	105.431,9
3	Sumatera Barat	29.159,5	30.949,9	32.913,0	35.007,0	29.159,5	30.949,9	32.913,0	35.007,0
4	Riau	79.287,6	83.370,9	86.213,3	91.085,4	33.516,5	36.417,6	39.420,8	42.596,9
5	Kep. Riau	30.381,5	32.441,0	34.713,8	37.021,4	28.559,8	30.625,3	32.937,7	35.314,3
6	Jambi	12.620,0	13.363,6	14.275,2	15.296,7	11.062,3	11.985,8	12.775,1	13.715,4
7	Sumatera Selatan	49.633,5	52.214,8	55.262,1	58.080,0	36.317,7	38.971,0	42.106,1	44.777,7
8	Kep. Bangka Belitung	8.707,3	9.053,6	9.464,5	9.884,6	8.383,0	8.785,6	9.257,0	9.722,3
9	Bengkulu	6.239,4	6.610,6	7.009,0	7.354,5	6.239,4	6.610,6	7.009,0	7.354,5
10	Lampung	29.397,2	30.861,4	32.694,9	34.414,7	28.837,1	30.367,2	32.231,9	33.951,0
11	DKI Jakarta	295.270,5	312.826,7	332.971,3	353.539,1	294.354,6	311.893,7	332.033,9	352.598,7
12	Jawa Barat	242.883,9	257.499,4	274.180,3	290.171,1	234.010,9	248.774,4	265.834,0	281.710,6
13	Banten	58.106,9	61.341,7	65.046,8	68.830,6	58.106,9	61.341,7	65.046,8	68.830,6
14	Jawa Tengah	143.051,2	150.682,7	159.110,3	167.790,4	133.578,0	140.681,4	149.083,1	157.023,6
15	DI. Yogyakarta	16.910,9	17.535,7	18.291,5	19.208,9	16.910,9	17.535,7	18.291,5	19.208,9
16	Jawa Timur	256.374,7	271.249,3	287.814,2	304.799,0	255.745,0	270.564,9	286.912,1	303.714,5
17	Bali	21.072,4	22.184,7	23.497,0	24.900,6	21.072,4	22.184,7	23.497,0	24.900,6
18	Nusa Tenggara Barat	15.183,8	15.603,8	16.369,2	16.799,8	15.183,8	15.603,8	16.369,2	16.799,8
19	Nusa Tenggara Timur	9.867,3	10.368,5	10.902,4	11.426,4	9.867,3	10.368,5	10.902,4	11.426,4
20	Kalimantan Barat	23.538,4	24.768,4	26.260,6	27.683,6	23.538,4	24.768,4	26.260,6	27.683,6
21	Kalimantan Tengah	14.034,6	14.853,7	15.754,5	16.725,5	14.034,6	14.853,7	15.754,5	16.725,5
22	Kalimantan Selatan	23.292,5	24.452,3	25.922,3	27.538,5	22.841,0	23.995,3	25.454,0	27.074,5
23	Kalimantan Timur	93.938,0	96.612,8	97.803,2	103.168,0	42.478,0	47.840,7	52.412,9	56.016,3
24	Sulawesi Utara	12.744,5	13.473,1	14.344,3	15.428,5	12.725,6	13.449,5	14.319,2	15.401,4
25	Gorontalo	2.027,7	2.175,8	2.339,2	2.520,7	2.027,7	2.175,8	2.339,2	2.520,7
26	Sulawesi Tengah	11.752,2	12.671,5	13.683,9	14.770,1	11.710,9	12.556,5	13.467,2	14.490,1
27	Sulawesi Selatan	36.421,8	38.867,7	41.332,4	44.549,8	36.337,2	38.781,5	41.242,7	44.456,8
28	Sulawesi Barat	3.106,7	3.321,1	3.567,8	3.872,5	3.106,7	3.321,1	3.567,8	3.872,5
29	Sulawesi Tenggara	8.026,9	8.643,3	9.331,7	10.010,6	8.026,9	8.643,3	9.331,7	10.010,6
30	Maluku	3.259,2	3.440,1	3.633,5	3.787,1	3.244,4	3.425,0	3.621,7	3.774,8
31	Maluku Utara	2.236,8	2.359,5	2.501,2	2.650,8	2.236,8	2.359,5	2.501,2	2.650,8
32	Papua	22.209,2	18.402,2	19.200,3	18.914,9	22.209,2	18.402,2	19.200,3	18.914,9
33	Papua Barat	5.307,3	5.548,9	5.934,3	6.369,4	3.915,9	4.204,0	4.566,1	4.962,3
	Jumlah 33 Provinsi	1.690.229,1	1.777.950,0	1.878.113,4	1.983.858,1	1.539.110,5	1.629.405,1	1.735.767,6	1.839.150,1
	Indonesia	1.750.815,2	1.847.126,7	1.963.091,8	2.082.103,7	1.605.261,8	1.703.422,4	1.820.511,8	1.939.249,9

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2009

Catatan : ^x Angka sementara

^{xx} Angka sangat sementara

Tabel 2.13
Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi
Tahun 2005 - 2008 (Ribu Rupiah)

No	Provinsi	Produk Domestik Regional Bruto				Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas			
		2005	2006	2007 ^x	2008 ^{xx}	2005	2006	2007 ^x	2008 ^{xx}
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nanggroe Aceh D.	13.946,8	16.697,2	16.831,6	17.124,5	8.681,1	10.464,6	11.771,0	12.621,0
2	Sumatera Utara	11.243,2	12.701,2	14.166,6	16.402,9	11.157,7	12.607,0	14.054,1	16.266,0
3	Sumatera Barat	9.781,6	11.447,3	12.729,1	14.955,2	9.781,6	11.447,3	12.729,1	14.955,2
4	Riau	28.747,3	33.730,7	41.412,5	53.264,5	16.349,7	19.143,1	23.079,3	28.737,6
5	Kep. Riau	32.046,8	34.624,0	37.207,5	40.745,7	29.255,3	31.428,3	34.044,4	37.465,5
6	Jambi	8.484,4	9.666,1	11.697,4	14.225,6	6.943,9	8.189,4	9.552,0	11.003,2
7	Sumatera Selatan	11.962,0	13.866,8	15.654,7	18.725,4	7.735,8	9.179,1	10.670,3	12.468,0
8	Kep. Bangka Belitung	13.185,3	14.595,3	16.169,7	19.350,2	12.593,5	14.026,0	15.694,8	18.905,3
9	Bengkulu	6.470,8	7.161,6	7.929,9	8.799,0	6.470,8	7.161,6	7.929,9	8.799,0
10	Lampung	5.771,8	6.833,1	8.357,2	10.078,4	5.560,2	6.636,6	8.160,1	9.881,0
11	DKI Jakarta	48.790,6	55.879,1	62.490,3	74.064,8	48.570,2	55.609,8	62.199,5	73.712,6
12	Jawa Barat	9.942,3	11.907,3	13.057,8	14.722,5	9.468,4	11.279,8	12.433,8	13.986,0
13	Banten	9.328,8	10.584,6	11.407,7	12.757,0	9.328,8	10.584,6	11.407,7	12.757,0
14	Jawa Tengah	7.355,2	8.777,1	9.648,7	11.184,1	6.372,0	7.564,7	8.419,2	9.602,8
15	DI. Yogyakarta	7.528,6	8.651,9	9.584,1	10.985,2	7.528,6	8.651,9	9.584,1	10.985,2
16	Jawa Timur	11.057,4	12.826,9	14.498,2	16.756,6	11.032,8	12.796,3	14.456,1	16.704,9
17	Bali	9.968,4	10.859,9	12.166,3	14.198,7	9.968,4	10.859,9	12.166,3	14.198,7
18	Nusa Tenggara Barat	6.189,9	6.775,2	7.809,5	8.080,5	6.189,9	6.775,2	7.809,5	8.080,5
19	Nusa Tenggara Timur	3.460,8	3.873,7	4.301,5	4.768,5	3.460,8	3.873,7	4.301,5	4.768,5
20	Kalimantan Barat	8.389,4	9.181,3	10.166,0	11.394,3	8.389,4	9.181,3	10.166,0	11.394,3
21	Kalimantan Tengah	10.653,0	12.246,1	13.765,3	15.724,9	10.653,0	12.246,1	13.765,3	15.724,9
22	Kalimantan Selatan	9.644,5	10.359,9	11.610,9	13.205,9	9.489,4	10.202,1	11.438,4	13.024,4
23	Kalimantan Timur	62.446,4	67.531,1	70.119,2	101.858,1	23.589,9	27.824,2	31.013,7	41.392,4
24	Sulawesi Utara	8.752,4	9.798,0	11.012,0	12.610,1	8.743,6	9.785,7	10.998,8	12.595,3
25	Gorontalo	3.717,4	4.283,8	4.957,5	6.068,5	3.717,4	4.283,8	4.957,5	6.068,5
26	Sulawesi Tengah	7.403,4	8.203,2	9.074,2	11.540,2	7.376,0	8.100,4	8.880,8	11.268,8
27	Sulawesi Selatan	6.913,5	8.018,8	8.996,0	10.908,8	6.896,2	7.999,5	8.974,6	10.886,1
28	Sulawesi Barat	4.487,1	5.118,7	6.091,1	7.534,6	4.487,1	5.118,7	6.091,1	7.534,6
29	Sulawesi Tenggara	6.673,3	7.680,5	8.837,4	10.686,2	6.673,3	7.680,5	8.837,4	10.686,2
30	Maluku	3.613,8	3.958,1	4.377,0	4.747,3	3.598,6	3.942,3	4.364,6	4.733,8
31	Maluku Utara	2.825,8	3.033,5	3.346,4	4.018,8	2.825,8	3.033,5	3.346,4	4.018,8
32	Papua	22.543,7	23.745,6	27.475,9	26.614,9	22.543,7	23.745,6	27.475,9	26.614,9
33	Papua Barat	11.499,3	12.741,1	14.483,0	17.084,4	7.887,1	9.069,4	10.408,1	11.967,0
	Jumlah 33 Provinsi	12.144,4	13.999,3	15.619,9	18.411,7	10.828,7	12.516,1	14.048,2	16.276,7
	Indonesia	12.618,9	14.991,0	17.502,6	21.678,4	11.181,3	13.320,2	15.656,7	19.369,5

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2009

Catatan : ^x Angka sementara

^{xx} Angka sangat sementara

Tabel 2.14
Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Provinsi
Tahun 2005 - 2008 (Ribu Rupiah)

No	Provinsi	Produk Domestik Regional Bruto				Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas			
		2005	2006	2007 ^x	2008 ^{xx}	2005	2006	2007 ^x	2008 ^{xx}
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nanggroe Aceh D.	8.886,5	8.872,8	8.519,1	7.938,1	5.517,8	5.842,6	6.160,9	6.174,0
2	Sumatera Utara	7.078,3	7.392,7	7.775,4	8.140,6	7.025,3	7.341,4	7.720,3	8.083,8
3	Sumatera Barat	6.384,5	6.681,0	7.006,0	7.349,6	6.384,5	6.681,0	7.006,0	7.349,6
4	Riau	16.395,6	16.832,4	17.001,2	17.552,9	6.930,8	7.352,6	7.773,8	8.208,8
5	Kep. Riau	23.756,0	24.304,0	24.922,0	25.477,5	22.331,5	22.943,7	23.646,9	24.302,7
6	Jambi	4.761,5	4.956,5	5.205,7	5.486,0	4.173,8	4.445,4	4.658,7	4.918,9
7	Sumatera Selatan	7.282,0	7.547,8	7.872,1	8.155,2	5.328,4	5.633,4	5.998,0	6.287,4
8	Kep. Bangka Belitung	8.101,3	8.300,0	8.552,0	8.805,9	7.799,6	8.054,3	8.364,5	8.661,3
9	Bengkulu	3.983,8	4.154,0	4.335,4	4.479,3	3.983,8	4.154,0	4.335,4	4.479,3
10	Lampung	4.147,8	4.293,2	4.485,0	4.656,2	4.068,8	4.224,5	4.421,5	4.593,5
11	DKI Jakarta	33.205,2	34.837,5	36.733,1	38.654,2	33.102,2	34.733,6	36.629,7	38.551,4
12	Jawa Barat	6.203,9	6.479,7	6.798,6	7.091,5	5.977,2	6.260,2	6.591,6	6.884,7
13	Banten	6.405,7	6.634,3	6.902,7	7.168,1	6.405,7	6.634,3	6.902,7	7.168,1
14	Jawa Tengah	4.488,1	4.690,0	4.913,8	5.142,8	4.190,9	4.378,7	4.604,1	4.812,8
15	DI. Yogyakarta	5.024,8	5.157,4	5.325,8	5.538,1	5.024,8	5.157,4	5.325,8	5.538,1
16	Jawa Timur	7.027,5	7.392,9	7.800,8	8.216,8	7.010,2	7.374,2	7.776,3	8.187,5
17	Bali	6.187,9	6.443,8	6.752,4	7.082,1	6.187,9	6.443,8	6.752,4	7.082,1
18	Nusa Tenggara Barat	3.659,5	3.696,9	3.813,4	3.849,8	3.659,5	3.696,9	3.813,4	3.849,8
19	Nusa Tenggara Timur	2.305,7	2.376,0	2.450,6	2.520,0	2.305,7	2.376,0	2.450,6	2.520,0
20	Kalimantan Barat	5.830,4	6.029,6	6.284,7	6.515,2	5.830,4	6.029,6	6.284,7	6.515,2
21	Kalimantan Tengah	7.125,2	7.430,6	7.767,3	8.129,8	7.125,2	7.430,6	7.767,3	8.129,8
22	Kalimantan Selatan	7.065,6	7.306,6	7.631,6	7.990,0	6.928,7	7.170,1	7.493,7	7.855,4
23	Kalimantan Timur	32.537,1	32.689,2	32.333,8	33.337,0	14.713,0	16.187,0	17.327,7	18.100,7
24	Sulawesi Utara	5.944,8	6.222,0	6.559,5	6.987,5	5.936,0	6.211,1	6.548,0	6.975,3
25	Gorontalo	2.165,7	2.294,4	2.435,9	2.592,8	2.165,7	2.294,4	2.435,9	2.592,8
26	Sulawesi Tengah	5.083,1	5.383,0	5.710,7	6.057,3	5.065,3	5.334,1	5.620,2	5.942,5
27	Sulawesi Selatan	4.862,9	5.117,5	5.367,6	5.707,9	4.851,6	5.106,2	5.356,0	5.695,9
28	Sulawesi Barat	3.151,8	3.317,1	3.509,2	3.751,3	3.151,8	3.317,1	3.509,2	3.751,3
29	Sulawesi Tenggara	4.126,5	4.347,3	4.593,5	4.824,4	4.126,5	4.347,3	4.593,5	4.824,4
30	Maluku	2.576,9	2.680,5	2.790,7	2.867,5	2.565,1	2.668,7	2.781,6	2.858,2
31	Maluku Utara	2.447,0	2.539,6	2.648,7	2.762,4	2.447,0	2.539,6	2.648,7	2.762,4
32	Papua	11.479,4	9.318,0	9.525,8	9.197,6	11.479,4	9.318,0	9.525,8	9.197,6
33	Papua Barat	7.711,9	7.903,3	8.288,1	8.725,2	5.690,1	5.987,8	6.377,2	6.797,7
	Jumlah 33 Provinsi	7.688,0	7.981,9	8.323,4	8.681,2	7.000,7	7.315,0	7.692,6	8.048,0
	Indonesia	7.963,6	8.292,5	8.700,0	9.111,1	7.301,6	7.647,3	8.068,1	8.486,0

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2009

Catatan : ^x Angka sementara

^{xx} Angka sangat sementara

Tabel 2.15
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto per Kapita
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi, Tahun 2005 - 2008

No	Provinsi	2005	2006	2007 ^x	2008 ^{xx}
1	2	3	4	5	6
1	Nanggroe Aceh D.	2,13	2,22	2,02	1,75
2	Sumatera Utara	5,23	5,14	5,16	5,08
3	Sumatera Barat	1,67	1,70	1,70	1,69
4	Riau	5,21	5,36	5,96	6,57
5	Kep. Riau	1,54	1,48	1,47	1,41
6	Jambi	0,84	0,84	0,91	0,94
7	Sumatera Selatan	3,05	3,08	3,12	3,17
8	Kep. Bangka Belitung	0,53	0,51	0,51	0,52
9	Bengkulu	0,38	0,37	0,36	0,34
10	Lampung	1,53	1,58	1,73	1,77
11	DKI Jakarta	16,25	16,09	16,07	16,10
12	Jawa Barat	14,58	15,17	14,94	14,32
13	Banten	3,17	3,14	3,05	2,91
14	Jawa Tengah	8,78	9,04	8,86	8,67
15	DI. Yogyakarta	0,95	0,94	0,93	0,91
16	Jawa Timur	15,11	15,09	15,18	14,77
17	Bali	1,27	1,20	1,20	1,19
18	Nusa Tenggara Barat	0,96	0,92	0,95	0,84
19	Nusa Tenggara Timur	0,55	0,54	0,54	0,51
20	Kalimantan Barat	1,27	1,21	1,21	1,15
21	Kalimantan Tengah	0,79	0,79	0,79	0,77
22	Kalimantan Selatan	1,19	1,11	1,12	1,08
23	Kalimantan Timur	6,75	6,40	6,02	7,49
24	Sulawesi Utara	0,70	0,68	0,68	0,66
25	Gorontalo	0,13	0,13	0,14	0,14
26	Sulawesi Tengah	0,64	0,62	0,62	0,67
27	Sulawesi Selatan	1,94	1,95	1,97	2,02
28	Sulawesi Barat	0,17	0,16	0,18	0,18
29	Sulawesi Tenggara	0,49	0,49	0,51	0,53
30	Maluku	0,17	0,16	0,16	0,15
31	Maluku Utara	0,10	0,09	0,09	0,09
32	Papua	1,63	1,50	1,57	1,30
33	Papua Barat	0,30	0,29	0,29	0,30
Jumlah 33 Provinsi		100,00	99,99	100,01	99,99

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2009

Catatan : ^x Angka sementara

^{xx} Angka sangat sementara

Tabel 2.16
Perkembangan Realisasi Investasi PMDN Menurut Sektor
Tahun 2005 - 2008

No.	Sektor	2005		2006		2007		2008	
		P	I	P	I	P	I	P	I
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sektor Primer	31	5.577,2	29	3.599,8	29	4.377,4	13	1.757,7
1	Tanaman Pangan & Perkebunan	19	3.070,6	20	3.443,0	18	3.528,8	4	1.184,1
2	Peternakan	3	108,3	7	115,6	1	145,2	2	50,4
3	Kehutanan	1	993,4	-	20,0	1	8,9	1	4,0
4	Perikanan	4	4,9	1	0,2	1	3,1	-	-
5	Pertambangan	4	1.400,0	1	21,0	8	691,4	6	519,2
	Sektor Sekunder	149	20.991,2	96	13.012,7	101	26.289,8	189	15.914,8
6	Industri Makanan	35	4.490,8	19	3.175,3	27	5.371,7	49	8.192,9
7	Industri Tekstil	22	1.640,7	7	81,7	8	228,2	20	719,6
8	Ind. Barang Dari Kulit & Alas Kaki	1	14,6	1	4,0	2	58,5	2	10,1
9	Industri Kayu	9	198,8	9	709,0	3	38,8	4	306,6
10	Ind. Kertas dan Percetakan	13	9.732,6	9	1.871,2	8	14.548,2	14	1.797,7
11	Ind. Kimia dan Farmasi	17	1.945,2	10	3.248,9	14	1.168,2	23	503,7
12	Ind. Karet dan Plastik	18	678,4	11	253,6	10	564,5	27	797,8
13	Ind. Mineral Non Logam	4	774,6	4	218,2	2	124,2	7	845,3
14	Ind. Logam, Mesin & Elektronik	16	1.151,5	22	3.334,2	17	3.541,6	31	2.381,1
15	Ind. Instru. Kedokteran, Presisi & Optik & Jam	-	-	-	-	-	-	2	7,0
16	Ind. Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain	6	284,6	4	116,6	8	609,4	6	314,7
17	Industri Lainnya	8	79,4	-	-	2	36,5	4	38,4
	Sektor Tersier	35	4.155,8	37	4.036,5	29	4.211,5	37	2.690,8
18	Listrik, Gas dan Air	-	-	2	88,0	6	746,4	3	519,8
19	Konstruksi	3	2.386,4	3	538,6	4	2.110,7	8	881,2
20	Perdagangan & Reparasi	5	91,9	7	345,8	5	143,0	14	594,8
21	Hotel & Restoran	4	269,0	1	180,2	3	127,7	3	238,6
22	Transportasi, Gudang & Komunikasi	16	637,5	14	1.227,7	7	286,2	4	429,2
23	Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran	3	46,9	3	45,6	-	-	1	0,8
24	Jasa Lainnya	4	724,1	7	1.610,6	4	797,5	4	26,4
	Jumlah	215	30.724,2	162	20.649,0	159	34.878,7	239	20.363,4

Sumber : Data Perkembangan Penanaman Modal, BKPM, Desember 2008

Catatan :

1. Diluar Investasi Sektor Minyak & Gas Bumi, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, Pertambangan dalam rangka Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, Investasi yang perizinannya dikeluarkan oleh instansi teknis/ sektor, Investasi Porto Folio (Pasar Modal) dan Investasi Rumah Tangga.
2. P : Jumlah Izin Usaha Tetap yang dikeluarkan
3. I : Nilai Realisasi Investasi dalam Rp Miliar
4. Data sementara, termasuk Izin Usaha Tetap yang dikeluarkan oleh daerah yang diterima BKPM sampai dengan 31 Desember 2008

Tabel 2.17
Perkembangan Realisasi Investasi PMA Menurut Sektor
Tahun 2005 - 2008

No.	Sektor	2005		2006		2007		2008	
		P	I	P	I	P	I	P	I
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sektor Primer	44	402,3	39	533,0	62	599,3	55	335,6
1	Tanaman Pangan & Perkebunan	17	171,5	13	351,9	16	219,1	10	147,4
2	Peternakan	3	52,8	7	18,8	7	45,7	1	4,5
3	Kehutanan	2	118,8	1	31,0	-	-	-	-
4	Perikanan	7	5,8	5	32,8	5	24,7	3	2,4
5	Pertambangan	15	53,4	13	98,5	34	309,8	41	181,4
	Sektor Sekunder	335	3.500,6	363	3.619,2	390	4.697,0	495	4.515,2
6	Industri Makanan	46	603,2	45	354,4	53	704,1	42	491,4
7	Industri Tekstil	31	71,1	61	424,0	63	131,7	67	210,2
8	Ind. Barang Dari Kulit & Alas Kaki	6	47,8	11	51,8	10	95,9	20	145,8
9	Industri Kayu	18	75,5	18	58,9	17	127,9	19	119,5
10	Ind. Kertas dan Percetakan	6	9,9	16	747,0	11	672,5	15	294,7
11	Ind. Kimia dan Farmasi	41	1.152,9	32	264,6	32	1.611,7	42	627,8
12	Ind. Karet dan Plastik	27	392,6	33	112,7	36	157,9	50	271,6
13	Ind. Mineral Non Logam	11	66,2	7	94,8	6	27,8	11	266,4
14	Ind. Logam, Mesin & Elektronik	87	521,8	86	955,2	99	714,1	141	1.281,4
15	Ind. Instru. Kedokteran, Presisi & Optik & Jam	2	3,1	1	0,2	1	10,9	7	15,7
16	Ind. Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain	31	360,6	28	438,5	38	412,3	47	756,2
17	Industri Lainnya	29	195,9	25	117,1	24	30,2	34	34,7
	Sektor Tersier	528	5.008,1	467	1.839,5	530	5.045,1	588	10.020,5
18	Listrik, Gas dan Air	2	68,7	3	105,3	3	119,3	4	26,9
19	Konstruksi	35	921,9	18	144,2	16	448,2	21	426,7
20	Perdagangan & Reparasi	261	383,6	266	434,3	312	482,9	375	582,2
21	Hotel & Restoran	33	180,3	31	111,2	22	136,4	22	156,9
22	Transportasi, Gudang & Komunikasi	53	2.946,8	37	646,9	43	3.305,2	35	8.529,9
23	Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran	5	208,3	16	254,0	8	64,5	19	174,9
24	Jasa Lainnya	139	298,5	96	143,6	126	488,6	112	123,1
	Jumlah	907	8.911,0	869	5.991,7	982	10.341,4	1.138	14.871,4

Sumber : Data Perkembangan Penanaman Modal, BKPM, Desember 2008

Catatan :

1. Diluar Investasi Sektor Minyak & Gas Bumi, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, Pertambangan dalam rangka Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, Investasi yang perizinannya dikeluarkan oleh instansi teknis/sektor, Investasi Porto Folio (Pasar Modal) dan Investasi Rumah Tangga.
2. P : Jumlah Izin Usaha Tetap yang dikeluarkan
3. I : Nilai Realisasi Investasi dalam US\$ Juta
4. Data sementara, termasuk Izin Usaha Tetap yang dikeluarkan oleh daerah yang diterima BKPM sampai dengan 31 Desember 2008

Tabel 2.18
Perkembangan Realisasi Investasi PMDN Menurut Lokasi
Tahun 2005 - 2008

No.	Lokasi	2005		2006		2007		2008	
		P	I	P	I	P	I	P	I
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sumatera		40	13.501,7	28	4.504,9	30	10.754,5	34	4.840,1
1	Nanggroe Aceh Darussalam	2	108,2	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	12	621,6	9	594,2	6	1.521,3	12	382,7
3	Sumatera Barat	1	71,6	1	74,4	-	-	-	-
4	Riau	15	10.230,8	10	2.500,9	11	3.095,3	8	1.966,8
5	Jambi	2	212,8	1	31,0	3	4.751,8	3	1.300,6
6	Sumatera Selatan	2	651,6	6	697,4	5	811,5	5	378,5
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Lampung	4	1.055,6	1	607,0	2	163,8	3	735,2
9	Bangka Belitung	2	549,5	-	-	1	313,7	1	2,0
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-	2	97,1	2	74,4
Jawa		142	14.855,8	103	13.030,8	112	18.668,9	183	12.230,7
11	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	24	2.546,0	29	3.088,0	34	4.218,0	34	1.837,3
12	Jawa Barat	53	3.405,3	29	5.314,4	35	11.347,9	64	4.289,5
13	Jawa Tengah	14	986,4	8	275,8	4	276,5	14	1.336,3
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	2	28,0	1	20,0	-	33,1	-	-
15	Jawa Timur	25	4.056,9	17	517,4	17	1.724,7	40	2.778,3
16	Banten	24	3.833,2	19	3.815,2	22	1.068,7	31	1.989,1
Bali & Nusa Tenggara		14	66,1	8	104,9	2	15,7	2	29,0
17	Bali	11	46,4	5	40,7	2	15,7	2	29,0
18	Nusa Tenggara Barat	1	0,7	3	64,2	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	2	19,0	-	-	-	-	-	-
Kalimantan		11	1.747,6	16	2.536,1	11	1.558,0	12	1.821,4
20	Kalimantan Barat	1	38,3	1	80,3	2	287,0	2	248,1
21	Kalimantan Tengah	4	824,8	6	1.198,6	2	447,0	2	681,9
22	Kalimantan Selatan	4	855,2	7	1.010,1	4	384,0	4	592,7
23	Kalimantan Timur	2	29,3	2	247,1	3	440,0	4	298,7
Sulawesi		5	509,0	4	68,6	4	3.881,6	5	1.147,5
24	Sulawesi Utara	3	35,3	-	-	1	624,0	1	42,2
25	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	2	487,6	-	-
26	Sulawesi Selatan	2	473,7	4	68,6	-	1,1	4	1.105,2
27	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	1	2.768,9	-	-
28	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
Maluku		1	0,8	1	0,2	-	-	-	-
30	Maluku	1	0,9	1	0,2	-	-	-	-
31	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
Papua		2	43,1	2	403,5	-	-	3	294,7
32	Papua	-	40,7	2	403,5	-	-	3	294,7
33	Irian Jaya Barat	2	2,4	-	-	-	-	-	-
Jumlah		215	30.724,2	162	20.649,0	159	34.878,7	239	20.363,4

Sumber : Data Perkembangan Penanaman Modal, BKPM, Desember 2008

Catatan :

1. Diluar Investasi Sektor Minyak & Gas Bumi, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, Pertambangan dalam rangka Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, Investasi yang perizinannya dikeluarkan oleh instansi teknis/sektor, Investasi Porto Folio (Pasar Modal) dan Investasi Rumah Tangga.
2. P : Jumlah Izin Usaha Tetap yang dikeluarkan
3. I : Nilai Realisasi Investasi dalam Rp Miliar
4. Data sementara, termasuk Izin Usaha Tetap yang dikeluarkan oleh daerah yang diterima BKPM sampai dengan 31 Desember 2008

Tabel 2.19
Perkembangan Realisasi Investasi PMA Menurut Lokasi
Tahun 2005 - 2008

No.	Lokasi	2005		2006		2007		2008	
		P	I	P	I	P	I	P	I
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sumatera		50	1.232,4	42	898,2	72	1.398,5	95	1.009,9
1	Nanggroe Aceh Darussalam	-	-	-	-	2	17,4	-	-
2	Sumatera Utara	19	59,9	11	58,1	17	189,7	18	127,3
3	Sumatera Barat	5	37,0	2	1,6	5	58,7	4	28,1
4	Riau	8	795,8	8	585,2	10	724,0	8	460,9
5	Jambi	3	10,2	4	96,7	1	17,6	1	36,1
6	Sumatera Selatan	4	125,0	3	27,8	5	213,8	7	114,6
7	Bengkulu	1	12,9	-	-	-	-	2	13,0
8	Lampung	3	72,2	9	116,1	4	124,5	2	67,0
9	Bangka Belitung	3	51,9	2	0,6	-	-	2	1,7
10	Kepulauan Riau	4	67,5	3	12,0	28	52,8	51	161,2
Jawa		717	7.239,8	718	4.416,4	792	8.503,5	947	13.566,8
11	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	364	3.266,8	330	1.472,1	365	4.676,9	434	9.927,8
12	Jawa Barat	209	2.561,4	200	1.622,9	244	1.326,9	293	2.552,1
13	Jawa Tengah	12	23,9	39	380,1	40	100,7	42	135,3
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	7	17,3	11	48,8	3	0,8	6	16,6
15	Jawa Timur	46	702,2	54	384,3	62	1.689,6	73	457,3
16	Banten	79	668,2	84	508,2	78	708,6	99	477,8
Bali & Nusa Tenggara		117	102,6	82	106,2	80	56,7	59	95,5
17	Bali	109	97,5	74	98,9	74	50,4	50	80,8
18	Nusa Tenggara Barat	7	3,6	6	4,9	5	5,9	7	12,8
19	Nusa Tenggara Timur	1	1,5	2	2,4	1	0,4	2	1,9
Kalimantan		13	181,8	16	534,8	27	300,6	19	115,2
20	Kalimantan Barat	6	60,5	1	2,0	2	11,2	3	39,8
21	Kalimantan Tengah	4	82,0	3	22,4	3	77,6	7	62,7
22	Kalimantan Selatan	-	0,5	4	107,9	6	59,8	1	0,2
23	Kalimantan Timur	3	38,8	8	402,5	16	152,0	8	12,5
Sulawesi		6	145,3	9	15,5	9	79,6	14	65,4
24	Sulawesi Utara	3	16,0	2	1,3	1	9,7	2	35,5
25	Sulawesi Tengah	-	-	2	0,6	-	7,1	1	1,5
26	Sulawesi Selatan	1	67,1	4	13,2	8	62,8	10	27,9
27	Sulawesi Tenggara	-	-	1	0,4	-	-	1	0,5
28	Gorontalo	2	62,2	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
Maluku		4	9,1	1	20	-	-	-	-
30	Maluku	4	9,1	1	20,0	-	-	-	-
31	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
Papua		-	-	1	0,6	2	2,5	4	18,7
32	Papua	-	-	-	-	1	0,4	2	17,8
33	Irian Jaya Barat	-	-	1	0,6	1	2,0	2	0,9
Jumlah		907	8.911,0	869	5.991,7	982	10.341,4	1.138	14.871,4

Sumber : Data Perkembangan Penanaman Modal, BKPM, Desember 2008

Catatan :

- Diluar Investasi Sektor Minyak & Gas Bumi, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, Pertambangan dalam rangka Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, Investasi yang perizinannya dikeluarkan oleh instansi teknis/sektor, Investasi Porto Folio (Pasar Modal) dan Investasi Rumah Tangga.
- P : Jumlah Izin Usaha Tetap yang dikeluarkan
- I : Nilai Realisasi Investasi dalam US\$ Juta
- Data sementara, termasuk Izin Usaha Tetap yang dikeluarkan oleh daerah yang diterima BKPM sampai dengan 31 Desember 2008



BAB III

INFORMASI STATISTIK PENDUKUNG PEMBANGUNAN

3.1 Konstruksi

Konstruksi adalah suatu kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan/konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya. Hasil kegiatan antara lain : gedung, jalan, jembatan, rel dan jembatan kereta api, terowongan, bangunan air dan drainase, bangunan sanitasi, bandara, dan lain-lain. Sektor Konstruksi memiliki peranan yang amat signifikan dalam pembangunan ekonomi nasional. Hal ini karena Sektor Konstruksi memiliki keterkaitan sangat erat terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya.

Dari sisi lapangan pekerjaan, peranan Sektor Konstruksi mampu menyerap tenaga kerja yang besar. Jumlah perusahaan konstruksi yang beroperasi di Indonesia dari tahun 2007-2008 mengalami kenaikan, yaitu dari 83.898 perusahaan tahun 2007 menjadi 120.014 perusahaan tahun 2008 (Tabel 3.1).

Nilai konstruksi yang diselesaikan merupakan komponen utama dalam struktur output perusahaan konstruksi. Jika pada tahun 2007 nilai konstruksi mencapai sebesar 81,7 triliun rupiah, maka tahun 2008 naik menjadi 96,4 triliun rupiah (Tabel 3.2). Ditinjau dari hal tersebut, maka jenis pekerjaan yang mempunyai nilai konstruksi besar adalah bangunan gedung dan bangunan sipil.

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, proyek konstruksi masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Tabel 3.2 menunjukkan pada tahun 2007 dan 2008 sekitar 59,3% dan 63,3% dari total nilai konstruksi berada di Pulau Jawa. Struktur persentase nilai konstruksi antar kelompok pulau cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2007 ke tahun 2008, kecuali di Pulau Sumatera.

3.2 Potensi Lahan Sawah

Luas panen padi sempat mengalami penurunan dari tahun 2005 ke 2006. Kenaikan terjadi mulai tahun 2006 sampai 2009 (Tabel 3.3). Untuk luas panen padi terbesar tahun 2009 berada di provinsi Jawa Barat (14,79%), disusul dengan provinsi Jawa Timur (14,50%) dan Jawa Tengah (13,29%).

Saluran induk, sekunder, dan bangunan yang dibangun di sawah irigasi teknis dikuasai dan dipelihara oleh pemerintah. Sawah irigasi setengah teknis sama dengan sawah irigasi teknis, hanya pemerintah menguasai bangunan penyalur untuk dapat mengatur dan mengukur pemasukan air. Untuk sawah irigasi sederhana, pemerintah ikut membangun sebagian dari jaringannya. Adapun pengairan sawah tadah hujan tergantung pada air hujan, pengairan sawah pasang surut tergantung pada air sungai yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. Sedangkan sawah lainnya sama seperti lahan sawah lebak, polder, dan rawa-rawa yang ditanami padi atau rembesan dan lain-lain. Jika ditinjau dari jenis pengairan, maka luas lahan sawah terbanyak menggunakan irigasi teknis, disusul tadah hujan, irigasi sederhana, irigasi setengah teknis, pasang surut, dan lainnya (Tabel 3.4).

3.3 Angkutan Darat (Transportasi)

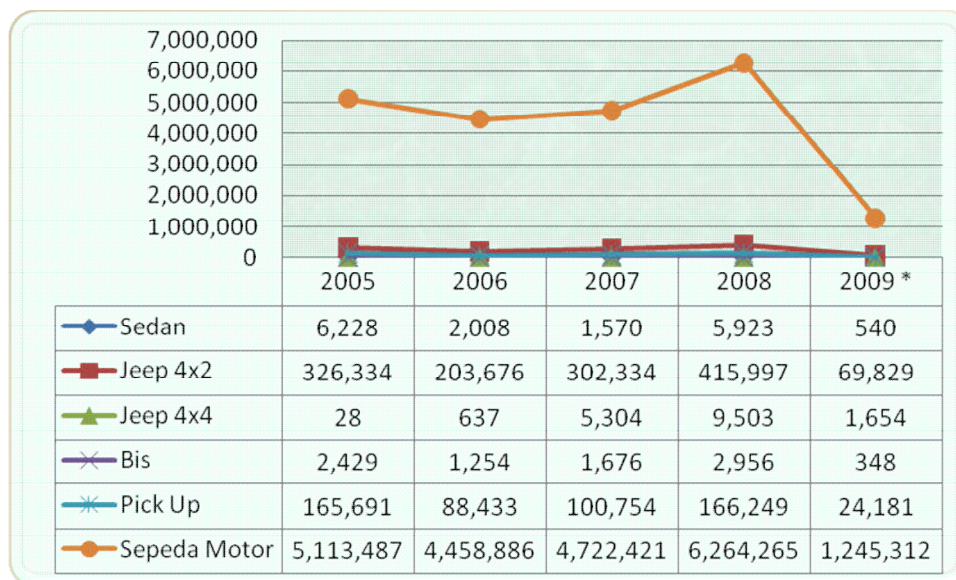
Angkutan adalah suatu kegiatan usaha menyediakan jasa angkutan penumpang dan atau barang/ ternak dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat angkutan bermotor maupun tidak bermotor, baik melalui darat, air maupun udara. Pembahasan selanjutnya hanya terkait angkutan umum di darat.

Pada tahun 2007 jumlah kendaraan bermotor yang tercatat di Kepolisian RI diperkirakan sebanyak 57,75 juta unit. Komposisinya pada tahun 2007 terdiri atas : 72,62% sepeda motor, 15,35% mobil penumpang, 8,39% truk, serta

3,64% bis (Tabel 3.5). Dari tahun ke tahun jumlah kendaraan bermotor terbanyak berada di provinsi DKI Jakarta, terutama dari tahun 2006 ke 2007.

Produksi kendaraan bermotor dalam negeri tahun 2006 turun dibandingkan tahun 2005 dan meningkat lagi di tahun 2007 dan 2008. Komposisi kendaraan bermotor dalam negeri dari tahun 2005 sampai triwulan I tahun 2009 paling banyak adalah jenis sepeda motor, disusul jenis jeep 4x2, pick up, sedan, bis, dan jeep 4x4 (Gambar 3.1).

Gambar 3.1 Produksi Kendaraan Bermotor Dalam Negeri (unit) Tahun 2005 – 2009*



Sumber : Statistik Indonesia, 2009 (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) dengan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AIS))

Catatan : * Sampai dengan Triwulan I

3.4 Perumahan dan Lingkungan Permukiman

3.4.1 Perumahan

Perumahan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, perlu mendapat perhatian penting dalam penyediaannya sebagai upaya meningkatkan



kesejahteraan masyarakat. Khususnya bagi *Masyarakat Berpenghasilan Rendah* yang sulit mendapatkan tempat tinggal yang layak dan terjangkau, merupakan kewajiban bagi Pemerintah untuk memberikan kemudahan akses bagi kelompok tersebut agar dapat terpenuhi hak dasarnya.

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk (rumah tangga) yang semakin naik maka kebutuhan rumah/ tempat tinggal yang layak hunipun diperkirakan akan bertambah. Sebagai akibat tidak terpenuhinya kebutuhan rumah tiap tahun (*backlog*) yang secara kumulatif akan bertambah terus, maka muncul berbagai jenis permukiman kumuh.

Permukiman kumuh adalah lingkungan hunian yang ditandai oleh :

1. Banyak rumah tidak layak huni
2. Banyak saluran pembuangan limbah macet
3. Penduduk/ bangunan sangat padat
4. Banyak penduduk buang air besar tidak di jamban
5. Biasanya berada di areal marginal (tepi sungai, pinggir rel kereta api)

Permukiman kumuh biasanya terdapat di daerah perkotaan.

Rumah tidak layak huni adalah rumah yang dibuat dari bahan bekas/ sampah yang dipertimbangkan tidak cocok untuk bertempat tinggal atau terletak pada areal yang diperuntukkan bukan untuk permukiman.

Jika dilihat dari permukiman kumuh di Indonesia, maka jumlah tempat permukiman kumuh tahun 2008 ada 3.881 desa/ kelurahan. Secara otomatis jumlah tempat permukiman tidak kumuh meningkat pada tahun 2008. Provinsi yang banyak terdapat permukiman kumuh adalah Jawa Barat (831 desa/ kelurahan), termasuk jumlah lokasi (2.848 desa/ kelurahan) dan bangunan rumah (88.879 desa/ kelurahan).

Pada Tabel 3.6 terlihat, bahwa lokasi permukiman kumuh di Indonesia di tahun 2008 sebesar 10.578 lokasi. Adapun jumlah bangunan rumah kumuh di permukiman kumuh pada tahun 2008, sebesar 399.638 unit dengan jumlah keluarga yang tinggal sebesar 548.539 keluarga.

Proyek pembangunan rumah oleh Perumnas diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah. Perumnas pernah menjadi pengembang dengan stok lahan paling besar, namun sekarang menciut akibat pembangunan pesat tanpa dibarengi penambahan stok lahan baru. Tabel 3.7 menunjukkan banyaknya stok akhir rumah yang dibangun oleh Perum Perumnas tahun 2008, yakni 2.365 unit dari stok awal berjumlah 3.457 unit.

Dari jenis rumah yang dibangun oleh Perum Perumnas tahun 2008, maka jumlah terbesar untuk pembangunan rumah sederhana sehat, yaitu 2.820 unit yang tersebar di beberapa provinsi, kecuali provinsi NAD, Sumatera Barat, Kep. Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Bali, NTT, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Papua Barat. Dari Tabel 3.8 disebutkan, bahwa rumah toko hanya dibangun di provinsi Jawa Tengah.

Pada tahun 2008 realisasi pembangunan Rumah Siap Huni (RSH) yang dibuat oleh Perum Perumnas sudah mencapai setengah lebih dari jumlah unit yang direncanakan (Tabel 3.9). Realisasi terbesar terdapat pada jenis bangunan apartemen ($RS > 27$) yang hampir seluruh rencana terpenuhi.

Pembangunan perumahan merupakan pembangunan multisektoral yang penyelenggaraannya melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam rangka memenuhi sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009, kinerja yang telah dicapai oleh Kemenpera terdapat di Tabel 3.10. Dari sasaran



RPJMN 2004-2009 sebanyak 1.265.000 unit, sampai dengan tahun 2009 telah terealisasi sebanyak 1.331.580 unit (105,26%). Dari sasaran RPJMN 2004-2009 sebanyak 60.000 unit Rusunawa (Kemenpera, Ditjen Cipta Karya - Departemen PU, dan Pemda DKI), sampai dengan akhir tahun 2009 telah terealisasi sebanyak 37.709 unit (62,85%). Dari sasaran RPJMN 2004-2009 sebanyak 25.000 unit Rusunami dengan Peran Swasta, sampai dengan tahun 2009 telah terealisasi sebanyak 6.716 unit (26,86%). Dari sasaran RPJMN 2004-2009 sebanyak 3.600.000 unit Perumahan Swadaya (Pemerintah dan Non Pemerintah), sampai dengan tahun 2009 telah terealisasi sebanyak 3.659.037 unit (101,64 %). Dari sasaran RPJMN 2004-2009 belum ditetapkan jumlah penataan kawasan, sampai dengan tahun 2009 telah terealisasi sebanyak 48 kawasan.

Dalam menyikapi kebutuhan penyediaan perumahan dan permukiman untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, maka pemerintah selalu membuka kawasan Perumahan Sederhana (RS) dan Rumah Sederhana Sehat (RsH) yang bisa dibeli masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Upaya penyediaan perumahan yang telah dilakukan Pemerintah selaku *fasilitator* dan *stimulator* sejak tahun 2005 hingga sekarang ini, antara lain dengan terealisasinya pembangunan stimulan Rusunawa yang tersebar di beberapa lokasi di hampir semua Provinsi dengan dana APBN maupun APBD.

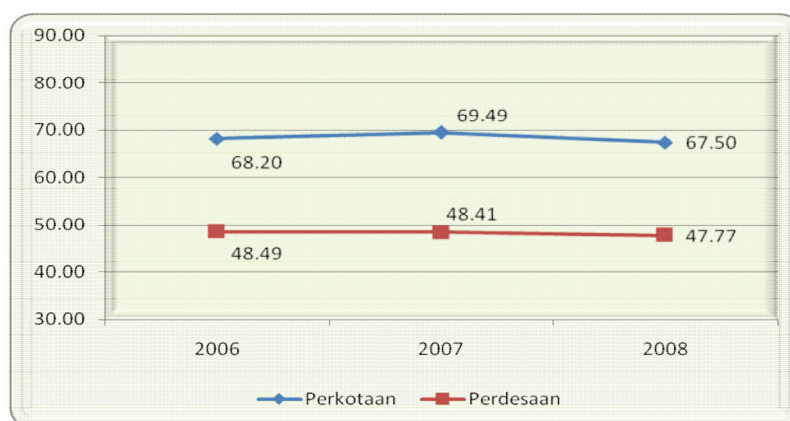
Kualitas rumah dibagi menjadi tiga, yaitu permanen, semi permanen, dan tidak permanen. Sedangkan kriteria permanen suatu bangunan ditentukan oleh dinding, atap dan lantai. Rumah permanen adalah rumah yang dindingnya terbuat dari tembok/ kayu, lantainya terbuat dari ubin/ keramik/ kayu berkualitas tinggi dan atapnya terbuat dari seng/genteng/sirap/asbes. Rumah semi permanen adalah rumah yang dindingnya setengah tembok/

bata tanpa plester/kayu, lantainya dari ubin/semèn/kayu berkualitas rendah dan atapnya seng/ genteng/ sirap/ asbes. Rumah tidak permanen adalah rumah yang dindingnya sangat sederhana (bambu/ papan/ daun), lantainya dari tanah, dan atapnya dari daun-daunan atau atap campuran genteng/ seng bekas dan sejenisnya. Kualitas bangunan rumah/ tempat tinggal di Indonesia tahun 2008 paling banyak adalah permanen dengan jumlah 27.726.648 unit, tidak termasuk ruko dan rukan (Tabel 3.11).

3.4.2 Lingkungan Permukiman

Kondisi lingkungan permukiman yang bersih memberikan kenyamanan pada penghuninya. Lingkungan yang tidak bersih merupakan sumber penyakit seperti demam berdarah, malaria, penyakit perut, penyakit kulit, dan penyakit lainnya. Oleh sebab itu masyarakat diharapkan dapat bergotong royong membersihkan selokan, pekarangan rumah, lingkungan sekitar rumah dan permukimannya.

Gambar 3.2 Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Milik Sendiri Menurut Provinsi, Tahun 2006 – 2008



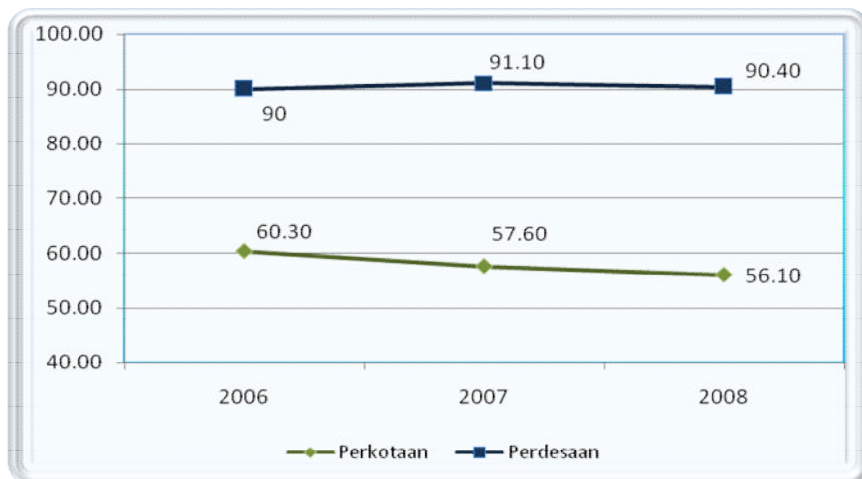
Sumber : http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=29¬ab=27

Dari Gambar 3.2 terlihat lebih dari 50% rumah tangga di perkotaan memiliki sumber air minum milik sendiri (2006 sampai 2008) dan mengalami

penurunan di tahun 2008. Bila dibandingkan dengan daerah perdesaan, sumber air minum milik sendiri yang digunakan masyarakat menunjukkan penurunan dari tahun 2006 ke 2008, dan masih dibawah 50%. Sebaliknya, rumah tangga di daerah perkotaan memiliki persentase lebih rendah dari perdesaan dalam hal sumber air minum bukan leding tahun 2006-2008 (Gambar 3.3).

Persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum bukan leding untuk daerah perdesaan masih cukup besar, yaitu di atas 90%, kecuali di tahun 2006. Persentase tertinggi di tahun 2007 sebesar 91,10%. Hal ini bisa dilihat pada Gambar 3.3, dimana persentase daerah perdesaan masih diatas perkotaan. Laju penurunan persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum bukan leding di perkotaan dari tahun 2006 ke 2008 sebesar 6,96%.

Gambar 3.3 Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bukan Leding Menurut Provinsi, Tahun 2006 – 2008



Sumber : http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=29¬ab=7

Perusahaan Air Bersih adalah perusahaan yang mempunyai aktivitas dalam penampungan, penjernihan, dan penyaluran air baku atau air bersih dari terminal air melalui saluran air, pipa atau mobil tangki (dalam satu



pengelolaan administrasi dengan kegiatan ekonomi) kepada rumah tangga, perusahaan industri, atau pengguna komersial lainnya. Sumber air untuk minum mencakup sumber air bersih untuk keperluan minum sebagian besar penduduk. Sumber air yang baik untuk minum berasal dari PAM/ PDAM. Adapun air leding adalah sumber air yang berasal dari air yang telah diproses menjadi jernih sebelum dialirkan kepada konsumen melalui instalasi berupa saluran air. Sumber air ini diusahakan oleh PAM/ PDAM.

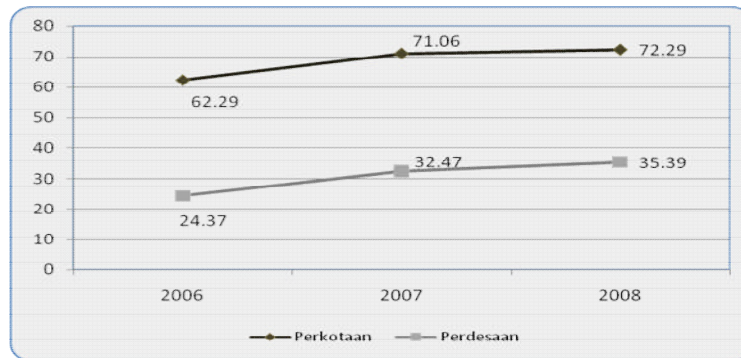
Persentase sumber air minum di rumah tangga Indonesia tahun 2008 paling besar adalah yang mengkonsumsi sumber dari Sumur Terlindung (28,60%), terutama di Provinsi Gorontalo (54,72%). Sumber air yang berkurang peminatnya adalah Lainnya, yaitu sebesar 0,38%. Untuk air leding menempati urutan ketiga setelah pompa (17,06%), yaitu sebesar 15,03% (Tabel 3.12).

Indikator penting Perusahaan Air Minum (PAM), antara lain Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja, Pengeluaran untuk Tenaga Kerja, Air Bersih yang diproduksi dan yang didistribusikan, Biaya Input, serta Nilai Output, untuk rincian dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 terdapat di Tabel 3.13.

Untuk menggambarkan keadaan lingkungan, disajikan beberapa indikator kesejahteraan diantaranya bidang sanitasi dan air bersih, seperti : Persentase rumah terhadap akses air bersih, persentase rumah tangga dengan sumber air minum dari leding, dan persentase rumah tangga menurut kepemilikan fasilitas buang air besar. Kepemilikan fasilitas tempat buang air besar tiap rumah tangga terdiri atas : milik sendiri, milik bersama, umum, dan tidak ada. Pada tahun 2008 persentase rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar masih cukup besar, sebesar 21,14% (Tabel 3.14).

Pada wilayah perdesaan didapatkan rumah tangga yang menggunakan tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki masih lebih kecil persentasenya dibanding wilayah perkotaan dari tahun 2006-2008 (Gambar 3.4).

Gambar 3.4 Persentase Rumah Tangga dengan Tempat Pembuangan Berupa Tinja Tangki Menurut Provinsi, Tahun 2006 – 2008



Sumber : http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=29¬ab=31

Selain tempat pembuangan akhir berupa tinja tangki, diperoleh informasi fasilitas tempat buang air besar sendiri dari suatu rumahtangga yang terlihat pada Gambar 3.5. Jika dilihat dari fasilitas tempat pembuangan air besar sendiri, maka sebagian besar rumahtangga di perkotaan pada rentang tahun 2006 sampai 2008 mencapai persentase lebih tinggi daripada di perdesaan.

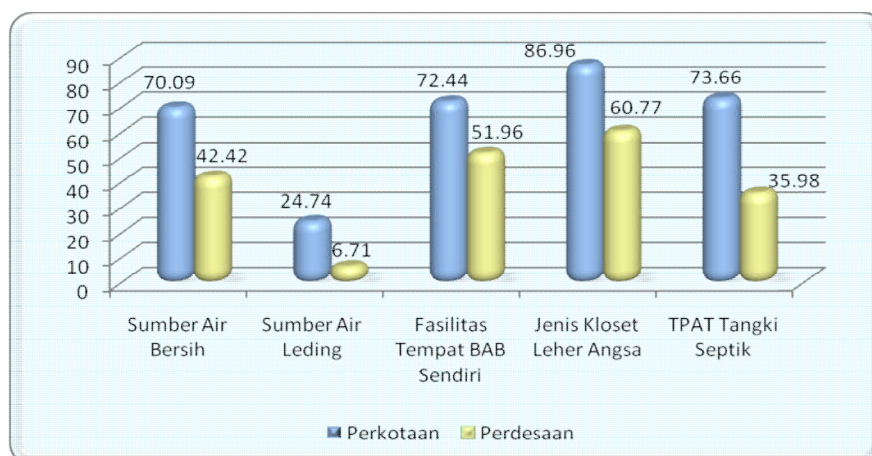
Gambar 3.5 Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Buang Air Besar Sendiri Menurut Provinsi, Tahun 2006 – 2008



Sumber : http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=29¬ab=18

Indikator kesejahteraan terdiri dari beberapa sektor, diantaranya pendidikan, kesehatan, ekonomi, angkatan kerja, perumahan, serta sanitasi dan air bersih. Untuk sektor sanitasi dan air bersih, terdiri atas persentase rumah tangga menggunakan air bersih, persentase rumah tangga mempunyai sumber air leding, dan persentase rumah tangga mempunyai tempat buang air besar yang layak. Untuk lebih lengkapnya, Gambar 3.6 berikut menunjukkan persentase rumah tangga menurut beberapa fasilitas perumahan di Indonesia tahun 2008.

Gambar 3.6 Persentase Rumah Tangga menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Indonesia, Tahun 2008



Sumber : BPS, Susenas 2008

3.5 Bencana Alam

Bencana alam dapat menyebabkan terjadinya gangguan lingkungan hidup, dimana air, tanah, udara, flora dan fauna akan berubah baik langsung maupun tidak langsung yang membahayakan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan makhluk hidup, dan biasanya terjadi dalam waktu yang lama. Selain itu perubahan lingkungan hidup bisa terjadi karena adanya polusi atau kerusakan yang disebabkan oleh manusia sendiri. Bencana alam juga dapat menimbulkan masalah sosial. Gangguan seperti ini bisa terjadi dengan sendirinya (alami) atau disebabkan oleh aktivitas manusia.



Banjir merupakan jenis bencana alam yang paling besar menelan korban manusia, baik yang luka dan menderita, maupun yang meninggal dunia. Persentase total kejadian bencana geologi (gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi) masing-masing relatif kecil. Namun demikian bencana ini telah menimbulkan kerusakan dan korban jiwa yang besar, terutama gempa bumi di DI Yogyakarta dan Jawa Tengah serta Tsunami di pantai selatan Jawa tahun 2006.

Pada Tabel 3.15.1 sampai dengan Tabel 3.15.2 menunjukkan rekapitulasi kejadian bencana alam dari bulan November tahun 2009 sampai dengan bulan April tahun 2010. Untuk hal kejadian (frekuensi terjadi bencana alam), jumlah orang meninggal, hilang, dan mengungsi tiap periodenya mengalami kenaikan, terutama untuk jumlah pengungsi. Sedangkan lokasi yang tergenang, seperti permukiman, rumah, fasilitas umum (fasum), jalan, jembatan, sawah, perkebunan, dan perikanan, telah mengalami kenaikan dari akhir tahun 2009 hingga April 2010 yang lalu. Demikian halnya untuk bangunan yang rusak/ roboh/ hanyut, yang meliputi rumah, fasum, jalan, jembatan, bendung, saluran, tanggul, dan bangunan SDA juga mengalami kenaikan pada periode waktu itu. Dari kedua tabel tersebut, terlihat dari tidak ada permukiman yang tergenang periode November sampai Desember 2009, menjadi ada 724 Ha permukiman yang tergenang periode November 2009 sampai April 2010. Selain itu dari tidak ada bendung, bangunan SDA, dan saluran yang rusak/ roboh/ hanyut periode November sampai Desember 2009 menjadi ada 2 bendung, 16 bangunan SDA, dan 330 m saluran yang rusak/ roboh/ hanyut pada periode November 2009 sampai April 2010.

Tabel 3.1
Jumlah Perusahaan Konstruksi Menurut Provinsi dan Jenis Golongan
Tahun 2007 dan 2008

No.	Provinsi	Kecil		Menengah		Besar		Jumlah	
		2007	2008 [*]	2007	2008 [*]	2007	2008 [*]	2007	2008 [*]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nanggroe Aceh Darussalam	998	3.554	138	671	16	21	1.152	4.246
2	Sumatera Utara	3.365	5.603	318	467	25	24	3.708	6.094
3	Sumatera Barat	2.841	3.704	180	216	8	9	3.029	3.929
4	Riau	2.914	4.184	551	628	34	41	3.499	4.853
5	Kep Riau	906	1.173	181	205	2	1	1.089	1.379
6	Jambi	1.904	2.536	155	187	7	9	2.066	2.732
7	Sumatera Selatan	1.565	2.564	301	428	22	22	1.888	3.014
8	Bangka Belitung	717	734	58	63	2	3	777	800
9	Bengkulu	777	906	51	56	-	1	828	963
10	Lampung	1.758	2.023	173	203	5	8	1.936	2.234
11	DKI Jakarta	2.900	3.744	1.180	1.612	240	293	4.320	5.649
12	Jawa Barat	6.266	8.841	528	755	32	42	6.826	9.638
13	Banten	1.491	1.949	153	202	5	8	1.649	2.159
14	Jawa Tengah	7.626	9.314	509	665	26	29	8.161	10.008
15	DI. Yogyakarta	775	998	85	97	2	3	862	1.098
16	Jawa Timur	10.686	14.378	596	747	61	76	11.343	15.201
17	Bali	1.372	2.003	119	133	6	6	1.497	2.142
18	Nusa Tenggara Barat	1.704	1.902	114	111	5	5	1.823	2.018
19	Nusa Tenggara Timur	1.316	3.334	152	261	1	1	1.469	3.596
20	Kalimantan Barat	3.150	3.983	348	405	5	5	3.503	4.393
21	Kalimantan Tengah	1.330	2.700	199	287	3	8	1.532	2.995
22	Kalimantan Selatan	1.783	3.024	200	286	5	7	1.988	3.317
23	Kalimantan Timur	2.377	4.605	433	860	78	84	2.888	5.549
24	Sulawesi Utara	1.435	1.948	250	276	10	10	1.695	2.234
25	Gorontalo	549	988	54	76	4	4	607	1.068
26	Sulawesi Tengah	1.442	2.161	117	155	1	2	1.560	2.318
27	Sulawesi Selatan	5.086	6.467	353	464	26	31	5.465	6.962
28	Sulawesi Barat	387	1.201	12	39	2	2	401	1.242
29	Sulawesi Tenggara	1.372	1.917	109	182	1	2	1.482	2.101
30	Maluku	1.439	1.875	167	210	10	12	1.616	2.097
31	Maluku Utara	1.340	1.409	76	87	3	5	1.419	1.501
32	Papua	1.465	1.713	304	315	20	19	1.789	2.047
33	Papua Barat	28	339		91	3	7	31	437
Indonesia		75.064	107.774	8.164	11.440	670	800	83.898	120.014

Sumber : Statistik Indonesia 2009 (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi)

Catatan : * Angka Sementara

Tabel 3.2
Nilai Konstruksi yang Diselesaikan Menurut Provinsi dan Jenis Pekerjaan (juta rupiah)
Tahun 2007 dan 2008

No.	Provinsi	Konstruksi Bangunan Gedung		Konstruksi Bangunan Sipil		Instalasi Bangunan dan Sipil		Konstruksi Khusus		Jumlah	
		2007	2008 ^e	2007	2008 ^e	2007	2008 ^e	2007	2008 ^e	2007	2008 ^e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Nanggroe Aceh Darussalam	765.361	740.735	500.592	267.898	19.987	104.560	115.020	149.830	1.400.960	1.263.024
2	Sumatera Utara	1.434.831	1.638.627	1.874.638	2.058.155	242.742	65.438	777.754	925.823	4.329.965	4.688.044
3	Sumatera Barat	399.234	536.443	720.492	551.711	144.222	43.739	343.470	370.418	1.607.418	1.502.311
4	Riau	930.141	1.322.453	698.291	886.030	1.192.267	494.931	37.972	212.183	2.858.671	2.915.596
5	Kep Riau	229.532	834.697	753.926	457.458	156.427	32.885	39.686	152.127	1.179.571	1.477.167
6	Jambi	391.433	482.379	744.346	544.142	107.085	179.655	99.439	120.060	1.342.303	1.326.236
7	Sumatera Selatan	425.313	516.320	1.643.393	1.078.680	54.589	110.289	105.696	235.791	2.228.991	1.941.080
8	Bangka Belitung	43.698	71.312	294.475	62.302	11.897	23.829	56.375	100.116	406.444	257.559
9	Bengkulu	83.122	101.296	151.799	129.010	13.977	45.559	52.955	26.969	301.852	302.833
10	Lampung	653.037	613.994	357.214	314.870	7.093	48.047	449.578	324.625	1.466.922	1.301.536
11	DKI Jakarta	7.768.240	13.582.459	868.834	3.199.978	320.326	1.762.410	7.975.440	4.094.049	16.932.841	22.638.897
12	Jawa Barat	6.482.918	7.773.145	5.742.806	5.352.694	1.078.853	2.056.904	2.134.212	3.057.003	15.438.789	18.239.746
13	Banten	676.033	1.045.478	1.112.755	341.357	45.680	200.640	239.176	263.772	2.073.643	1.851.247
14	Jawa Tengah	2.485.661	2.760.216	1.584.368	2.197.651	440.768	700.366	1.364.255	1.742.644	5.875.052	7.400.877
15	DI. Yogyakarta	1.129.863	1.461.020	64.665	378.573	6.965	51.541	34.904	162.487	1.236.397	2.053.621
16	Jawa Timur	5.298.648	3.751.162	303.949	2.106.387	226.146	601.182	111.308	780.481	5.940.052	7.239.212
17	Bali	561.078	878.602	190.811	218.417	41.656	233.497	142.894	217.141	936.440	1.547.657
18	Nusa Tenggara Barat	120.656	153.061	117.317	153.182	2.405	32.246	157.089	128.349	397.467	466.837
19	Nusa Tenggara Timur	81.716	152.032	612.781	604.236	16.374	122.038	156.136	239.889	867.007	1.118.196
20	Kalimantan Barat	199.504	236.959	639.318	738.067	264.408	390.147	271.641	217.302	1.374.871	1.582.475
21	Kalimantan Tengah	59.199	61.284	272.226	448.652	2.813	3.645	41.023	17.666	375.261	531.248
22	Kalimantan Selatan	643.207	867.874	579.522	546.974	16.508	100.460	293.845	370.436	1.533.083	1.885.744
23	Kalimantan Timur	988.592	1.066.311	1.661.306	1.063.100	505.862	630.384	753.716	840.493	3.909.476	3.600.288

Lanjutan Tabel 3.2

No.	Provinsi	Konstruksi Bangunan Gedung		Konstruksi Bangunan Sipil		Instalasi Bangunan dan Sipil		Konstruksi Khusus		Jumlah	
		2007	2008 ^e	2007	2008 ^e	2007	2008 ^e	2007	2008 ^e	2007	2008 ^e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Sulawesi Utara	104.802	113.930	115.194	26.677	7.802	2.227	124.373	149.870	352.172	292.703
25	Gorontalo	90.778	114.710	250.354	235.099	8.000	25.646	268.973	69.092	618.105	444.547
26	Sulawesi Tengah	238.110	236.667	250.595	252.266	21.004	75.877	111.004	280.382	620.712	845.192
27	Sulawesi Selatan	669.535	1.059.785	737.803	975.250	187.948	188.612	533.227	323.200	2.128.514	2.546.847
28	Sulawesi Barat	79.450	119.327	166.363	142.963	4.941	34.918	12.454	87.978	263.208	385.186
29	Sulawesi Tenggara	257.259	63.826	288.909	210.765	874	1.845	35.255	142.656	582.298	419.092
30	Maluku	380.071	216.007	76.275	153.178	7.488	38.140	1.994	109.814	465.828	517.139
31	Maluku Utara	92.764	248.955	285.908	139.214	4.292	3.467	8.321	66.752	391.285	458.388
32	Papua	666.644	563.723	610.165	604.137	1.494	69.712	15.505	926.473	1.293.808	2.164.045
33	Papua Barat	181.826	290.602	328.181	679.102	21.474	95.956	414.084	110.195	945.566	1.175.855
Indonesia		34.612.257	43.675.390	24.599.573	27.118.176	3.323.651	8.570.793	17.278.776	17.016.065	81.674.973	96.380.423

Sumber : Statistik Indonesia 2009 (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi)

Catatan : * Angka Perkiraan

1. Konstruksi Bangunan Gedung mencakup konstruksi gedung tempat tinggal, perkantoran, gedung industri, gedung perbelanjaan, gedung kesehatan, gedung pendidikan, penginapan, gedung tempat hiburan, dan konstruksi gedung lainnya
2. Konstruksi Bangunan Sipil mencakup pembangunan jalan, jembatan dan landasan, jalan dan jembatan kereta api, terowongan, bangunan pengairan, pengolahan, penyaluran dan penampungan barang minyak dan gas, bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan barang minyak dan gas, bangunan dermaga, dan bangunan sipil lainnya
3. Instalasi Bangunan dan Sipil, mencakup pemasangan instalasi air (*plumbing*), instalasi listrik, telekomunikasi, gas, elektronika, mekanikal, AC, dan instalasi pada gedung, termasuk reparasinya, mencakup pemasangan instalasi listrik bangunan sipil, navigasi laut dan sungai, meteorologi dan geofisika, navigasi udara, sinyal dan telekomunikasi kereta api, sinyal dan rambu-rambu jalan raya, instalasi telekomunikasi, jaringan pipa, dan instalasi bangunan sipil lainnya, termasuk reparasinya
4. Konstruksi Khusus mencakup pemasangan pondasi dan pilar, pembuatan/ pengeboran sumur air tanah, pemasangan perancah (*steiger*), pemasangan atap (*roof covering*), pemasangan bangunan konstruksi (*prefab*) dan pemasangan kerangka baja, pengerukan, dan konstruksi khusus lainnya.

Tabel 3.3
Luas Panen Padi Menurut Provinsi
Tahun 2005-2009, (Ha)

No	Provinsi	2005	2006	2007	2008	2009 ¹⁾
1	2	3	4	5	6	7
1	Nanggroe Aceh Darussalam	337.893	320.789	360.717	362.489	356.705
2	Sumatera Utara	822.073	705.023	750.232	748.540	772.927
3	Sumatera Barat	426.950	417.846	423.655	435.778	436.086
4	Riau	134.418	136.177	147.167	147.796	161.735
5	Kepulauan Riau	107	116	117	134	149
6	Jambi	154.941	140.613	149.888	143.034	153.990
7	Sumatera Selatan	626.849	646.927	691.467	718.797	742.129
8	Kepulauan Bangka Belitung	6.691	5.741	9.010	9.554	7.182
9	Bengkulu	116.818	100.991	123.853	127.506	125.110
10	Lampung	496.538	494.102	524.955	511.159	547.040
11	D.K.I. Jakarta	2.668	1.323	1.544	1.640	1.660
12	Jawa Barat	1.894.796	1.798.260	1.829.085	1.803.628	1.873.318
13	Banten	374.755	348.414	356.803	362.637	367.507
14	Jawa Tengah	1.611.107	1.672.315	1.614.098	1.659.314	1.683.897
15	D.I Yogyakarta	130.973	132.374	133.369	140.167	146.082
16	Jawa Timur	1.693.651	1.750.903	1.736.048	1.774.884	1.837.004
17	Bali	142.356	150.557	145.030	141.815	144.288
18	Nusa Tenggara Barat	300.394	341.418	331.916	353.364	372.974
19	Nusa Tenggara Timur	162.539	173.208	166.753	187.835	194.611
20	Kalimantan Barat	352.305	378.042	399.832	423.601	405.317
21	Kalimantan Tengah	203.595	202.664	229.665	202.505	204.555
22	Kalimantan Selatan	459.541	462.672	505.846	506.580	504.527
23	Kalimantan Timur	140.996	150.549	155.484	157.341	153.100
24	Sulawesi Utara	94.944	94.717	103.189	109.951	114.217
25	Gorontalo	39.110	43.953	44.548	44.646	46.213
26	Sulawesi Tengah	175.489	179.078	204.342	211.876	220.195
27	Sulawesi Selatan	730.611	719.846	770.733	802.128	840.853
28	Sulawesi Barat	59.767	64.462	66.630	66.887	72.337
29	Sulawesi Tenggara	91.585	93.826	110.498	102.520	107.453
30	Maluku	11.341	13.866	15.352	18.353	20.234
31	Maluku Utara	16.953	17.355	14.497	13.164	13.606
32	Papua	18.483	19.898	22.957	24.461	30.004
33	Papua Barat	7.823	8.405	8.357	9.089	11.984
	Indonesia	11.839.060	11.786.430	12.147.637	12.323.173	12.668.989

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2009 (Diolah dari Hasil Laporan Statistik Pertanian Tanaman Pangan, BPS)

Catatan : 1) Angka Ramalan II

Tabel 3.4
Luas Lahan Sawah Menurut Jenis Pengairan dan Provinsi
Tahun 2005, (Ha)

No	Provinsi	Irigasi			Tadah Hujan	Pasang Surut	Lainnya	Jumlah
		Teknis	Setengah Teknis	Sederhana				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nanggroe Aceh Darussalam	68.391	58.415	108.340	130.519	1.308	110	367.083
2	Sumatera Utara	74.163	78.215	232.311	168.532	7.860	14.168	575.249
3	Sumatera Barat	30.126	60.622	90.453	46.901	250	9.510	237.862
4	Riau	50	10.614	6.709	61.199	37.627	3.356	119.555
5	Kepulauan Riau	95	-	129	468	-	-	692
6	Jambi	3.349	9.129	19.534	20.720	92.230	16.251	161.213
7	Sumatera Selatan	31.906	12.514	11.445	83.680	153.876	190.786	484.207
8	Kepulauan Bangka Belitung	500	1.080	1.602	594	100	235	4.111
9	Bengkulu	15.869	18.173	19.655	14.542	160	8.954	77.353
10	Lampung	103.076	22.818	37.877	88.338	30.820	30.388	313.317
11	D.K.I. Jakarta	510	782	582	370	-	-	2.244
12	Jawa Barat	376.718	119.407	250.525	168.998	13	2.064	917.725
13	Banten	51.908	18.217	46.030	78.237	-	112	194.504
14	Jawa Tengah	382.569	120.113	188.227	274.325	638	1.936	967.808
15	D.I Yogyakarta	18.493	22.630	6.742	9.305	-	18	57.188
16	Jawa Timur	641.001	110.435	109.866	232.397	8	2.370	1.096.077
17	Bali	-	67.555	12.064	586	-	6	80.211
18	Nusa Tenggara Barat	78.154	74.478	38.477	34.371	-	228	225.708
19	Nusa Tenggara Timur	14.096	26.761	41.220	33.465	-	54	115.596
20	Kalimantan Barat	227	11.793	61.610	110.883	81.302	8.847	274.662
21	Kalimantan Tengah	5.041	8.138	32.107	45.321	67.581	5.313	163.501
22	Kalimantan Selatan	17.039	5.261	23.719	140.948	155.760	91.137	433.864
23	Kalimantan Timur	2.583	5.086	20.946	68.000	26.429	848	123.892
24	Sulawesi Utara	18.001	16.144	13.607	10.097	50	70	57.969
25	Gorontalo	12.607	5.048	2.689	6.558	-	196	27.098
26	Sulawesi Tengah	49.067	32.441	28.241	7.540	255	171	117.715
27	Sulawesi Selatan	153.659	55.508	131.325	227.241	1.015	-	568.748
28	Sulawesi Barat	11.366	2.154	17.087	16.694	113	-	47.414
29	Sulawesi Tenggara	25.318	16.914	23.115	7.793	151	21	73.312
Indonesia ¹		2.185.882	990.445	1.576.234	2.088.622	657.546	387.149	7.885.878

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2009 (Diolah dari Hasil Laporan Statistik Pertanian Tanaman Pangan, BPS)

Catatan : 1) Tidak termasuk Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat karena data tidak tersedia

Tabel 3.5
Jumlah Kendaraan Bermotor menurut Provinsi dan Jenis Kendaraan
Tahun 2005 - 2007, (Unit)

No	Provinsi	Akhir Tahun	Mobil Penumpang	Bis	Truk	Sepeda Motor	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nanggroe Aceh D	2005	63.254	33.884	54.371	634.188	785.697
		2006	68.984	39.656	57.563	696.874	863.077
		2007	86.801	51.812	87.856	1.235.894	1.462.363
2	Sumatera Utara	2005	367.452	32.340	157.031	1.729.262	2.286.085
		2006	406.101	37.420	166.879	2.014.975	2.625.375
		2007	442.533	54.311	175.672	2.389.981	3.062.497
3	Sumatera Barat	2005	35.765	69.245	75.520	501.920	682.450
		2006	39.975	73.116	75.520	653.487	842.098
		2007	44.689	77.809	123.645	887.982	1.134.125
4	Riau	2005	139.689	41.029	69.520	704.423	954.661
		2006	208.877	42.297	90.147	828.824	1.170.145
		2007	292.082	43.399	111.523	950.473	1.397.477
5	Kep. Riau	2005	38.360	8.065	18.439	313.307	378.171
		2006	75.199	11.976	25.591	344.578	457.344
		2007	75.465	6.252	25.699	378.691	486.107
6	Jambi	2005	45.829	14.419	49.022	516.671	625.941
		2006	57.989	19.851	72.047	719.461	869.348
		2007	77.461	26.238	129.921	1.201.362	1.434.982
7	Sumatera Selatan	2005	150.733	28.477	76.599	508.150	763.959
		2006	218.782	38.223	83.312	663.154	1.003.471
		2007	301.955	63.891	99.861	850.639	1.316.346
8	Kep. Bangka Belitung	2005	8.432	16.951	14.312	199.813	239.508
		2006	8.623	18.144	14.312	204.712	245.791
		2007	8.961	17.231	31.170	311.712	369.074
9	Bengkulu	2005	16.609	1.248	20.810	146.943	185.610
		2006	19.891	2.265	26.940	203.289	252.385
		2007	28.672	3.764	39.372	398.511	470.319
10	Lampung	2005	61.501	6.356	56.477	549.514	673.848
		2006	68.055	9.943	60.610	687.563	826.171
		2007	73.272	14.782	66.396	921.521	1.075.971
11	DKI Jakarta	2005	1.937.396	490.532	644.054	5.343.211	8.415.193
		2006	2.127.535	590.384	802.198	5.359.956	8.880.073
		2007	3.592.132	788.996	1.247.734	5.972.862	11.601.724
12	Jawa Barat	2005	438.310	117.177	319.494	1.415.801	2.290.782
		2006	466.117	129.547	373.703	1.481.789	2.451.156
		2007	495.295	150.242	451.372	1.991.862	3.088.771
13	Banten	2005	25.452	15.670	17.420	282.193	340.735
		2006	26.364	17.044	17.420	357.867	418.695
		2007	51.369	18.562	26.897	512.632	609.460
14	Jawa Tengah	2005	205.404	37.751	330.628	5.069.421	5.643.204
		2006	259.422	43.388	373.750	6.022.584	6.699.144
		2007	309.235	63.941	399.273	6.785.135	7.557.584
15	DI Yogyakarta	2005	104.584	14.505	50.059	949.715	1.118.863
		2006	128.702	19.991	65.462	1.132.314	1.346.469
		2007	194.272	36.921	84.572	1.901.862	2.217.627

Lanjutan Tabel 3.5

No	Provinsi	Akhir Tahun	Mobil Penumpang	Bis	Truk	Sepeda Motor	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Jawa Timur	2005	721.013	17.084	330.929	4.729.983	5.799.009
		2006	887.000	20.098	373.647	5.183.133	6.463.878
		2007	899.997	25.618	409.371	7.592.152	8.927.138
17	Bali	2005	340.333	13.216	99.729	1.117.609	1.570.887
		2006	451.782	16.164	133.344	1.245.717	1.847.007
		2007	479.721	19.865	208.981	1.561.844	2.270.411
18	Nusa Tenggara Barat	2005	30.538	10.407	26.034	305.804	372.783
		2006	43.987	18.059	33.282	407.142	502.470
		2007	59.994	28.861	55.981	533.741	678.577
19	Nusa Tenggara Timur	2005	34.260	18.794	9.878	110.511	173.443
		2006	54.453	26.948	13.802	157.192	252.395
		2007	95.701	47.998	18.379	216.403	378.481
20	Kalimantan Barat	2005	82.704	8.253	44.370	535.309	670.636
		2006	138.549	12.644	63.270	664.921	879.384
		2007	218.351	30.382	113.992	799.792	1.162.517
21	Kalimantan Tengah	2005	52.979	8.894	23.812	234.882	320.567
		2006	87.757	21.317	37.471	286.974	433.519
		2007	134.807	44.819	67.861	399.982	647.469
22	Kalimantan Selatan	2005	79.930	20.243	63.539	586.206	749.918
		2006	104.387	38.278	85.179	692.724	920.568
		2007	130.773	65.411	144.592	898.861	1.239.637
23	Kalimantan Timur	2005	89.489	21.770	114.255	642.953	868.467
		2006	118.986	48.229	162.645	800.908	1.130.768
		2007	176.995	73.477	226.152	991.512	1.468.136
24	Sulawesi Utara	2005	33.599	24.527	26.739	162.113	246.978
		2006	39.738	42.958	30.192	231.795	344.683
		2007	54.981	69.179	39.181	324.477	487.818
25	Gorontalo	2005	4.492	652	4.904	55.141	65.189
		2006	4.892	6.576	5.201	55.141	71.810
		2007	25.777	11.216	5.300	70.251	112.544
26	Sulawesi Tengah	2005	85.678	22.228	49.561	398.418	555.885
		2006	118.684	30.032	63.981	512.835	725.532
		2007	120.564	42.921	100.742	669.999	934.226
27	Sulawesi Selatan ¹⁾	2005	175.055	46.974	108.143	364.471	694.643
		2006	231.979	73.668	160.874	413.297	879.818
		2007	231.987	108.005	256.982	465.594	1.062.568
28	Sulawesi Tenggara	2005	7.575	26.522	14.893	72.449	121.439
		2006	10.260	42.765	20.724	72.449	146.198
		2007	13.372	84.001	36.367	107.543	241.283
29	Maluku	2005	28.072	4.141	15.855	101.870	149.938
		2006	28.983	4.141	15.855	126.595	175.574
		2007	29.824	8.228	15.855	178.612	232.519
30	Maluku Utara	2005	75	21	136	553	785
		2006	88	26	208	648	970
		2007	161	138	239	996	1.534
31	Papua ²⁾	2005	20.285	12.275	13.668	149.292	195.520
		2006	29.760	14.879	15.295	177.961	237.895
		2007	42.708	21.972	18.241	299.881	382.802
Indonesia	2005	5.494.035	1.184.918	2.920.828	28.556.497	38.156.278	
	2006	6.615.106	1.511.129	3.541.800	32.522.508	44.190.543	
	2007	8.864.961	2.101.362	4.845.937	41.935.248	57.747.508	

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2009 (Kepolisian Republik Indonesia)

Catatan : ¹⁾ Termasuk Sulawesi Barat²⁾ Termasuk Papua Barat

Tabel 3.6
Permukiman Kumuh di Indonesia
Tahun 2008

No	Provinsi	Kualitas Permukiman (desa/kelurahan)		Jumlah Permukiman Kumuh		
		Kumuh	Tidak Kumuh	Lokasi (Lok.)	Bang. Rumah (Unit)	Keluarga (Kel.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Nanggroe Aceh Darussalam	144	6.280	299	4.959	5.857
2	Sumatera Utara	357	5.410	898	46.570	51.287
3	Sumatera Barat	34	890	79	2.575	2.972
4	Riau	60	1.544	143	7.543	8.438
5	Jambi	48	1.255	128	3.600	3.771
6	Sumatera Selatan	202	2.877	619	21.958	31.523
7	Bengkulu	26	1.325	123	3.837	4.233
8	Lampung	77	2.262	155	8.809	11.986
9	Kep. Bangka Belitung	8	336	16	563	590
10	Kep. Riau	56	270	118	7.741	8.981
	Sumatera	1.012	22.449	2.578	108.155	129.638
11	D.K.I Jakarta	175	92	580	86.417	121.884
12	Jawa Barat	831	5.040	2.848	88.879	109.716
13	Jawa Tengah	381	8.193	1.048	31.076	38.553
14	D.I Yogyakarta	16	422	37	398	565
15	Jawa Timur	201	8.304	496	15.867	19.414
16	Banten	180	1.324	596	19.748	21.220
17	Bali	33	679	65	1.357	2.248
	Jawa dan Bali	1.817	24.054	5.670	243.742	313.600
18	Nusa Tenggara Barat	60	853	166	9.083	10.527
19	Nusa Tenggara Timur	45	2.758	109	3.403	4.447
	Nusa Tenggara	105	3.611	275	12.486	14.974
20	Kalimantan Barat	171	1.620	345	10.432	12.241
21	Kalimantan Tengah	60	1.388	111	6.195	9.380
22	Kalimantan Selatan	6	1.968	8	157	246
23	Kalimantan Timur	129	1.288	312	12.041	15.622
	Kalimantan	366	6.264	776	28.825	37.489
24	Sulawesi Utara	102	1.392	159	4.951	5.533
25	Sulawesi Tengah	11	1.675	24	614	860
26	Sulawesi Selatan	326	2.620	797	27.287	35.726
27	Sulawesi Tenggara	0	2.028	0	0	0
28	Gorontalo	0	584	0	0	0
29	Sulawesi Barat	18	518	60	1.316	1.574
	Sulawesi	457	8.817	1.040		43.693
30	Maluku	30	876	92	1.382	1.842
31	Maluku Utara	19	1017	26	574	651
	Maluku	49	1.893	118	1.956	2.493
32	Papua Barat	13	1192	21	673	944
33	Papua	62	3249	100	3.801	5.708
	Papua	75	4.441	121	4.474	6.652
	Indonesia	3.881	71.529	10.578	399.638	548.539

Sumber : BPS, Potensi Desa 2008

Tabel 3.7
Banyaknya Stok Akhir Rumah¹ yang Dibangun oleh Perum Perumnas (unit)
Tahun 2008

No.	Provinsi	Stok Awal	Pembangunan	Persediaan	Penjualan	Stok Akhir
1	2	3	4	5	6	7
1	Nanggroe Aceh Darussalam	67	-	67	67	-
2	Sumatera Utara	380	648	1.028	750	278
3	Sumatera Barat	21	-	21	38	-17
4	Riau	95	96	191	115	76
5	Kep Riau	44	89	133	137	-4
6	Jambi	118	41	159	74	85
7	Sumatera Selatan	24	100	124	265	-141
8	Bangka Belitung	3	-	3	0	3
9	Bengkulu	19	150	169	112	57
10	Lampung	39	59	98	170	-72
11	DKI Jakarta	42	915	957	248	709
12	Jawa Barat	837	757	1.594	1.316	278
13	Banten	40	25	65	28	37
14	Jawa Tengah	290	636	926	758	168
15	DI. Yogyakarta	14	52	66	59	7
16	Jawa Timur	328	987	1.315	1.069	246
17	Bali	3	-	3	0	3
18	Nusa Tenggara Barat	7	81	88	81	7
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	76	50	126	91	35
21	Kalimantan Tengah	65	20	85	80	5
22	Kalimantan Selatan	31	23	54	50	4
23	Kalimantan Timur	41	59	100	148	-48
24	Sulawesi Utara	37	25	62	53	9
25	Gorontalo	10	20	30	25	5
26	Sulawesi Tengah	345	-	345	54	291
27	Sulawesi Selatan	354	276	630	407	223
28	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	3	36	39	37	2
30	Maluku	29	10	39	35	4
31	Maluku Utara	-	-	-	-	-
32	Papua	95	61	156	41	115
33	Papua Barat	-	-	-	-	-
Indonesia		3.457	5.216	8.673	6.308	2.365

Sumber : Statistik Indonesia 2009 (Perum Perumnas)

Catatan : ¹ Mencakup rumah sederhana sehat, rumah sederhana, rumah inti, rumah toko, dan rumah susun sewa

Angka negatif menunjukkan bahwa status bangunan masih dalam pelaksanaan dan belum siap huni

Tabel 3.8
Jumlah Pembangunan Rumah oleh Perum Perumnas Menurut Jenis Rumah (unit)
Tahun 2008

No.	Provinsi	Rumah Sederhana Sehat	Rumah Sederhana	Rumah Inti	Rumah Toko	Rumah Susun Sewa	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nanggroe Aceh Darussalam	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	580	68	-	-	-	648
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-
4	Riau	91	5	-	-	-	96
5	Kep Riau	4	85	-	-	-	89
6	Jambi	41	-	-	-	-	41
7	Sumatera Selatan	94	6	-	-	-	100
8	Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-
9	Bengkulu	148	2	-	-	-	150
10	Lampung	5	54	-	-	-	59
11	DKI Jakarta	-	110	-	-	805	915
12	Jawa Barat	426	199	132	-	-	757
13	Banten	-	10	15	-	-	25
14	Jawa Tengah	553	73	-	10	-	636
15	DI. Yogyakarta	52	-	-	-	-	52
16	Jawa Timur	170	629	188	-	-	987
17	Bali	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	80	1	-	-	-	81
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	50	-	-	-	-	50
21	Kalimantan Tengah	20	-	-	-	-	20
22	Kalimantan Selatan	23	-	-	-	-	23
23	Kalimantan Timur	55	4	-	-	-	59
24	Sulawesi Utara	25	-	-	-	-	25
25	Gorontalo	20	-	-	-	-	20
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	276	-	-	-	-	276
28	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	36	-	-	-	-	36
30	Maluku	10	-	-	-	-	10
31	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-
32	Papua	61	-	-	-	-	61
33	Papua Barat	-	-	-	-	-	-
Indonesia		2.820	1.246	335	10	805	5.216

Sumber : Statistik Indonesia 2009 (Perum Perumnas)

Tabel 3.9
Rencana dan Realisasi Pembangunan Rumah Siap Huni (RSH) oleh Perum Perumnas (unit)
Tahun 2008

No.	Provinsi	Rencana				Realisasi			
		RSS	RS<27	RS>27	Jumlah	RSS	RS<27	RS>27	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nanggroe Aceh Darussalam	136	-	30	166	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	462	-	273	735	580	-	68	648
3	Sumatera Barat	113	-	60	173	-	-	-	-
4	Riau	215	-	38	253	91	-	5	96
5	Kep Riau	310	-	-	310	4	-	85	89
6	Jambi	248	-	11	259	41	-	-	41
7	Sumatera Selatan	205	-	7	212	94	-	6	100
8	Bangka Belitung	77	-	-	77	-	-	-	-
9	Bengkulu	246	-	-	246	148	-	2	150
10	Lampung	69	-	130	199	5	-	54	59
11	DKI Jakarta	-	219	611	830	-	-	915	915
12	Jawa Barat	419	368	435	1.222	426	132	199	757
13	Banten	-	-	-	-	-	15	10	25
14	Jawa Tengah	379	180	250	809	553	10	73	636
15	DI. Yogyakarta	172	-	-	172	52	-	-	52
16	Jawa Timur	783	302	546	1.631	170	188	629	987
17	Bali	-	90	-	90	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	70	-	35	105	80	-	1	81
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	350	-	111	461	50	-	-	50
21	Kalimantan Tengah	50	-	16	66	20	-	-	20
22	Kalimantan Selatan	100	-	20	120	23	-	-	23
23	Kalimantan Timur	-	-	-	-	55	-	4	59
24	Sulawesi Utara	250	-	-	250	25	-	-	25
25	Gorontalo	85	-	-	85	20	-	-	20
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	340	-	238	578	276	-	-	276
28	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	108	-	-	108	10	-	-	36
30	Maluku	44	-	-	44	36	-	-	10
31	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Papua	-	-	100	100	61	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	61
Indonesia		5.231	1.159	2.911	9.301	2.820	345	2.051	5.216

Sumber : Statistik Indonesia 2009 (Perum Perumnas)

Tabel 3.10
Kinerja Pembangunan Perumahan Rakyat,
Tahun 2005 - 2009

Status : 28 Desember 2009

No.	Kegiatan	Satuan	Sasaran RPJMN 2004-2009	Rencana 2005 - 2009					Realisasi Kumulatif 2005 - 2009	
				2005	2006	2007	2008	2009	Total	Prosentase thdp Sasaran RPJMN (%)
				5	6	7	8	9	10	11
I.	Rumah Baru Layak Huni	Unit	1.265.000	159.768	282.408	308.872	325.810	254.722	1.331.580	105,26
a.	RsH Bersubsidi ^{a)}	Unit		63.713	77.663	103.221	120.218	212.783	577.598	
b.	RsH + Rs Non Subsidi	Unit		81.565	111.240	120.700	144.770	39.362	497.637	
c.	Rumah Khusus ^{b)}	Unit		-	539	518	480	2.577	4.114	
d.	Rumah Pasca Bencana ^{c)}	Unit		14.490	92.966	84.433	60.342	-	252.231	
II.	Rumah Susun Sederhana	Unit	85.000	4.762	6.448	8.265	12.076	12.874	44.425	52,26
		(Tower)		50	67	86	105	104	412	
a.	Rusunawa ^{d)}	Unit	60.000	4.762	6.448	8.265	9.443	8.791	37.709	62,85
		(Tower)		50	67	86	98	99	400	
b.	Rusunami dengan peran swasta	Unit	25.000	-	-	-	2.633	4.083	6.716	26,86
		(Tower)					7	5	12	
III.	Perumahan Swadaya ^{e)}	Unit	3.600.000	26.965	219.812	794.168	1.401.795	1.216.297	3.659.037	101,64
a.	Peningkatan Kualitas	Unit	2.092.800	16.840	27.729	55.908	1.189.012	698.711	1.988.200	
b.	Pembangunan Baru	Unit	1.507.200	10.125	192.083	738.260	212.783	517.586	1.670.837	
IV.	Penataan Kawasan	Kawasan Ha ^{f)}	pm	1	9	16	13	9	48	
			10.700	650	2.327	2.723	1.669	813	8.182	76,47

Sumber : Kedepuitan Bidang Perumahan Formal, Kementerian Negara Perumahan Rakyat

Keterangan :

- a) Diluar KPR/ KPRS Mikro Bersubsidi dan Kredit Pemilikan Satuan Rumah Susun Sederhana (KP Sarusuna)
- b) Termasuk pembangunan rumah nelayan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan
- c) Termasuk Rumah Paska Bencana NAD-Nias, rehab Paska Bencana DIY-Jateng, juga yang dilaksanakan oleh Departemen Sosial, TNI, Departemen Pekerjaan Umum, dan Departemen Kelautan Perikanan
- d) Pembanunan Rusunawa berdasarkan APBN Kemenpera, Ditjen Cipta Karya - Dep. PU, dan APBD DKI
- e) Termasuk KPR/ KPRS Mikro Bersubsidi
- f) Dalam RPJMN tidak disebutkan, tetapi dalam Renstra Kemenpera 2005 - 2009 disebutkan sarana penataan kawasan sebesar 10,700 Ha

Tabel 3.11
Kualitas Bangunan Rumah/ Tempat Tinggal Di Indonesia Tahun 2008

No.	Provinsi	Kualitas Bangunan (Unit)		
		Permanen	Semi Permanen	Tidak Permanen
1	2	3	4	5
1	Nanggroe Aceh Darussalam	288.460	244.144	472.558
2	Sumatera Utara	1.074.104	1.010.150	666.579
3	Sumatera Barat	562.102	301.112	182.580
4	Riau	471.782	317.767	355.040
5	Jambi	278.195	199.269	166.548
6	Sumatera Selatan	687.486	416.506	429.231
7	Bengkulu	134.094	143.249	112.065
8	Lampung	729.213	558.221	562.106
9	Bangka Belitung	158.746	73.380	26.813
10	Kepulauan Riau	238.912	55.401	78.334
11	DKI Jakarta	939.609	433.282	160.475
12	Jawa Barat	5.659.988	2.145.811	2.071.682
13	Jawa Tengah	4.040.656	1.984.063	1.924.965
14	DI Yogyakarta	648.900	106.000	79.170
15	Jawa Timur	6.559.874	1.703.727	1.320.492
16	Banten	1.472.126	452.114	380.183
17	Bali	617.963	163.050	54.539
18	Nusa Tenggara Barat	480.834	384.393	310.476
19	Nusa Tenggara Timur	164.133	271.050	504.643
20	Kalimantan Barat	234.919	441.527	272.945
21	Kalimantan Tengah	151.460	253.051	134.016
22	Kalimantan Selatan	200.144	416.765	225.961
23	Kalimantan Timur	291.069	335.650	154.078
24	Sulawesi Utara	148.934	227.545	132.224
25	Sulawesi Tengah	147.436	215.889	205.395
26	Sulawesi Selatan	606.602	706.123	429.978
27	Sulawesi Tenggara	116.388	150.071	193.819
28	Gorontalo	67.814	74.469	58.676
29	Sulawesi Barat	45.105	102.223	107.811
30	Maluku	112.544	94.942	90.092
31	Maluku Utara	43.774	102.085	61.522
32	Irian Jaya Barat	269.884	254.933	265.043
33	Papua	83.398	82.190	384.222
	Indonesia	27.726.648	14.420.152	12.574.261

Sumber : BPS, Podes 2008

Tabel 3.12
Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Sumber Air Minum, 2008

No.	Provinsi	Ledeng	Pompa	Air Dalam Kemasan	Sumur Terlindung	Sumur Tak Terlindung	Mata Air Terlindung	Mata Air Tak Terlindung	Air Sungai	Air Hujan	Lainnya	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nanggroe Aceh Darussalam	8,89	5,25	14,44	41,19	17,99	4,15	3,20	3,31	1,22	0,35	100,00
2	Sumatera Utara	22,26	18,62	5,44	23,47	12,10	6,85	4,89	3,06	2,70	0,60	100,00
3	Sumatera Barat	20,07	7,64	5,86	30,93	13,47	8,70	6,43	3,75	2,58	0,57	100,00
4	Riau	2,16	8,86	19,71	27,83	13,68	0,79	0,66	2,25	23,87	0,17	100,00
5	Kepulauan Riau	18,58	1,92	23,60	27,10	20,46	5,39	1,16	0,20	1,50	0,10	100,00
6	Jambi	17,06	2,33	6,87	30,05	19,62	2,82	0,70	6,76	13,50	0,28	100,00
7	Sumatera Selatan	17,40	2,70	9,28	33,11	16,88	2,14	1,05	10,02	6,93	0,47	100,00
8	Kep. Bangka Belitung	3,07	10,95	16,80	47,29	18,73	1,35	0,88	0,78	0,13	0,03	100,00
9	Bengkulu	12,58	5,21	4,64	20,25	44,55	3,42	5,73	2,88	0,15	0,58	100,00
10	Lampung	3,82	5,71	6,17	45,33	27,40	4,86	4,35	1,17	0,93	0,27	100,00
11	DKI Jakarta	25,28	23,43	49,01	1,28	0,18	0,17	0,00	0,02	0,44	0,19	100,00
12	Jawa Barat	10,83	26,70	12,58	26,04	8,06	9,10	5,59	0,53	0,23	0,34	100,00
13	Banten	8,29	29,79	27,78	16,90	6,94	3,48	3,52	3,05	0,15	0,09	100,00
14	Jawa Tengah	14,85	16,30	4,09	39,97	7,38	12,35	3,61	0,79	0,45	0,21	100,00
15	DI Yogyakarta	10,60	14,21	14,07	44,43	6,90	3,61	3,10	0,16	2,66	0,25	100,00
16	Jawa Timur	14,84	22,00	9,48	34,18	4,91	10,97	2,37	0,23	0,36	0,66	100,00
17	Bali	30,66	6,06	21,12	13,81	1,64	16,84	3,87	1,70	3,72	0,59	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	13,62	9,99	7,29	40,99	9,61	12,70	5,33	0,28	0,10	0,09	100,00
19	Nusa Tenggara Timur	16,83	1,52	1,02	18,51	9,73	28,46	16,14	4,90	2,42	0,48	100,00
20	Kalimantan Barat	7,96	1,98	5,52	4,97	9,18	4,98	4,21	20,25	40,72	0,22	100,00
21	Kalimantan Tengah	14,66	14,14	5,37	13,01	10,54	1,00	0,63	32,86	7,44	0,35	100,00
22	Kalimantan Selatan	35,80	12,41	3,28	10,72	15,82	0,98	0,75	17,60	2,16	0,49	100,00
23	Kalimantan Timur	44,16	4,84	16,19	6,00	7,23	2,12	1,13	9,91	7,78	0,65	100,00
24	Sulawesi Utara	21,97	8,04	14,72	27,67	9,43	13,51	2,93	0,10	1,46	0,17	100,00
25	Gorontalo	14,01	5,84	4,37	54,72	11,18	4,75	2,62	2,50		0,02	100,00
26	Sulawesi Tengah	13,46	14,57	6,35	21,42	8,93	22,62	4,40	6,73	1,18	0,34	100,00
27	Sulawesi Selatan	20,89	17,33	7,10	24,89	12,39	7,39	7,21	1,88	0,62	0,30	100,00
28	Sulawesi Barat	16,13	9,96	3,76	28,84	11,75	8,52	14,37	5,49	1,06	0,13	100,00
29	Sulawesi Tenggara	18,19	6,61	2,31	31,06	14,23	19,61	3,47	1,88	2,16	0,48	100,00
30	Maluku	14,12	9,05	0,86	31,70	11,08	23,31	6,75	1,51	1,48	0,15	100,00
31	Maluku Utara	19,50	1,65	2,41	39,54	17,34	5,66	2,12	6,69	4,74	0,35	100,00
32	Papua	12,14	3,16	6,48	6,89	9,40	10,50	21,92	16,54	11,85	1,12	100,00
33	Papua Barat	12,32	3,11	14,21	10,06	8,91	8,03	13,55	15,73	13,02	1,05	100,00
	Indonesia	15,03	17,06	11,26	28,60	9,48	8,73	4,05	2,75	2,65	0,38	100,00

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2009 (Diolah dari Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS)

Tabel 3.13
Indikator Penting Perusahaan Air Minum (PAM), 2004 - 2008

No.	Rincian	Satuan	2004	2005	2006	2007	2008 ^x
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Perusahaan	Perusahaan	475	524	641 ^r	642	646
2	Jumlah Tenaga Kerja	Orang	45.720	50.533	43,300 ^r	47.880	47.670
3	Pengeluaran Untuk Tenaga Kerja	000 000 Rupiah	755.130	1.018.180	1,327,028 ^r	1.400.092	1.686.041
4	Air Bersih yang Diproduksi	000 000 m ³	2.445	2.876	3.985	2.678	3.560
5	Air Bersih yang Didistribusikan	000 000 m ³	2.144	2.353	3,789 ^r	2.296	3.119
6	Biaya Input	000 000 Rupiah	3.390.902	2.190.751	2.371.264	2.252.117	2.460.952
7	Nilai Output	000 000 Rupiah	4.684.144	6.150.622	6.854.009	7,390,183 ^r	8.257.834

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2009 (Diolah dari Survei Tahunan Perusahaan Air Bersih, BPS)

Catatan : ^r Angka diperbaiki

^x Angka sementara

Tabel 3.14
Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Fasilitas Buang Air Besar, 2008

No.	Provinsi	Sendiri	Bersama	Umum	Tidak Ada	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	Nanggroe Aceh Darussalam	56,05	8,08	8,22	27,64	100,00
2	Sumatera Utara	72,76	6,67	4,03	16,53	100,00
3	Sumatera Barat	51,18	14,09	6,16	28,57	100,00
4	Riau	81,88	6,44	1,20	10,49	100,00
5	Kepulauan Riau	82,54	9,98	1,70	5,78	100,00
6	Jambi	66,24	7,89	3,41	22,45	100,00
7	Sumatera Selatan	63,31	10,46	4,43	21,79	100,00
8	Kep. Bangka Belitung	66,11	5,16	2,89	25,83	100,00
9	Bengkulu	61,16	9,82	2,65	26,37	100,00
10	Lampung	70,19	13,58	1,53	14,70	100,00
11	DKI Jakarta	74,03	19,58	5,73	0,67	100,00
12	Jawa Barat	62,92	14,26	6,75	16,07	100,00
13	Banten	58,66	12,12	2,93	26,30	100,00
14	Jawa Tengah	60,53	13,49	2,88	23,10	100,00
15	DI Yogyakarta	65,67	25,49	0,64	8,20	100,00
16	Jawa Timur	58,42	15,31	1,67	24,60	100,00
17	Bali	63,17	19,88	0,58	16,37	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	37,76	13,83	2,05	46,36	100,00
19	Nusa Tenggara Timur	62,23	11,86	1,50	24,41	100,00
20	Kalimantan Barat	58,67	6,34	3,10	31,90	100,00
21	Kalimantan Tengah	53,29	16,21	8,91	21,58	100,00
22	Kalimantan Selatan	58,56	15,05	6,32	20,07	100,00
23	Kalimantan Timur	77,03	10,49	4,64	7,84	100,00
24	Sulawesi Utara	62,49	18,55	2,47	16,49	100,00
25	Gorontalo	31,82	14,75	10,04	43,39	100,00
26	Sulawesi Tengah	50,58	8,61	3,92	36,89	100,00
27	Sulawesi Selatan	58,20	11,86	1,63	28,31	100,00
28	Sulawesi Barat	46,14	9,57	2,44	41,85	100,00
29	Sulawesi Tenggara	58,15	10,09	2,57	29,19	100,00
30	Maluku	47,15	8,44	7,97	36,44	100,00
31	Maluku Utara	44,21	15,03	13,75	27,01	100,00
32	Papua	46,27	13,36	3,59	36,78	100,00
33	Papua Barat	44,32	18,48	12,60	24,60	100,00
	Indonesia	61,68	13,38	3,79	21,14	100,00

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2009 (Diolah dari Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS)

Tabel 3.15.1
Rekapitulasi Kejadian Bencana Alam
Musim Hujan 2009
(Status 01 November - 31 Desember 2009)

No.	Provinsi	Kejadian (Frekuensi)	Meninggal (Orang)	Hilang (Orang)	Mengungsi (Orang)	Tergangang								Rusak/Roboh/Hanyut							
						Permukiman (Ha)	Rumah (Buah)	Fasum (Buah)	Jalan (Km)	Jembatan (Buah)	Sawah (Ha)	Perkebunan (Ha)	Perikanan (Ha)	Rumah (Buah)	Fasum (Buah)	Jalan (Km)	Jembatan (Buah)	Bendung (Buah)	Saluran (m)	Tanggul (m)	Bang SDA (Buah)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
TOTAL INDONESIA		245	43	0	10.083	0	40.478	50	68	11	36.222	670	230	20.079	169	29	12	0	0	85	0
Wilayah Barat		63	10	0	4.683	0	14.500	16	28	3	1.935	570	120	3.621	5	13	3	0	0	10	0
1	N A D	11	0	0	2.597	0	4.600	6	3	2	500	0	0	1.148	2	1	2	0	0	0	0
2	Sumatera Utara	25	5	0	1.020	0	5.000	4	9	0	1.035	220	20	1.203	1	4	0	0	0	0	0
3	Sumatera Barat	11	5	0	450	0	700	0	5	0	0	0	0	179	0	4	0	0	0	0	0
4	Sumatera Selatan	2	0	0	0	0	350	0	2	0	300	0	100	87	0	1	0	0	0	0	0
5	Riau	6	0	0	616	0	3.600	4	9	1	0	200	0	898	1	3	1	0	0	10	0
6	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Jambi	2	0	0	0	0	150	2	0	0	0	150	0	37	1	0	0	0	0	0	0
8	Bengkulu	4	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0
9	Lampung	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0
10	Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wilayah Tengah		125	6	0	3.650	0	25.523	31	36	7	34.137	100	100	10.262	136	14	8	0	0	45	0
11	DKI Jakarta	12	0	0	0	0	285	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
12	Banten	13	2	0	1.400	0	16.698	17	7	1	31.332	0	0	4.179	5	3	1	0	0	0	0
13	Jawa Barat	27	1	0	1.800	0	6.980	4	12	1	0	0	100	2.657	6	5	1	0	0	0	0
14	Jawa Tengah	32	1	0	200	0	560	8	11	2	2.800	0	0	2.466	119	3	3	0	0	10	0
15	D.I.Y.	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0
16	Jawa Timur	31	2	0	250	0	305	0	1	2	5	100	0	695	5	1	3	0	0	35	0
17	Kalimantan Timur	1	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0
18	Kalimantan Tengah	2	0	0	0	0	325	2	2	0	0	0	0	81	1	1	0	0	0	0	0
19	Kalimantan Barat	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Kalimantan Selatan	2	0	0	0	0	300	0	3	0	0	0	0	87	0	1	0	0	0	0	0
Wilayah Timur		57	27	0	1.750	0	455	3	4	1	150	0	10	6.196	28	2	1	0	0	30	0
21	Bali	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
22	NTB	2	3	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	5.663	28	0	0	0	0	0	0
23	NTT	7	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0
24	Sulawesi Selatan	7	13	0	100	0	120	2	4	1	0	0	0	304	0	2	1	0	0	0	0
25	Sulawesi Tengah	2	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Sulawesi Tenggara	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
27	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Sulawesi Utara	13	10	0	1.000	0	65	1	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	30	0
29	Sulawesi Barat	1	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	10	37	0	0	0	0	0	0	0
30	Maluku	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Maluku Utara	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Papua	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Papua Barat	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber : Posko Bencana Kementerian PU

Tabel 3.15.2
Rekapitulasi Kejadian Bencana Alam
Musim Hujan 2009 - 2010
(Status 01 November 2009 - 30 April 2010)

No.	Provinsi	Kejadian (Frekuensi)	Meninggal (Orang)	Hilang (Orang)	Mengungsi (Orang)	Tergenang								Rusak/Roboh/Hanyut							
						Permukiman (Ha)	Rumah (Buah)	Fasum (Buah)	Jalan (Km)	Jembatan (Buah)	Sawah (Ha)	Perkebunan (Ha)	Perikanan (Ha)	Rumah (Buah)	Fasum (Buah)	Jalan (Km)	Jembatan (Buah)	Bendung (Buah)	Saluran (m)	Tanggul (m)	Bang SDA (Buah)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
TOTAL INDONESIA		847	148	36	23.187	724	210.904	404	414	53	77.712	12.308	1.561	88.523	298	149	57	2	330	928	16
Wilayah Barat		167	28	11	7.424	203	54.452	53	119	21	10.393	12.020	120	12.501	17	45	22	2	0	10	16
1	N A D	21	0	0	2.597	2	4.950	6	9	2	540	40	0	1.235	2	3	2	0	0	0	0
2	Sumatera Utara	43	15	4	2.245	1	5.230	5	15	5	1.183	220	20	1.345	1	6	5	0	0	0	0
3	Sumatera Barat	31	10	2	870	3	1.385	4	6	1	540	0	0	444	0	4	2	0	0	0	0
4	Sumatera Selatan	15	0	0	0	81	9.317	0	33	1	4.050	11.310	100	2.407	2	12	1	1	0	0	0
5	Riau	13	0	0	816	2	19.461	13	25	1	1.500	200	0	3.443	4	9	1	0	0	10	0
6	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Jambi	18	1	2	800	77	9.820	24	19	10	2.065	250	0	2.546	8	7	10	0	0	0	16
8	Bengkulu	11	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0
9	Lampung	13	2	3	96	36	4.019	1	12	1	390	0	0	1.019	0	4	1	1	0	0	0
10	Bangka Belitung	2	0	0	0	1	170	0	0	0	25	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0
Wilayah Tengah		494	79	12	13.708	501	150.895	345	263	30	66.369	148	1.431	68.226	251	92	32	0	330	777	0
11	DKI Jakarta	27	0	0	0	48	6.465	9	15	0	0	0	0	1.573	3	6	0	0	0	0	0
12	Banten	43	4	0	2.600	7	21.228	29	22	1	33.956	0	0	5.447	9	8	1	0	0	50	0
13	Jawa Barat	123	46	2	4.028	115	56.304	47	73	6	14.062	0	600	16.602	22	27	6	0	330	30	0
14	Jawa Tengah	120	20	7	650	76	16.738	35	39	6	7.222	26	700	8.807	128	13	8	0	0	302	0
15	D.I.Y.	9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0
16	Jawa Timur	137	6	3	400	146	27.161	16	69	12	6.201	122	131	6.021	19	23	13	0	0	395	0
17	Kalimantan Timur	8	2	0	1.454	59	6.460	7	6	0	140	0	0	1.505	3	2	0	0	0	0	0
18	Kalimantan Tengah	6	0	0	0	2	725	3	8	0	0	0	0	180	1	3	0	0	0	0	0
19	Kalimantan Barat	2	0	0	0	0	20	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
20	Kalimantan Selatan	19	1	0	4.576	48	15.794	199	28	4	4.788	0	0	28.034	66	9	4	0	0	0	0
Wilayah Timur		186	41	13	2.055	20	5.557	6	32	2	950	140	10	7.796	30	12	3	0	0	141	0
21	Bali	7	1	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0
22	NTB	5	3	0	650	0	86	0	0	0	0	0	0	5.663	28	0	0	0	0	0	0
23	NTT	20	1	3	30	3	750	2	6	0	20	20	0	220	0	2	0	0	0	100	0
24	Sulawesi Selatan	24	15	2	100	4	2.700	2	10	1	350	0	0	1.068	1	4	1	0	0	0	0
25	Sulawesi Tengah	9	0	0	0	8	995	0	5	0	230	100	0	137	0	2	0	0	0	0	0
26	Sulawesi Tenggara	9	9	7	200	0	65	0	3	1	0	0	0	102	1	1	2	0	0	0	0
27	Gorontalo	6	0	0	0	2	246	1	5	0	0	0	0	61	0	2	0	0	0	0	0
28	Sulawesi Utara	24	10	0	1.000	0	65	1	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	30	0
29	Sulawesi Barat	10	0	0	0	2	400	0	0	0	250	10	10	261	0	0	0	0	0	11	0
30	Maluku	36	0	0	75	1	225	0	3	0	100	0	0	70	0	1	0	0	0	0	0
31	Maluku Utara	21	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0
32	Papua	8	0	0	0	0	15	0	0	0	0	10	0	12	0	0	0	0	0	0	0
33	Papua Barat	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber : Posko Bencana Kementerian PU



BAB IV

INFORMASI STATISTIK KE-PU-AN

4.1 Infrastruktur Sumber Daya Air

Air menopang kehidupan manusia, termasuk kesinambungan rantai-rantai pangan makhluk hidup di muka bumi ini. Sehingga, air merupakan hak azasi manusia; artinya setiap manusia di muka bumi ini mempunyai hak dasar yang sama terhadap pemakaian air. Namun, saat ini yang menjadi pokok permasalahan adalah, bahwa air secara sangat cepat menjadi sumber daya yang makin langka dan tidak ada sumber penggantinya. Oleh karena itu, air seharusnya diperlakukan sebagai bahan yang sangat bernilai, dimanfaatkan secara bijak, dan dijaga terhadap pencemaran.

Masalah air di Indonesia ditandai dengan kondisi lingkungan yang makin tidak kondusif sehingga makin mempercepat kelangkaan air. Kerusakan lingkungan antara lain disebabkan oleh terjadinya degradasi daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) hulu akibat kerusakan hutan yang tak terkendali. Penyedotan air tanah terutama di beberapa kota besar yang melebihi kemampuan alami untuk mengisinya kembali makin tidak terkendali sejalan dengan perkembangan permukiman dan pertumbuhan kegiatan ekonomi penduduk yang pada akhirnya menyebabkan permukaan tanah turun, dan muka air tanah menurun.

Pembangunan infrastruktur sumber daya air tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan pembangunan sektor lain, karena infrastruktur merupakan penunjang pembangunan sektor-sektor tersebut. Pembangunan infrastruktur sumber daya air banyak memberikan dukungan yang besar, antara lain untuk pembangunan pertanian, perkebunan, pengendalian banjir, penyediaan air baku dan industri, serta Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).



4.1.1 Wilayah Sungai

Sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan meningkatnya kegiatan masyarakat mengakibatkan perubahan fungsi lingkungan yang berdampak negatif terhadap kelestarian sumber daya air dan meningkatnya daya rusak air. Hal tersebut menuntut pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi dari hulu sampai hilir dengan basis wilayah sungai dalam satu pola pengelolaan sumber daya air tanpa dipengaruhi batas-batas wilayah administrasi yang dilaluinya. Berdasarkan hal tersebut, pengaturan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya air oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota didasarkan pada keberadaan wilayah sungai yang bersangkutan, yaitu :

1. Wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan/ atau wilayah sungai strategis nasional menjadi kewenangan Pemerintah
2. Wilayah sungai lintas kabupaten/ kota menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi
3. Wilayah sungai secara utuh berada pada satu wilayah kabupaten/ kota menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota

Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya air yang dapat memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat dalam segala bidang kehidupan disusun pola pengelolaan sumber daya air. Pola pengelolaan sumber daya air tersebut disusun berdasarkan wilayah sungai dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah, serta dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha. Pola pengelolaan sumber daya air ini didasarkan pada prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, sehingga harus dilakukan dari hulu sampai ke hilir. Konservasi untuk wilayah sungai yang terkait dengan perencanaan tata ruang perlu dikembangkan dengan menerima adanya keterbatasan lingkungan dan meminimalkan dampak banjir pada masing-masing wilayah.



Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah tata pengairan sebagai hasil pengembangan satu atau lebih daerah pengaliran sungai. Pengelolaan Sumber Daya Air dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya berdasarkan penetapan wilayah sungai. Pada Tabel 4.1 disajikan data wilayah sungai berikut jumlah Sungai, DAS, DI, Bendungan, Embung, Embung Potensi, Pos Hujan, Pos Debit, dan Stasiun Klimatologi. Dari data wilayah sungai (WS) di Indonesia tersebut cukup menunjukkan kerawanan terjadinya banjir, untuk itu penanganan WS ini perlu mendapat perhatian penting.

Penetapan Wilayah Sungai memerlukan data yang lengkap dan akurat tentang keberadaan daerah aliran sungai (DAS) dan/ atau wilayah sungai (WS) yang secara utuh berada di wilayah kabupaten/ kota, lintas kabupaten/kota, lintas provinsi, lintas negara, dan strategis nasional di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka melaksanakan pengelolaan sumber daya air yang berbasis wilayah hidrografis, daratan Indonesia dibagi habis ke dalam 133 wilayah sungai (WS) sebagai kesatuan wilayah pengelolaan yang terdiri dari 5 WS Lintas Negara, 27 WS Lintas Provinsi, 51 WS Lintas Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi dan 13 WS dalam Kabupaten/ Kota, serta 37 WS Strategis Nasional (Tabel 4.1).

Wilayah Sungai dengan jumlah sungai terbanyak adalah Mahakam dengan jumlah sungai 494 buah (WS Strategis Nasional). Untuk Wilayah Sungai dengan jumlah DAS terbanyak adalah Batanghari dengan jumlah DAS 19 buah (WS Lintas Provinsi). Jumlah Daerah Irigasi (DI) dan bendungan terbanyak ada di WS Lintas Provinsi Bengawan Solo, dengan masing-masing jumlah DI 5.535 buah dan bendungan 9 buah. Adapun WS Serayu-Bogowonto (WS Strategis Nasional) memiliki jumlah pos hujan terbanyak (172), WS Bali-Penida (WS Strategis Nasional) mempunyai jumlah pos debit terbanyak (60).



4.1.2 Danau/ Situ

Danau adalah wadah air dan ekosistem yang terbentuk secara alamiah termasuk situ dan wadah air sejenis dengan sebutan istilah lokal. Situ atau danau buatan berfungsi sebagai daerah resapan air, pemasok cadangan air tanah, pendingin suhu udara kota, pengendali banjir (nilai ekologis), wisata olahraga air, seperti perahu dayung, kano, memancing (nilai ekonomi), habitat satwa liar (nilai edukatif), dan menambah keindahan kota (nilai estetis).

Pada umumnya kedalaman danau bervariasi antara 50 – 200 m, akan tetapi banyak juga yang mempunyai kedalaman lebih rendah dari 50 m. Sampai saat ini sebgaiian besar dari danau belum diketahui volumenya dengan pasti, demikian juga halnya presipitasi, evaporasinya serta debit inflow dan outflow-nya. Dengan demikian waktu tinggal air danau tidak diketahui sehingga daya tampung beban pencemaran tidak diketahui dan sekaligus pemanfaatan bagi berbagai keperluan sulit untuk diprogramkan.

Danau yang terbesar adalah Danau Toba di Sumatera Utara dengan panjang 275 km, lebar 150 km dengan luas 1.130 km², dan kedalaman maksimum 529 m di bagian utara dan 429 m di bagian selatan. Danau yang terdalam di Indonesia adalah danau Montana di Sulawesi Tengah dengan kedalaman maksimum 590 m dan merupakan danau terdalam ketujuh di dunia.

Danau kecil sering dikenal sebagai situ berukuran besar. Pemanfaatan situ-situ (danau) sebagai sistem pengendalian banjir memang belum begitu besar. Sejauh ini pemanfaatan situ lebih banyak untuk keperluan pertanian, irigasi serta konservasi sumber daya air. Namun demikian sesuai dengan fungsinya, situ mampu memberikan kontribusi dalam pengendalian banjir. Tabel 4.2 menyebutkan bahwa jumlah situ lebih banyak dibandingkan dengan danau, yakni 1.134 banding 561.



4.1.3 Rawa

Rawa merupakan sebutan untuk semua daerah yang tergenang air, yang penggenangannya dapat bersifat musiman atau permanen dan ditumbuhi oleh tumbuhan. Selanjutnya daerah rawa adalah daerah yang secara permanen atau temporal tergenang air karena tidak adanya sistem drainase alami. Daerah rawa merupakan daerah yang mempunyai arti penting dalam menunjang aspek fisik lingkungan suatu daerah aliran sungai. Selain itu, rawa juga berfungsi sebagai reservoir air yang dapat menjaga elevasi muka air daerah di atasnya maupun daerah genangan yang dapat meredam terjadinya banjir di daerah hilir.

Data rawa di beberapa provinsi dan kabupaten di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 4.3. Dari data yang tersedia dalam tabel terlihat bahwa provinsi yang memiliki jumlah rawa terbanyak di Indonesia adalah Provinsi Riau dengan total rawa mencapai 347 yang berada di 10 lokasi. Lokasi-lokasi tersebut adalah Kabupaten Siak, Kuantan Singingi, Kampar, Pelalawan, Indragiri Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, dan Indragirili Hilir. Untuk lokasi di kota berada di Kota Dumai dan Kota Pekanbaru. Total jumlah rawa di Indonesia yang terhitung hingga sekarang adalah 1.912 buah.

Menurut jenisnya lahan rawa dibagi menjadi Rawa Pasang Surut (RPS) dan Rawa Non Pasang Surut (RNPS) atau rawa lebak. Rawa pasang surut adalah daerah rawa yang sistem drainase atau sistem pemberian airnya dipengaruhi oleh gerakan pasang surut muka air sungai terdekat. RNPS didefinisikan sebagai daerah rawa yang tidak dipengaruhi oleh pasang surut air sungai. Daerah rawa ini merupakan lahan tanah berbentuk cekungan dan dalam musim hujan seluruhnya digenangi air. Pada musim kemarau air tersebut berangsur-angsur kering bahkan kadang-kadang ada yang kering sama sekali selama masa yang relatif sangat singkat (1-2 bulan).



4.1.4 Air Tanah

Air tanah adalah air yang tersimpan di dalam lapisan batuan yang mengalami pengisian secara terus menerus oleh alam. Air tanah berasal dari air hujan dan air permukaan, yang meresap makin dalam dan menjadi air tanah. Air tanah dan air permukaan saling berkaitan dan berinteraksi. Setiap aksi (pemompaan, pencemaran) terhadap air tanah akan memberikan reaksi ke air permukaan, demikian sebaliknya. Air tanah yang tercemar menjadi pembawa bibit penyakit yang berasal dari air. Air tanah di perkotaan yang telah intensif pemanfaatan air tanahnya, menjadi sangat rawan pencemaran, apabila sudah tercemar.

Dalam kehidupan sehari-hari pola pemanfaatan air tanah sering terlihat dalam penggunaan sumur gali oleh penduduk, dan sumur bor. Tabel 4.4 ditunjukkan lokasi air tanah beserta jumlah sumur di beberapa kabupaten dalam provinsi yang ada di Indonesia. Total jumlah sumur yang tercatat hingga sekarang di Indonesia sebanyak 1.257 unit.

Pada Tabel 4.4 terlihat, bahwa jumlah sumur terbanyak di Indonesia berada pada Provinsi Nusa Tenggara Barat, yakni 449, disusul dengan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 275 dan Provinsi Jawa Tengah sebesar 186. Sedangkan provinsi yang mempunyai jumlah sumur paling sedikit adalah Kalimantan Tengah, yakni 19 unit. Masih banyak provinsi yang belum tercatat jumlah sumurnya, perlu segera dilakukan survai, guna pengelolaan air tanah lebih lanjut. Karena air tanah akan menjadi bahan komoditi ketika nanti kesulitan mencari air tawar dan air baku untuk kehidupan sehari-hari.

Pada Tabel 4.4 juga terlihat, bahwa jumlah kabupaten terbanyak yang ada lokasi air tanah dan memiliki beberapa sumur adalah di Provinsi Jawa Tengah, yakni ada 14 kabupaten. Adapun di Provinsi DI Yogyakarta hanya mempunyai satu lokasi air tanah, yakni di Kabupaten Gunung Kidul dengan 59 sumur.



4.1.5 Bendungan/ Waduk

Bendungan adalah bangunan strategis berupa tembok yang dibangun melintasi sebuah sungai, terbuat dari tanah, batu, atau beton. Struktur ini menghambat aliran sungai, sehingga menciptakan danau buatan yang dinamakan waduk. Air yang ditampung dalam waduk dapat digunakan untuk membangkitkan listrik selain untuk menyediakan air irigasi dan minum, membantu pergerakan perahu dan mengendalikan banjir, serta untuk rekreasi.

Pembangunan dan pengelolaannya memerlukan teknologi tinggi, karena memiliki risiko yang besar apabila jebol, sehingga memerlukan pemeliharaan yang teliti. Dalam pengelolaan bendungan terus dilakukan *reservoir operation* dan monitoring setiap musimnya. Kedua hal tersebut bertujuan bagaimana mengoperasikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan air. Jika ketersediaan air karena curah hujan menurun maka pengeluarannya harus dihemat, sehingga ketersediaan air akan tetap terjaga. Untuk itu keterlibatan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan bendungan ini sangat diperlukan.

Pembangunan bendungan tergantung dari topografi dari masing-masing daerah serta berapa besar air yang mengalir dalam skala tahunan. Umur sebuah bendungan bergantung pada banyak faktor, diantaranya jumlah endapan yang terdapat didalam sungai. Seiring dengan waktu, waduk akan terisi dengan endapan. Semakin bertambahnya endapan, bendungan menjadi semakin kurang efektif, hingga tidak lagi dapat beroperasi. Tabel 4.5 adalah data inventarisasi bendungan di Indonesia dengan rincian jumlah bendungan dan luas muka air waduk.

Waduk adalah tampungan buatan yang dibentuk akibat pembendungan aliran sungai. Peruntukkan waduk sebagai sumber air adalah untuk irigasi, PLTA, air minum, penggelontoran, perikanan, pengendalian banjir, tempat pariwisata,



dan industri. Berdasarkan data pada Tabel 4.5, tentang luas muka air waduk memberikan informasi tentang muka air banjir, normal, dan minimum.

Secara teknis ada tiga pola waduk, yaitu :

1. Waduk tahunan, dimana sepanjang tahun tetap terisi air dan pengaturannya tergantung musim tahunan, seperti Jatiluhur, dan Kedungombo;
2. Waduk bulanan, adalah waduk-waduk kecil yang fungsinya hanya memperpanjang ketersediaan air dengan membangun embung-embung kecil ataru reservoir, dimana ketersediaan airnya bisa diperpanjang. Misalnya di daerah-daerah pertanian seperti di Gunung Kidul dan Lombok, dimana musim hujannya kurang lebih empat bulan;
3. Waduk harian, untuk penyediaan air minum.

Data luas muka air waduk berdasarkan provinsi di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 4.5, dimana luas muka air banjir terbesar berada di Provinsi Jawa Tengah, dari total 52 bendungan yaitu seluas 141.006,34 Ha. Sedangkan inventarisasi bendungan hingga tahun 2010 berdasarkan provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah bendungan paling banyak, yakni ada 102 unit. Beberapa bendungan belum tercatat data luas muka air waduknya baik untuk banjir, normal, maupun minimum, diantaranya ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo.

4.1.6 Embung

Salah satu cara untuk menanggulangi kekurangan air di lahan sawah tadah hujan adalah dengan membangun kolam penampung air atau embung. Embung adalah bangunan konservasi air berbentuk kolam untuk menampung air hujan dan air limpasan (*run off*) serta sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian (pangan/ hortikultura), perkebunan dan peternakan (keperluan air minum ternak yang dilepas liar di padang). Perairan embung selain



berfungsi untuk menampung air, juga menjaga keseimbangan alam, dan menopang kehidupan masyarakat. Demikian pentingnya perairan embung bagi kehidupan, sehingga dibutuhkan suatu pengelolaan yang bersifat terpadu dalam menjaga dan melestarikannya. Embung yang bisa menampung genangan air yang luas diharapkan menjaga kelestarian dan kelangsungan dari usia bendungan, ketersediaan/ cadangan air untuk irigasi akan terpenuhi terutama pada musim kering dan meningkatkan pendapatan Sektor Pariwisata.

Embung potensi adalah titik-titik yang memungkinkan bagi pembangunan embung (danau buatan). Informasi data embung potensi yang dapat disajikan adalah lokasi, dan jumlah dari embung potensi tersebut, yang dapat dilihat pada Tabel 4.6. Lokasi yang berpotensi untuk embung ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat yang masing-masing tersebar di 13 kabupaten.

Embung juga bisa untuk konservasi sumber air, pasalnya air dari perut embung ini bisa menimbulkan sumber air tanah baru. Data embung berdasarkan fisiknya tersebar di 16 Provinsi, dimana informasi lengkap datanya dapat dilihat pada Tabel 4.7, yang berisi informasi tentang lokasi, dan jumlah embung tiap provinsi. Jumlah embung terbanyak di Provinsi Nusa Tenggara Timur (317 embung) dan paling sedikit di provinsi Bali dan Kep. Bangka Belitung (masing-masing terdapat 1 embung).

4.1.7 Bendung

Bendung merupakan sebuah proyek yang dibangun sebagai suatu alat pengendali dan pemantauan seluruh tata pengaturan air dan berfungsi sebagai antisipasi bencana banjir. Menurut Kartasapoetra, Bendung merupakan bangunan air yang dibangun secara melintang sungai, sedemikian rupa agar permukaan air sungai disekitarnya naik sampai ketinggian tertentu, sehingga

air sungai tadi dapat dialirkan melalui pintu sadap ke saluran–saluran pembagi kemudian hingga ke lahan–lahan pertanian.

Bendung berfungsi untuk menaikkan taraf muka air sungai agar dapat dialirkan ke lahan yang letaknya lebih tinggi dari dasar aliran sungai tersebut. Ditinjau dari segi sifat pelimpahan air, ada tiga jenis bendung yaitu, bendung tetap, bendung gerak dan kombinasi antara bendung tetap dan bendung gerak. Data bendung terdapat di 11 Provinsi dapat dilihat pada Tabel 4.8, yang berisi tentang informasi tentang lokasi, dan jumlah bendung tiap provinsi. Jumlah bendung terbanyak di Provinsi DI Yogyakarta, yakni ada 2.025 unit. Provinsi Papua hanya memiliki 1 bendung, yaitu di Kabupaten Merauke.

4.1.8 Kinerja Sumber Daya Air

Hasil-hasil bidang sumber daya air dari tahun 2005-2009 yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia dapat dilihat di Tabel 4.9. Pembangunan paling banyak dilakukan di wilayah timur, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan dan Papua, yakni masing-masing ada 4 jenis pembangunan, disusul Provinsi Sumatera Selatan, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat, yang masing-masing terdapat 3 jenis pembangunan.

Pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan, antara lain bendungan Ponre-Ponre di Kabupaten Bone, revitalisasi pantai Losari di kota Makassar, Sabo Dam Bawakaraeng di Kabupaten Gowa, dan peningkatan jaringan suplesi rawa tambak Malili di Kabupaten Luwu Timur. Adapun di Provinsi Papua, antara lain pembangunan Bendung Kalibumi di Kabupaten Nabire, pengamanan pantai Bosnik di Kabupaten Biak Numfor, daerah rawa Tanah Miring dan peningkatan jaringan daerah rawa Kurik di Kabupaten Merauke. Jenis pembangunan yang termasuk proyek strategis, diantaranya Banjir Kanal Timur dan Barat di DKI Jakarta, serta Bendungan Jatigede di Jawa Barat.



4.1.9 Analisis Statistik Bidang Sumber Daya Air

Berdasarkan data pada Tabel 4.10 akan dibuat plot yang secara simultan dapat menggambarkan data yang terdiri dari n objek (provinsi) dan p peubah (Frekuensi Bencana, Luas Wilayah Terendam, Jumlah Bangunan Terendam dan Rusak, Jumlah Bangunan SDA) dalam dua dimensi. Plot ini selanjutnya disebut Biplot, dapat memberikan informasi mengenai :

- (1) kedekatan antar objek
- (2) karakteristik atau peubah penciri setiap objek
- (3) keterkaitan antar peubah

Frekuensi Bencana adalah jumlah kejadian banjir dan tanah longsor yang terjadi pada periode 1 November 2009 – 30 April 2010. Alasan dipilih hanya banjir dan tanah longsor, karena kedua kejadian bencana ini berhubungan dengan bangunan SDA. Luas wilayah terendam adalah luas wilayah yang terendam akibat banjir dan tanah longsor yang terdiri dari wilayah permukiman, sawah, perkebunan, dan perikanan. Jumlah bangunan terendam dan rusak adalah jumlah bangunan yang terendam dan rusak, akibat banjir dan tanah longsor, yang terdiri dari rumah, fasum, dan jembatan, bendung dan bangunan SDA. Jumlah bangunan SDA adalah jumlah bangunan yang dikelola oleh Ditjen SDA di sebuah provinsi yang terdiri dari danau, situ, embung, bendung, dan bendungan. Grafik yang ditampilkan adalah per wilayah, yakni wilayah I meliputi provinsi-provinsi di Pulau Sumatera, wilayah II meliputi provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan Bali, wilayah III meliputi provinsi-provinsi di Pulau Kalimantan dan Sulawesi, serta provinsi NTB, wilayah IV meliputi provinsi-provinsi di Pulau Maluku dan Papua, serta provinsi NTT.

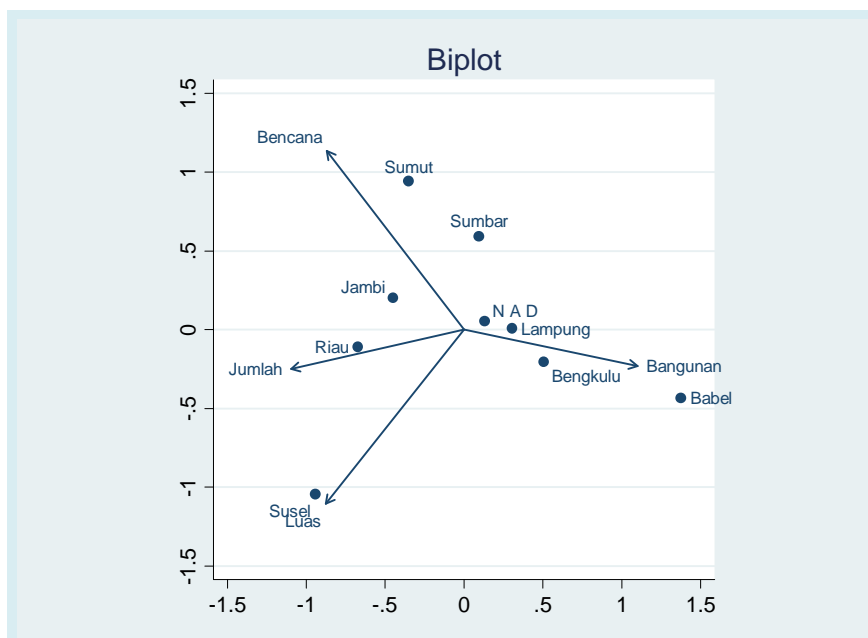
Dari hasil analisis biplot didapat hasil sebagai berikut :

A. Sumatera (Lihat Gambar 4.1)

- Provinsi yang memiliki frekuensi terjadinya bencana banjir dan tanah longsor cukup tinggi di Pulau Sumatera adalah Sumatera Utara, Jambi, dan Sumatera Barat

- Provinsi yang paling banyak jumlah bangunan terendam dan rusak akibat banjir dan tanah longsor adalah Riau
- Provinsi yang dominan dalam luas wilayah terendam akibat banjir dan tanah longsor adalah Sumatera Selatan
- Provinsi yang paling banyak memiliki bangunan SDA adalah Bangka Belitung, sedangkan yang relatif memiliki jumlah lebih banyak bangunan SDA adalah NAD, Lampung, dan Bengkulu

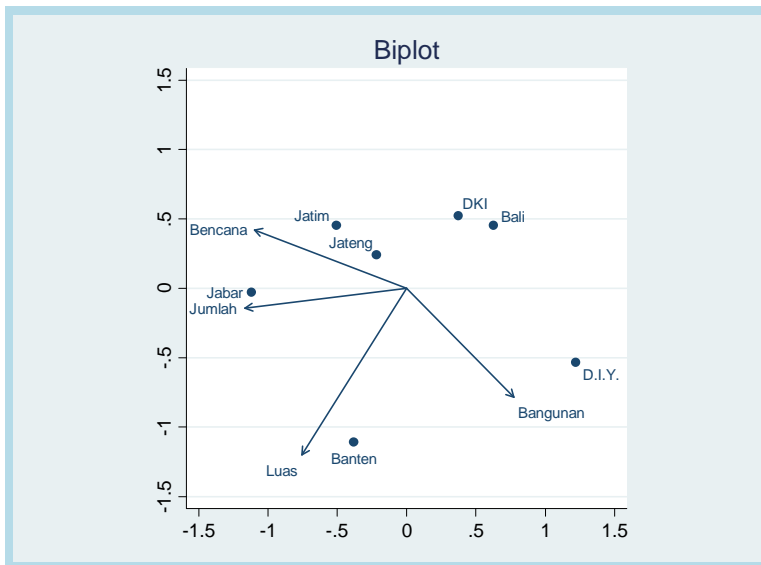
Gambar 4.1 Grafik Biplot dari Data -Tabel 4.10 untuk Pulau Sumatera



B. Jawa dan Bali (Lihat Gambar 4.2)

- Provinsi yang memiliki frekuensi terjadinya bencana banjir dan tanah longsor cukup tinggi di Pulau Jawa adalah Jawa Timur, Jawa Tengah
- Provinsi yang paling banyak jumlah bangunan terendam dan rusak akibat banjir dan tanah longsor adalah Jawa Barat
- Provinsi yang dominan dalam luas daerah terkena dampak banjir dan tanah longsor adalah Banten

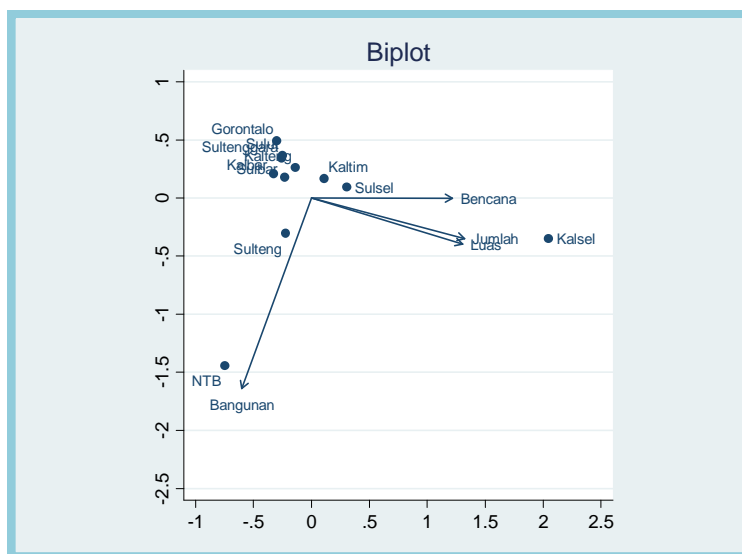
Gambar 4.2 Grafik Biplot dari Data Tabel 4.10 untuk Pulau Jawa dan Bali



C. Kalimantan, Sulawesi, dan NTB (Lihat Gambar 4.3)

- Provinsi yang memiliki frekuensi terjadinya bencana banjir dan tanah longsor cukup tinggi, luas daerah serta jumlah bangunan terendam dan rusak cukup besar di Pulau Kalimantan adalah Kalimantan Selatan
- Provinsi yang paling banyak memiliki bangunan SDA adalah NTB

Gambar 4.3 Grafik Biplot dari Data Tabel 4.10 untuk Pulau Kalimantan, Sulawesi dan NTB

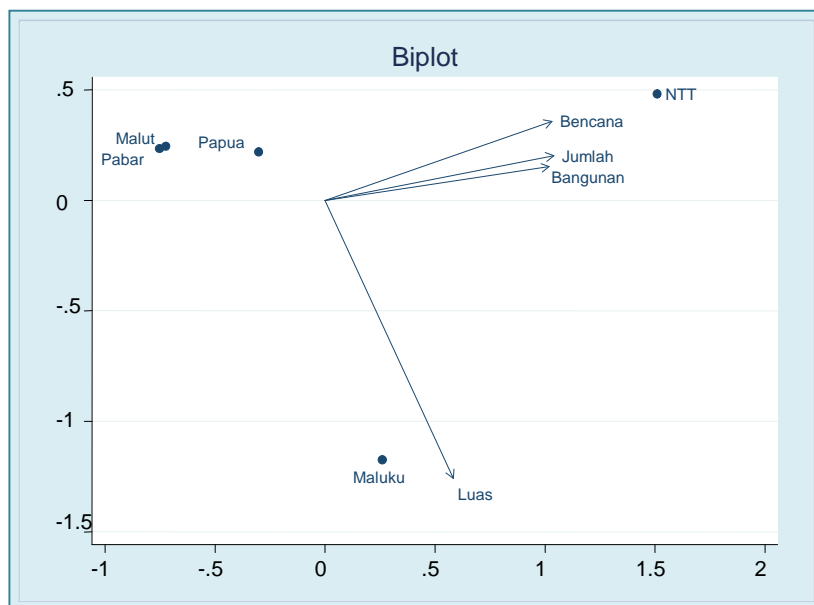


- Provinsi Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat memiliki kesamaan kondisi, bila dilihat dari frekuensi bencana dan akibat yang ditimbulkan, serta jumlah bangunan SDA yang dimiliki wilayah tersebut
- Berkurang tidaknya luas wilayah terendam juga akan diikuti dengan turun tidaknya jumlah bangunan terendam dan rusak

D. Maluku, Papua dan NTT (Lihat Gambar 4.4)

- Provinsi yang frekuensi terjadinya bencana banjir dan tanah longsor cukup tinggi, jumlah bangunan terendam dan rusak cukup besar serta memiliki banyak jumlah bangunan SDA adalah Nusa Tenggara Timur
- Provinsi yang paling luas wilayah terendamnya adalah Maluku
- Provinsi Maluku Utara dan Papua Barat memiliki kesamaan kondisi, bila dilihat dari frekuensi bencana dan akibat yang ditimbulkan, serta jumlah bangunan SDA yang dimiliki wilayah tersebut
- Jumlah bangunan terendam berkorelasi dengan jumlah bangunan SDA

Gambar 4.4 Grafik Biplot dari Data Tabel 4.10 untuk Pulau Maluku, Papua dan NTT





4.2 Infrastruktur Bina Marga

4.2.1 Jalan Tol

Pertumbuhan penjualan kendaraan yang tinggi serta kebijakan otoritas pengatur jalan yang semakin kondusif, akan membuat posisi jalan tol semakin kuat untuk kota-kota besar di Indonesia. Hal ini mendorong Pemerintah untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan tol dengan cara melibatkan partisipasi swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta. Sejak Pemerintah mengenalkan kebijakan untuk menggali partisipasi Sektor Swasta dalam pengembangan infrastruktur, maka pembangunan jalan tol di Indonesia meningkat. Jalan bebas hambatan dengan sistem tol ini merupakan alternatif dari jalan umum non tol yang ada dan merupakan bagian dari jaringan jalan nasional, yang dibiayai oleh pengguna jalan untuk mendapatkan kenyamanan sekaligus pengurangan biaya operasi kendaraan. Fungsi jalan arteri jalan tol paling banyak dibangun di Pulau Jawa, mengingat wilayah ini paling padat penduduk dan jumlah kendaraannya (Tabel 4.11.1 - 4.11.3).

Pemerintah berkeinginan untuk mempercepat pembangunan jalan tol guna mewujudkan sistem transportasi yang efisien dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat kemiskinan. Hal ini diwujudkan dengan keluarnya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 630/KPTS/M/2009, tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri dan Jalan Kolektor 1, dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 631/KPTS/M/2009, tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional.

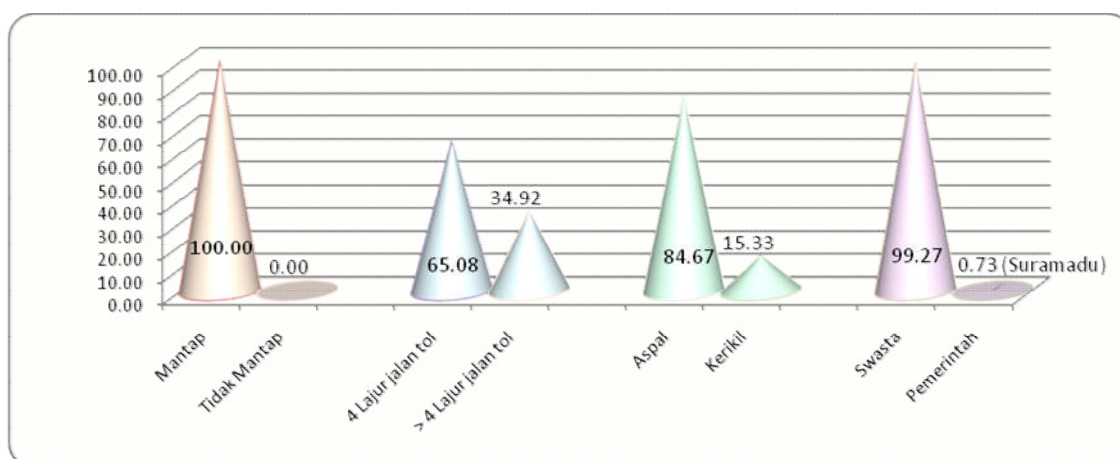
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tanggal 31 Desember 2009 ini, diantaranya menghasilkan ruas jalan tol menurut fungsi jalan arteri di Pulau Sumatera, Jawa, dan Sulawesi (Tabel 4.11.1 - 4.11.3). Selain itu menghasilkan

ruas jalan tol menurut status jalan nasional di Pulau Sumatera, Jawa, dan Sulawesi (Tabel 4.12.1 - 4.12.3). Hal ini sesuai dengan definisi di UU No.38/2004, Pasal 9 ayat 2, dimana yang termasuk Jalan Nasional adalah:

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer yang Menghubungkan Antaribukota Provinsi
- Jalan Strategis Nasional
- Jalan Tol

Pembangunan jalan tol didasarkan prinsip-prinsip pembangunan infrastruktur yang menyeluruh, berkelanjutan secara lingkungan, sosial, ekonomi, dan keuangan, dengan cara bersaing transparan serta mendorong terjadinya Alih Teknologi. Pembangunan jalan tol di Indonesia sangat lambat, karena terkendala permasalahan dasar, yaitu lambatnya proses pembebasan lahan. Hal ini bisa terlihat pada Tabel 4.11 - 4.12, dimana masih sedikit ruas jalan tol yang dibangun, mengingat jumlah kendaraan terus meningkat. Pulau Sumatera hanya ada 1 ruas (Tabel 4.11.1 dan 4.12.1), Pulau Sulawesi ada 2 ruas (Tabel 4.11.2 dan 4.12.2), dan Pulau Jawa ada 28 ruas tol (Tabel 4.11.3 dan 4.12.3).

**Gambar 4.5 Investasi Jalan Tol (%)
Tingkat Pelayanan Akhir Tahun 2009**



Sumber : Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian PU



Pada akhir tahun 2009 kondisi jalan tol 100% mantap, panjang 4 lajur jalan tol menjadi 65,08% dan lebih dari 4 lajur tercapai 34,92%. Selain itu, telah dicapai jalan tol sampai dengan TA 2009 dengan jenis permukaan aspal sebesar 84,67% selesai dibangun dan sisanya berupa kerikil sejumlah 15,33%. Jalan tol yang telah diselesaikan dioperasikan oleh pengelola dari swasta sebesar 99,27% dan 0,73% dilakukan oleh Pemerintah. Keterangan tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.5 di atas, sedangkan untuk rincian per provinsi terdapat pada Tabel 4.13.

Tujuan pembangunan jalan tol diantaranya menstimulasi pembangunan, dengan mengurangi pengangguran dan kemiskinan serta berpotensi untuk pengembangan wilayah. Hingga Maret 2010 jalan tol yang sudah beroperasi sekitar 28 ruas dengan total panjang utama sebesar 741,92 Km (Tabel 4.14).

4.2.2 Jalan

Infrastruktur jalan yang telah dibangun selama ini pada hakikatnya dimaksudkan untuk menciptakan pondasi yang amat kuat dan mantap bagi tercapainya pembangunan ekonomi yang berkesinambungan di Indonesia. Informasi yang di sajikan di Tabel 4.15 menunjukkan panjang jalan di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan tingkat kewenangan pemerintahan dari tahun 2005 hingga 2007, yang terdiri dari panjang Jalan Negara, Jalan Provinsi, dan Jalan Kabupaten/ Kota. Dari seluruh panjang Jalan Negara tersebut, Provinsi Papua, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara relatif lebih panjang dibanding provinsi lain di tahun 2005-2006. Sedangkan panjang Jalan Provinsi, yang lebih panjang dibandingkan provinsi lain adalah Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, Lampung, Jawa Barat, dan Sumatera Utara. Dari jalan kabupaten/ kota, provinsi Jawa Timur, dan Sumatera Utara, memiliki jalan lebih panjang.



Rencana pembangunan jalan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dengan mengacu kepada rencana tata ruang dan mempertimbangkan aspek sosial penyediaan sarana angkutan umum dan sekaligus aspek lingkungan, sebagai sistem pengembangan terpadu mendukung "quality of life" masyarakat. Berdasarkan pengelompokan 4 kondisi menurut *International Roughness Index (IRI)* dalam satu ruas jalan, maka kondisi jalan nasional hasil survai tahun 2009 dapat dilihat pada Tabel 4.16.1 (Km) dan Tabel 4.16.2 (%), dengan prosentase baik (48,27%), sedang (37,75%), rusak ringan (11,59%), rusak berat (0,93%).

Selain berfungsi sebagai prasarana transportasi, jalan juga berfungsi sebagai sarana yang berfungsi memperindah dan memperkaya ruang terbuka hijau. Berdasarkan kondisi rata-rata *Surface Distress Index (SDI)* per ruas jalan, maka kondisi jalan nasional hasil survai tahun 2009 dapat dilihat pada Tabel 4.17.1 (Km) dan Tabel 4.17.2 (%), dengan prosentase baik (82,76%), sedang (8,90%), rusak ringan (6,26%), dan rusak berat (2,08%).

Untuk Jalan "Mantap" dan "Tidak Mantap", menggunakan kriteria yang sama dengan kondisi jalan secara fungsional, yaitu :

1. Mantap, jika kondisi jalan baik atau sedang
2. Tidak Mantap, jika kondisi jalan rusak ringan atau rusak berat

Dari Tabel 4.16.1 dan Tabel 4.16.2 dapat diketahui bahwa ruas jalan sepanjang 29.788,17 km atau 86,02 persen berada dalam kondisi mantap, sementara sisanya sejumlah 4.334,59 km atau 12,52 persen dalam kondisi tidak mantap. Tabel 4.17.1 dan Tabel 4.17.2 dapat diketahui, bahwa ruas jalan sepanjang 31.739,58 km atau 91,66 persen berada dalam kondisi mantap, sementara sisanya sejumlah 2.889,25 km atau 8,34 persen dalam kondisi tidak mantap.

Menurut PP Jalan No. 34 tahun 2006, maka klasifikasi jalan dibagi atas :

- ❖ Jalan Raya (≥ 14 m)



- ❖ Jalan Sedang (7 – 14 m)
- ❖ Jalan Kecil (5 – 7 m)
- ❖ Jalan Sub Standar (< 5 m)

Klasifikasi Jalan Nasional tahun 2009 dapat dilihat pada Tabel 4.18.1 (Km) dan Tabel 4.18.2 (%). Prosentase klasifikasi jalan pada Tabel 4.18.2, menunjukkan bahwa klasifikasi jalan kecil berada pada urutan teratas (57,46%), disusul jalan sedang (20,67%), jalan sub standar (17,60%), dan jalan raya (4,27%).

Jalan Nasional adalah jalan umum yang pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah. Yang masuk jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor I, seperti ditunjukkan pada Tabel 4.19, yaitu panjang jalan berdasarkan fungsinya. Dari total panjang ruas jalan di Indonesia sebesar 38.569,823 Km, maka panjang jalan arteri sebesar 45,98% dan panjang jalan kolektor I ada 54,02%.

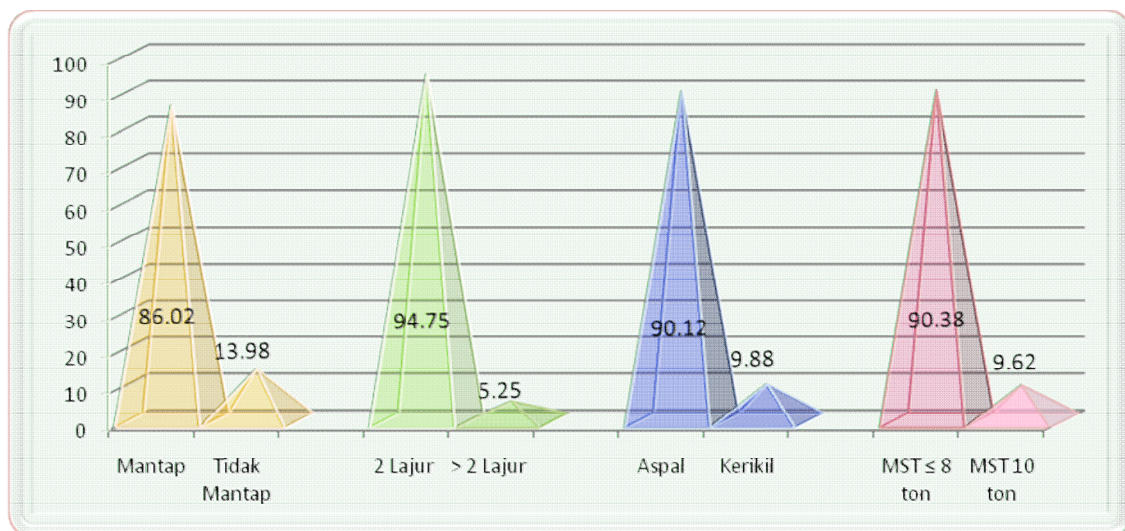
Tabel 4.20.1 menunjukkan status jalan nasional bukan jalan tol menurut SK Menteri PU tahun 2009, sedangkan Tabel 4.20.2 adalah data perbandingan panjang ruas jalan nasional dari SK Menteri PU tahun 2004 dan tahun 2009. Proporsi kenaikan panjang ruas jalan nasional dari tahun 2004 ke tahun 2009 kurang lebih sebesar 11,38%. Ada 3 provinsi yang baru ada panjang ruas jalan nasional tahun 2009, karena pemekaran wilayah, diantaranya Provinsi Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, dan Papua Barat.

Kota metropolitan merupakan kota yang memiliki pengaruh besar terhadap kota-kota lain dan seringkali dihubungkan dengan jumlah penduduk yang besar dan di Indonesia terdapat 9 kota metropolitan, seperti terlihat pada Tabel 4.21. Total ruas jalan nasional untuk kota metropolitan adalah 2.207,008 km, dimana kota Jakarta (Jabodetabekpunjur) memiliki jalan terpanjang dibanding kota lain.

IRMS (*Interurban Road Management System*) merupakan suatu sistem pengelolaan jalan nasional dan provinsi yang dikembangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Monitoring Data IRMS berdasarkan roughness untuk status 18 Agustus 2010 ditunjukkan Tabel 4.22. Berdasarkan IRI (*The International Roughness Index*), ditemukan jalan yang dikategorikan rusak (IRI di atas 8) dan normal (IRI di bawah 8). Hasil sementara menunjukkan bahwa kondisi jalan normal (baik dan sedang) sebesar 81,73%, dan sisanya perlu perbaikan.

Pada akhir tahun 2009 kondisi jalan nasional meliputi 86,02% mantap dan 13,98% tidak mantap, panjang 2 lajur jalan menjadi 94,75% dan lebih dari 2 lajur tercapai 5,25%. Selain itu, telah dicapai pengaspalan jalan sampai dengan TA 2009 sebesar 90,12% selesai dibangun dan sisanya berupa kerikil sejumlah 9,88%. Ruas-ruas jalan yang didisain untuk Muatan Sumbu Terberat (MST) ≤ 8 ton sebesar 90,38% dan sisanya 9,62% untuk kekuatan jalan atau MST 10 ton (Gambar 4.6). Untuk rincian lebih mendetail per provinsi dari Gambar 4.6 dapat dilihat pada Tabel 4.23 (tanpa Provinsi Kepulauan Riau).

Gambar 4.6 Ruas Jalan Nasional Tingkat Pelayanan Akhir Tahun 2009



Sumber : Subdit Data & Informasi, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PU



4.2.3 Jembatan

Pemerintah Indonesia melalui Bina Marga telah mengembangkan suatu sistem pengelolaan jembatan yang dikenal sebagai Sistem Manajemen Jembatan (*Bridge Management System /BMS*). Salah satu aktivitas sistem ini adalah perencanaan dan pembuatan program penanganan jembatan, yang berfungsi untuk menjamin pengalokasian biaya pemeliharaan jembatan dilakukan secara optimal. Hal ini dilakukan dengan skrining teknis dan evaluasi ekonomi, untuk menentukan prioritas penanganan suatu jembatan. Menurut BMS, berdasarkan panjang jembatan, maka jembatan nasional dibagi atas :

- a) 0 – 20 m
- b) 20 – 30 m
- c) 30 – 60 m
- d) 60 – 100 m
- e) > 100 m

Rekapitulasi jembatan nasional menurut BMS berdasarkan panjang jembatan tahun 2009 dapat dilihat di Tabel 4.24.1 (Unit) dan Tabel 4.24.2 (%). Data hasil filterisasi dengan ruas jalan nasional menurut Kepmen No.376/KPTS/M/2004, menunjukkan bahwa jumlah jembatan dengan panjang jembatan 0 – 20 m ada 75,09%, disusul panjang jembatan 20 – 30 m (10,04%), 30 – 60 m (9,90%), 60 – 100 m (2,69%), dan diatas 100 m sebesar 2,28%.

Rekapitulasi jembatan nasional menurut BMS berdasarkan panjang jembatan tahun 2009 dapat dilihat di Tabel 4.25.1 (m) dan Tabel 4.25.2 (%). Data hasil filterisasi dengan ruas jalan nasional menurut Kepmen No.376/KPTS/M/2004, menunjukkan bahwa panjang jembatan dengan panjang jembatan 0 – 20 m ada 32,07%, disusul panjang jembatan 20 – 30 m (12,96%), 30 – 60 m (21,84%), 60 – 100 m (10,88%), dan diatas 100 m sebesar 22,25%.



Untuk mempertahankan kinerja jembatan, diadakan pemantauan dan evaluasi yang menentukan strategi pemeliharaan dan perbaikan kondisi jembatan. Berdasarkan kondisi jembatan secara umum, jembatan nasional dibagi atas :

- a) Kondisi baik sekali
- b) Kondisi baik
- c) Kondisi rusak ringan
- d) Kondisi rusak berat
- e) Kondisi kritis
- f) Kondisi runtuh/ tidak ada jembatan

Dari rekapitulasi kondisi jembatan nasional menurut *Bridge Management System (BMS)* tahun 2009 berdasarkan kondisi jembatan secara umum, Tabel 4.26.1 menunjukkan jumlah jembatan di Indonesia tanpa Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan jumlah jembatan dalam prosentase ditunjukkan pada Tabel 4.26.2, dimana kondisi jumlah jembatan kritis ada 3,01% dan yang runtuh/ tidak ada jembatan hanya ada 1,86%.

Jembatan nasional menurut BMS berdasarkan kondisi jembatan secara umum tahun 2009 dapat dilihat di Tabel 4.27.1 (m) dan Tabel 4.27.2 (%). Data hasil filterisasi dengan ruas jalan nasional menurut Kepmen No.376/KPTS/M/2004, menunjukkan bahwa panjang jembatan dengan kondisi jembatan baik sekali ada 42,48%, baik (20,21%), rusak ringan (19,64%), rusak berat (10,16%), kritis (3%), dan runtuh/ tidak ada jembatan sebesar 4,50% (Tabel 4.27.2).

Keberadaan jembatan mampu mempersingkat jarak, dan memberi nilai lebih yang positif untuk kemajuan pembangunan di suatu kawasan. Menurut BMS, berdasarkan jenis konstruksi jembatan, maka jembatan nasional dibagi atas :

- a) Box culvert (tunnel)
- b) Gelagar (Girder)
- c) Rangka (Truss)
- d) Lain-lain (lengkung, gantung, dan lainnya)

Dengan adanya jembatan akan mempermudah masyarakat suatu wilayah untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintahan bisa lebih baik. Dari rekapitulasi jumlah jembatan nasional menurut *Bridge Management System (BMS)* tahun 2009 berdasarkan jenis konstruksi jembatan, maka Tabel 4.28.1 menunjukkan jumlah jembatan di Indonesia tanpa Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan jumlah jembatan dalam prosentase ditunjukkan pada Tabel 4.28.2, dimana jumlah jembatan konstruksi gelagar paling banyak, yaitu 68,03% dan yang konstruksi rangka hanya ada 14,46%.

Berjalannya pembangunan jembatan mempermudah akses masyarakat untuk menggunakan fasilitas yang ada. Rekapitulasi panjang jembatan nasional menurut BMS berdasarkan jenis konstruksi jembatan tahun 2009 dapat dilihat di Tabel 4.29.1 (m) dan Tabel 4.29.2 (%). Data hasil filterisasi dengan ruas jalan nasional menurut Kepmen No.376/KPTS/M/2004, menunjukkan bahwa panjang jembatan dengan konstruksi gelagar ada 52,21%, disusul konstruksi rangka (42,43%), Lain-lain (34,60%), dan box culvert 5,36% (Tabel 4.29.2).

Berdasarkan tahun dibangun jembatan, maka jembatan nasional dibagi atas :

- a) Kurang dari tahun 1970
- b) 1970 – 1980
- c) 1980 – 1990
- d) 1990 – 2000
- e) Diatas tahun 2000

Dari rekapitulasi jumlah jembatan nasional menurut *Bridge Management System (BMS)* tahun 2009 berdasarkan tahun dibangun jembatan, maka Tabel 4.30.1 menunjukkan jumlah jembatan di Indonesia tanpa Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan jumlah jembatan dalam prosentase ditunjukkan pada Tabel 4.30.2, dimana jumlah jembatan banyak dibangun pada rentang tahun 1980 - 1990, yaitu 26,84% dan diatas tahun 2000 hanya ada 3,24%.

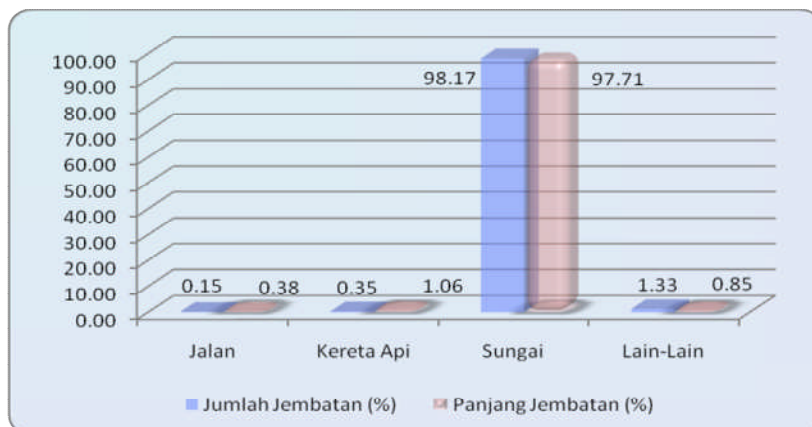
Rekapitulasi panjang jembatan nasional menurut BMS berdasarkan tahun dibangun jembatan tahun 2009 dapat dilihat di Tabel 4.31.1 (m) serta Tabel 4.31.2 (%). Data hasil filterisasi dengan ruas jalan nasional menurut Kepmen No.376/KPTS/M/2004, menunjukkan bahwa jembatan terpanjang dibangun pada rentang tahun 1990 – 2000 yakni sebesar 35,14%, disusul tahun 1980 - 1990 (27,24%), 1970 - 1980 (17,24%), kurang dari tahun 1970 (15,28%), dan diatas tahun 2000 sebesar 5,10% (Tabel 4.31.2).

Menurut BMS, berdasarkan tipe lintas jembatan, maka jembatan nasional tahun 2009 dibagi atas :

- a) Jalan
- b) Kereta Api
- c) Sungai
- d) Lain-Lain

Dari rekapitulasi kondisi jembatan nasional menurut *Bridge Management System (BMS)* tahun 2009 berdasarkan jumlah dan panjang jembatan (%), maka Gambar 4.7 menunjukkan jumlah dan panjang jembatan berdasarkan tipe lintas jembatan, tanpa Provinsi Kepulauan Riau.

Gambar 4.7 Jumlah dan Panjang Jembatan Berdasarkan Tipe Lintas Jembatan Status : 5 Januari 2010



Sumber : Subdit Data dan Informasi, Direktorat Bina Program, Bina Marga, Kementerian PU

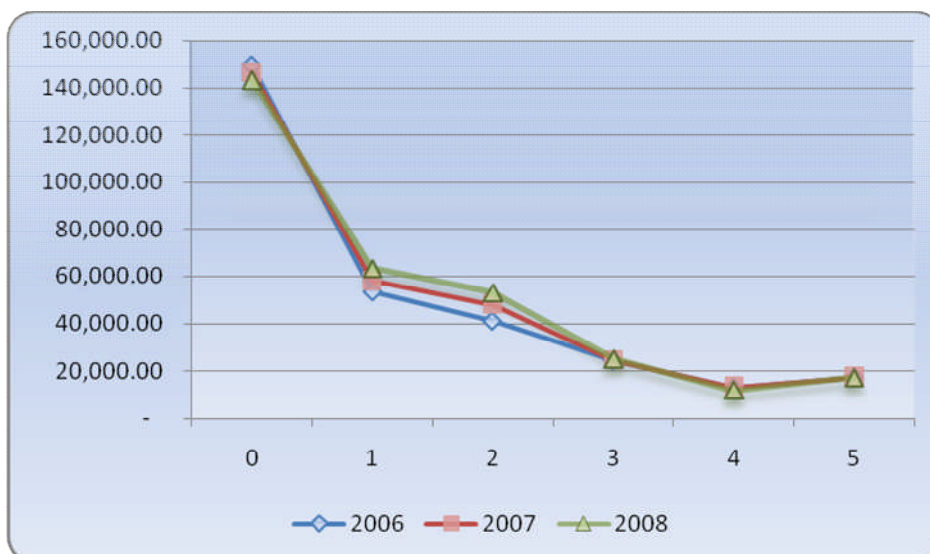
*) Jalan Nasional di Kepulauan Riau belum ditetapkan dengan SK Menteri

Berdasarkan kondisi jembatan secara umum dengan panjang lebih atau sama dengan 6 m, maka jembatan dibagi atas :

- a) Kondisi 0 = jembatan baru tanpa kerusakan
- b) Kondisi 1 = kerusakan kecil
- c) Kondisi 2 = kerusakan yang memerlukan pemantauan atau pemeliharaan di waktu mendatang
- d) Kondisi 3 = kerusakan yang memerlukan tindakan secepatnya
- e) Kondisi 4 = kondisi kritis
- f) Kondisi 5 = jembatan/ elemen tidak berfungsi lagi

Panjang jembatan berdasarkan data kondisi jembatan secara umum dengan panjang lebih besar atau sama dengan 6 m untuk tahun 2006 – 2008 dapat dilihat pada Gambar 4.8. Dari gambar terlihat, bahwa kondisi jembatan baru tanpa kerusakan (kondisi 0) berada pada tingkat tertinggi, sedangkan kondisi kritis (kondisi 4) berada pada titik terendah dari tahun ke tahun.

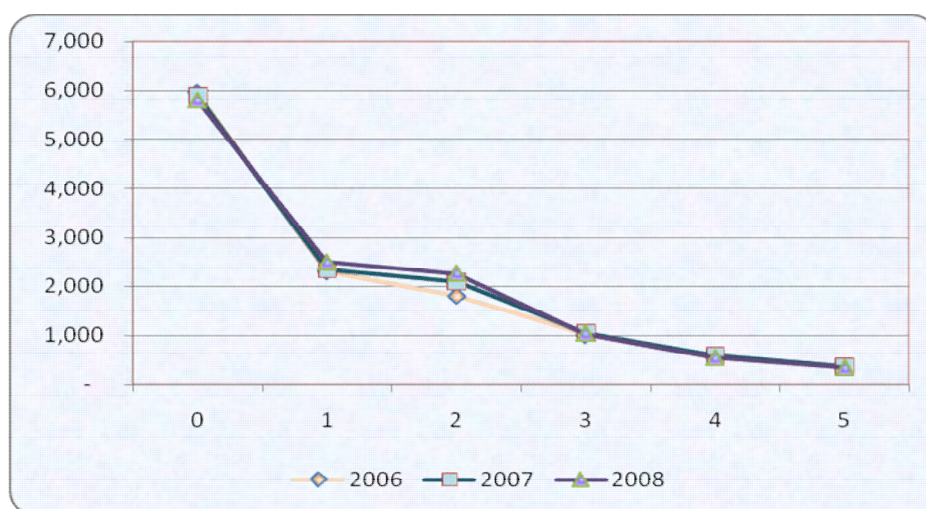
Gambar 4.8 Panjang Jembatan Berdasarkan Kondisi Jembatan Secara Umum Tahun 2006 – 2008 (Status 29 Januari 2009)



Sumber : Subdit Data dan Informasi, Direktorat Bina Program, Bina Marga, Kementerian PU

Jumlah jembatan berdasarkan data kondisi jembatan secara umum dengan panjang lebih besar atau sama dengan 6 m untuk tahun 2006 – 2008 dapat dilihat pada Gambar 4.9. Dari gambar terlihat, bahwa kondisi jembatan baru tanpa kerusakan (kondisi 0) berada pada tingkat tertinggi, sedangkan kondisi jembatan/ elemen tidak berfungsi lagi (kondisi 5) berada pada titik terendah.

Gambar 4.9 Jumlah Jembatan Berdasarkan Kondisi Jembatan Secara Umum Tahun 2006 – 2008 (Status 29 Januari 2009)



Sumber : Subdit Data dan Informasi, Direktorat Bina Program, Bina Marga, Kementerian PU

4.2.4 Analisis Statistik Bidang Bina Marga

A. Jalan

Berdasarkan data pada Tabel 4.32 akan dibuat plot yang secara simultan dapat menggambarkan data yang terdiri dari n objek (provinsi) dan p peubah (Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik, Sedang, Rusak Ringan, dan Rusak Berat) dalam dua dimensi. Plot atau grafik ini selanjutnya disebut Biplot yang diharapkan dapat menyajikan posisi relatif suatu provinsi terhadap provinsi lainnya dan menentukan kondisi jalan seperti apa di masing-masing wilayah tersebut yang perlu dikembangkan atau diperbaiki performanya.

Keempat peubah yang dianalisis, yaitu Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik, Panjang Jalan Dalam Kondisi Sedang, Panjang Jalan Dalam Kondisi Rusak Ringan, dan Panjang Jalan Dalam Kondisi Rusak Berat terhadap panjang jalan dari SK Menteri PU tahun 2009, yang diperoleh dari hasil monitoring data IRMS berdasarkan *roughness* Tahun Anggaran 2010 dengan status sampai dengan 18 Agustus 2010. Grafik yang ditampilkan adalah perwilayah, yakni wilayah I meliputi provinsi-provinsi di Pulau Sumatera, wilayah II meliputi provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan Bali, wilayah III meliputi provinsi-provinsi di Pulau Kalimantan dan Sulawesi, provinsi NTB, wilayah IV meliputi provinsi-provinsi di Pulau Maluku dan Papua, serta provinsi NTT.

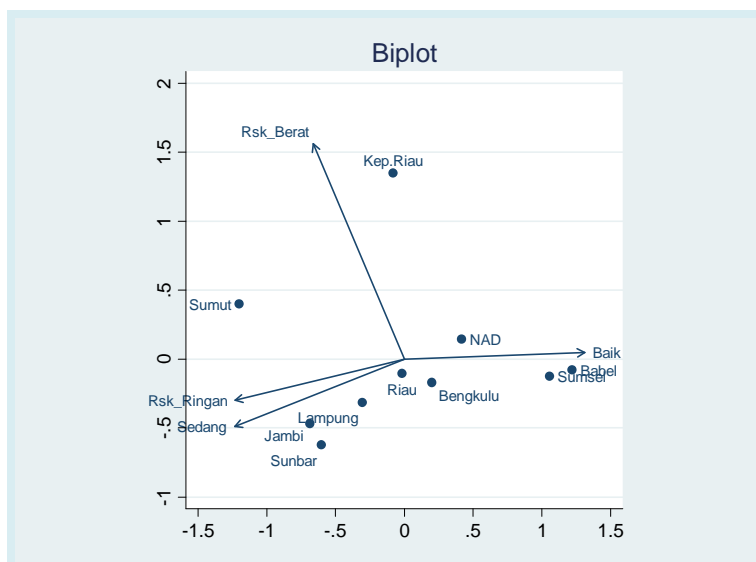
Dari analisis biplot didapat hasil sebagai berikut :

a. Sumatera (Lihat Gambar 4.10)

- Provinsi yang memiliki persentase ruas jalan kondisi baik paling besar di Pulau Sumatera adalah Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, dan Nanggroe Aceh Darussalam
- Provinsi yang dominan dalam persentase ruas jalan kondisi sedang adalah Sumatera Barat dan Jambi
- Provinsi yang cenderung dominan dalam persentase jalan kondisi rusak ringan adalah Sumatera Utara
- Provinsi yang persentase jalan kondisi rusak beratnya paling besar di Pulau Sumatera adalah Kepulauan Riau
- Di Pulau Sumatera menunjukkan, bahwa trend persentase kondisi jalan sedang dan rusak ringan relatif sama di masing-masing wilayah
- Untuk provinsi Lampung, Riau, dan Bengkulu, memiliki kemiripan jika dilihat dari persentase komposisi kondisi jalannya



Gambar 4.10 Grafik Biplot dari Data Tabel 4.32 untuk Pulau Sumatera



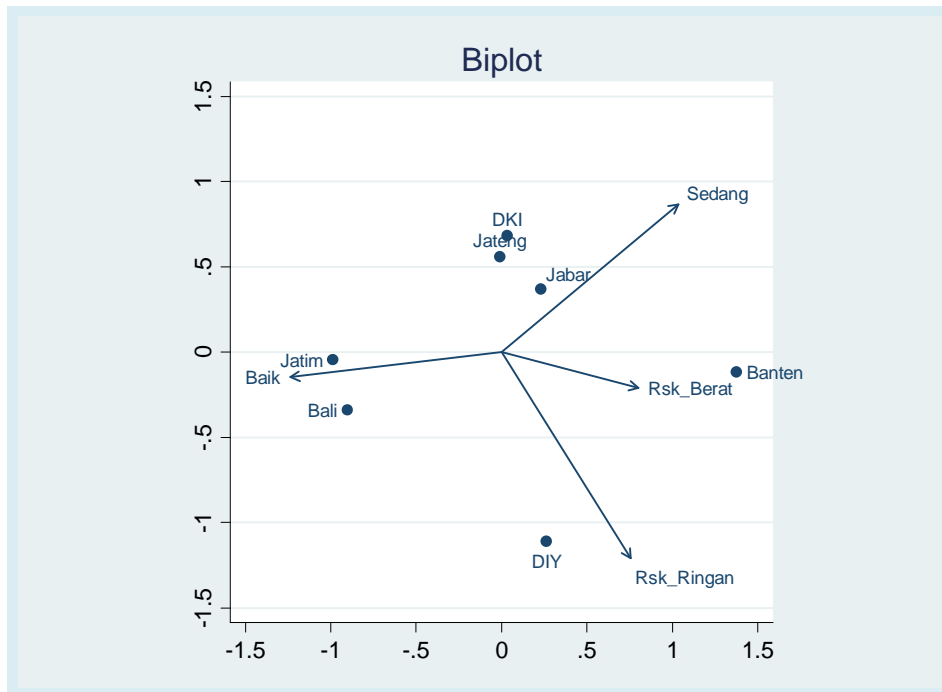
b. Jawa dan Bali (Lihat Gambar 4.11)

- Ada 2 provinsi yang cenderung dominan dalam persentase ruas jalan kondisi baik di wilayahnya, yaitu Jawa Timur, dan Bali
- Provinsi yang relatif dominan dalam persentase jalan kondisi sedang adalah Jawa Barat
- Untuk jalan kondisi rusak ringan, provinsi yang dominan adalah DIY
- Prosentase kondisi jalan rusak berat paling dominan di Provinsi Banten
- Provinsi DKI Jakarta, dan Jawa Tengah memiliki kemiripan dalam hal komposisi kondisi jalan di wilayahnya

c. Kalimantan, Sulawesi, NTB (Lihat Gambar 4.12)

- Provinsi yang relatif dominan dalam persentase ruas jalan dalam kondisi baik, yaitu Sulawesi Utara
- Provinsi yang dominan dalam persentase ruas jalan kondisi sedang adalah Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Barat
- Provinsi yang relatif dominan dalam persentase jalan dengan kondisi rusak ringan adalah Kalimantan Barat

Gambar 4.11 Grafik Biplot dari Data Tabel 4.32 untuk Pulau Jawa dan Bali

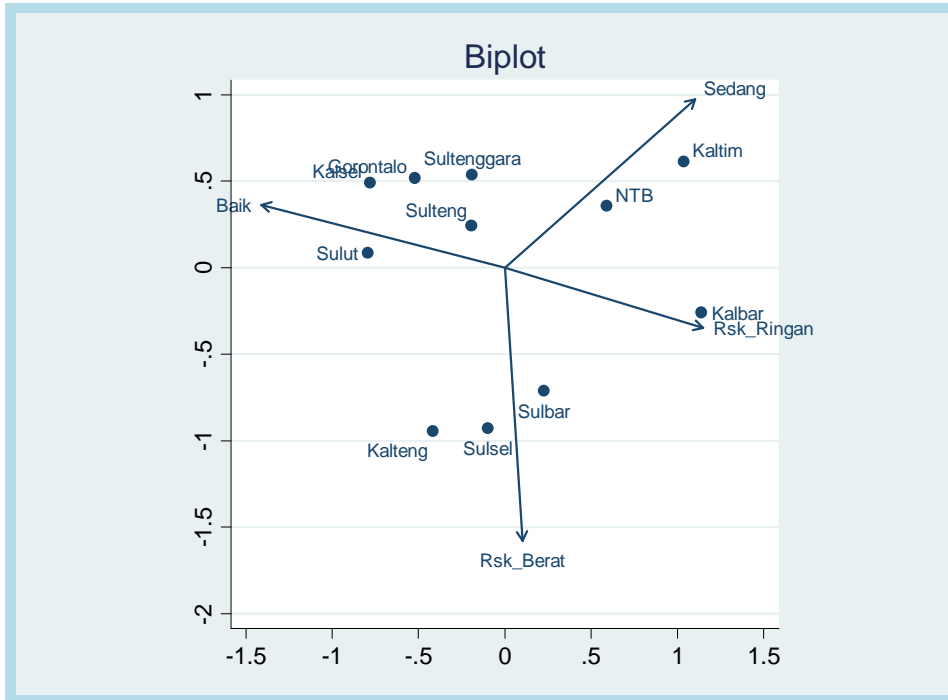


- Untuk jalan dengan kondisi rusak berat, ada tiga provinsi yang dominan, adalah Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan
- Provinsi Gorontalo memiliki kemiripan komposisi kondisi jalan dengan Kalimantan Selatan, sedangkan Provinsi Sulawesi Tenggara relatif lebih mirip dengan Provinsi Sulawesi Tengah

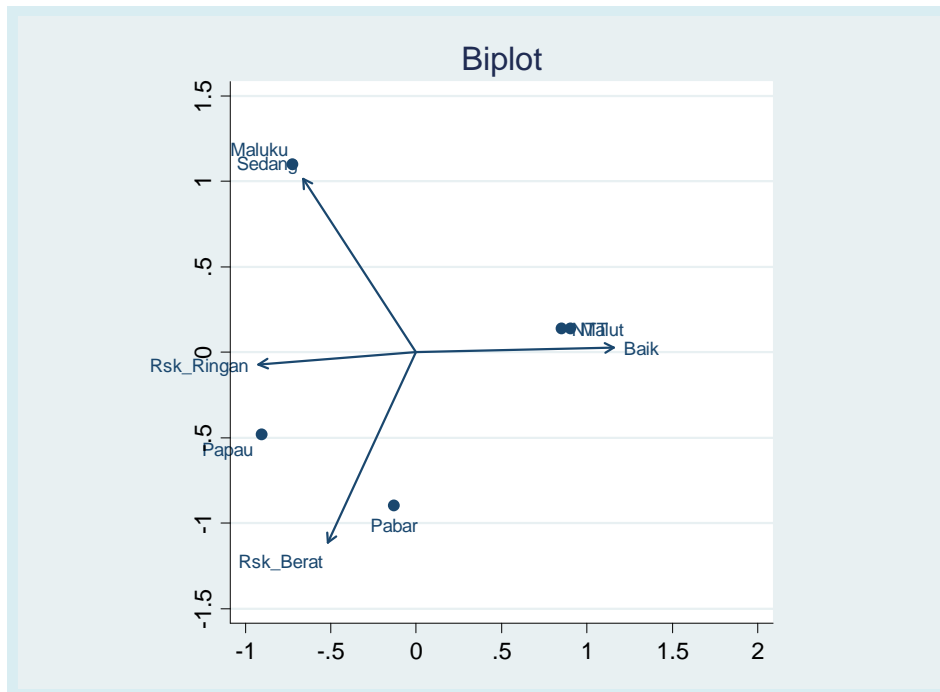
d. Maluku, Papua dan Nusa Tenggara Timur (Lihat Gambar 4.13)

- Provinsi yang dominan dalam persentase jalan dengan kondisi baik, adalah Nusa Tenggara Timur dan Maluku Utara
- Provinsi yang dominan dalam persentase jalan dengan kondisi sedang, adalah Maluku
- Provinsi yang dominan dalam persentase jalan dengan kondisi rusak ringan, adalah Papua
- Sedangkan untuk jalan dengan kondisi rusak berat, provinsi yang dominan adalah Papua Barat

Gambar 4.12 Grafik Biplot dari Data Tabel 4.32 untuk Pulau Kalimantan, Sulawesi, NTB



Gambar 4.13 Grafik Biplot dari Data Tabel 4.32 untuk Pulau Maluku, Papua dan NTT





B. Jembatan

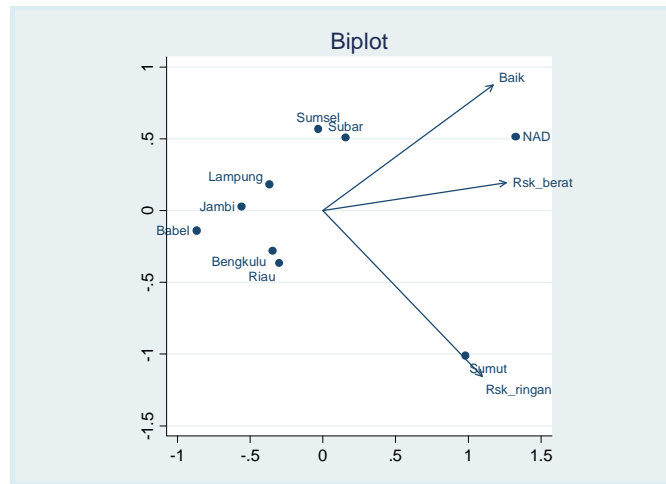
Berdasarkan data pada Tabel 4.33 akan dibuat plot yang secara simultan dapat menggambarkan data yang terdiri dari n objek (provinsi) dan p peubah (Persentase Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Baik (Baik Sekali dan Baik), Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Rusak Ringan, dan Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Rusak Berat (Rusak Berat, Kritis, dan Runtuh/ Tidak ada Jembatan) dalam dua dimensi. Plot atau grafik ini selanjutnya disebut Biplot yang merupakan upaya grafis dalam tampilan dua dimensi.

Biplot akan menampilkan kedekatan/ tingkat kemiripan antar provinsi dan kondisi jembatan. Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Baik merupakan jumlah jembatan yang berdasarkan BMS masuk dalam kategori baik sekali dan baik. Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Rusak Ringan adalah hanya jumlah jembatan yang dalam kategori rusak ringan. Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Rusak Berat adalah jumlah jembatan yang masuk dalam kategori rusak berat, kritis, dan runtuh atau tidak ada jembatan.

Dari analisis biplot didapat hasil sebagai berikut :

- a) Sumatera (Lihat Gambar 4.14)
 - o Provinsi yang banyak memiliki persentase jembatan dalam kondisi baik adalah Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan relatif di wilayah NAD
 - o Untuk persentase jembatan dalam kondisi rusak ringan, provinsi yang paling dominan adalah Sumatera Utara
 - o Provinsi yang juga dominan dalam persentase jembatan dengan kondisi rusak berat di wilayahnya adalah Nanggroe Aceh Darussalam
 - o Provinsi Bengkulu dan Riau memiliki kemiripan dalam hal persentase kondisi jembatan di wilayahnya, sedangkan persentase kondisi jembatan di Provinsi Lampung memiliki kemiripan dengan Provinsi Jambi

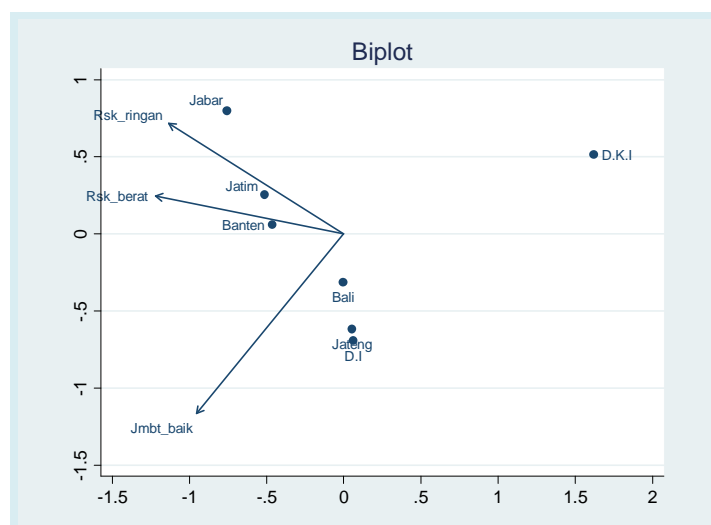
Gambar 4.14 Grafik Biplot dari Data Tabel 4.33 untuk Pulau Sumatera



b) Jawa dan Bali (Lihat Gambar 4.15)

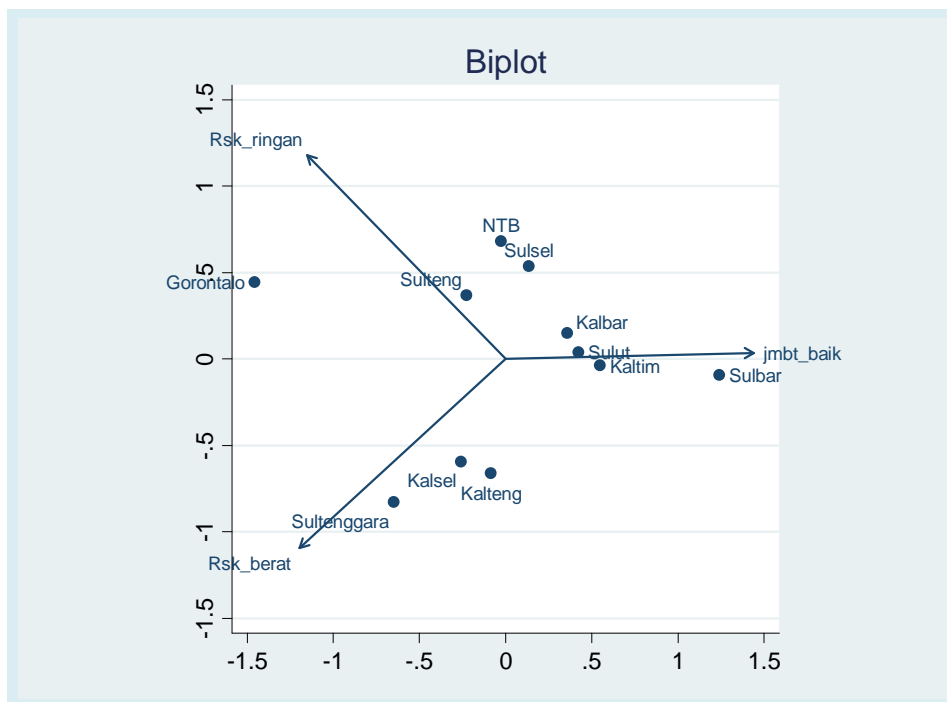
- o Provinsi yang paling banyak memiliki persentase jembatan dengan kondisi baik adalah DI Yogyakarta dan Jawa Tengah
- o Provinsi yang cenderung dominan dalam persentase jembatan dengan kondisi rusak ringan adalah Jawa Barat dan relatif di Jawa Timur
- o Provinsi yang persentase jumlah jembatan dalam kondisi rusak beratnya paling banyak adalah Banten, serta relatif di Jawa Timur dan Jawa Barat

Gambar 4.15 Grafik Biplot dari Data Tabel 4.33 untuk Pulau Jawa dan Bali



- c) Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat (Lihat Gambar 4.16)
 - o Provinsi yang dominan dalam persentase jumlah jembatan dengan kondisi baik, yaitu Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan relatif di wilayah Kalimantan Barat
 - o Untuk persentase jumlah jembatan dalam kondisi rusak ringan, provinsi yang cenderung dominan adalah Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan NTB
 - o Provinsi yang mempunyai persentase jumlah jembatan dalam kondisi rusak berat paling banyak adalah Sulawesi Tenggara, dan relatif di wilayah Kalimantan Selatan serta Kalimantan Tengah
 - o Provinsi Sulawesi Selatan dan NTB memiliki kemiripan dalam hal persentase kondisi jembatan di wilayahnya

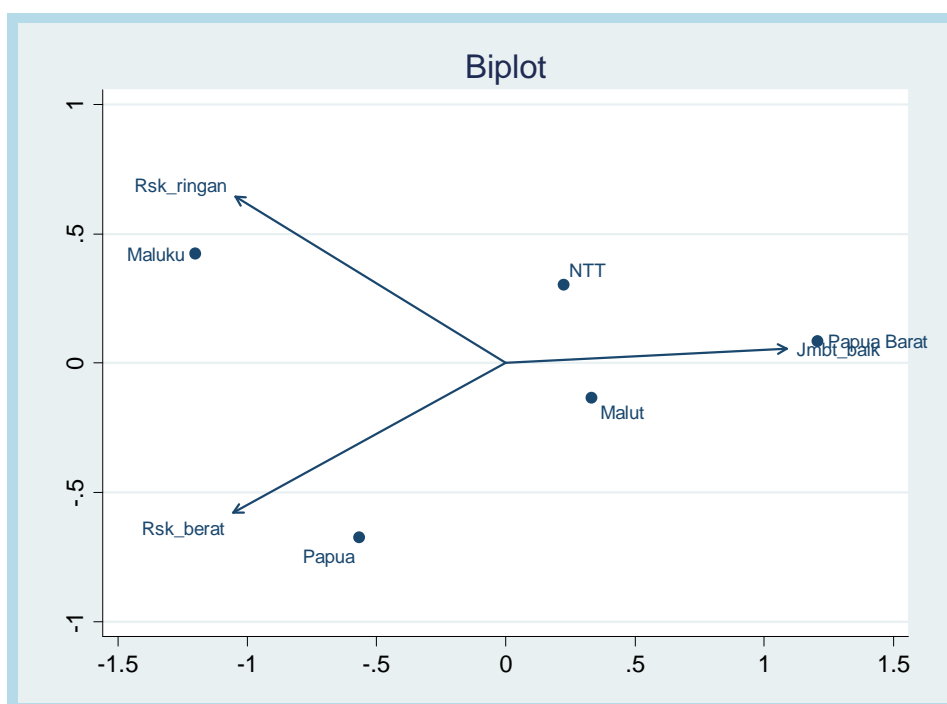
Gambar 4.16 Grafik Biplot dari Data Tabel 4.33 untuk Pulau Kalimantan, Sulawesi, NTB



- d) Maluku, Papua dan Nusa Tenggara Timur (Lihat Gambar 4.17)
 - o Provinsi yang dominan dalam presentasi jumlah jembatan untuk kondisi baik adalah Papua Barat

- o Kedua provinsi, yaitu Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur terlihat memiliki kemiripan dalam komposisi persentase kondisi jembatan
- o Persentase jembatan rusak ringan lebih dominan di Provinsi Maluku, sedangkan jembatan rusak berat lebih dominan di Provinsi Papua

Gambar 4.17 Grafik Biplot dari Data Tabel 4.33 untuk Pulau Maluku, Papua dan NTT



4.3 Infrastruktur Cipta Karya

4.3.1 Penyediaan Air Minum

Pembangunan prasarana dan sarana Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) semakin meningkat khususnya dalam era desentralisasi dan otonomi daerah. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat tersebut, dipandang perlu untuk menyepakati standar mutu yang harus dipenuhi demi menjamin capaian sasaran penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan SPAM.



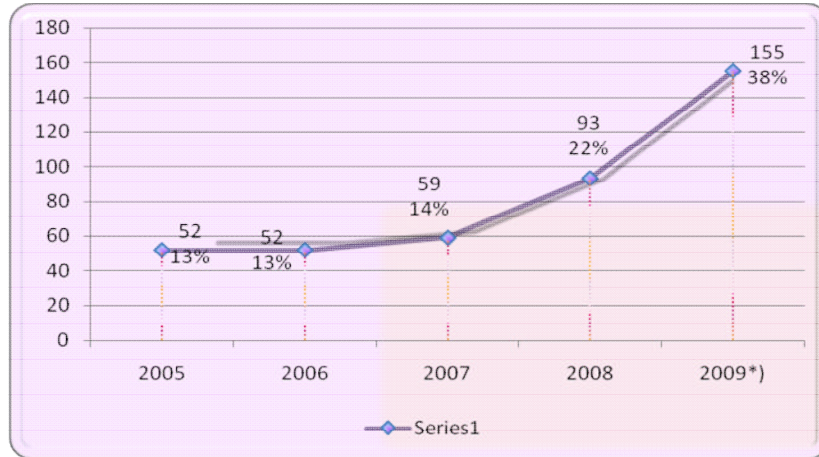
Kewajiban pemenuhan hak-hak dasar manusia, seperti air minum, memotivasi Pemerintah untuk memfasilitasi pembangunan dan pengembangan sistem penyediaan air minum khususnya bagi masyarakat perdesaan yang notabene merupakan masyarakat dengan tingkat pelayanan SPAM terendah. Sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di kota kecil dan di perdesaan (termasuk Ibu Kota Kecamatan atau disingkat IKK).

Berkenaan dengan usaha mengurangi tingkat kemiskinan di perdesaan serta upaya percepatan pencapaian tujuan pembangunan Millenium Development Goals (MDGs), maka diperlukan adanya peningkatan jangkauan penerima manfaat program. Berdasarkan hal ini pemerintah melalui Kementerian PU meluncurkan program pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum IKK (SPAM IKK). Program dititikberatkan pada IKK rawan air yang masih memiliki tingkat pelayanan SPAM yang masih rendah, sedangkan fokus utama program adalah pembangunan SPAM IKK. Lokasi yang dikembangkan SPAM nya berdasarkan kriteria pemilihan lokasi IKK diuraikan pada Tabel 4.34.

Tujuan dari Program Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) adalah melakukan percepatan dalam meningkatkan cakupan pelayanan air minum di seluruh tanah air, sehingga kesenjangan antara cakupan pelayanan dan kebutuhan air minum dapat diperkecil. Sasaran Program Pengembangan SPAM IKK merupakan bagian dari sasaran program meningkatkan pelayanan air minum baik nasional maupun internasional. Pembangunan SPAM IKK terbagi menjadi 4 (empat) unit, yaitu :

1. Unit Air Baku, terdiri atas Intake, Pipa Air Baku
2. Unit Produksi, terdiri atas Instalasi Pengolahan Air (IPA)
3. Unit Distribusi, terdiri atas Jaringan Distribusi Utama (JDU), Jaringan Distribusi Bagi (JDB), Jaringan Distribusi Layanan (JDL)
4. Unit Pemanfaatan, terdiri atas Hidran Umum (HU), Sambungan Rumah (SR)

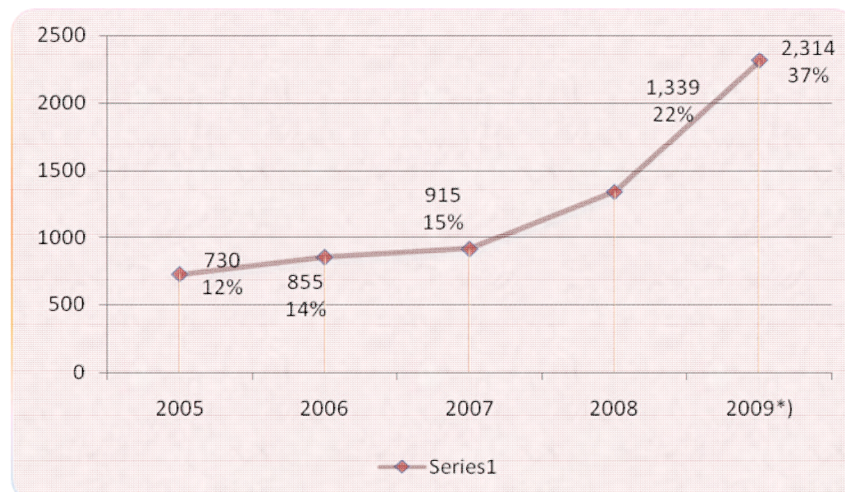
Gambar 4.18 Jumlah Lokasi IKK dalam Pembangunan SPAM IKK Tahun 2005 - 2009*)



Sumber : Menuju Pencapaian Target MDGs Bidang Air Minum, Hasil Pembangunan SPAM-IKK 2005-2009, Ditjen Cipta Karya, Departemen PU
 Catatan : *) Rencana

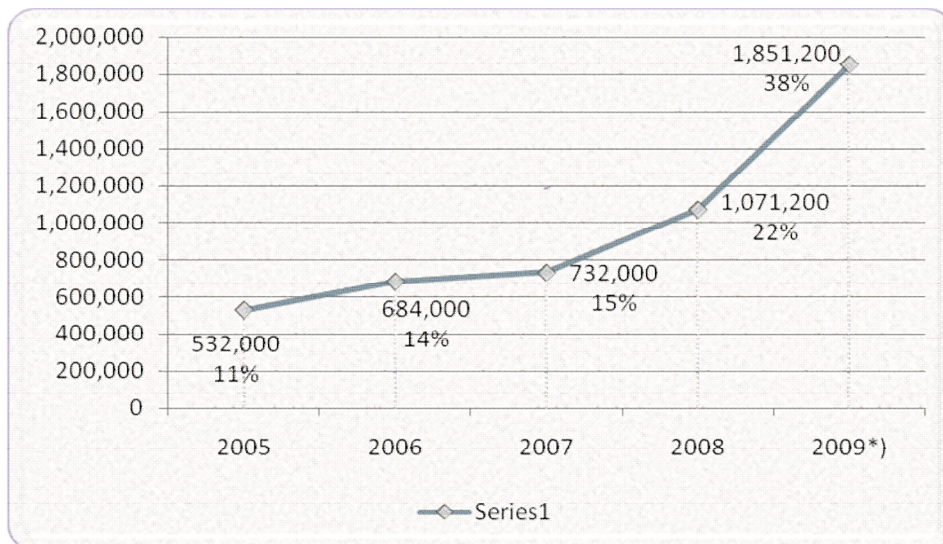
Pelaksanaan pengembangan SPAM IKK dimulai tahun 2005 hingga sekarang. Gambar 4.18 menunjukkan jumlah lokasi IKK dari rekapitulasi pembangunan SPAM IKK. Hal ini dipertegas dengan Gambar 4.19, yang menunjukkan total kapasitas (l/dt) dan Gambar 4.20 menyatakan jumlah penduduk terlayani (jiwa).

Gambar 4.19 Total Kapasitas (l/det) dalam Pembangunan SPAM IKK Tahun 2005 - 2009*)



Sumber : Menuju Pencapaian Target MDGs Bidang Air Minum, Hasil Pembangunan SPAM-IKK 2005-2009, Ditjen Cipta Karya, Departemen PU
 Catatan : *) Rencana

Gambar 4.20 Jumlah Penduduk Terlayani (Jiwa) dalam Pembangunan SPAM IKK Tahun 2005 - 2009*)



Sumber : Menuju Pencapaian Target MDGs Bidang Air Minum, Hasil Pembangunan SPAM-IKK 2005-2009, Ditjen Cipta Karya, Departemen PU
 Catatan : *) Rencana

Pamsimas adalah Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat. Berbasis masyarakat berarti seluruh proses perencanaan Pamsimas, seperti pemilihan kebutuhan air dan pelaksanaan kegiatan menyertakan partisipasi aktif masyarakat, tidak terkecuali kaum perempuan. Pamsimas merupakan kegiatan di bidang air minum dan sanitasi yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di perdesaan dan pinggiran perkotaan.

Pamsimas merupakan salah satu program guna mempercepat perwujudan tujuan MDG's, sehingga cakupan kerjanya cukup luas hampir di 50% provinsi di seluruh Indonesia dan pelaksanaannya dilakukan secara serentak. Sebanyak 15 provinsi ambil bagian dalam program Pamsimas, dengan rincian seperti disajikan pada Tabel 4.35. Secara keseluruhan Pamsimas tersebar di 100 kabupaten dan 10 kota di seluruh Indonesia. Sedangkan secara nasional, Pamsimas menargetkan 5.000 desa maupun kelurahan, dengan cakupan layanan tidak kurang dari 6 – 10 juta penduduk.

4.3.2 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP)

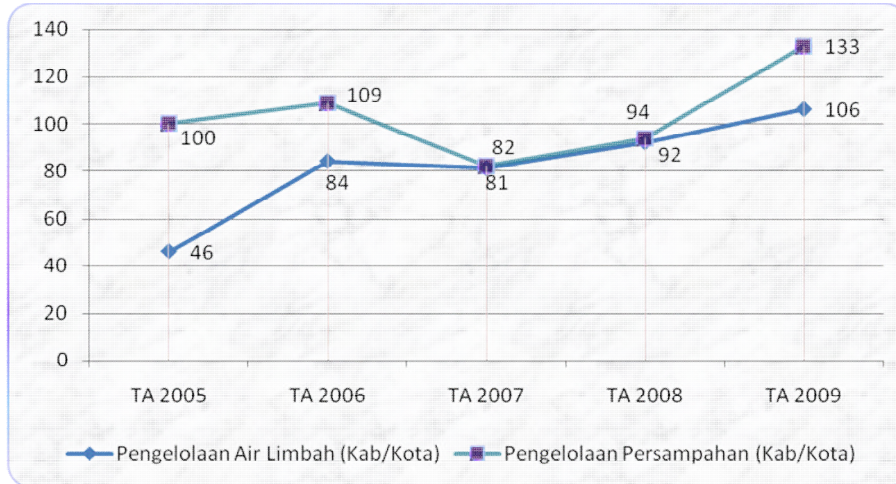
Untuk mendukung peningkatan kualitas permukiman, cakupan pelayanan infrastruktur permukiman semakin meningkat. Pada kurun waktu 2005 – 2009, telah dilaksanakan pembangunan infrastruktur pengelolaan air limbah di 409 kabupaten/kota dengan total jiwa terlayani sebesar 1.716.359 jiwa (Tabel 4.36). Pembangunan yang dilakukan antara lain, *Sewerage* (IPAL Terpusat), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Prasarana Sarana Air Limbah mendukung RSH/ Rusun/ Prokasih, dan Rehabilitasi/ Optimalisasi IPLT.

Pemerintah kota/ kabupaten juga bertanggung jawab dalam hal pengelolaan persampahan. Pada kurun waktu 2005–2009 telah dilaksanakan pembangunan infrastruktur pengelolaan air limbah di 518 kabupaten/kota dengan total jiwa terlayani sebesar 19.021.931 jiwa (Tabel 4.37). Kegiatan yang dilakukan antara lain pembangunan persampahan terpadu 3R, peningkatan kinerja TPA, pengembangan TPA regional, pengadaan *dump truck* dan motor sampah.

Sasaran Renstra PU dan Pencapaian Kinerja Bidang PLP tahun 2005-2009 untuk pengelolaan air limbah dan persampahan dapat dilihat pada Gambar 4.21 berikut. Pengelolaan air limbah dan persampahan di kabupaten/ kota selalu mengalami kenaikan, kecuali di tahun 2007 dan naik lagi di tahun 2008. Pada tahun 2007-2008, jumlah kabupaten/ kota hampir sama dalam hal pengelolaan air limbah dan persampahan.

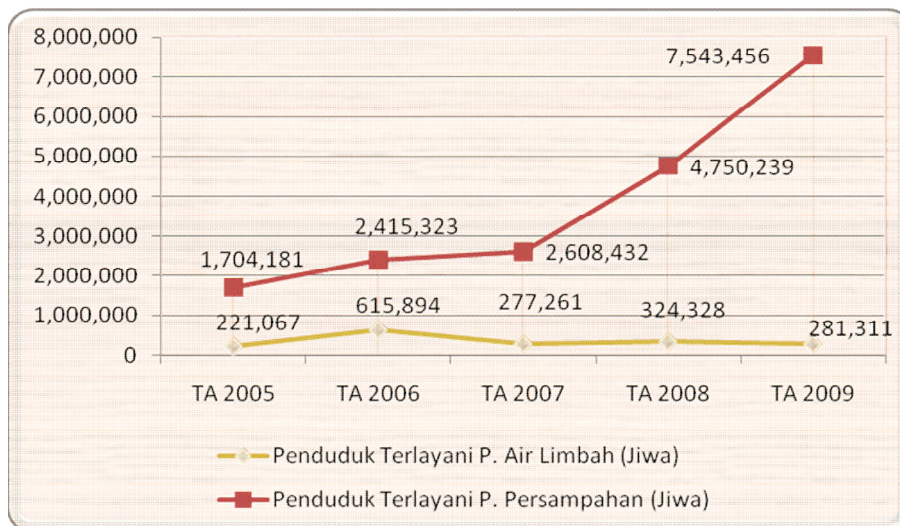
Prioritas fasilitas pengembangan infrastruktur permukiman kota diantaranya pada penduduk terlayani dari pengelolaan air limbah dan persampahan. Jumlah jiwa yang terlayani dari program utama tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.22. Jumlah penduduk terlayani untuk pengelolaan persampahan lebih banyak dibandingkan dengan pengelolaan air limbah, dan simpangan terjauh berada di tahun 2008-2009.

Gambar 4.21 Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Air Limbah dan Persampahan (Kab/ Kota) Tahun Anggaran 2005 - 2009



Sumber : Menuju Permukiman yang Layak Huni, Bebas Air Limbah, Bersih dari Sampah dan Bebas Genangan, Ditjen Cipta Karya, Departemen PU

Gambar 4.22 Penduduk Terlayani dari Pengelolaan Air Limbah dan Persampahan (Jiwa) Tahun Anggaran 2005 – 2009

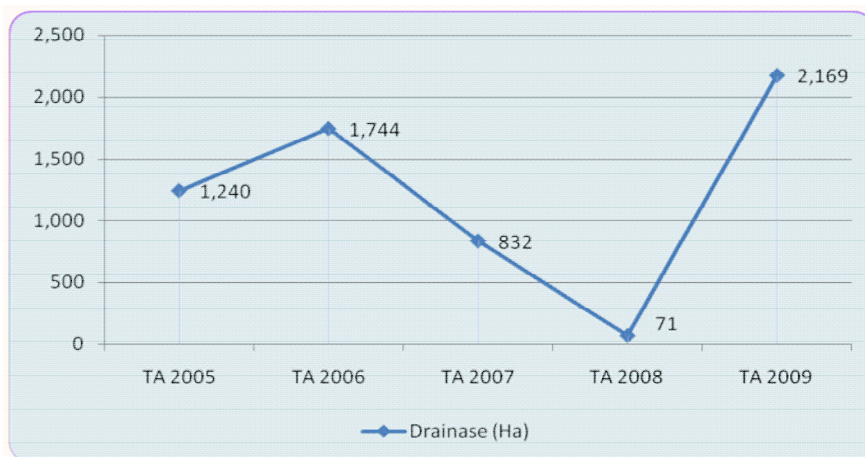


Sumber : Menuju Permukiman yang Layak Huni, Bebas Air Limbah, Bersih dari Sampah dan Bebas Genangan, Ditjen Cipta Karya, Departemen PU

Penanganan drainase dilakukan dengan penataan drainase yang baik, diantaranya untuk normalisasi peningkatan saluran primer dan sekunder, pembersihan saluran air secara rutin. Pada kurun waktu 2005–2009 telah

dilaksanakan pembangunan infrastruktur penanganan drainase di 300 kabupaten/kota dengan total jiwa terlayani sebesar 6.059 Ha (Tabel 4.38).

**Gambar 4.23 Hasil Pencapaian Drainase (Ha)
Tahun Anggaran 2005 – 2009**



Sumber : Menuju Permukiman yang Layak Huni, Bebas Air Limbah, Bersih dari Sampah dan Bebas Genangan, Ditjen Cipta Karya, Departemen PU

Sasaran pembangunan sub bidang drainase, total pencapaian dari tahun 2005 hingga tahun 2009 menangani genangan seluas 6.056 Ha. Dari Gambar 4.23 terlihat bahwa pencapaian menurun mulai tahun 2006-2008, untuk TA 2008 paling sedikit, yaitu hanya dapat menangani genangan seluas 71 Ha, sedangkan TA 2009 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu bisa menangani genangan seluas 2.169 Ha.

Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kota dilakukan diantaranya melalui kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Persampahan, serta Drainase. Kegiatan Pengelolaan Air Limbah pada tahun 2009 telah dilaksanakan di 106 kabupaten/ kota yang tersebar di 33 provinsi dengan penduduk terlayani sebanyak 281.311 jiwa. Dari sisi pemanfaatan, provinsi Bali yang paling banyak merasakan pelayanan air limbah, yaitu pada kawasan Sarbagita (Denpasar, Bangli, Gianyar, Tabanan) sebanyak 61.028 jiwa. Sedangkan dari sektor persampahan, Ditjen Cipta Karya



telah membangun prasarana dan sarana di 133 kabupaten/ kota dengan penduduk terlayani sebanyak 7.543.756 jiwa. Provinsi yang paling banyak menerima manfaat adalah Provinsi Bali (Sarbagita) dengan penduduk yang terlayani sebanyak 885.714 jiwa. Pada sektor drainase, sarana dan prasarana yang berhasil dibangun seluas 2.678 hektar di 106 kabupaten/ kota pada 30 provinsi. Dari luas total tersebut, sarana dan prasarana drainase paling luas dibangun di Provinsi NAD, yaitu seluas 550 hektar (Tabel 4.39).

Sanitasi Berbasis Masyarakat atau lebih dikenal dengan SANIMAS merupakan salah satu opsi program untuk peningkatan kualitas di bidang sanitasi khusus pengelolaan air limbah yang diperuntukkan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan padat kumuh miskin perkotaan dengan menerapkan pendekatan berbasis masyarakat. Pilihan teknologi SANIMAS ada bermacam-macam, yaitu Tangki Septik Bersama (*Shared Septic Tank*), Sistem Perpipaan Komunal (*Simplified Sewerage System*) dan MCK Plus++ (*Community Sanitation Centre*) dimana setiap sistem memiliki kelebihannya masing-masing. Sejak tahun 2003 hingga akhir tahun anggaran 2008, SANIMAS telah dibangun di 24 provinsi, 221 kota/ kabupaten, 323 titik/ lokasi di seluruh Indonesia, khususnya di lingkungan masyarakat yang tinggal di perkampungan padat dan kumuh serta miskin atau sering disebut PAKUMIS dengan jumlah layanan sebanyak 30.251 KK atau sekitar 136.602 jiwa (Tabel 4.40).

Terus meningkatnya jumlah penduduk berdampak pada semakin meningkatnya timbunan sampah. Hal tersebut menyebabkan beban TPA juga semakin berat. Maka perlu ada upaya untuk mengurangi beban ke TPA dengan berbagai metode, diantaranya dengan 3R. Reduce berarti mengurangi, reuse berarti menggunakan kembali dan recycle berarti mendaur ulang. Program 3R dimaksudkan untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Konsep dasar kegiatan 3R antara lain mengurangi



sampah mulai dari sumbernya. Kegiatan pengurangan sampah ini dilakukan dengan memilah antara lain sampah basah (organik) dan sampah kering (anorganik). Sampah basah diolah menjadi kompos dan sampah kering dijual kepada pemulung atau dijadikan produk daur ulang. Lokasi kegiatan Program 3R TA 2007-2009 dapat dilihat pada Tabel 4.41.

4.3.3 Pengembangan Permukiman

Penyelenggaraan Penataan Kawasan Kumuh dilakukan dengan pendekatan pembangunan rusunawa untuk mengatasi luasnya permukiman kumuh di perkotaan, terbatasnya/ tingginya harga lahan dan peremajaan kota. Tujuan utama pembangunan rusunawa ialah memberikan fasilitas hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan mahasiswa kurang mampu serta untuk meningkatkan kualitas permukiman.

Penyelenggaraan Rumah Susun Sederhana Sewa atau yang dikenal dengan Rusunawa, dirintis sejak tahun 2003 yaitu dengan penataan kawasan kumuh dengan tujuan meningkatkan kualitas lingkungan di daerah perkotaan. Upaya peremajaan kota melalui promosi Rusunawa tersebut mendapat tanggapan yang baik dari pemerintah daerah serta masyarakat setempat. Rusunawa diselenggarakan di tujuh provinsi dengan total jumlah unit sebanyak 1.240 buah yang tersebar di 13,5 tower twin block (Tabel 4.42). Luas tipikal unit hanya ada dua jenis yaitu tipe 27 dan 21 meter persegi.

Pada tahun 2004, Kementerian Pekerjaan Umum kembali membangun 844 unit tipikal dengan varian luas 20, 27, dan 30 meter persegi pada 4 provinsi, pada total 9 buah twin block. Pada tahun 2005, 11 provinsi menyelenggarakan pembangunan 23 twin block rusunawa dan tersedia 2.200 unit dengan luasan yang sama dengan tahun sebelumnya. Desain bangunan gedung rusunawa

belum distandardisasi sehingga dipandang perlu untuk menyusun prototipe desain tipe 21 meter persegi.

Peningkatan yang signifikan menanggapi kebutuhan akan perumahan kota melalui pembangunan rusunawa terus berlanjut hingga tahun 2009. Tercatat pada tahun 2006-2007 dibangun 42 twin block dengan jumlah unit sebanyak 4.032 buah. Pada tahun 2007-2008 dibangun 46 twin block dengan 4.433 unit. Kemudian pada tahun 2008-2009 disediakan unit sejumlah 5.539 yang tersebar pada 56 buah twin block (Tabel 4.42).

Kementerian Pekerjaan Umum dalam mendukung penanggulangan kemiskinan di pedesaan melalui penyediaan infrastruktur dilaksanakan sejak tahun 2005. Dengan pembangunan infrastruktur pedesaan diharapkan dapat memberikan peluang dalam mendukung kegiatan produksi, ekonomi, sosial yang merupakan faktor-faktor penting dalam perkembangan pedesaan.

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) sampai tahun 2009 telah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat di 22.147 desa dari 33 provinsi. Sasaran PPIP menitikberatkan penanganan pada desa-desa miskin dan tertinggal pada kabupaten-kabupaten tertinggal. Namun tidak sedikit ditemukan desa yang tingkat kemiskinannya tinggi di kabupaten non tertinggal. Jumlah desa miskin dan tertinggal yang ada di Indonesia mencapai lebih dari 32.000 desa. Untuk itu PPIP juga memprioritaskan pada desa-desa dengan tingkat kemiskinannya lebih tinggi (Tabel 4.43).

Capaian sasaran PPIP sebanyak 22.147 desa belum dapat memenuhi target sebanyak 32.000 desa tertinggal yang ada saat ini, atau baru mencapai 69%. Ini pun masih terhitung adanya pengulangan penanganan yang dilakukan untuk desa-desa yang mempunyai kinerja baik atau desa yang mempunyai tingkat keparahan infrastruktur yang tinggi sesuai dengan rencana RPJM yang disusun

oleh masyarakat. Secara rinci, capaian sasaran pelaksanaan PPIP per provinsi dapat dilihat pada Tabel 4.43.

Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman Perdesaan skala kawasan dilakukan melalui Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Perdesaan (DPP/ KTP2D). Pengembangan Kawasan Agropolitan dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan Jalan Desa, Saluran Drainase, Jembatan, Saluran Irigasi, Pasar, Gudang, SubTerminal Agropolitan, dan Penyusunan Bantuan Teknis. Pengembangan Kawasan Agropolitan bertujuan untuk menumbuhkembangkan kelembagaan usaha ekonomi petani yang efektif, efisien, berdaya saing, serta sarana dan prasarana umum dan social yang mendukung kelancaran usaha ekonomi masyarakat. Kegiatan ini juga menciptakan iklim usaha ekonomi yang mampu mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha masyarakat di kawasan tersebut.

Pada Tahun Anggaran 2009, Pengembangan Kawasan Agropolitan dilakukan di 30 provinsi dengan jumlah kawasan terbangun pada tiap provinsinya antara 1 sampai 5 kawasan. Sehingga total hasil pelaksanaan pada TA 2009 adalah 60 kawasan dengan Provinsi Sulawesi Utara mendapatkan paling banyak pelaksanaan kegiatan, yaitu 5 kawasan (Tabel 4.44).

Sedangkan Desa Pusat Pertumbuhan/ Kawasan Terpadu Pusat Pertumbuhan Desa (DPP/ KTP2D) diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal pada kawasan-kawasan perdesaan yang potensial dan cepat tumbuh, terutama pada desa-desa pusat pertumbuhan yang berpotensi didorong menjadi sentra-sentra pengembangan agrobisnis, agrowisata, agroindustri, dan agropolitan.

Untuk pengembangan prasarana dan sarana perdesaan (DPP/ KTP2D) jenis kegiatannya adalah pembangunan jalan lingkungan, pembangunan saluran



lingkungan, pembangunan gorong-gorong, pembangunan jalan poros desa, pembangunan plat duiker, jembatan ulin, pasar desa, bronjong, talud, dan jalan setapak. Kecuali Provinsi DKI Jakarta, semua provinsi mendapatkan dana pembangunan KTP2D untuk membangun prasarana dan sarana tersebut yang berjumlah 47 kawasan dan tersebar di 32 provinsi (Tabel 4.44).

4.3.4 Analisis Statistik Bidang Cipta Karya

Berdasarkan data pada Tabel 4.45 akan dibuat plot yang secara simultan dapat menggambarkan data yang terdiri dari n objek (provinsi) dan p peubah (Jumlah Jiwa terlayani dari pengolahan air limbah, persampahan, dan drainase) dalam dua dimensi. Plot atau grafik ini selanjutnya disebut Biplot yang merupakan upaya grafis dalam tampilan dua dimensi, mendeskripsikan ciri-ciri provinsi sehubungan dengan pembangunan infrastruktur bidang cipta karya.

Melalui analisis biplot terungkap bahwa penduduk terlayani bervariasi menurut pengolahan air limbah, persampahan, drainase, selain itu menggambarkan pengaruh interaksi antara jiwa terlayani dan kondisi lingkungan di sekitar pengolahan air limbah, persampahan dan drainase. Titik-titik amatan yang mempunyai arah yang sama berarti berinteraksi positif (saling menunjang), sedangkan titik-titik yang berbeda arah menunjukkan berinteraksi negatif.

Gambar biplot menunjukkan pengolahan air limbah, persampahan, drainase yang berinteraksi khas dengan lokasi provinsi tertentu. Makin dekat jarak lokasi dengan salah satu pengolahan air limbah, persampahan, dan drainase, atau semakin kecil sudut diantara keduanya, maka makin kuat interaksinya. Berdasarkan peta dua dimensi hasil metode biplot dapat digambarkan ciri yang menonjol (*image*) dari setiap provinsi menurut kondisi air limbah, persampahan, dan drainase di wilayahnya. Melalui peta konfigurasi hasil metode biplot dapat

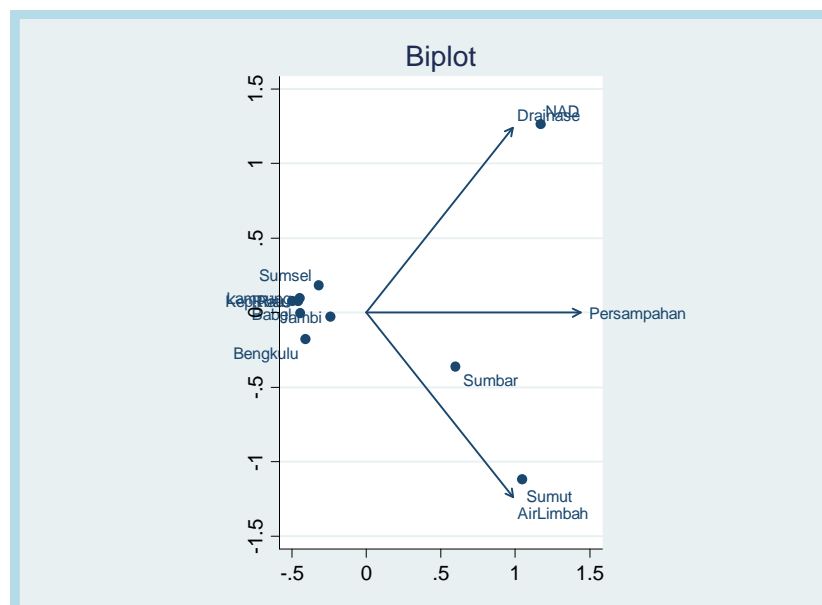
dikembangkan cara untuk menentukan prioritas pengembangan pengolahan air limbah, persampahan, dan drainase.

Hasil analisis biplot dari data pengelolaan air limbah, persampahan, drainase tahun 2009, didapat keluaran sebagai berikut :

a) Sumatera (Lihat Gambar 4.24)

- Provinsi di Pulau Sumatera yang paling banyak menerima manfaat pembangunan drainase adalah Nanggroe Aceh Darussalam
- Untuk pengolahan persampahan, provinsi yang relatif dominan menerima manfaatnya adalah Sumatera Barat
- Provinsi yang dominan menerima manfaat pengolahan air limbah adalah Sumatera Utara
- Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, Riau, Bengkulu, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung memiliki kesamaan jumlah jiwa terlayani dalam hal pemanfaatan drainase, persampahan, dan air limbah

Gambar 4.24 Grafik Biplot dari Data Tabel 4.45 untuk Pulau Sumatera

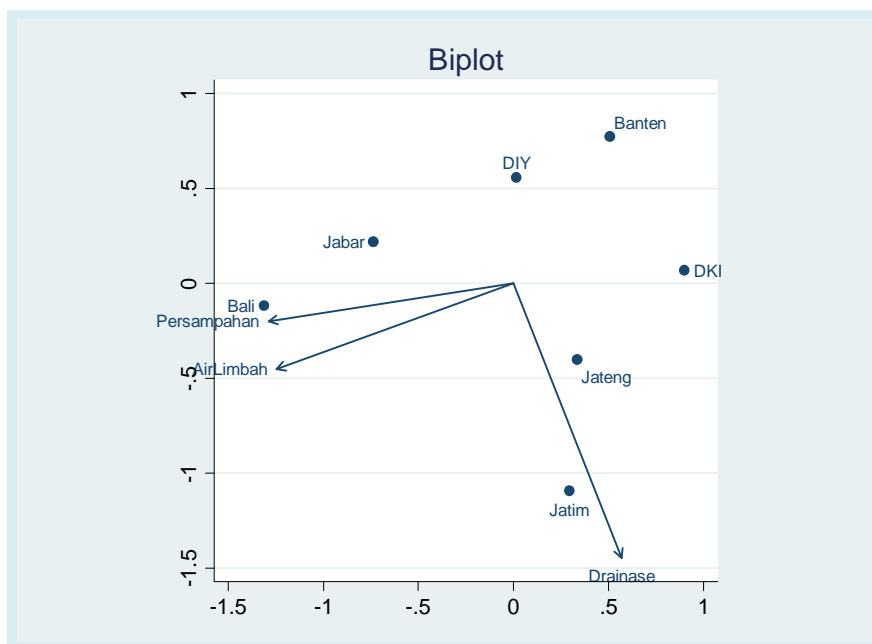




b) Jawa dan Bali (Lihat Gambar 4.25)

- o Bangunan infrastruktur pengolahan air limbah/ tinja dan persampahan terasa sangat penting di Pulau Jawa dan Bali, terutama di Provinsi Bali.
- o Saluran drainase yang mencegah banjir dan genangan di Pulau Jawa dan Bali, lebih dominan di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah
- o Tingkat pelayanan air limbah, persampahan, dan drainase belum begitu dominan di Provinsi Banten, DI Yogyakarta, dan DKI Jakarta
- o Kondisi jiwa terlayani oleh pengelolaan persampahan dan air limbah memiliki hubungan yang erat di wilayah Pulau Jawa dan Bali

Gambar 4.25 Grafik Biplot dari Data Tabel 4.45 untuk Pulau Jawa dan Bali

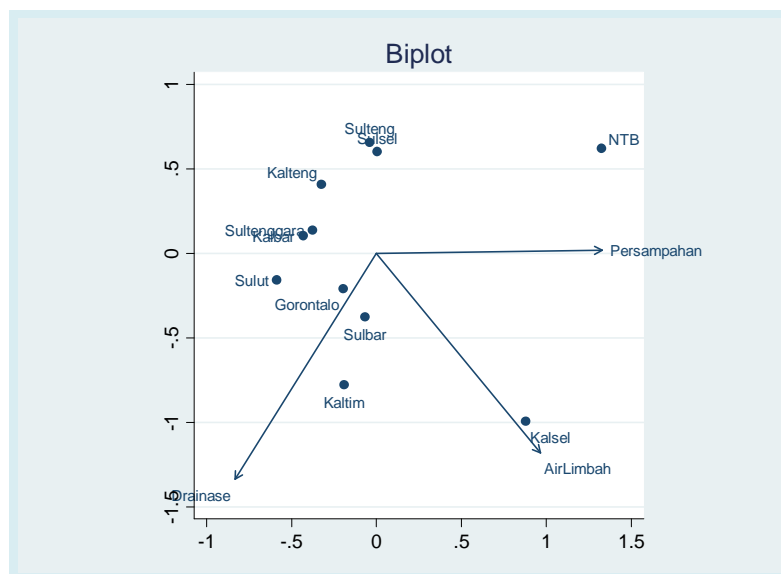


c) Kalimantan, Sulawesi dan NTB (Lihat Gambar 4.26)

- o Pembangunan sistem pengelolaan air limbah di Pulau Kalimantan, Sulawesi dan NTB, terutama dominan di Provinsi Kalimantan Selatan.
- o Sebagian besar drainase atau saluran pembuangan air, dominan jiwa terlayani di Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, dan Gorontalo

- o Pantauan Biplot di seputar persampahan menunjukkan, bahwa Provinsi NTB paling banyak tingkat pelayanan jiwanya.
- o Kondisi saluran pembuangan persampahan, air limbah, dan drainase di Provinsi Sulawesi Tengah mirip dengan Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan kondisi Provinsi Sulawesi Tenggara mirip dengan Provinsi Kalimantan Barat (dalam hal jiwa terlayani)

Gambar 4.26 Grafik Biplot dari Tabel 4.45 untuk Pulau Kalimantan, Sulawesi dan NTB

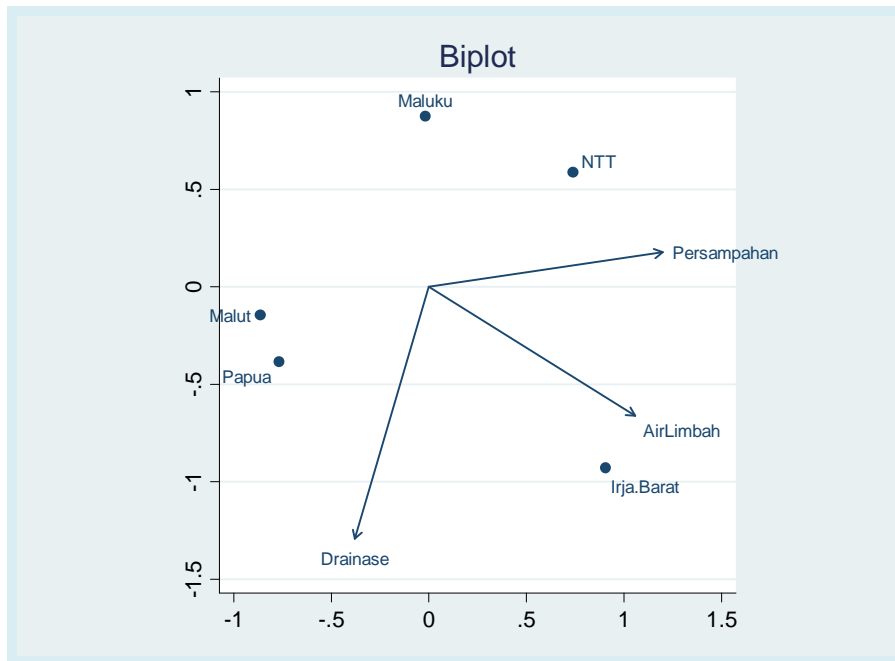


d) Maluku, Papua dan NTT (Lihat Gambar 4.27)

- o Sistem drainase di Pulau Maluku, Papua dan NTT, tidak terlalu dominan dalam hal jiwa terlayani, kecuali di Provinsi Papua
- o Pengelolaan persampahan relatif dominan jiwa yang terlayani di Provinsi Nusa Tenggara Timur
- o Instalasi pengolahan air limbah lebih dominan di seputar Provinsi Papua Barat dalam hal tingkat pelayanan jiwanya.
- o Provinsi Maluku Utara dan Papua memiliki kesamaan dalam hal mendukung upaya pemeliharaan jaringan drainase, air limbah, dan persampahan



Gambar 4.27 Grafik Biplot dari Tabel 4.45 untuk Pulau Maluku, Papua dan NTT

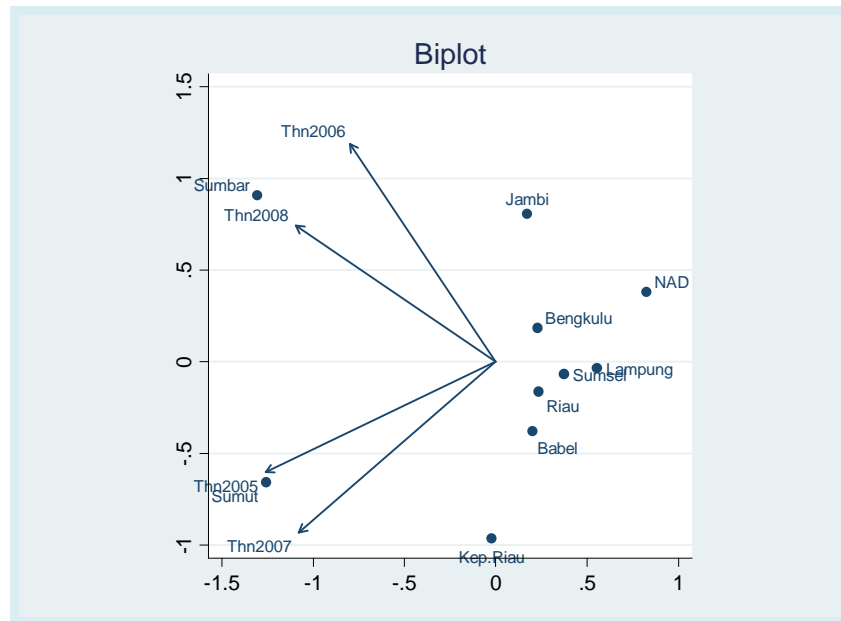


Hasil analisis biplot dari data pengelolaan air limbah dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 (Tabel 4.46), didapat keluaran sebagai berikut :

a) Sumatera (Lihat Gambar 4.28)

- o Pengolahan air limbah tahun 2005 dan 2007 dominan dimanfaatkan di Provinsi Sumatera Utara, di Kepulauan Riau dominan di tahun 2007
- o Instalasi pengolahan air limbah tahun 2006 dan 2008 dominan jiwa yang terlayani di Provinsi Sumatera Barat, khusus Jambi dominan tahun 2006
- o Pengelolaan air limbah dari tahun 2005 sampai 2008 belum optimal capaian jiwa yang terlayani di Provinsi NAD, Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Riau, Babel, Jambi, dan Kepulauan Riau
- o Kondisi jiwa terlayani dari pengelolaan air limbah tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 memiliki kemiripan relatif di provinsi Sumatera Selatan dan Lampung

Gambar 4.28 Grafik Biplot dari Tabel 4.46 untuk Pulau Sumatera



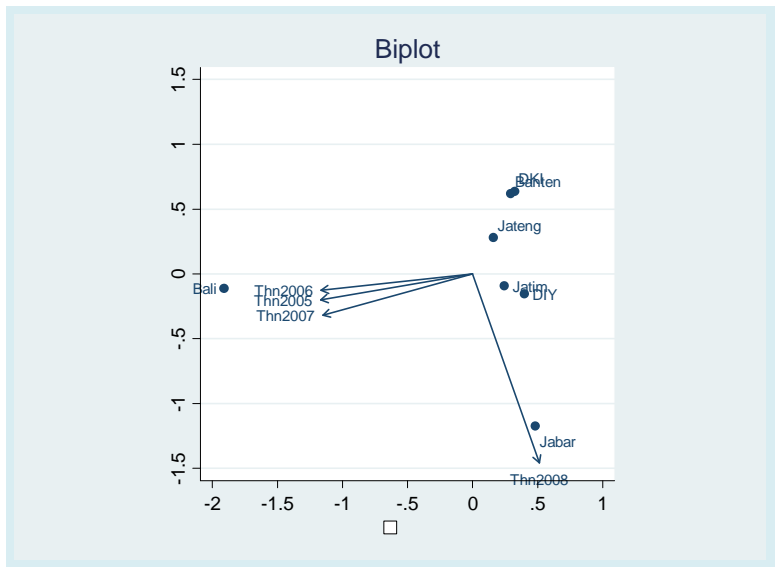
b) Jawa dan Bali (Lihat Gambar 4.29)

- o Pelayanan pengolahan air limbah dirasakan masyarakat Bali tahun 2005 sampai 2007
- o Layanan air limbah dapat menjadi peluang usaha bagi masyarakat Jawa Barat di tahun 2008
- o Peningkatan pelayanan air limbah tidak merata di provinsi DKI Jakarta dan Banten untuk rentang waktu 2005 sampai 2008

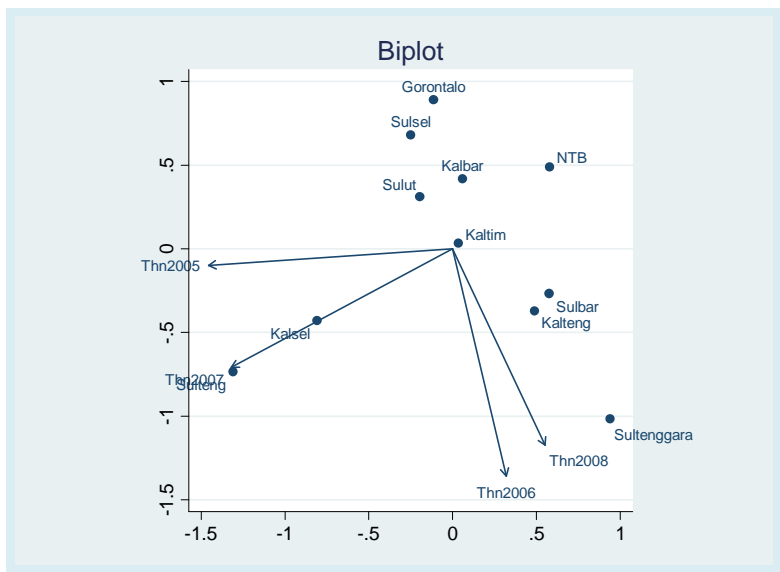
c) Kalimantan, Sulawesi, NTB (Lihat Gambar 4.30)

- o Jumlah pelanggan air limbah di Provinsi Kalimantan Selatan dan Sulawesi Tengah meningkat di tahun 2007
- o Pengelolaan air limbah di Sulawesi Tenggara bisa dijadikan barometer di tahun 2008, ditandai dengan banyaknya jiwa yang terlayani
- o Kondisi pengembangan wilayah pelayanan air limbah di Provinsi Sulawesi Barat memiliki kemiripan dengan Kalimantan Tengah

Gambar 4.29 Grafik Biplot dari Tabel 4.46 untuk Pulau Jawa, Bali



Gambar 4.30 Grafik Biplot dari Tabel 4.46 untuk Pulau Kalimantan, Sulawesi, NTB

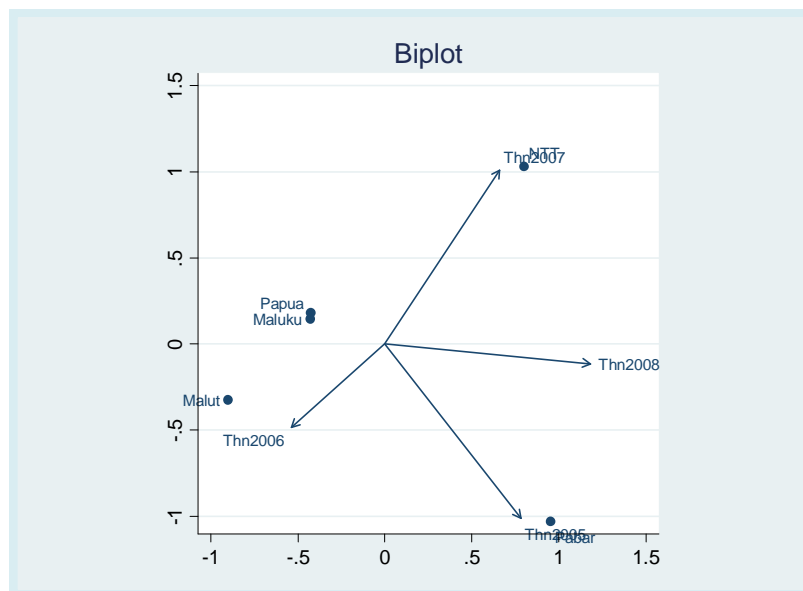


d) Maluku, Papua, NTT (Lihat Gambar 4.31)

- o Pengolahan air limbah dilakukan sesuai dengan karakteristik pencemar tahun 2005 lebih ke wilayah Provinsi Papua Barat sebagai pemakai

- Pengolahan air limbah tahun 2006 dilakukan lebih untuk melayani kebutuhan Provinsi Maluku Utara
- Sistem pengolahan air limbah tahun 2007 telah melayani penduduk terbanyak di Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Pengolahan air limbah di provinsi Papua memiliki kemiripan dengan Maluku dalam hal jiwa yang terlayani

Gambar 4.31 Grafik Biplot dari Tabel 4.46 untuk Pulau Maluku, Papua, NTT

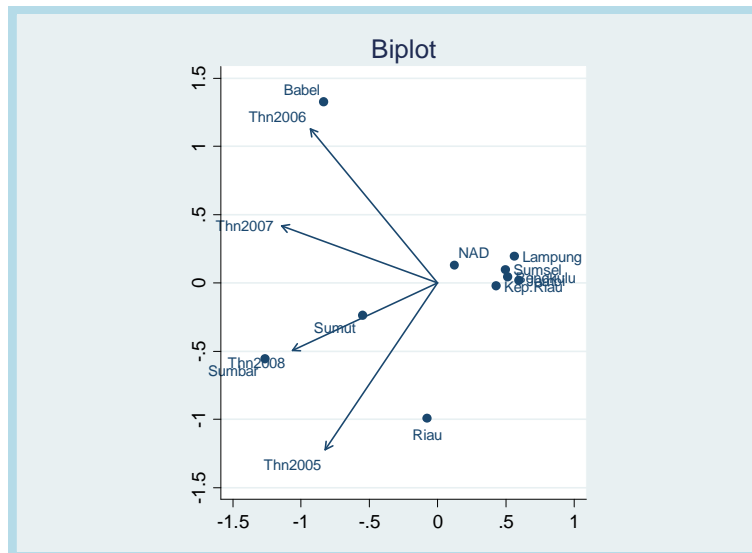


Hasil analisis biplot dari data pengelolaan persampahan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 (Tabel 4.47), didapat keluaran sebagai berikut :

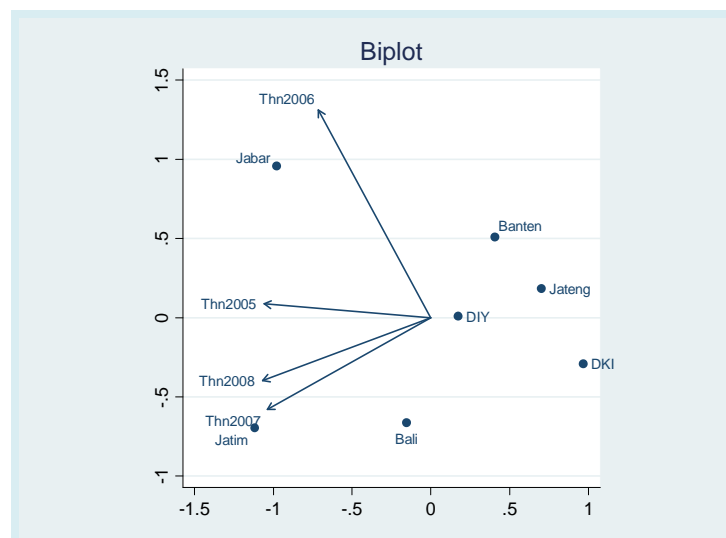
a) Sumatera (Lihat Gambar 4.32)

- Dari tahun 2005 provinsi yang mampu mengelola sampah adalah Riau
- Pengelolaan sampah tahun 2006 lebih dominan di Provinsi Babel
- Kebijakan pengelolaan persampahan tahun 2007 banyak dimanfaatkan oleh masyarakat di Provinsi Sumatera Utara
- Pengelolaan sampah dan implementasinya bagi Provinsi Sumatera Barat sangat dominan di tahun 2008

Gambar 4.32 Grafik Biplot dari Tabel 4.47 untuk Pulau Sumatera



Gambar 4.33 Grafik Biplot dari Tabel 4.47 untuk Pulau Jawa, Bali



b) Jawa dan Bali (Lihat Gambar 4.33)

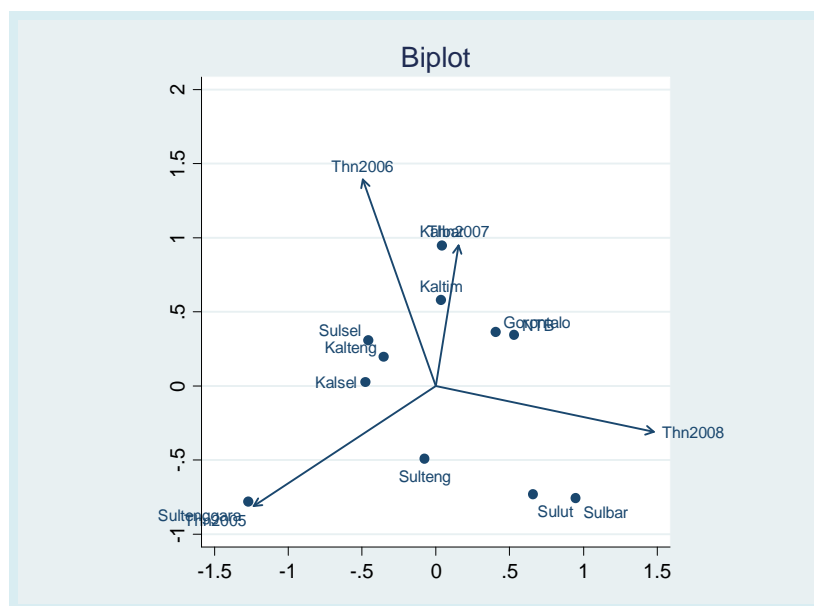
- Kebijakan teknis pengelolaan persampahan di Provinsi Jawa Barat banyak dirasakan masyarakatnya di tahun 2006
- Penanganan persampahan banyak memberi manfaat bagi masyarakat Jawa Timur khususnya tahun 2007 sampai 2008

- Proses pengelolaan sampah yang berkaitan dengan jiwa terlayani, maka kondisi tahun 2007 relatif sama dengan kondisi tahun 2008

c) Kalimantan, Sulawesi, NTB (Lihat Gambar 4.34)

- Pengelolaan sampah bermanfaat banyak bagi masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara di tahun 2005
- Partisipasi masyarakat Kalimantan Barat dalam pengelolaan sampah menonjol di tahun 2007
- Keterlibatan masyarakat Sulawesi Barat dan Sulawesi Utara dominan di tahun 2008

Gambar 4.34 Grafik Biplot dari Tabel 4.47 untuk Pulau Kalimantan, Sulawesi, NTB

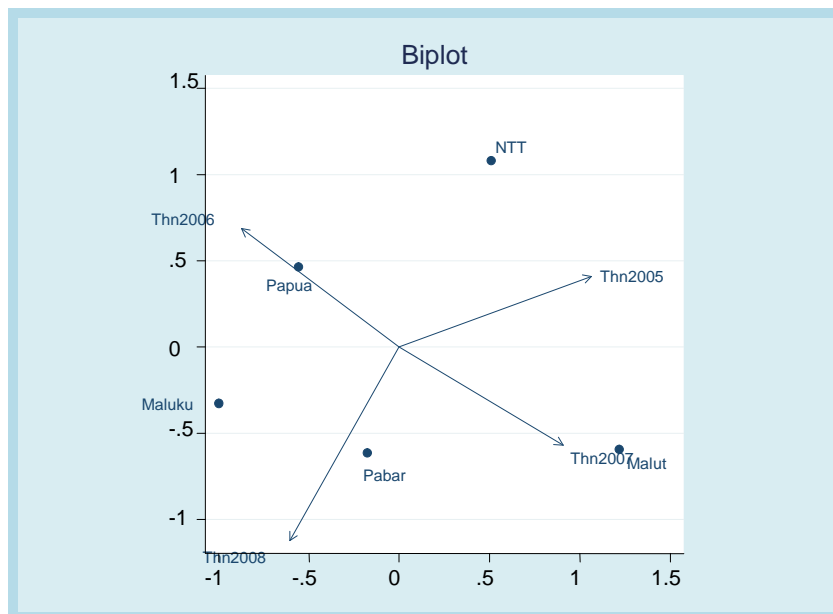


d) Maluku, Papua, NTT (Lihat Gambar 4.35)

- Keterlibatan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kegiatan persampahan lebih menonjol di tahun 2005
- Penduduk terlayani sektor persampahan di Provinsi Papua dominan di tahun 2006

- Tingkat pelayanan persampahan tahun 2007 lebih dominan di Provinsi Maluku Utara
- Penanganan sampah dilakukan oleh masyarakat Papua Barat lebih menonjol di tahun 2008

Gambar 4.35 Grafik Biplot dari Tabel 4.47 untuk Pulau Maluku, Papua, NTT

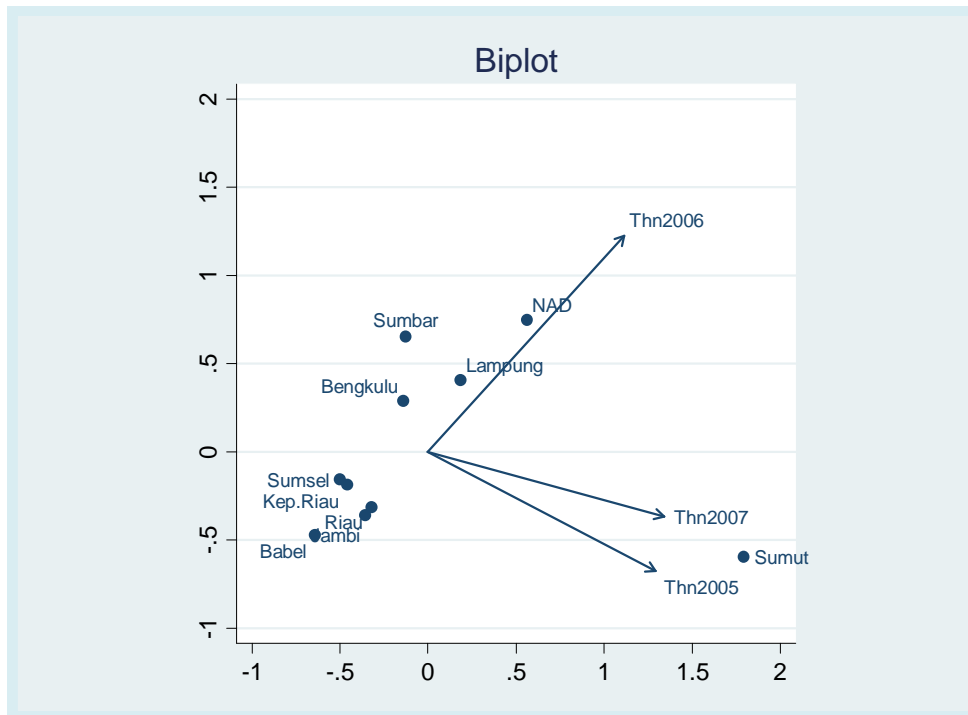


Hasil analisis biplot dari data pengelolaan drainase dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 (Tabel 4.48), didapat keluaran sebagai berikut :

a) Sumatera (Lihat Gambar 4.36)

- ◇ Tahun 2005 dan 2007 sistem drainase dominan di Provinsi Sumatera Utara
- ◇ Saluran drainase yang dikelola tahun 2006 cenderung dominan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- ◇ Luasan sistem drainase di Provinsi Sumatera Selatan cenderung sama dengan di Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan Provinsi Riau cenderung sama dengan Provinsi Jambi

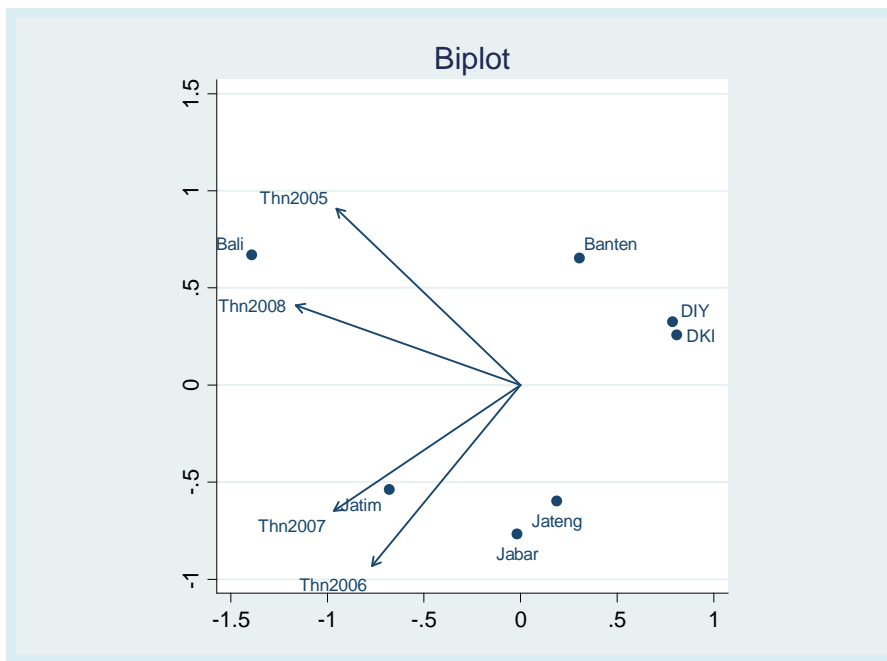
Gambar 4.36 Grafik Biplot dari Tabel 4.48 untuk Pulau Sumatera



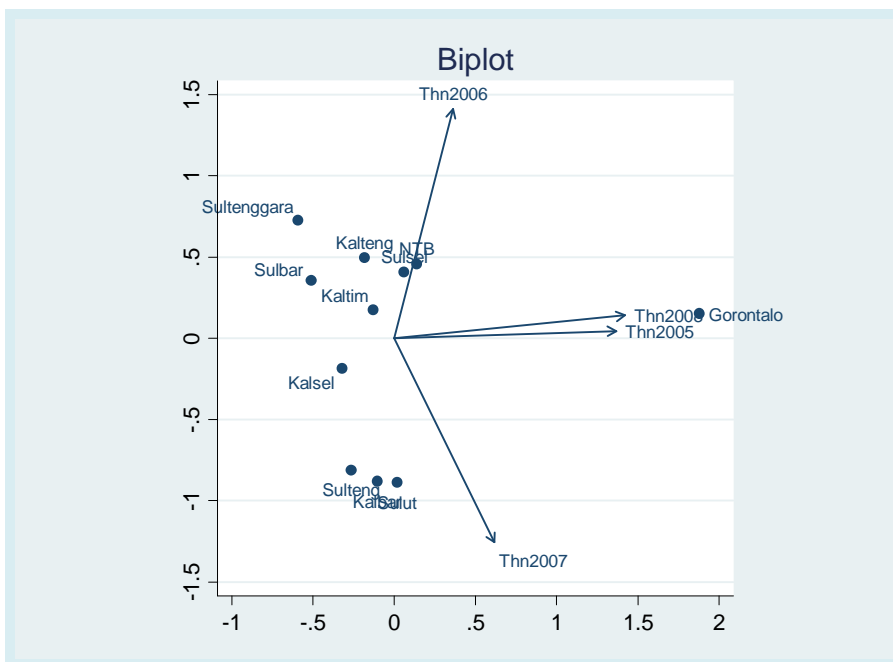
b) Jawa dan Bali (Lihat Gambar 4.37)

- ◇ Sistem drainase di Provinsi Bali cenderung dominan di tahun 2005 dan 2008
- ◇ Pembangunan drainase tahun 2006 dominan di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat
- ◇ Pengerjaan pembangunan saluran drainase tahun 2007 lebih menonjol di Provinsi Jawa Timur
- ◇ Kondisi luasan saluran drainase di Provinsi DKI Jakarta mirip dengan DI Yogyakarta, sedangkan Jawa Tengah lebih mirip Jawa Barat
- ◇ Kondisi luasan saluran drainase tahun 2006 mirip dengan tahun 2007, sedangkan tahun 2005 lebih mirip dengan tahun 2008

Gambar 4.37 Grafik Biplot dari Tabel 4.48 untuk Pulau Jawa, Bali



Gambar 4.38 Grafik Biplot dari Tabel 4.48 untuk Pulau Kalimantan, Sulawesi, NTB



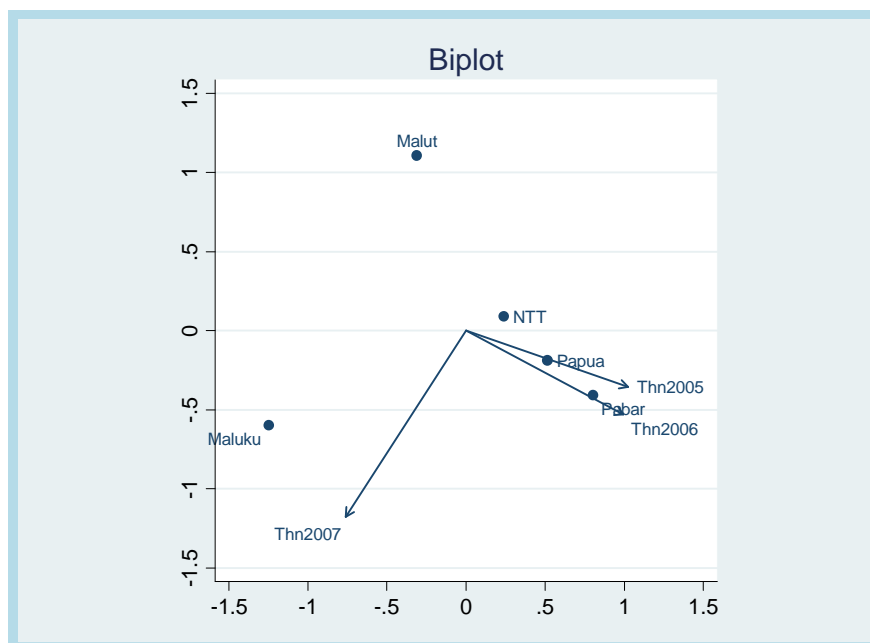
c) Kalimantan, Sulawesi, NTB (Lihat Gambar 4.38)

- ◇ Saluran drainase tahun 2005 dan 2008 dominan di Provinsi Gorontalo
- ◇ Provinsi Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Utara lebih cenderung memiliki kesamaan pada luasan saluran drainasinya
- ◇ Wilayah yang luasan drainasinya hampir sama adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan

d) Maluku, Papua, NTT (Lihat Gambar 4.39)

- ◇ Saluran drainase tahun 2005 dan 2006 lebih dominan di Provinsi Papua Barat dan Papua, serta relatif di Provinsi Nusa Tenggara Timur
- ◇ Proyek drainase tahun 2007 lebih dominan di Provinsi Maluku
- ◇ Luasan sistem drainase di Provinsi Maluku Utara cenderung sedikit dibandingkan provinsi lain di Wilayah Maluku, Papua, NTT dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007

Gambar 4.39 Grafik Biplot dari Tabel 4.48 untuk Pulau Maluku, Papua, NTT





4.4 Penataan Ruang

Penataan ruang merupakan pendekatan pembangunan berdimensi spasial yang memberikan perhatian utama pada pengaturan perilaku manusia dalam memanfaatkan ruang dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya yang bertujuan untuk mewujudkan ruang kehidupan yang nyaman, aman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dalam wadah NKRI (Penjelasan Pasal 20 ayat 3 UU No. 26 Tahun 2007) tentang Penataan Ruang. Dengan demikian penataan ruang merupakan suatu langkah pendekatan spasial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Penataan ruang diharapkan :

- i. Dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- ii. Tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang;
- iii. Tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang

Upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan :

❖ **Perencanaan Tata Ruang**

Suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR

❖ **Pemanfaatan Ruang**

Upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program serta pembiayaannya

❖ **Pengendalian Pemanfaatan Ruang**

Upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang yang meliputi peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi



4.4.1 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional, mengamanatkan keharusan pembuatan 17 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi, 36 Perda Kabupaten, serta 20 Perda Kotamadya. Pembuatan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masih jauh dari target. Penyebabnya antara lain, pemerintah pusat dan daerah masih belum sepakat tentang soal status suatu kawasan tertentu. Selain itu, kelambatan pembuatan Perda ini karena sebagian daerah mengalami kendala dalam mendapatkan persetujuan substansi.

Perda RTRW ini dapat menjadi pedoman pembangunan di daerah agar lebih fokus dan terarah. Selain itu, terkait proses pembangunan sangat penting untuk mengacu kepada Perda RTRW. Status progres penyelesaian Perda RTRW sampai dengan 31 Agustus 2010 untuk Provinsi sebesar 18,2%, Kabupaten sebesar 2%, dan Kota sebesar 3,2%. Dengan selesainya Perda RTRW nanti disusul dengan penyusunan Perda Rencana Detil Tata Ruang (RDTR). Penyusunan Perda RDTR ini sangat penting terutama untuk kawasan-kawasan yang dianggap strategis di daerah, misalnya kawasan ibukota kabupaten. Adanya Perda RDTR ini diharapkan lahan yang masih tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Ditjen Penataan Ruang menargetkan semua provinsi yang berjumlah 33 provinsi sudah bisa menerbitkan Perda RTRW provinsinya pada tahun ini untuk menjadi pedoman baru dalam pemanfaatan ruang wilayah bagi kegiatan ekonomi yang berbasis lestari lingkungan. Tabel 4.49 menunjukkan Daftar Status Perda RTRW di Indonesia sampai Agustus 2010. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa sudah ada enam provinsi yang menerbitkan Perda RTRW provinsinya, di antaranya DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Lampung, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Bali. Selain itu ada tiga kota dan delapan kabupaten yang telah menerbitkan Perda RTRW di wilayahnya.



Sistem perencanaan keuangan di Indonesia mengacu kepada UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam UU tersebut dikenal empat hirarki rencana tata ruang, yaitu :

1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional
2. RTRW Pulau,
3. RTRW Provinsi,
4. RTRW Kabupaten/ Kota

RTRW Nasional menjadi acuan dalam penyusunan RTRW Pulau. RTRW Pulau menjadi Pedoman penyusunan RTRW Provinsi yang kemudian dijadikan pedoman lebih lanjut oleh kabupaten/ kota.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau yang menjadi Lampiran II mengenai Rancangan Peraturan Presiden tentang RTR Pulau Strategi Pengembangan Sistem Pusat Permukiman di Pulau, antara lain menyebutkan Rencana Tata Ruang Wilayah Empat Pulau, yaitu Sumatera, Jawa dan Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, yang dirinci per provinsi seperti pada Tabel 4.50. Fungsi kota sebagai pusat permukiman disini meliputi PKN, PKW, dan PKSN.

Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan PKN, PKW dan PKSN menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah sebagai berikut :

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kota yang mempunyai potensi sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional dan mempunyai potensi untuk mendorong daerah sekitarnya serta sebagai pusat jasa, pusat pengolahan, simpul transportasi yang melayani beberapa provinsi dan nasional, dengan kriteria penentuan: kota yang mempunyai potensi sebagai pintu gerbang ke kawasan internasional dan mempunyai potensi untuk mendorong daerah sekitarnya, pusat jasa-jasa pelayanan keuangan/ bank



yang cakupan pelayanannya berskala nasional/ beberapa provinsi, pusat pengolahan/ pengumpul barang secara nasional/ beberapa provinsi, simpul transportasi secara nasional/ beberapa provinsi, jasa pemerintahan untuk Nasional/ beberapa provinsi, jasa publik yang lain untuk Nasional/ beberapa provinsi.

2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kota sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten, dengan kriteria penentuan : pusat jasa pelayanan keuangan/ bank yang melayani beberapa kabupaten, pusat pengolahan/ pengumpul barang yang melayani kabupaten, simpul transportasi untuk beberapa kabupaten, pusat pelayanan jasa pemerintahan untuk beberapa kabupaten, pusat pelayanan jasa yang lain untuk beberapa kabupaten.
3. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) adalah pusat perkotaan yang ditetapkan secara nasional dalam RTRW Nasional untuk mendorong perkembangan kawasan perbatasan negara; Kawasan yang ditetapkan sebagai PKSN tersebut didukung dan dilengkapi dengan jaringan prasarana wilayah yang tingkat pelayanannya disesuaikan dengan hierarki kegiatan dan kebutuhan pelayanan.

PKSN ditetapkan dengan kriteria :

- a. pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga;
- b. pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga;
- c. pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya; dan/atau
- d. pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya.



4.4.2 Pengembangan Kawasan

Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budi daya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut. Melalui Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008) telah ditetapkan 70 kawasan andalan yang tersebar di seluruh Indonesia meliputi darat dan laut, seperti yang terlihat di Tabel 4.51.

Kebijakan pengembangan Kawasan Strategi Nasional (KSN) bertujuan agar terjadi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional. Nantinya, kondisi itu berimbas pada peningkatan daya saing pada perekonomian internasional. Selain itu KSN ini bisa menyokong pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antar kawasan. Tabel 4.52 menunjukkan kawasan strategis per provinsi, yang merupakan Lampiran X dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008.

Salah satu unsur pembentuk pola ruang dalam Rencana Tata Ruang adalah terdapatnya penetapan kawasan lindung pada suatu wilayah. Kawasan lindung memiliki peran yang penting, karena berfungsi memberikan perlindungan terhadap kawasan hilirnya dan pelestarian terhadap kawasan lindung. Fungsi pengawasan terhadap pemanfaatan ruang merupakan hal utama yang harus ditingkatkan dalam pelestarian kawasan lindung. Adanya RTR dapat menjadi pedoman dalam penentuan siapa yang bertanggung jawab dalam pengawasan kawasan-kawasan lindung yang telah ditetapkan sesuai dengan tupoksi dari masing-masing lembaga pemerintahan. Terkait upaya untuk meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan akan pentingnya tata ruang dalam pelestarian kawasan lindung, diperlukan pemahaman bagi seluruh pemangku kepentingan tentang arti pentingnya RTR bagi pengembangan suatu wilayah. Penetapan Kawasan Lindung Nasional yang merupakan Lampiran VIII dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, dapat dilihat pada Tabel 4.53.

Tabel 4.11.1
Fungsi Jalan Arteri Jalan Tol Pulau Sumatera

No.	Nama Ruas	Panjang Ruas (km)
1	2	3
1	BELAWAN - MEDAN - TANJUNG MORAWA	42,700
Total		42,700

Sumber : Lampiran 34.B : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 630 / KPTS / M / 2009

Tanggal : 31 Desember 2009

Pulau : Sumatera

Tabel 4.11.2
Fungsi Jalan Arteri Jalan Tol Pulau Sulawesi

No.	Nama Ruas	Panjang Ruas (km)
1	2	3
1	UJUNG PANDANG TAHAP I	6,050
2	MAKASAR SEKSI IV	11,600
Total		17,650

Sumber : Lampiran 36.B : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 630 / KPTS / M / 2009

Tanggal : 31 Desember 2009

Pulau : Sulawesi

Tabel 4.11.3
Fungsi Jalan Arteri Jalan Tol Pulau Jawa

No.	Nama Ruas	Panjang Ruas (km)
1	2	3
1	JAKARTA - BOGOR - CIAWI	59,000
2	JAKARTA - TANGERANG	33,000
3	SURABAYA - GEMPOL	49,000
4	JAKARTA - CIKAMPEK	83,000
5	PADALARANG - CILEUNYI	64,400
6	PROF. DR. IR. SOEDIJATMO	14,300
7	TOMANG - GROGOL - PLUIT	7,550
8	TOMANG - CAWANG	16,000
9	IR. WIYOTO WIYONO, MSc (CAWANG - TANJUNG PRIOK)	15,500
10	HARBOUR ROAD (TANJUNG PRIOK - PLUIT)	11,550
11	SEMARANG SEKSI A, B, C	24,750
12	ULUJAMI - PONDOK AREN	5,550
13	PALIMANAN - KANCI	26,300
14	JORR W2 SELATAN (PONDOK PINANG - ULUJAMI)	6,200
15	JORR E1 SELATAN (TAMAN MINI - HANKAM RAYA)	4,000
16	JORR E1 UTARA (HANKAM RAYA - CIKUNIR)	8,100
17	JORR E2 (CIKUNIR - CAKUNG)	9,070
18	CIKAMPEK - PADALARANG	58,500
19	TANGERANG - MERAK	73,000
20	SURABAYA - GRESIK	20,700
21	JORR SEKSI S (PONDOK PINANG - TAMAN MINI)	14,250
22	PONDOK AREN - SERPONG	7,250
23	JORR E3 (CAKUNG - CILINCING)	3,750
24	SS WARU - BANDARA JUANDA	12,800
25	JALAN DAN JEMBATAN SURABAYA - MADURA	20,900
26	BOGOR RING ROAD SEKSI I (SENTUL - KEDUNG HALANG)	3,850
27	JORR W1 (KEBON JERUK - PENJARINGAN)	9,850
28	KANCI - PEJAGAN	35,000
Total		697,120

Sumber : Lampiran 35.B : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 630 / KPTS / M / 2009

Tanggal : 31 Desember 2009

Pulau : Jawa

Tabel 4.12.1
Status Jalan Nasional Jalan Tol Pulau Sumatera

No.	Nama Ruas	Panjang Ruas (km)
1	2	3
1	BELAWAN - MEDAN - TANJUNG MORAWA	42,700
Total		42,700

Sumber : Lampiran 34.B : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 631 / KPTS / M / 2009

Tanggal : 31 Desember 2009

Pulau : Sumatera

Tabel 4.12.2
Status Jalan Nasional Jalan Tol Pulau Sulawesi

No.	Nama Ruas	Panjang Ruas (km)
1	2	3
1	UJUNG PANDANG TAHAP I	6,050
2	MAKASAR SEKSI IV	11,600
Total		17,650

Sumber : Lampiran 36.B : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 631 / KPTS / M / 2009

Tanggal : 31 Desember 2009

Pulau : Sulawesi

Tabel 4.12.3
Status Jalan Nasional Jalan Tol Pulau Jawa

No.	Nama Ruas	Panjang Ruas (km)
1	2	3
1	JAKARTA - BOGOR - CIAWI	59,000
2	JAKARTA - TANGERANG	33,000
3	SURABAYA - GEMPOL	49,000
4	JAKARTA - CIKAMPEK	83,000
5	PADALARANG - CILEUNYI	64,400
6	PROF. DR. IR. SOEDIJATMO	14,300
7	TOMANG - GROGOL - PLUIT	7,550
8	TOMANG - CAWANG	16,000
9	IR. WIYOTO WIYONO, MSc (CAWANG - TANJUNG PRIOK)	15,500
10	HARBOUR ROAD (TANJUNG PRIOK - PLUIT)	11,550
11	SEMARANG SEKSI A, B, C	24,750
12	ULUJAMI - PONDOK AREN	5,550
13	PALIMANAN - KANCI	26,300
14	JORR W2 SELATAN (PONDOK PINANG - ULUJAMI)	6,200
15	JORR E1 SELATAN (TAMAN MINI - HANKAM RAYA)	4,000
16	JORR E1 UTARA (HANKAM RAYA - CIKUNIR)	8,100
17	JORR E2 (CIKUNIR - CAKUNG)	9,070
18	CIKAMPEK - PADALARANG	58,500
19	TANGERANG - MERAK	73,000
20	SURABAYA - GRESIK	20,700
21	JORR SEKSI S (PONDOK PINANG - TAMAN MINI)	14,250
22	PONDOK AREN - SERPONG	7,250
23	JORR E3 (CAKUNG - CILINCING)	3,750
24	SS WARU - BANDARA JUANDA	12,800
25	JALAN DAN JEMBATAN SURABAYA - MADURA	20,900
26	BOGOR RING ROAD SEKSI I (SENTUL - KEDUNG HALANG)	3,850
27	JORR W1 (KEBON JERUK - PENJARINGAN)	9,850
28	KANCI - PEJAGAN	35,000
Total		697,120

Sumber : Lampiran 35.B : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 631 / KPTS / M / 2009

Tanggal : 31 Desember 2009

Pulau : Jawa

Catatan : Untuk Jalan dan Jembatan Tol Surabaya-Madura

Dari total panjang Jalan dan Jembatan Tol Surabaya-Madura 20,90 km :

- a. 5,40 km sudah dioperasikan sebagai Jalan Nasional Jalan Tol
- b. 3,99 km dioperasikan sebagai Jalan Nasional bukan Jalan Tol (Jalan Kedung Cowek)
- c. 11,51 km sementara dioperasikan sebagai Jalan Nasional bukan Jalan Tol.

Tabel 4.13
Data Investasi Jalan Tol Per Provinsi
Akhir Tahun 2009

No.	Provinsi / Ruas Jalan	Panjang Jalan	Kondisi jalan		Jml Lajur Jalan		Jenis Permukaan		Kapasitas MST 12 ton	Status Pengelolaan	
			Mantap	Tidak mantap	4 lajur	> 4 lajur	Aspal	Kerikil		Swasta	Pemerintah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sumatera Utara											
1	BELAWAN-MEDAN-TANJUNG MORAWA	42,70	42,70		42,70		42,70		42,70	42,70	
Banten											
1	TANGERANG - MERAK	73,00	73,00		73,00		73,00		73,00	73,00	
2	PONDOK AREN - SERPONG	7,25	7,25		7,25		7,25		7,25	7,25	
DKI Jakarta											
1	JAKARTA-BOGOR-CIAWI	59,00	59,00		18,00	41,00	59,00		59,00	59,00	
2	CAWANG-TOMANG-GROGOL-PLUIT	23,55	23,55			23,55	23,55		23,55	23,55	
3	PROF. Dr.Ir. SEDIJATMO (CENKARENG)	14,30	14,30			14,30	14,30		14,30	14,30	
4	JAKARTA-CIKAMPEK	83,00	83,00		15,00	68,00	83,00		83,00	83,00	
5	JAKARTA-TANGERANG	33,00	33,00		18,00	15,00	33,00		33,00	33,00	
6	ULUJAMI - PONDOK AREN	5,55	5,55		5,55		5,55		5,55	5,55	
7	JAKARTA LINGKAR LUAR (W2-S-E1-E2-E3, W1)	55,22	55,22			55,22		55,22	55,22	55,22	
8	CAWANG - T.J. PRIOK-ANCOL TIMUR-PLUIT/JBT. TIGA)	27,05	27,05		27,05		27,05		27,05	27,05	
Jawa Barat											
1	PADALARANG-CILEUNYI	64,40	64,40		64,40		64,40		64,40	64,40	
2	CIKAMPEK-PURWAKARTA-PADALARANG	58,50	58,50		58,50			58,50	58,50	58,50	
3	PALIMANAN-PLUBON-KANCI	26,30	26,30		26,30		26,30		26,30	26,30	
4	BOGOR RING ROAD SEKSI I	3,85	3,85		3,85		3,85		3,85	3,85	
Jawa Tengah											
1	SEMARANG SEKSI A,B,C	24,75	24,75		24,75		24,75		24,75	24,75	
2	KANCI-PEJAGAN	35,00	35,00		7,94	27,06	35,00		35,00	35,00	
Jawa Timur											
1	SURABAYA - GEMPOL	49,00	49,00		34,00	15,00	49,00		49,00	49,00	
2	SURABAYA - GRESIK	20,70	20,70		20,70		20,70		20,70	20,70	
3	SS WARU - BANDARA JUANDA	12,80	12,80		12,80		12,80		12,80	12,80	
4	JEMBATAN SURABAYA - MADURA	5,40	5,40		5,40		5,40		5,40		5,40
Sulawesi Selatan											
1	UJUNG PANDANG TAHAP I DAN II	6,05	6,05		6,05		6,05		6,05	6,05	
2	MAKASSAR SEKSI IV	11,60	11,60		11,60		11,60		11,60	11,60	
T o t a l		741,97	741,97		482,84	259,13	628,25	113,72	741,97	736,57	5,40

Sumber : Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum

Tabel 4.14
Jalan Tol Yang Beroperasi

Status Maret 2010

No.	Ruas	Panjang (KM)		Investor	Tahun Beroperasi
		Utama	Akses		
1	2	3	4	5	6
A. PENGELOLA OLEH PT. JASA MARGA					
1	Jakarta - Bogor - Ciawi	50,00	9,00	PT. Jasa Marga	1978
2	Jakarta - Tangerang	27,00	6,00	PT. Jasa Marga	1983 - 1998
3	Surabaya - Gempol	43,00	6,00	PT. Jasa Marga	1984
4	Jakarta - Cikampek	72,00	11,00	PT. Jasa Marga	1985
5	Padalarang - Cileunyi	35,63	28,77	PT. Jasa Marga	1986
6	Prof. Dr. Ir. Soedyatmo	14,30	-	PT. Jasa Marga	1986
7	Lingkar Dalam Kota Jakarta	23,55	-	PT. Jasa Marga	1988
8	Belawan - Medan - Tanjung Morawa	33,70	9,00	PT. Jasa Marga	1989 & 1996
9	Semarang Seksi A,B,C	24,75	-	PT. Jasa Marga	1983 & 1987 & 1998
10	Ulujami - Pondok Aren	5,55	-	PT. Jasa Marga	2001
11	Cirebon - Palimanan	26,30	-	PT. Jasa Marga	1998
12	JORR W2 Selatan (Pondok Pinang - Veteran)	-	-	PT. Jasa Marga	1991
	JORR E1 Selatan (Taman Mini - Hankam Raya)	16,77	-	PT. Jasa Marga	1998
	JORR E2 (Cikunir - Cakung)	-	-	PT. Jasa Marga	2001 - 2003
13	Cikampek - Padalarang I	17,50	-	PT. Jasa Marga	2004
14	Cikampek - Padalarang II	41,00	-	PT. Jasa Marga	2005
15	JORR E1-3,W2-S2,E3,E1-4	14,35	-	PT. Jasa Marga	2005
16	JORR Selatan (Pondok Pinang - Taman Mini)	14,25	-	PT. Jasa Marga	1995 - 1996
17	Jembatan Suramadu (Surabaya - Madura)	5,40	-	PT. Jasa Marga	10 Juni 2009
	TOTAL A	465,05	69,77		
	SUB TOTAL A	534,82			
B. PENGELOLA OLEH BADAN USAHA					
1	Tangerang - Merak	73,00		PT. Marga Mandala Sakti	1987 & 1996
2	Ir. Wiyoto Wiyono M.Sc.	15,50		PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk	1990
3	Surabaya - Gresik	20,70		PT. Margabumi Matraraya	1993 - 1996
4	Harbour Road	11,55		PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk	1995 - 1996
5	Ujung Pandang Tahap I	6,05		PT. Bosowa Marga Nusantara	1998
6	Serpong - Pondok Aren	7,25		PT. Bintaro Serpong Damai	1999
7	SS Waru - Bandara Juanda	12,80		PT. Citra Margatama Surabaya	27-Apr-08
8	Makassar Seksi IV	11,60		PT. Jalan Tol Seksi Empat	26-Sep-08
9	Bogor Ring Road Seksi I	3,80		PT. Marga Sarana Jabar	23-Nov-09
10	Kanci Pejagan	35,00		PT. Semesta Marga Raya	26-Jan-10
11	JORR W1	9,85		PT. Jakarta Lingkar Barat I	22-Feb-10
	TOTAL B	207,10			
	TOTAL A + B	741,92			

Sumber : Peluang Investasi Jalan Tol di Indonesia 2010, Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum

Tabel 4.15
Panjang Jalan Menurut Provinsi dan Tingkat Kewenangan Pemerintahan (km)
Tahun 2005 - 2007 ¹

No.	Provinsi	Akhir Tahun	Negara ²	Provinsi ²	Kab/ Kota ³	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	Nanggroe Aceh Darussalam	2005	1.783	1.702	15.031	18.516
		2006	1.783	1.702	15.405	18.890
		2007	1.783	1.702	15.197	18.682
2	Sumatera Utara	2005	2.098	2.752	31.152	36.002
		2006	2.098	2.752	31.144	35.994
		2007	2.098	2.752	32.114	36.964
3	Sumatera Barat	2005	1.200	1.131	16.896	19.227
		2006	1.200	1.131	15.114	17.445
		2007	1.200	1.131	15.459	17.790
4	Riau ⁴	2005	1.126	1.796	17.993	20.915
		2006	1.126	1.796	18.461	21.383
		2007	1.126	1.796	18.520	21.442
5	Kepulauan Riau	2005
		2006
		2007
6	Jambi	2005	820	1.525	7.638	9.983
		2006	820	1.525	7.837	10.182
		2007	820	1.525	8.132	10.477
7	Sumatera Selatan	2005	1.290	1.621	11.269	14.180
		2006	1.290	1.621	10.485	13.396
		2007	1.290	1.621	11.153	14.064
8	Kep. Bangka Belitung	2005	531	511	2.257	3.299
		2006	531	511	2.388	3.430
		2007	531	511	2.666	3.708
9	Bengkulu	2005	736	1.357	3.657	5.750
		2006	736	1.357	3.829	5.922
		2007	736	1.357	3.829	5.922
10	Lampung	2005	1.004	2.355	10.104	13.463
		2006	1.004	2.355	10.888	14.247
		2007	1.004	2.355	11.544	14.903
11	DKI Jakarta	2005	122	1.125	5.883	7.130
		2006	122	1.125	4.938	6.185
		2007	122	1.125	4.938	6.185
12	Jawa Barat	2005	1.141	2.141	23.050	26.332
		2006	1.141	2.141	22.397	25.679
		2007	1.141	2.141	22.397	25.679
13	Banten	2005	490	372	3.611	4.473
		2006	490	372	3.464	4.326
		2007	490	372	3.911	4.773
14	Jawa Tengah	2005	1.298	2.550	25.208	29.056
		2006	1.298	2.550	24.510	28.358
		2007	1.298	2.550	24.642	28.490

Lanjutan Tabel 4.15

No.	Provinsi	Akhir Tahun	Negara ²	Provinsi ²	Kab/ Kota ³	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
15	DI Yogyakarta	2005	169	690	3.966	4.825
		2006	169	690	4.000	4.859
		2007	169	690	3.974	4.833
16	Jawa Timur	2005	1.899	1.439	33.465	36.803
		2006	1.899	1.439	32.999	36.337
		2007	1.899	1.439	33.689	37.027
17	Bali	2005	502	840	5.438	6.780
		2006	502	840	5.707	7.049
		2007	502	840	6.018	7.360
18	Nusa Tenggara Barat	2005	602	1.416	5.224	7.242
		2006	602	1.416	5.412	7.430
		2007	602	1.416	5.329	7.347
19	Nusa Tenggara Timur	2005	1.273	2.627	15.037	18.937
		2006	1.273	2.627	16.497	20.397
		2007	1.273	2.627	16.497	20.397
20	Kalimantan Barat	2005	1.575	628	9.382	11.585
		2006	1.575	628	10.174	12.377
		2007	1.575	628	10.808	13.011
21	Kalimantan Tengah	2005	1.715	772	9.441	11.928
		2006	1.715	772	9.374	11.861
		2007	1.715	772	9.312	11.799
22	Kalimantan Selatan	2005	876	898	5.202	6.976
		2006	876	898	7.502	9.276
		2007	876	898	7.978	9.752
23	Kalimantan Timur	2005	1.540	1.442	6.594	9.576
		2006	1.540	1.442	6.385	9.367
		2007	1.540	1.442	6.804	9.786
24	Sulawesi Utara	2005	1.267	741	3.490	5.498
		2006	1.267	741	3.481	5.489
		2007	1.267	741	3.952	5.960
25	Gorontalo	2005	616	284	2.450	3.350
		2006	616	284	3.718	4.618
		2007	616	284	4.077	4.977
26	Sulawesi Tengah	2005	1.806	1.977	8.006	11.789
		2006	1.806	1.977	8.681	12.464
		2007	1.806	1.977	11.842	15.625
27	Sulawesi Selatan	2005 ⁵	2.108	1.486	26.627	30.221
		2006 ⁵	2.108	1.486	27.153	30.747
		2007	1.578	816	25.978	28.372
28	Sulawesi Barat	2005
		2006
		2007	530	671	6.137	7.338
29	Sulawesi Tenggara	2005	1.294	489	6.291	8.074
		2006	1.294	489	6.576	8.359
		2007	1.294	489	6.409	8.192

Lanjutan Tabel 4.15

No.	Provinsi	Akhir Tahun	Negara ²	Provinsi ²	Kab/ Kota ³	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
30	Maluku	2005	985	998	2.065	4.048
		2006	985	998	4.091	6.074
		2007	985	998	4.001	5.984
31	Maluku Utara	2005	458	587	361	1.406
		2006	458	587	357	1.402
		2007	458	587	357	1.402
32	Papua	2005 ⁶	2.303	1.873	7.306	11.482
		2006 ⁶	2.303	1.873	8.679	12.855
		2007	1.795	1.119	5.597	8.511
33	Papua Barat	2005
		2006
		2007	508	754	3.521	4.783
Indonesia		2005	34628^r	40.125	324094^r	398846^r
		2006	34.628	40.125	331646^r	406398^r
		2007	34.628	40.125	346.782	421.535

Sumber : Statistik Indonesia, 2009 (Departemen Pekerjaan Umum, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota)

Catatan : ^r Angka diperbaiki

1 Data tidak termasuk panjang jalan tol sepanjang 663,47 km

2 Berdasarkan SK Menteri Perhubungan dan Prasarana Wilayah No.375/KPTS/2004

3 Data dari Dinas Pekerjaan Umum Kab/Kota

4 Termasuk Kepulauan Riau

5 Termasuk Sulawesi Barat

6 Termasuk Papua Barat

Tabel 4.16.1
Kondisi Jalan Nasional Hasil Survei Tahun 2009 (Km),
(Berdasarkan Pengelompokan 4 Kondisi Menurut IRI Dalam Satu Ruas Jalan)
National Road Condition 2009

Status : 05 Januari 2009

No.	Pulau - Provinsi	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Mantap	Tidak Mantap	Tidak Tembus	Total (km)
		(km)	(km)	(km)	(km)	(km)	(km)	(km)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	SUMATERA	5.024,90	4.714,04	689,28	47,70	9.738,94	736,98	113,00	10.588,92
1	Nanggroe Aceh Darussalam	1.241,31	412,32	63,06	11,10	1.653,62	74,16	55,00	1.782,78
2	Sumatera Utara	766,49	1.142,19	115,91	15,46	1.908,68	131,37	58,00	2.098,05
3	Sumatera Barat	395,66	654,24	143,41	6,78	1.049,90	150,19	-	1.200,09
4	Riau	566,38	389,61	170,12	-	955,99	170,12	-	1.126,11
5	Kepulauan Riau *)	-	-	-	-	-	-	-	0,00
6	Jambi	328,17	458,02	31,12	3,10	786,19	34,21	-	820,40
7	Bengkulu	274,66	430,65	31,13	-	705,31	31,13	-	736,44
8	Sumatera Selatan	664,46	559,23	65,59	0,96	1.223,69	66,55	-	1.290,24
9	Bangka Belitung	206,16	310,86	13,33	0,30	517,02	13,63	-	530,65
10	Lampung	581,61	356,93	55,62	10,00	938,54	65,62	-	1.004,16
	JAWA	3.064,15	1.859,12	167,50	28,34	4.923,27	195,85	-	5.119,12
11	DKI Jakarta	122,38	-	-	-	122,38	-	-	122,38
12	Banten	38,79	293,87	131,88	25,86	332,66	157,74	-	490,40
13	Jawa Barat	656,90	462,74	20,10	0,95	1.119,64	21,05	-	1.140,69
14	Jawa Tengah	725,44	562,37	8,28	1,54	1.287,81	9,82	-	1.297,63
15	D.I. Yogyakarta	132,25	36,56	-	-	168,81	-	-	168,81
16	Jawa Timur	1.388,38	503,58	7,24	-	1.891,97	7,24	-	1.899,21
	KALIMANTAN	2.098,51	2.275,27	1.260,93	71,27	4.373,78	1.332,19	-	5.705,97
17	Kalimantan Barat	797,14	399,95	373,11	5,12	1.197,09	378,23	-	1.575,32
18	Kalimantan Tengah	924,87	271,29	518,79	-	1.196,16	518,79	-	1.714,95
19	Kalimantan Timur	117,14	1.111,68	277,16	33,72	1.228,82	310,88	-	1.539,70
20	Kalimantan Selatan	259,36	492,35	91,86	32,42	751,71	124,29	-	876,00
	BALI, MALUKU, NUSA TENGGARA	1.635,61	1.544,98	473,10	82,47	3.180,59	555,57	84,00	3.820,16
21	Bali	390,81	96,58	14,13	0,12	487,39	14,25	-	501,64
22	Nusa Tenggara Barat	326,32	230,87	32,76	11,89	557,19	44,64	-	601,83
23	Nusa Tenggara Timur	513,24	634,06	112,11	13,60	1.147,30	125,72	-	1.273,02
30	Maluku	259,78	395,23	224,57	21,89	655,00	246,46	84,00	985,46
31	Maluku Utara	145,46	188,24	89,53	34,98	333,70	124,51	-	458,21
	SULAWESI	4.624,76	1.669,91	675,06	92,19	6.294,67	767,25	29,57	7.091,50
24	Sulawesi Utara	1.032,78	100,73	133,88	-	1.133,51	133,88	-	1.267,39
25	Gorontalo	523,99	89,15	3,10	-	613,14	3,10	-	616,24
26	Sulawesi Tengah	1.101,04	406,75	178,28	90,82	1.507,79	269,09	29,57	1.806,46
27	Sulawesi Barat	83,17	413,63	32,80	-	496,79	32,80	-	529,59
28	Sulawesi Selatan	1.257,41	262,75	56,55	1,24	1.520,16	57,79	-	1.577,95
29	Sulawesi Tenggara	626,37	396,91	270,45	0,14	1.023,28	270,59	-	1.293,87
	PAPUA	267,25	1.009,66	746,74	-	1.276,92	746,74	279,50	2.303,16
32	Papua	103,31	744,68	667,46	-	847,99	667,46	279,50	1.794,95
33	Papua Barat	163,94	264,99	79,28	-	428,93	79,28	-	508,21
	Total Indonesia	16.715,18	13.072,99	4.012,62	321,97	29.788,17	4.334,59	506,07	34.628,83

Sumber : Subdit Data dan Informasi, Direktorat Bina Program, Bina Marga, Dep. PU

*) Jalan Nasional di Kepulauan Riau belum ditetapkan dengan SK Menteri

Tabel 4.16.2
Kondisi Jalan Nasional Hasil Survei Tahun 2009 (%),
(Berdasarkan Pengelompokan 4 Kondisi Menurut IRI Dalam Satu Ruas Jalan)
National Road Condition 2009

Status : 05 Januari 2009

No.	Pulau - Provinsi	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Mantap	Tidak Mantap	Tidak Tembus
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	SUMATERA	0,47	0,45	0,07	0,00	0,92	0,07	0,01
1	Nanggroe Aceh Darussalam	71,84	23,86	3,65	0,64	95,71	4,29	3,09
2	Sumatera Utara	37,57	55,99	5,68	0,76	93,56	6,44	2,76
3	Sumatera Barat	32,97	54,52	11,95	0,57	87,49	12,51	-
4	Riau	50,30	34,60	15,11	-	84,89	15,11	-
5	Kepulauan Riau *)	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	40,00	55,83	3,79	0,38	95,83	4,17	-
7	Bengkulu	37,30	58,48	4,23	-	95,77	4,23	-
8	Sumatera Selatan	51,50	43,34	5,08	0,07	94,84	5,16	-
9	Bangka Belitung	38,85	58,58	2,51	0,06	97,43	2,57	-
10	Lampung	57,92	35,54	5,54	1,00	93,47	6,53	-
	JAWA	0,60	0,36	0,03	0,01	0,96	0,04	-
11	DKI Jakarta	100,00	-	-	-	100,00	-	-
12	Banten	7,91	59,92	26,89	5,27	67,83	32,17	-
13	Jawa Barat	57,59	40,57	1,76	0,08	98,15	1,85	-
14	Jawa Tengah	55,91	43,34	0,64	0,12	99,24	0,76	-
15	D.I. Yogyakarta	78,34	21,66	-	-	100,00	-	-
16	Jawa Timur	73,10	26,52	0,38	-	99,62	0,38	-
	KALIMANTAN	0,37	0,40	0,22	0,01	0,77	0,23	0,02
17	Kalimantan Barat	50,60	25,39	23,68	0,33	75,99	24,01	-
18	Kalimantan Tengah	53,93	15,82	30,25	-	69,75	30,25	-
19	Kalimantan Timur	7,61	72,20	18,00	2,19	79,81	20,19	-
20	Kalimantan Selatan	29,61	56,20	10,49	3,70	85,81	14,19	-
	BALI, MALUKU, NUSA TENGGARA	0,43	0,40	0,12	0,02	0,83	0,15	0,02
21	Bali	77,91	19,25	2,82	0,02	97,16	2,84	-
22	Nusa Tenggara Barat	54,22	38,36	5,44	1,98	92,58	7,42	-
23	Nusa Tenggara Timur	40,32	49,81	8,81	1,07	90,12	9,88	-
30	Maluku	28,82	43,84	24,91	2,43	72,66	27,34	8,52
31	Maluku Utara	31,74	41,08	19,54	7,63	72,83	27,17	-
	SULAWESI	0,65	0,24	0,10	0,01	0,89	0,11	0,00
24	Sulawesi Utara	81,49	7,95	10,56	-	89,44	10,56	-
25	Gorontalo	85,03	14,47	0,50	-	99,50	0,50	-
26	Sulawesi Tengah	61,96	22,89	10,03	5,11	84,86	15,14	1,64
27	Sulawesi Barat	15,70	78,10	6,19	-	93,81	6,19	-
28	Sulawesi Selatan	79,69	16,65	3,58	0,08	96,34	3,66	-
29	Sulawesi Tenggara	48,41	30,68	20,90	0,01	79,09	20,91	-
	PAPUA	0,12	0,44	0,32	-	0,55	0,32	0,12
32	Papua	6,82	49,14	44,04	-	55,96	44,04	15,57
33	Papua Barat	32,26	52,14	15,60	-	84,40	15,60	-
	Total Indonesia	48,27	37,75	11,59	0,93	86,02	12,52	1,46

Sumber : Subdit Data dan Informasi, Direktorat Bina Program, Bina Marga, Dep. PU

*) Jalan Nasional di Kepulauan Riau belum ditetapkan dengan SK Menteri

Tabel 4.17.1
Kondisi Jalan Nasional Hasil Survei Tahun 2009 (Km),
(Berdasarkan Kondisi Rata-Rata SDI Per Ruas Jalan)

Status : 05 Januari 2009

No.	Pulau - Provinsi	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Mantap	Tidak Mantap	Total (km)
		(km)	(km)	(km)	(km)	(km)	(km)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	SUMATERA	8.620,28	1.072,40	737,44	158,80	9.692,68	896,24	10.588,92
1	Nanggroe Aceh Darussalam	1.430,76	117,49	202,13	32,41	1.548,24	234,54	1.782,78
2	Sumatera Utara	1.266,25	444,40	315,48	71,92	1.710,65	387,40	2.098,05
3	Sumatera Barat	1.026,15	54,56	78,83	40,55	1.080,71	119,38	1.200,09
4	Riau	1.020,22	89,48	16,41	-	1.109,70	16,41	1.126,11
5	Kepulauan Riau *)	-	-	-	-	-	-	0,00
6	Jambi	665,73	78,56	62,72	13,40	744,29	76,11	820,40
7	Bengkulu	612,44	101,64	22,37	-	714,07	22,37	736,44
8	Sumatera Selatan	1.201,50	60,51	28,22	-	1.262,02	28,22	1.290,24
9	Bangka Belitung	480,20	50,45	-	-	530,65	-	530,65
10	Lampung	917,03	75,32	11,28	0,52	992,35	11,81	1.004,16
	JAWA	4.386,41	464,55	235,98	32,18	4.850,96	268,16	5.119,12
11	DKI Jakarta	122,38	-	-	-	122,38	-	122,38
12	Banten	234,24	114,74	115,14	26,29	348,97	141,43	490,40
13	Jawa Barat	943,13	140,88	55,12	1,56	1.084,01	56,68	1.140,69
14	Jawa Tengah	1.122,79	127,99	44,59	2,27	1.250,78	46,85	1.297,63
15	D.I. Yogyakarta	160,96	7,85	-	-	168,81	-	168,81
16	Jawa Timur	1.802,92	73,10	21,13	2,06	1.876,01	23,20	1.899,21
	KALIMANTAN	5.235,33	375,07	85,59	9,98	5.610,40	95,57	5.705,97
17	Kalimantan Barat	1.467,04	85,80	22,48	-	1.552,84	22,48	1.575,32
18	Kalimantan Tengah	1.374,20	267,66	63,11	9,98	1.641,86	73,09	1.714,95
19	Kalimantan Timur	1.520,18	19,52	-	-	1.539,70	-	1.539,70
20	Kalimantan Selatan	873,91	2,09	-	-	876,00	-	876,00
	BALI, MALUKU, NUSA TENGGARA	3.270,24	180,83	239,34	129,75	3.451,07	369,09	3.820,16
21	Bali	501,64	-	-	-	501,64	-	501,64
22	Nusa Tenggara Barat	400,65	33,48	54,11	113,59	434,13	167,70	601,83
23	Nusa Tenggara Timur	1.151,36	65,61	39,89	16,16	1.216,97	56,05	1.273,02
30	Maluku	779,57	60,55	145,34	-	840,12	145,34	985,46
31	Maluku Utara	437,01	21,20	-	-	458,21	-	458,21
	SULAWESI	5.218,34	775,47	716,91	380,79	5.993,81	1.097,69	7.091,50
24	Sulawesi Utara	1.015,00	133,54	92,48	26,37	1.148,54	118,85	1.267,39
25	Gorontalo	545,14	23,82	30,78	16,50	568,96	47,28	616,24
26	Sulawesi Tengah	1.015,40	299,27	280,21	211,58	1.314,67	491,79	1.806,46
27	Sulawesi Barat	341,46	54,60	72,12	61,41	396,06	133,53	529,59
28	Sulawesi Selatan	1.274,62	127,19	141,83	34,31	1.401,81	176,14	1.577,95
29	Sulawesi Tenggara	1.026,70	137,06	99,49	30,62	1.163,76	130,11	1.293,87
	PAPUA	1.926,58	214,08	152,40	10,10	2.140,66	162,50	2.303,16
32	Papua	1.478,28	180,86	126,89	8,92	1.659,14	135,81	1.794,95
33	Papua Barat	448,31	33,21	25,51	1,18	481,52	26,69	508,21
	Total Indonesia	28.657,18	3.082,40	2.167,65	721,60	31.739,58	2.889,25	34.628,83

Sumber : Subdit Data dan Informasi, Direktorat Bina Program, Bina Marga, Dep. PU

*) Jalan Nasional di Kepulauan Riau belum ditetapkan dengan SK Menteri

Tabel 4.17.2
Kondisi Jalan Nasional Hasil Survei Tahun 2009 (%),
(Berdasarkan Kondisi Rata-Rata SDI Per Ruas Jalan)

Status : 05 Januari 2009

No.	Pulau - Provinsi	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Mantap	Tidak Mantap
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
SUMATERA		0,81	0,10	0,07	0,01	0,92	0,08
1	Nanggroe Aceh Darussalam	80,25	6,59	11,34	1,82	86,84	13,16
2	Sumatera Utara	60,35	21,18	15,04	3,43	81,54	18,46
3	Sumatera Barat	85,51	4,55	6,57	3,38	90,05	9,95
4	Riau	90,60	7,95	1,46	-	98,54	1,46
5	Kepulauan Riau *)	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	81,15	9,58	7,64	1,63	90,72	9,28
7	Bengkulu	83,16	13,80	3,04	-	96,96	3,04
8	Sumatera Selatan	93,12	4,69	2,19	-	97,81	2,19
9	Bangka Belitung	90,49	9,51	-	-	100,00	-
10	Lampung	91,32	7,50	1,12	0,05	98,82	1,18
JAWA		0,86	0,09	0,05	0,01	0,95	0,05
11	DKI Jakarta	100,00	-	-	-	100,00	-
12	Banten	47,76	23,40	23,48	5,36	71,16	28,84
13	Jawa Barat	82,68	12,35	4,83	0,14	95,03	4,97
14	Jawa Tengah	86,53	9,86	3,44	0,17	96,39	3,61
15	D.I. Yogyakarta	95,35	4,65	-	-	100,00	-
16	Jawa Timur	94,93	3,85	1,11	0,11	98,78	1,22
KALIMANTAN		0,92	0,07	0,01	0,00	0,98	0,02
17	Kalimantan Barat	93,13	5,45	1,43	-	98,57	1,43
18	Kalimantan Tengah	80,13	15,61	3,68	0,58	95,74	4,26
19	Kalimantan Timur	98,73	1,27	-	-	100,00	-
20	Kalimantan Selatan	99,76	0,24	-	-	100,00	-
BALI, MALUKU, NUSA TENGGARA		0,86	0,05	0,06	0,03	0,90	0,10
21	Bali	100,00	-	-	-	100,00	-
22	Nusa Tenggara Barat	66,57	5,56	8,99	18,87	72,14	27,86
23	Nusa Tenggara Timur	90,44	5,15	3,13	1,27	95,60	4,40
30	Maluku	79,11	6,14	14,75	-	85,25	14,75
31	Maluku Utara	95,37	4,63	-	-	100,00	-
SULAWESI		0,74	0,11	0,10	0,05	0,85	0,15
24	Sulawesi Utara	80,09	10,54	7,30	2,08	90,62	9,38
25	Gorontalo	88,46	3,86	4,99	2,68	92,33	7,67
26	Sulawesi Tengah	56,21	16,57	15,51	11,71	72,78	27,22
27	Sulawesi Barat	64,48	10,31	13,62	11,60	74,79	25,21
28	Sulawesi Selatan	80,78	8,06	8,99	2,17	88,84	11,16
29	Sulawesi Tenggara	79,35	10,59	7,69	2,37	89,94	10,06
PAPUA		0,84	0,09	0,07	0,00	0,93	0,07
32	Papua	82,36	10,08	7,07	0,50	92,43	7,57
33	Papua Barat	88,21	6,54	5,02	0,23	94,75	5,25
Total Indonesia		82,76	8,90	6,26	2,08	91,66	8,34

Sumber : Subdit Data dan Informasi, Direktorat Bina Program, Bina Marga, Dep. PU

*) Jalan Nasional di Kepulauan Riau belum ditetapkan dengan SK Menteri

Tabel 4.18.1
Klasifikasi Jalan Nasional Tahun 2009 (Km),
(Menurut PP Jalan No.34 Tahun 2006)

Status : 05 Januari 2009

No.	Pulau - Provinsi	Klasifikasi Jalan (Km)				Total (km)
		Jalan Raya (≥14 m)	Jalan Sedang (7 - 14 m)	Jalan Kecil (5 - 7 m)	Jalan Sub Standar (<5 m)	
1	2	3	4	5	6	7
	SUMATERA	242,50	2.908,89	6.713,60	723,93	10.588,92
1	Nanggroe Aceh Darussalam	46,11	364,78	940,49	431,40	1.782,78
2	Sumatera Utara	116,55	383,55	1.529,38	68,56	2.098,05
3	Sumatera Barat	2,75	229,15	968,18	-	1.200,09
4	Riau	18,57	431,54	613,11	62,90	1.126,11
5	Kepulauan Riau *)	-	-	-	-	0,00
6	Jambi	37,92	304,29	478,19	-	820,40
7	Bengkulu	-	50,96	685,48	-	736,44
8	Sumatera Selatan	9,51	815,92	423,37	41,44	1.290,24
9	Bangka Belitung	8,98	17,10	447,90	56,66	530,65
10	Lampung	2,10	311,59	627,50	62,97	1.004,16
	JAWA	1.030,51	2.535,77	1.550,33	2,51	5.119,12
11	DKI Jakarta	122,38	-	-	-	122,38
12	Banten	15,21	122,64	352,55	-	490,40
13	Jawa Barat	241,33	625,61	271,24	2,51	1.140,69
14	Jawa Tengah	376,74	485,72	435,17	-	1.297,63
15	D.I. Yogyakarta	58,69	110,12	-	-	168,81
16	Jawa Timur	216,16	1.191,68	491,37	-	1.899,21
	KALIMANTAN	119,41	411,23	4.209,68	965,65	5.705,97
17	Kalimantan Barat	23,32	150,67	949,61	451,72	1.575,32
18	Kalimantan Tengah	7,59	48,41	1.594,78	64,17	1.714,95
19	Kalimantan Timur	45,96	136,61	1.007,12	350,01	1.539,70
20	Kalimantan Selatan	42,54	75,54	658,16	99,76	876,00
	BALI, MALUKU, NUSA TENGGARA	26,14	434,63	2.369,09	990,30	3.820,16
21	Bali	20,82	252,55	219,46	8,81	501,64
22	Nusa Tenggara Barat	5,22	122,50	162,12	311,98	601,83
23	Nusa Tenggara Timur	-	10,86	1.095,46	166,70	1.273,02
30	Maluku	0,10	46,50	857,72	81,14	985,46
31	Maluku Utara	-	2,22	34,32	421,67	458,21
	SULAWESI	33,13	632,75	3.013,06	3.412,56	7.091,50
24	Sulawesi Utara	-	122,46	524,56	620,37	1.267,39
25	Gorontalo	-	20,98	142,62	452,65	616,24
26	Sulawesi Tengah	4,23	42,59	378,90	1.380,74	1.806,46
27	Sulawesi Barat	-	49,17	180,52	299,90	529,59
28	Sulawesi Selatan	26,29	225,86	1.325,79	-	1.577,95
29	Sulawesi Tenggara	2,60	171,69	460,67	658,91	1.293,87
	PAPUA	27,45	234,41	2.041,29	-	2.303,16
32	Papua	16,86	213,22	1.564,87	-	1.794,95
33	Papua Barat	10,60	21,19	476,42	-	508,21
	Total Indonesia	1.479,14	7.157,68	19.897,05	6.094,96	34.628,83

Sumber : Subdit Data dan Informasi, Direktorat Bina Program, Bina Marga, Dep. PU

*) Jalan Nasional di Kepulauan Riau belum ditetapkan dengan SK Menteri

Tabel 4.18.2
Klasifikasi Jalan Nasional Tahun 2009 (%),
(Menurut PP Jalan No.34 Tahun 2006)

Status : 05 Januari 2009

No.	Pulau - Provinsi	Klasifikasi Jalan (%)			
		Jalan Raya (≥14 m)	Jalan Sedang (7 - 14 m)	Jalan Kecil (5 - 7 m)	Jalan Sub Standar (<5 m)
1	2	3	4	5	6
	SUMATERA	0,02	0,27	0,63	0,07
1	Nanggroe Aceh Darussalam	2,59	20,46	52,75	24,20
2	Sumatera Utara	5,56	18,28	72,90	3,27
3	Sumatera Barat	0,23	19,09	80,68	-
4	Riau	1,65	38,32	54,44	5,59
5	Kepulauan Riau *)	-	-	-	-
6	Jambi	4,62	37,09	58,29	-
7	Bengkulu	-	6,92	93,08	-
8	Sumatera Selatan	0,74	63,24	32,81	3,21
9	Bangka Belitung	1,69	3,22	84,41	10,68
10	Lampung	0,21	31,03	62,49	6,27
	JAWA	0,20	0,50	0,30	0,00
11	DKI Jakarta	100,00	-	-	-
12	Banten	3,10	25,01	71,89	-
13	Jawa Barat	21,16	54,84	23,78	0,22
14	Jawa Tengah	29,03	37,43	33,54	-
15	D.I. Yogyakarta	34,76	65,24	-	-
16	Jawa Timur	11,38	62,75	25,87	-
	KALIMANTAN	0,02	0,07	0,74	0,17
17	Kalimantan Barat	1,48	9,56	60,28	28,67
18	Kalimantan Tengah	0,44	2,82	92,99	3,74
19	Kalimantan Timur	2,98	8,87	65,41	22,73
20	Kalimantan Selatan	4,86	8,62	75,13	11,39
	BALI, MALUKU, NUSA TENGGERA	0,01	0,11	0,62	0,26
21	Bali	4,15	50,34	43,75	1,76
22	Nusa Tenggara Barat	0,87	20,35	26,94	51,84
23	Nusa Tenggara Timur	-	0,85	86,05	13,10
30	Maluku	0,01	4,72	87,04	8,23
31	Maluku Utara	-	0,48	7,49	92,03
	SULAWESI	0,00	0,09	0,42	0,48
24	Sulawesi Utara	-	9,66	41,39	48,95
25	Gorontalo	-	3,40	23,14	73,45
26	Sulawesi Tengah	0,23	2,36	20,97	76,43
27	Sulawesi Barat	-	9,28	34,09	56,63
28	Sulawesi Selatan	1,67	14,31	84,02	-
29	Sulawesi Tenggara	0,20	13,27	35,60	50,93
	PAPUA	0,01	0,10	0,89	-
32	Papua	0,94	11,88	87,18	-
33	Papua Barat	2,09	4,17	93,74	-
	Total Indonesia	4,27	20,67	57,46	17,60

Sumber : Subdit Data dan Informasi, Direktorat Bina Program, Bina Marga, Dep. PU

*) Jalan Nasional di Kepulauan Riau belum ditetapkan dengan SK Menteri

Tabel 4.19
Fungsi Jalan Arteri Dan Kolektor 1 Bukan Jalan Tol
(Menurut Kepmen Jalan No.630 Tahun 2009)

No.	Provinsi	Panjang Ruas	Arteri	Kolektor I
		(Km)	(Km)	(Km)
1	2	3	4	5
1	A C E H	1.803,35	538,25	1.265,10
2	SUMATERA UTARA	2.249,64	1.149,31	1.100,33
3	SUMATERA BARAT	1.212,89	675,10	537,79
4	R I A U	1.134,47	791,16	343,31
5	KEPULAUAN RIAU	334,00	132,01	201,99
6	J A M B I	936,48	729,03	207,45
7	BENGGKULU	783,87	167,93	615,94
8	SUMATERA SELATAN	1.444,26	1.097,44	346,83
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	509,59	-	509,59
10	LAMPUNG	1.159,57	475,57	684,00
11	DKI JAKARTA	142,65	109,34	33,31
12	BANTEN	476,49	105,70	370,79
13	JAWA BARAT	1.351,13	808,01	543,12
14	JAWA TENGAH	1.390,57	991,89	398,69
15	D.I. YOGYAKARTA	223,16	114,80	108,36
16	JAWA TIMUR	2.027,01	950,99	1.076,02
17	KALIMANTAN BARAT	1.664,55	791,66	872,89
18	KALIMANTAN TENGAH	1.714,83	819,49	895,35
19	KALIMANTAN TIMUR	2.118,17	331,66	1.786,51
20	KALIMANTAN SELATAN	866,09	343,55	522,53
21	B A L I	535,23	196,76	338,47
22	NUSA TENGGARA BARAT	632,17	488,70	143,48
23	NUSA TENGGARA TIMUR	1.406,68	1.024,63	382,05
30	SULAWESI UTARA	1.319,23	372,92	946,32
31	GORONTALO	606,70	337,56	269,14
24	SULAWESI TENGAH	2.181,95	675,65	1.506,30
25	SULAWESI BARAT	571,98	216,11	355,87
26	SULAWESI SELATAN	1.722,86	933,45	789,40
27	SULAWESI TENGGARA	1.397,05	470,47	926,59
28	MALUKU	1.066,65	41,32	1.025,33
29	MALUKU UTARA	511,89	-	511,89
32	P A P U A	2.111,44	1.102,80	1.008,64
33	PAPUA BARAT	963,24	752,76	210,48
Total Indonesia		38.569,823	17.735,983	20.833,840

Sumber : Lampiran B : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 630 / KPTS / M / 2009

Tanggal : 31 Desember 2009

Provinsi : Seluruh Indonesia

Tabel 4.20.1
Status Jalan Nasional Bukan Jalan Tol
(Menurut Kepmen Jalan No.631 Tahun 2009)

No.	Provinsi	Panjang Ruas
		(Km)
1	2	3
1	A C E H	1.803,35
2	SUMATERA UTARA	2.249,64
3	SUMATERA BARAT	1.212,89
4	R I A U	1.134,47
5	KEPULAUAN RIAU	334,00
6	J A M B I	936,48
7	BENGGULU	783,87
8	SUMATERA SELATAN	1.444,26
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	509,59
10	LAMPUNG	1.159,57
11	DKI JAKARTA	142,65
12	BANTEN	476,49
13	JAWA BARAT	1.351,13
14	JAWA TENGAH	1.390,57
15	D.I. YOGYAKARTA	223,16
16	JAWA TIMUR	2.027,01
17	KALIMANTAN BARAT	1.664,55
18	KALIMANTAN TENGAH	1.714,83
19	KALIMANTAN TIMUR	2.118,17
20	KALIMANTAN SELATAN	866,09
21	B A L I	535,23
22	NUSA TENGGARA BARAT	632,17
23	NUSA TENGGARA TIMUR	1.406,68
30	SULAWESI UTARA	1.319,23
31	GORONTALO	606,70
24	SULAWESI TENGAH	2.181,95
25	SULAWESI BARAT	571,98
26	SULAWESI SELATAN	1.722,86
27	SULAWESI TENGGARA	1.397,05
28	MALUKU	1.066,65
29	MALUKU UTARA	511,89
32	P A P U A	2.111,44
33	PAPUA BARAT	963,24
Total Indonesia		38.569,823

Sumber : Lampiran B : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 631 / KPTS / M / 2009

Tanggal : 31 Desember 2009

Provinsi : Seluruh Indonesia

Tabel 4.20.2
Perbandingan Panjang Ruas Jalan Nasional
Antara SK Menteri PU tahun 2004 dan SK Menteri PU tahun 2009

No.	Provinsi	Panjang Jalan Nasional	
		SK 2004	SK 2009
1	2	3	4
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	1.782,78	1.803,354
2	SUMATERA UTARA	2.098,05	2.249,644
3	SUMATERA BARAT	1.200,09	1.212,889
4	RIAU	1.126,11	1.134,466
5	JAMBI	820,40	936,480
6	SUMATERA SELATAN	1.290,24	1.444,261
7	BENGKULU	736,44	783,867
8	LAMPUNG	1.004,16	1.159,573
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	530,65	509,589
10	KEPULAUAN RIAU	-	333,995
11	DKI JAKARTA	122,38	142,647
12	JAWA BARAT	1.140,69	1.351,132
13	JAWA TENGAH	1.297,63	1.390,571
14	DI YOGYAKARTA	168,81	223,161
15	JAWA TIMUR	1.899,21	2.027,005
16	BANTEN	490,40	476,491
17	BALI	501,64	535,230
18	NUSA TENGGARA BARAT	601,83	632,174
19	NUSA TENGGARA TIMUR	1.273,02	1.406,681
20	KALIMANTAN BARAT	1.575,32	1.664,553
21	KALIMANTAN TENGAH	1.714,95	1.714,833
22	KALIMANTAN SELATAN	876,00	866,086
23	KALIMANTAN TIMUR	1.539,70	2.118,167
24	SULAWESI UTARA	1.267,39	1.319,231
25	SULAWESI TENGAH	1.806,46	2.181,945
26	SULAWESI SELATAN	2.107,54	1.722,856
27	SULAWESI TENGGARA	1.293,87	1.397,051
28	GORONTALO	616,24	606,696
29	SULAWESI BARAT	-	571,981
30	MALUKU	985,46	1.066,650
31	MALUKU UTARA	458,21	511,889
32	PAPUA BARAT	-	963,238
33	PAPUA	2.303,16	2.111,437
	Indonesia	34.628,830	38.569,823

Sumber : Subdit Data & Informasi, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PU

Tabel 4.21
Daftar Ruas Jalan Nasional
Kota Metropolitan

No.	Kota Metropolitan	Panjang (Km)
1	2	3
1	MEDAN (MEBIDANGRO)	227,501
2	PALEMBANG (PASANGLAYA)	215,983
3	JAKARTA (JABODETABEKPUNJUR)	453,311
4	BANDUNG (BANDUNGRAYA)	113,398
5	SEMARANG (KEDUNGSEPUR)	199,089
6	SURABAYA (GERBANGKERTOSUSILA)	414,660
7	BANJARMASIN (BANJARMASIN - BANJARBARU - MARTAPURA)	169,826
8	DENPASAR (SARBAGITA)	200,220
9	MAKASSAR (MAMMINASATA)	213,020
Total Indonesia		2.207,008

Sumber : Subdit Perencanaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PU

Tabel 4.22
Monitoring Data IRMS Berdasarkan Roughness
Tahun Anggaran 2010

Status : 18 Agustus 2010

No.	Provinsi	Panjang (Km) SK 2009	IRI Per Kelompok Kondisi (% terhadap SK 2009)															
			Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		Mantap		Tidak Mantap		Tidak Tembus		Tidak Ada Data	
			Km	(%)	Km	(%)	Km	(%)	Km	(%)	Km	(%)	Km	(%)	Km	(%)	Km	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Nanggroe Aceh Darussalam	1.803,35	1.120,41	62,13	547,15	30,34	45,67	2,53	90,13	5	1.667,56	92,47	135,80	7,53	0	0	0	0,00
2	Sumatera Utara	2.249,64	390,81	17,37	1.277,10	56,77	260,05	11,56	296,55	13,18	1.667,91	74,14	556,60	24,74	24,93	1,11	0,21	0,01
3	Sumatera Barat	1.212,89	345,01	28,45	758,20	62,51	83,85	6,91	25,83	2,13	1.103,21	90,96	109,67	9,04	0	0	0	0,00
4	Riau	1.134,47	576,67	50,83	378,10	33,33	79,45	7	47,9	4,22	954,77	84,16	127,35	11,23	3,43	0,3	48,91	4,31
5	Kepulauan Riau	334	160,26	47,98	104,51	31,29	10,99	3,29	58,23	17,43	264,77	79,27	69,22	20,73	0	0	0	0,00
6	Jambi	936,48	267,11	28,52	557,12	59,49	77,15	8,24	35,1	3,75	824,23	88,01	112,25	11,99	0	0	0	0,00
7	Bengkulu	783,87	432,33	55,15	296,34	37,81	30,14	3,85	24,06	3,07	728,67	92,96	54,20	6,91	1	0,13	0	0,00
8	Sumatera Selatan	1.444,25	1.188,29	82,28	212,20	14,69	15,33	1,06	2,56	0,18	1.400,49	96,97	17,89	1,24	0,05	0	25,82	1,79
9	Bangka Belitung	509,59	449,48	88,2	58,82	11,54	1,1	0,22	0,18	0,04	508,31	99,75	1,28	0,25	0	0	0	0,00
10	Lampung	1.159,57	520,57	44,89	496,65	42,83	100,56	8,67	41,79	3,6	1.017,22	87,72	142,35	12,28	0	0	0	0,00
11	DKI Jakarta	142,65	60,78	42,61	77,66	54,44	4,11	2,88	0,1	0,07	138,44	97,05	4,21	2,95	0	0	0	0,00
12	Banten	476,49	70,96	14,89	283,20	59,44	74,14	15,56	48,19	10,11	354,16	74,33	122,33	25,67	0	0	0	0,00
13	Jawa Barat	1.351,13	516,15	38,2	710,45	52,58	97,96	7,25	16,49	1,22	1.226,60	90,78	114,45	8,47	0	0	10,08	0,75
14	Jawa Tengah	1.390,57	615,85	44,29	718,91	51,7	53,12	3,82	2,7	0,19	1.334,76	95,99	55,82	4,01	0	0	0	0,00
15	D.I. Yogyakarta	223,16	88,59	39,7	76,55	34,3	57,82	25,91	0,2	0,09	165,14	74	58,02	26	0	0	0	0,00
16	Jawa Timur	2.027,18	1.515,03	74,74	448,56	22,13	27,72	1,37	4	0,2	1.963,58	96,86	31,72	1,56	0	0	31,88	1,57
17	Kalimantan Barat	1.664,55	352,89	21,2	701,47	42,14	407,65	24,49	204,42	12,28	1.054,36	63,34	612,07	36,77	0	0	-1,88	0,00
18	Kalimantan Tengah	1.714,83	770,02	44,9	322,97	18,83	48,47	2,83	525,5	30,64	1.092,98	63,74	573,97	33,47	0,05	0	47,84	2,79
19	Kalimantan Timur	2.118,17	433,72	20,48	1.348,37	63,66	255	12,04	81,08	3,83	1.782,09	84,13	336,08	15,87	0	0	0	0,00
20	Kalimantan Selatan	866,09	603,94	69,73	236,58	27,32	22,7	2,62	2,86	0,33	840,52	97,05	25,56	2,95	0	0	0	0,00
21	Bali	535,23	412,52	77,07	89,97	16,81	15,93	2,98	16,76	3,13	502,49	93,88	32,69	6,11	0,05	0,01	0	0,00
22	Nusa Tenggara Barat	631,64	170,20	26,95	352,23	55,76	38,87	6,15	62,59	9,91	522,44	82,71	101,46	16,06	5,33	0,84	2,41	0,38
23	Nusa Tenggara Timur	1.406,68	821,78	58,42	434,33	30,88	120,2	8,55	30,37	2,16	1.256,11	89,3	150,57	10,7	0	0	0	0,00
30	Maluku	1.319,23	110,38	8,37	988,22	74,91	164,58	12,48	56,05	4,25	1.098,60	83,28	220,63	16,72	0	0	0	0,00
31	Maluku Utara	606,7	339,17	55,9	205,93	33,94	31,67	5,22	29,92	4,93	545,1	89,85	61,59	10,15	0	0	0	0,00
24	Sulawesi Utara	2.181,94	1.502,17	68,85	411,65	18,87	116,29	5,33	130,86	6	1.913,82	87,71	247,15	11,33	1,02	0,05	19,96	0,91
25	Gorontalo	572,01	352,30	61,59	195,29	34,14	14,8	2,59	9,59	1,68	547,6	95,73	24,39	4,26	0	0	0,03	0,00
26	Sulawesi Tengah	1.722,86	922,96	53,57	564,89	32,79	141,24	8,2	89,26	5,18	1.487,84	86,36	230,50	13,38	0	0	4,51	0,26
27	Sulawesi Barat	1.397,05	549,38	39,32	327,48	23,44	225,9	16,17	294,24	21,06	876,86	62,77	520,14	37,23	0	0	0,05	0,00
28	Sulawesi Selatan	1.066,65	403,59	37,84	272,84	25,58	54,08	5,07	336,14	31,51	676,44	63,42	390,21	36,58	0	0	0	0,00
29	Sulawesi Tenggara	511,89	263,47	51,47	215,42	42,08	16	3,13	17	3,32	478,89	93,55	33,00	6,45	0	0	0	0,00
32	Papua	2.111,44	207,13	9,81	784,44	37,15	459,3	21,75	506,19	23,97	991,58	46,96	965,49	45,73	154,37	7,31	0	0,00
33	Papua Barat	963,24	202,44	21,02	332,11	34,48	67,03	6,96	361,66	37,55	534,55	55,5	428,68	44,5	0	0	0	0,00
Indonesia		38.569,49	16.736,36	43,39	14.785,71	38,34	3.218,87	8,35	3.448,50	8,94	31.522,09	81,73	6.667,34	17,29	190,22	0,49	189,81	0,49

Sumber : Subdit Data dan Informasi, Direktorat Bina Program, Bina Marga, Dep. PU

Kondisi IRI

baik : iri <= 4

sedang : 4 < iri <= 8

r.ringan : 8 < iri <= 12

r.berat : 12 < iri <= 30

t.tembus : iri >= 30

Tabel 4.23
Data Jalan Nasional Per Provinsi
Akhir Tahun 2009

No.	Provinsi	Panjang Jalan (Km)	Kondisi Jalan		Jumlah Lajur Jalan		Jenis Permukaan		Kapasitas MST	
			Mantap	Tidak Mantap	2 Lajur	> 2 Lajur	Aspal/ Rigid	Kerikil/ Tanah	8Ton	10Ton
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Nanggroe Aceh Darussalam	1.782,78	1.637,38	145,40	1.676,52	106,26	1.697,64	85,14	384	290
2	Sumatera Utara	2.098,05	1.871,78	226,27	1.962,04	136,01	1.995,70	102,35	824	320
3	Sumatera Barat	1.200,09	1.048,10	151,99	1.138,23	61,86	1.174,62	25,47	520	250
4	Riau	1.126,11	948,76	177,35	1.066,37	59,74	1.055,09	71,02	256	160
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	820,40	785,84	34,56	786,97	33,43	820,40	0,00	208	170
7	Sumatera Selatan	1.290,24	1.221,67	68,58	1.270,16	20,09	1.290,24	0,00	496	100
8	Kepulauan Bangka Belitung	530,65	516,94	13,71	517,16	13,49	529,51	1,14	184	50
9	Bengkulu	736,44	706,39	30,06	736,44	0,00	736,44	0,00	256	0
10	Lampung	1.004,16	931,59	72,57	950,16	54,01	985,24	18,92	288	80
11	DKI Jakarta	122,38	122,38	0,00	0,00	122,38	122,38	0,00	0	0
12	Jawa Barat	1.140,69	1.119,33	21,36	821,15	319,55	1.140,48	0,22	1.216	410
13	Banten	490,40	330,80	159,60	424,64	65,76	490,40	0,00	48	300
14	Jawa Tengah	1.297,63	1.288,25	9,38	965,83	331,80	1.295,72	1,91	688	1.390
15	DI Yogyakarta	168,81	168,81	0,00	95,81	73,00	168,81	0,00	32	220
16	Jawa Timur	1.899,21	1.891,71	7,50	1.680,13	219,08	1.899,21	0,00	2.016	790
17	Bali	501,64	486,96	14,68	462,74	38,90	501,64	0,00	368	120
18	Nusa Tenggara Barat	601,83	558,05	43,78	589,35	12,49	601,83	0,00	392	50
19	Nusa Tenggara Timur	1.273,02	1.148,60	124,42	1.270,01	3,01	1.269,32	3,70	856	30
20	Kalimantan Barat	1.575,32	1.182,93	392,39	1.553,69	21,63	1.155,56	419,77	384	110
21	Kalimantan Tengah	1.714,95	1.184,48	530,47	1.711,08	3,87	1.126,05	588,90	408	20
22	Kalimantan Selatan	876,00	750,09	125,91	845,56	30,44	871,79	4,21	504	90
23	Kalimantan Timur	1.539,70	1.216,26	323,45	1.457,31	82,39	1.350,85	188,85	368	380
24	Sulawesi Utara	1.267,39	1.129,25	138,14	1.266,39	1,00	1.198,30	69,10	496	10
25	Gorontalo	616,24	613,24	3,00	616,24	0,00	616,24	0,00	176	0
26	Sulawesi Tengah	1.806,46	1.496,46	310,00	1.804,68	1,78	1.741,67	64,79	616	10
27	Sulawesi Selatan	1.577,95	1.524,08	53,88	1.541,99	35,96	1.569,68	8,27	808	300
28	Sulawesi Barat	529,59	493,46	36,13	529,59	0,00	514,28	15,31	184	0
29	Sulawesi Tenggara	1.293,87	1.009,16	284,71	1.290,94	2,93	1.006,23	287,64	408	130
30	Maluku	985,46	649,61	335,85	984,48	0,98	627,90	357,56	320	10
31	Maluku Utara	458,21	330,73	127,48	458,21	0,00	309,59	148,62	176	0
32	Papua	1.794,95	795,59	999,36	1.752,85	42,10	720,09	1.074,86	456	10
33	Papua Barat	508,21	424,88	83,33	500,15	8,06	355,48	152,73	88	50
Indonesia		34.628,83	29.583,52	5.045,31	32.726,86	1.901,97	30.938,35	3.690,48	14.424,00	5.850,00

Sumber : Subdit Data dan Informasi, Direktorat Bina Program, Bina Marga, Dep. PU

Tabel 4.24.1
Rekapitulasi Jumlah Jembatan Nasional Menurut BMS Tahun 2009 (Unit)
Berdasarkan Panjang Jembatan
(Hasil Filterisasi Dengan Ruas Jalan Nasional Menurut Kepmen No.376/KPTS/M/2004)

Status : 5 Januari 2010

No.	Provinsi	Jumlah Jembatan (Unit)					Total
		0 - 20 m	20 - 30 m	30 - 60 m	60 - 100 m	> 100 m	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nanggroe Aceh Darussalam	728	108	137	49	29	1.051
2	Sumatera Utara	794	78	80	22	17	991
3	Sumatera Barat	427	74	75	38	10	624
4	Riau	225	45	40	5	16	331
5	Kepulauan Riau *)	0	0	0	0	0	0
6	Jambi	221	32	45	1	11	310
7	Bengkulu	154	48	76	25	11	314
8	Sumatera Selatan	355	133	46	18	40	592
9	Bangka Belitung	93	7	6	2	2	110
10	Lampung	296	62	32	20	11	421
11	DKI Jakarta	15	4	16	0	1	36
12	Banten	287	11	24	6	10	338
13	Jawa Barat	779	83	100	19	24	1.005
14	Jawa Tengah	1.024	82	133	38	27	1.304
15	D.I. Yogyakarta	73	20	20	14	12	139
16	Jawa Timur	1.244	79	117	20	16	1.476
17	Kalimantan Barat	461	81	45	12	13	612
18	Kalimantan Tengah	306	54	28	4	15	407
19	Kalimantan Timur	426	93	51	9	11	590
20	Kalimantan Selatan	468	50	59	13	6	596
21	Bali	266	47	56	16	3	388
22	Nusa Tenggara Barat	274	23	29	6	4	336
23	Nusa Tenggara Timur	511	36	48	6	8	609
24	Sulawesi Utara	395	70	71	9	10	555
25	Gorontalo	225	56	35	9	4	329
26	Sulawesi Tengah	869	89	81	21	18	1.078
27	Sulawesi Barat	161	35	37	13	8	254
28	Sulawesi Selatan	759	52	84	37	18	950
29	Sulawesi Tenggara	516	66	38	4	12	636
30	Maluku	285	36	49	17	14	401
31	Maluku Utara	286	36	31	5	0	358
32	Papua	451	81	69	19	19	639
33	Papua Barat	115	32	20	7	10	184
Total Indonesia		13.489	1.803	1.778	484	410	17.964

Sumber : Subdit Data dan Informasi, Direktorat Bina Program, Bina Marga, Dep. PU

*) Jalan Nasional di Kepulauan Riau belum ditetapkan dengan SK Menteri

Tabel 4.24.2
Rekapitulasi Jumlah Jembatan Nasional Menurut BMS Tahun 2009 (%),
Berdasarkan Panjang Jembatan
(Hasil Filterisasi Dengan Ruas Jalan Nasional Menurut Kepmen No.376/KPTS/M/2004)

Status : 5 Januari 2010

No.	Provinsi	Jumlah Jembatan (%)				
		0 - 20 m	20 - 30 m	30 - 60 m	60 - 100 m	> 100 m
1	2	3	4	5	6	7
1	Nanggroe Aceh Darussalam	69,27	10,28	13,04	4,66	2,76
2	Sumatera Utara	80,12	7,87	8,07	2,22	1,72
3	Sumatera Barat	68,43	11,86	12,02	6,09	1,60
4	Riau	67,98	13,60	12,08	1,51	4,83
5	Kepulauan Riau *)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Jambi	71,29	10,32	14,52	0,32	3,55
7	Bengkulu	49,04	15,29	24,20	7,96	3,50
8	Sumatera Selatan	59,97	22,47	7,77	3,04	6,76
9	Bangka Belitung	84,55	6,36	5,45	1,82	1,82
10	Lampung	70,31	14,73	7,60	4,75	2,61
11	DKI Jakarta	41,67	11,11	44,44	0,00	2,78
12	Banten	84,91	3,25	7,10	1,78	2,96
13	Jawa Barat	77,51	8,26	9,95	1,89	2,39
14	Jawa Tengah	78,53	6,29	10,20	2,91	2,07
15	D.I. Yogyakarta	52,52	14,39	14,39	10,07	8,63
16	Jawa Timur	84,28	5,35	7,93	1,36	1,08
17	Kalimantan Barat	75,33	13,24	7,35	1,96	2,12
18	Kalimantan Tengah	75,18	13,27	6,88	0,98	3,69
19	Kalimantan Timur	72,20	15,76	8,64	1,53	1,86
20	Kalimantan Selatan	78,52	8,39	9,90	2,18	1,01
21	Bali	68,56	12,11	14,43	4,12	0,77
22	Nusa Tenggara Barat	81,55	6,85	8,63	1,79	1,19
23	Nusa Tenggara Timur	83,91	5,91	7,88	0,99	1,31
24	Sulawesi Utara	71,17	12,61	12,79	1,62	1,80
25	Gorontalo	68,39	17,02	10,64	2,74	1,22
26	Sulawesi Tengah	80,61	8,26	7,51	1,95	1,67
27	Sulawesi Barat	63,39	13,78	14,57	5,12	3,15
28	Sulawesi Selatan	79,89	5,47	8,84	3,89	1,89
29	Sulawesi Tenggara	81,13	10,38	5,97	0,63	1,89
30	Maluku	71,07	8,98	12,22	4,24	3,49
31	Maluku Utara	79,89	10,06	8,66	1,40	0,00
32	Papua	70,58	12,68	10,80	2,97	2,97
33	Papua Barat	62,50	17,39	10,87	3,80	5,43
Total Indonesia		75,09	10,04	9,90	2,69	2,28

Sumber : Subdit Data dan Informasi, Direktorat Bina Program, Bina Marga, Dep. PU

*) Jalan Nasional di Kepulauan Riau belum ditetapkan dengan SK Menteri

Tabel 4.25.1
Rekapitulasi Panjang Jembatan Nasional Menurut BMS Tahun 2009 (m),
Berdasarkan Panjang Jembatan
(Hasil Filterisasi Dengan Ruas Jalan Nasional Menurut Kepmen No.376/KPTS/M/2004)

Status : 5 Januari 2010

No.	Provinsi	Panjang Jembatan (m)					Total
		0 - 20 m	20 - 30 m	30 - 60 m	60 - 100 m	> 100 m	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nanggroe Aceh Darussalam	6.249	2.659	5.628	3.751	4.695	22.982
2	Sumatera Utara	6.379	1.912	3.443	1.775	2.448	15.957
3	Sumatera Barat	3.601	1.883	3.269	3.147	1.375	13.275
4	Riau	2.326	1.176	1.883	385	3.481	9.251
5	Kepulauan Riau *)	0	0	0	0	0	0
6	Jambi	1.695	804	1.969	90	2.297	6.855
7	Bengkulu	1.255	1.170	3.183	2.050	1.500	9.158
8	Sumatera Selatan	3.689	3.109	1.939	1.418	7.331	17.486
9	Bangka Belitung	869	181	248	152	398	1.848
10	Lampung	2.913	1.512	1.468	1.652	2.266	9.811
11	DKI Jakarta	159	88	659	0	230	1.136
12	Banten	1.736	271	1.082	514	1.145	4.748
13	Jawa Barat	5.755	2.067	4.241	1.428	4.107	17.598
14	Jawa Tengah	6.490	2.124	5.548	2.738	4.381	21.281
15	D.I. Yogyakarta	606	494	752	1.018	2.989	5.859
16	Jawa Timur	7.831	1.970	4.883	1.556	3.024	19.264
17	Kalimantan Barat	4.273	2.027	1.968	1.002	3.082	12.352
18	Kalimantan Tengah	3.599	1.414	1.306	307	5.852	12.478
19	Kalimantan Timur	2.747	2.323	1.998	702	2.640	10.410
20	Kalimantan Selatan	4.203	1.244	2.423	1.081	4.300	13.251
21	Bali	1.954	1.209	2.311	1.124	426	7.024
22	Nusa Tenggara Barat	2.603	546	1.143	439	695	5.426
23	Nusa Tenggara Timur	4.226	869	2.063	506	1.080	8.744
24	Sulawesi Utara	3.725	1.739	2.926	677	1.371	10.438
25	Gorontalo	2.015	1.348	1.443	626	502	5.934
26	Sulawesi Tengah	6.251	2.076	3.350	1.574	2.386	15.637
27	Sulawesi Barat	1.645	824	1.543	871	1.267	6.150
28	Sulawesi Selatan	5.386	1.256	3.421	2.739	2.426	15.228
29	Sulawesi Tenggara	4.881	1.601	1.646	320	1.419	9.867
30	Maluku	2.643	977	2.067	1.412	2.318	9.417
31	Maluku Utara	2.436	843	1.241	422	0	4.942
32	Papua	5.037	2.169	3.259	1.505	3.561	15.531
33	Papua Barat	1.242	758	898	498	1.614	5.010
Total Indonesia		110.419	44.643	75.201	37.479	76.606	344.348

Sumber : Subdit Data dan Informasi, Direktorat Bina Program, Bina Marga, Dep. PU

*) Jalan Nasional di Kepulauan Riau belum ditetapkan dengan SK Menteri

Tabel 4.25.2
Rekapitulasi Panjang Jembatan Nasional Menurut BMS Tahun 2009 (%),
Berdasarkan Panjang Jembatan
(Hasil Filterisasi Dengan Ruas Jalan Nasional Menurut Kepmen No.376/KPTS/M/2004)

Status : 5 Januari 2010

No.	Provinsi	Panjang Jembatan (%)				
		0 - 20 m	20 - 30 m	30 - 60 m	60 - 100 m	> 100 m
1	2	3	4	5	6	7
1	Nanggroe Aceh Darussalam	27,19	11,57	24,49	16,32	20,43
2	Sumatera Utara	39,98	11,98	21,58	11,12	15,34
3	Sumatera Barat	27,13	14,18	24,63	23,71	10,36
4	Riau	25,14	12,71	20,35	4,16	37,63
5	Kepulauan Riau *)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Jambi	24,73	11,73	28,72	1,31	33,51
7	Bengkulu	13,70	12,78	34,76	22,38	16,38
8	Sumatera Selatan	21,10	17,78	11,09	8,11	41,92
9	Bangka Belitung	47,02	9,79	13,42	8,23	21,54
10	Lampung	29,69	15,41	14,96	16,84	23,10
11	DKI Jakarta	14,00	7,75	58,01	0,00	20,25
12	Banten	36,56	5,71	22,79	10,83	24,12
13	Jawa Barat	32,70	11,75	24,10	8,11	23,34
14	Jawa Tengah	30,50	9,98	26,07	12,87	20,59
15	D.I. Yogyakarta	10,34	8,43	12,83	17,37	51,02
16	Jawa Timur	40,65	10,23	25,35	8,08	15,70
17	Kalimantan Barat	34,59	16,41	15,93	8,11	24,95
18	Kalimantan Tengah	28,84	11,33	10,47	2,46	46,90
19	Kalimantan Timur	26,39	22,32	19,19	6,74	25,36
20	Kalimantan Selatan	31,72	9,39	18,29	8,16	32,45
21	Bali	27,82	17,21	32,90	16,00	6,06
22	Nusa Tenggara Barat	47,97	10,06	21,07	8,09	12,81
23	Nusa Tenggara Timur	48,33	9,94	23,59	5,79	12,35
24	Sulawesi Utara	35,69	16,66	28,03	6,49	13,13
25	Gorontalo	33,96	22,72	24,32	10,55	8,46
26	Sulawesi Tengah	39,98	13,28	21,42	10,07	15,26
27	Sulawesi Barat	26,75	13,40	25,09	14,16	20,60
28	Sulawesi Selatan	35,37	8,25	22,47	17,99	15,93
29	Sulawesi Tenggara	49,47	16,23	16,68	3,24	14,38
30	Maluku	28,07	10,37	21,95	14,99	24,62
31	Maluku Utara	49,29	17,06	25,11	8,54	0,00
32	Papua	32,43	13,97	20,98	9,69	22,93
33	Papua Barat	24,79	15,13	17,92	9,94	32,22
Total Indonesia		32,07	12,96	21,84	10,88	22,25

Sumber : Subdit Data dan Informasi, Direktorat Bina Program, Bina Marga, Dep. PU

*) Jalan Nasional di Kepulauan Riau belum ditetapkan dengan SK Menteri

Tabel 4.26.1
Rekapitulasi Kondisi Jumlah Jembatan Nasional Menurut BMS Tahun 2009 (Unit),
Berdasarkan Kondisi Jembatan Secara Umum
(Hasil Filterisasi Dengan Ruas Jalan Nasional Menurut KEPMEN NO.376/KPTS/M/2004)

Status : 5 Januari 2010

No.	Provinsi	Jumlah Jembatan (Unit)						Total
		Kondisi Baik Sekali	Kondisi Baik	Kondisi Rusak Ringan	Kondisi Rusak Berat	Kondisi Kritis	Kondisi Runtuh/ Tdk Ada Jembatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nanggroe Aceh Darussalam	329	301	220	145	47	9	1.051
2	Sumatera Utara	284	151	452	52	46	6	991
3	Sumatera Barat	317	141	85	42	29	10	624
4	Riau	118	18	125	61	5	4	331
5	Kepulauan Riau *)	0	0	0	0	0	0	0
6	Jambi	93	138	59	19	0	1	310
7	Bengkulu	82	59	106	41	20	6	314
8	Sumatera Selatan	406	72	67	28	7	12	592
9	Bangka Belitung	64	6	17	17	5	1	110
10	Lampung	169	155	72	18	3	4	421
11	DKI Jakarta	0	4	17	13	2	0	36
12	Banten	178	64	56	30	8	2	338
13	Jawa Barat	397	199	291	56	6	56	1.005
14	Jawa Tengah	810	282	124	78	7	3	1.304
15	D.I. Yogyakarta	110	8	11	8	0	2	139
16	Jawa Timur	544	466	301	130	28	7	1.476
17	Kalimantan Barat	280	188	90	28	17	9	612
18	Kalimantan Tengah	230	45	46	51	25	10	407
19	Kalimantan Timur	122	350	67	37	13	1	590
20	Kalimantan Selatan	276	107	80	106	24	3	596
21	Bali	231	75	61	12	5	4	388
22	Nusa Tenggara Barat	130	103	77	23	3	0	336
23	Nusa Tenggara Timur	266	172	96	52	7	16	609
24	Sulawesi Utara	351	80	73	15	20	16	555
25	Gorontalo	108	29	110	81	0	1	329
26	Sulawesi Tengah	433	271	236	92	41	5	1.078
27	Sulawesi Barat	208	29	12	4	1	0	254
28	Sulawesi Selatan	401	286	192	54	16	1	950
29	Sulawesi Tenggara	119	241	94	112	34	36	636
30	Maluku	78	87	119	41	20	56	401
31	Maluku Utara	179	85	44	28	22	0	358
32	Papua	228	115	112	52	79	53	639
33	Papua Barat	150	21	10	3	0	0	184
Total Indonesia		7.691	4.348	3.522	1.529	540	334	17.964

Sumber : Subdit Data dan Informasi, Direktorat Bina Program, Bina Marga, Dep. PU

*) Jalan Nasional di Kepulauan Riau belum ditetapkan dengan SK Menteri

Tabel 4.26.2
Rekapitulasi Kondisi Jumlah Jembatan Nasional Menurut BMS Tahun 2009 (%),
Berdasarkan Kondisi Jembatan Secara Umum
(Hasil Filterisasi Dengan Ruas Jalan Nasional Menurut KEPMEN NO.376/KPTS/M/2004)

Status : 5 Januari 2010

No.	Provinsi	Jumlah Jembatan (%)						Kondisi Runtuh/ Tdk Ada Jembatan
		Kondisi Baik Sekali	Kondisi Baik	Kondisi Rusak Ringan	Kondisi Rusak Berat	Kondisi Kritis		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Nanggroe Aceh Darussalam	31,30	28,64	20,93	13,80	4,47	0,86	
2	Sumatera Utara	28,66	15,24	45,61	5,25	4,64	0,61	
3	Sumatera Barat	50,80	22,60	13,62	6,73	4,65	1,60	
4	Riau	35,65	5,44	37,76	18,43	1,51	1,21	
5	Kepulauan Riau *)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Jambi	30,00	44,52	19,03	6,13	0,00	0,32	
7	Bengkulu	26,11	18,79	33,76	13,06	6,37	1,91	
8	Sumatera Selatan	68,58	12,16	11,32	4,73	1,18	2,03	
9	Bangka Belitung	58,18	5,45	15,45	15,45	4,55	0,91	
10	Lampung	40,14	36,82	17,10	4,28	0,71	0,95	
11	DKI Jakarta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Banten	52,66	18,93	16,57	8,88	2,37	0,59	
13	Jawa Barat	39,50	19,80	28,96	5,57	0,60	5,57	
14	Jawa Tengah	62,12	21,63	9,51	5,98	0,54	0,23	
15	D.I. Yogyakarta	79,14	5,76	7,91	5,76	0,00	1,44	
16	Jawa Timur	36,86	31,57	20,39	8,81	1,90	0,47	
17	Kalimantan Barat	45,75	30,72	14,71	4,58	2,78	1,47	
18	Kalimantan Tengah	56,51	11,06	11,30	12,53	6,14	2,46	
19	Kalimantan Timur	20,68	59,32	11,36	6,27	2,20	0,17	
20	Kalimantan Selatan	46,31	17,95	13,42	17,79	4,03	0,50	
21	Bali	59,54	19,33	15,72	3,09	1,29	1,03	
22	Nusa Tenggara Barat	38,69	30,65	22,92	6,85	0,89	0,00	
23	Nusa Tenggara Timur	43,68	28,24	15,76	8,54	1,15	2,63	
24	Sulawesi Utara	63,24	14,41	13,15	2,70	3,60	2,88	
25	Gorontalo	32,83	8,81	33,43	24,62	0,00	0,30	
26	Sulawesi Tengah	40,17	25,14	21,89	8,53	3,80	0,46	
27	Sulawesi Barat	81,89	11,42	4,72	1,57	0,39	0,00	
28	Sulawesi Selatan	42,21	30,11	20,21	5,68	1,68	0,11	
29	Sulawesi Tenggara	18,71	37,89	14,78	17,61	5,35	5,66	
30	Maluku	19,45	21,70	29,68	10,22	4,99	13,97	
31	Maluku Utara	50,00	23,74	12,29	7,82	6,15	0,00	
32	Papua	35,68	18,00	17,53	8,14	12,36	8,29	
33	Papua Barat	81,52	11,41	5,43	1,63	0,00	0,00	
Total Indonesia		42,81	24,20	19,61	8,51	3,01	1,86	

Sumber : Subdit Data dan Informasi, Direktorat Bina Program, Bina Marga, Dep. PU

*) Jalan Nasional di Kepulauan Riau belum ditetapkan dengan SK Menteri

Tabel 4.27.1
Rekapitulasi Kondisi Panjang Jembatan Nasional Menurut BMS Tahun 2009 (m),
Berdasarkan Kondisi Jembatan Secara Umum
(Hasil Filterisasi Dengan Ruas Jalan Nasional Menurut KEPMEN NO.376/KPTS/M/2004)

Status : 5 Januari 2010

No.	Provinsi	Panjang Jembatan (m)						Kondisi Runtuh/ Tdk Ada Jembatan	Total
		Kondisi Baik Sekali	Kondisi Baik	Kondisi Rusak Ringan	Kondisi Rusak Berat	Kondisi Kritis			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Nanggroe Aceh Darussalam	5.366	5.344	5.648	5.290	777	556	22.981	
2	Sumatera Utara	4.349	3.236	6.133	1.179	637	425	15.959	
3	Sumatera Barat	6.540	2.491	1.962	1.549	342	392	13.276	
4	Riau	1.828	282	4.600	1.819	137	585	9.251	
5	Kepulauan Riau *)	0	0	0	0	0	0	0	
6	Jambi	1.972	1.610	1.674	1.466	0	134	6.856	
7	Bengkulu	1.344	1.576	3.927	1.566	248	495	9.156	
8	Sumatera Selatan	8.504	3.281	3.612	757	360	970	17.484	
9	Bangka Belitung	803	313	246	405	51	30	1.848	
10	Lampung	3.826	3.385	1.480	800	99	240	9.830	
11	DKI Jakarta	0	120	587	387	42	0	1.136	
12	Banten	2.754	403	863	445	221	63	4.749	
13	Jawa Barat	9.194	2.017	3.831	1.070	158	1.327	17.597	
14	Jawa Tengah	13.527	4.379	2.283	840	87	167	21.283	
15	D.I. Yogyakarta	4.063	1.073	267	420	0	36	5.859	
16	Jawa Timur	7.236	4.265	4.053	2.287	757	666	19.264	
17	Kalimantan Barat	5.080	4.056	1.639	652	405	520	12.352	
18	Kalimantan Tengah	6.301	2.154	1.206	1.587	478	754	12.480	
19	Kalimantan Timur	2.768	4.514	1.354	1.506	244	25	10.411	
20	Kalimantan Selatan	7.809	1.380	1.414	1.835	574	238	13.250	
21	Bali	4.195	1.399	795	325	71	240	7.025	
22	Nusa Tenggara Barat	2.572	1.320	1.174	334	24	0	5.424	
23	Nusa Tenggara Timur	3.556	2.666	1.260	761	196	305	8.744	
24	Sulawesi Utara	6.705	1.176	1.151	252	350	804	10.438	
25	Gorontalo	1.958	595	1.821	1.535	0	25	5.934	
26	Sulawesi Tengah	7.893	3.103	3.264	923	398	57	15.638	
27	Sulawesi Barat	5.391	528	157	56	18	0	6.150	
28	Sulawesi Selatan	4.661	4.455	4.789	1.013	186	125	15.229	
29	Sulawesi Tenggara	2.656	3.547	1.158	1.147	740	621	9.869	
30	Maluku	1.351	1.812	2.585	863	384	2.424	9.419	
31	Maluku Utara	2.478	1.031	540	365	528	0	4.942	
32	Papua	5.093	1.804	2.002	1.524	1.836	3.273	15.532	
33	Papua Barat	4.532	296	159	23	0	0	5.010	
Total Indonesia		146.305	69.611	67.634	34.981	10.348	15.497	344.376	

Sumber : Subdit Data dan Informasi, Direktorat Bina Program, Bina Marga, Dep. PU

*) Jalan Nasional di Kepulauan Riau belum ditetapkan dengan SK Menteri

Tabel 4.27.2
Rekapitulasi Kondisi Panjang Jembatan Nasional Menurut BMS Tahun 2009 (%),
Berdasarkan Kondisi Jembatan Secara Umum
(Hasil Filterisasi Dengan Ruas Jalan Nasional Menurut KEPMEN NO.376/KPTS/M/2004)

Status : 5 Januari 2010

No.	Provinsi	Panjang Jembatan (%)						Kondisi Runtuh/ Tdk Ada Jembatan
		Kondisi Baik Sekali	Kondisi Baik	Kondisi Rusak Ringan	Kondisi Rusak Berat	Kondisi Kritis		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Nanggroe Aceh Darussalam	23,35	23,25	24,58	23,02	3,38	2,42	
2	Sumatera Utara	27,25	20,28	38,43	7,39	3,99	2,66	
3	Sumatera Barat	49,26	18,76	14,78	11,67	2,58	2,95	
4	Riau	19,76	3,05	49,72	19,66	1,48	6,32	
5	Kepulauan Riau *)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Jambi	28,76	23,48	24,42	21,38	0,00	1,95	
7	Bengkulu	14,68	17,21	42,89	17,10	2,71	5,41	
8	Sumatera Selatan	48,64	18,77	20,66	4,33	2,06	5,55	
9	Bangka Belitung	43,45	16,94	13,31	21,92	2,76	1,62	
10	Lampung	38,92	34,44	15,06	8,14	1,01	2,44	
11	DKI Jakarta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Banten	57,99	8,49	18,17	9,37	4,65	1,33	
13	Jawa Barat	52,25	11,46	21,77	6,08	0,90	7,54	
14	Jawa Tengah	63,56	20,58	10,73	3,95	0,41	0,78	
15	D.I. Yogyakarta	69,35	18,31	4,56	7,17	0,00	0,61	
16	Jawa Timur	37,56	22,14	21,04	11,87	3,93	3,46	
17	Kalimantan Barat	41,13	32,84	13,27	5,28	3,28	4,21	
18	Kalimantan Tengah	50,49	17,26	9,66	12,72	3,83	6,04	
19	Kalimantan Timur	26,59	43,36	13,01	14,47	2,34	0,24	
20	Kalimantan Selatan	58,94	10,42	10,67	13,85	4,33	1,80	
21	Bali	59,72	19,91	11,32	4,63	1,01	3,42	
22	Nusa Tenggara Barat	47,42	24,34	21,64	6,16	0,44	0,00	
23	Nusa Tenggara Timur	40,67	30,49	14,41	8,70	2,24	3,49	
24	Sulawesi Utara	64,24	11,27	11,03	2,41	3,35	7,70	
25	Gorontalo	33,00	10,03	30,69	25,87	0,00	0,42	
26	Sulawesi Tengah	50,47	19,84	20,87	5,90	2,55	0,36	
27	Sulawesi Barat	87,66	8,59	2,55	0,91	0,29	0,00	
28	Sulawesi Selatan	30,61	29,25	31,45	6,65	1,22	0,82	
29	Sulawesi Tenggara	26,91	35,94	11,73	11,62	7,50	6,29	
30	Maluku	14,34	19,24	27,44	9,16	4,08	25,74	
31	Maluku Utara	50,14	20,86	10,93	7,39	10,68	0,00	
32	Papua	32,79	11,61	12,89	9,81	11,82	21,07	
33	Papua Barat	90,46	5,91	3,17	0,46	0,00	0,00	
Total Indonesia		42,48	20,21	19,64	10,16	3,00	4,50	

Sumber : Subdit Data dan Informasi, Direktorat Bina Program, Bina Marga, Dep. PU

*) Jalan Nasional di Kepulauan Riau belum ditetapkan dengan SK Menteri

Tabel 4.28.1
Rekapitulasi Jumlah Jembatan Nasional Menurut BMS Tahun 2009 (Unit),
Berdasarkan Jenis Konstruksi Jembatan
(Hasil Filterisasi Dengan Ruas Jalan Nasional Menurut KEPMEN NO.376/KPTS/M/2004)

Status : 5 Januari 2010

No.	Provinsi	Jumlah Jembatan (Unit)				Total
		Box Culvert	Gelagar	Rangka	Lain-Lain	
1	2	3	4	5	6	7
1	Nanggroe Aceh Darussalam	213	428	126	284	1.051
2	Sumatera Utara	121	423	65	382	991
3	Sumatera Barat	67	331	72	154	624
4	Riau	113	152	44	22	331
5	Kepulauan Riau *)				0	0
6	Jambi	172	79	47	12	310
7	Bengkulu	33	82	84	115	314
8	Sumatera Selatan	52	358	70	112	592
9	Bangka Belitung	4	93	5	8	110
10	Lampung	79	228	17	97	421
11	DKI Jakarta	4	25	1	6	36
12	Banten	15	143	17	163	338
13	Jawa Barat	119	152	52	682	1.005
14	Jawa Tengah	46	422	66	770	1.304
15	D.I. Yogyakarta	14	88	7	30	139
16	Jawa Timur	58	456	78	884	1.476
17	Kalimantan Barat		321	117	174	612
18	Kalimantan Tengah	16	323	32	36	407
19	Kalimantan Timur	186	223	62	119	590
20	Kalimantan Selatan	208	241	64	83	596
21	Bali		160	19	209	388
22	Nusa Tenggara Barat	8	195	27	106	336
23	Nusa Tenggara Timur	2	366	49	192	609
24	Sulawesi Utara	5	308	57	283	653
25	Gorontalo	2	170	40	117	329
26	Sulawesi Tengah	146	404	86	442	1.078
27	Sulawesi Barat	53	97	49	55	254
28	Sulawesi Selatan	230	310	67	343	950
29	Sulawesi Tenggara		309	36	291	636
30	Maluku	7	205	43	146	401
31	Maluku Utara	10	276	14	58	358
32	Papua	37	383	136	83	639
33	Papua Barat	10	137	28	9	184
Total Indonesia		2.030	7.888	1.677	6.467	18.062

Sumber : Subdit Data dan Informasi, Direktorat Bina Program, Bina Marga, Dep. PU

*) Jalan Nasional di Kepulauan Riau belum ditetapkan dengan SK Menteri

Tabel 4.28.2
Rekapitulasi Jumlah Jembatan Nasional Menurut BMS Tahun 2009 (%),
Berdasarkan Jenis Konstruksi Jembatan
(Hasil Filterisasi Dengan Ruas Jalan Nasional Menurut KEPMEN NO.376/KPTS/M/2004)

Status : 5 Januari 2010

No.	Provinsi	Jumlah Jembatan (%)			
		Box Culvert	Gelagar	Rangka	Lain-Lain
1	2	3	4	5	6
1	Nanggroe Aceh Darussalam	20,27	40,72	11,99	27,02
2	Sumatera Utara	12,21	42,68	6,56	38,55
3	Sumatera Barat	10,74	53,04	11,54	24,68
4	Riau	34,14	45,92	13,29	6,65
5	Kepulauan Riau *)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Jambi	55,48	25,48	15,16	3,87
7	Bengkulu	10,51	26,11	26,75	36,62
8	Sumatera Selatan	8,78	60,47	11,82	18,92
9	Bangka Belitung	3,64	84,55	4,55	7,27
10	Lampung	18,76	54,16	4,04	23,04
11	DKI Jakarta	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Banten	4,44	42,31	5,03	48,22
13	Jawa Barat	11,84	15,12	5,17	67,86
14	Jawa Tengah	3,53	32,36	5,06	59,05
15	D.I. Yogyakarta	10,07	63,31	5,04	21,58
16	Jawa Timur	3,93	30,89	5,28	59,89
17	Kalimantan Barat	0,00	52,45	19,12	28,43
18	Kalimantan Tengah	3,93	79,36	7,86	8,85
19	Kalimantan Timur	31,53	37,80	10,51	20,17
20	Kalimantan Selatan	34,90	40,44	10,74	13,93
21	Bali	0,00	41,24	4,90	53,87
22	Nusa Tenggara Barat	2,38	58,04	8,04	31,55
23	Nusa Tenggara Timur	0,33	60,10	8,05	31,53
24	Sulawesi Utara	0,77	47,17	8,73	43,34
25	Gorontalo	0,61	51,67	12,16	35,56
26	Sulawesi Tengah	13,54	37,48	7,98	41,00
27	Sulawesi Barat	20,87	38,19	19,29	21,65
28	Sulawesi Selatan	24,21	32,63	7,05	36,11
29	Sulawesi Tenggara	0,00	48,58	5,66	45,75
30	Maluku	1,75	51,12	10,72	36,41
31	Maluku Utara	2,79	77,09	3,91	16,20
32	Papua	5,79	59,94	21,28	12,99
33	Papua Barat	5,43	74,46	15,22	4,89
Total Indonesia		17,51	68,03	14,46	55,77

Sumber : Subdit Data dan Informasi, Direktorat Bina Program, Bina Marga, Dep. PU

*) Jalan Nasional di Kepulauan Riau belum ditetapkan dengan SK Menteri

Tabel 4.29.1
Rekapitulasi Panjang Jembatan Nasional Menurut BMS Tahun 2009 (m),
Berdasarkan Jenis Konstruksi Jembatan
(Hasil Filterisasi Dengan Ruas Jalan Nasional Menurut KEPMEN NO.376/KPTS/M/2004)

Status : 5 Januari 2010

No.	Provinsi	Panjang Jembatan (m)				T o t a l
		Box Culvert	Gelagar	Rangka	Lain-Lain	
1	2	3	4	5	6	7
1	Nanggroe Aceh Darussalam	1.653	96	8.586	12.646	22.981
2	Sumatera Utara	785	6.657	4.643	3.873	15.958
3	Sumatera Barat	507	6.029	4.275	2.927	13.738
4	Riau	714	3.929	3.270	1.338	9.251
5	Kepulauan Riau *)				0	0
6	Jambi	966	1.850	3.245	794	6.855
7	Bengkulu	196	1.955	5.070	1.936	9.157
8	Sumatera Selatan	447	8.768	5.837	2.433	17.485
9	Bangka Belitung	18	1.243	529	58	1.848
10	Lampung	658	3.519	1.394	4.258	9.829
11	DKI Jakarta	52	804	230	50	1.136
12	Banten	92	2.303	1.394	959	4.748
13	Jawa Barat	856	4.264	3.623	8.854	17.597
14	Jawa Tengah	294	9.499	5.412	6.077	21.282
15	D.I. Yogyakarta	100	3.480	1.414	865	5.859
16	Jawa Timur	291	7.505	5.240	6.228	19.264
17	Kalimantan Barat		4.511	5.800	2.041	12.352
18	Kalimantan Tengah	144	5.116	5.193	2.026	12.479
19	Kalimantan Timur	995	4.077	3.719	1.619	10.410
20	Kalimantan Selatan	1.451	6.705	3.077	2.018	13.251
21	Bali		3.867	1.044	2.114	7.025
22	Nusa Tenggara Barat	126	2.749	1.483	1.067	5.425
23	Nusa Tenggara Timur	27	4.313	2.928	1.476	8.744
24	Sulawesi Utara	82	5.559	2.791	3.644	12.076
25	Gorontalo	21	3.143	2.003	766	5.933
26	Sulawesi Tengah	793	6.757	5.499	2.589	15.638
27	Sulawesi Barat	468	1.825	3.104	753	6.150
28	Sulawesi Selatan	1.459	5.105	4.692	3.973	15.229
29	Sulawesi Tenggara		5.001	2.283	2.584	9.868
30	Maluku	54	2.333	2.989	4.042	9.418
31	Maluku Utara	124	3.261	656	900	4.941
32	Papua	357	5.858	5.540	3.776	15.531
33	Papua Barat	77	2.299	2.251	384	5.011
Total Indonesia		13.807	134.380	109.214	89.068	346.469

Sumber : Subdit Data dan Informasi, Direktorat Bina Program, Bina Marga, Dep. PU

*) Jalan Nasional di Kepulauan Riau belum ditetapkan dengan SK Menteri

Tabel 4.29.2
Rekapitulasi Panjang Jembatan Nasional Menurut BMS Tahun 2009 (%),
Berdasarkan Jenis Konstruksi Jembatan
(Hasil Filterisasi Dengan Ruas Jalan Nasional Menurut KEPMEN NO.376/KPTS/M/2004)

Status : 5 Januari 2010

No.	Provinsi	Panjang Jembatan (%)			
		Box Culvert	Gelagar	Rangka	Lain-Lain
1	2	3	4	5	6
1	Nanggroe Aceh Darussalam	7,19	0,42	37,36	55,03
2	Sumatera Utara	4,92	41,72	29,10	24,27
3	Sumatera Barat	3,69	43,89	31,12	21,31
4	Riau	7,72	42,47	35,35	14,46
5	Kepulauan Riau *)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Jambi	14,09	26,99	47,34	11,58
7	Bengkulu	2,14	21,35	55,37	21,14
8	Sumatera Selatan	2,56	50,15	33,38	13,91
9	Bangka Belitung	0,97	67,26	28,63	3,14
10	Lampung	6,69	35,80	14,18	43,32
11	DKI Jakarta	4,58	0,00	0,00	0,00
12	Banten	1,94	48,50	29,36	20,20
13	Jawa Barat	4,86	24,23	20,59	50,32
14	Jawa Tengah	1,38	44,63	25,43	28,55
15	D.I. Yogyakarta	1,71	59,40	24,13	14,76
16	Jawa Timur	1,51	38,96	27,20	32,33
17	Kalimantan Barat	0,00	36,52	46,96	16,52
18	Kalimantan Tengah	1,15	41,00	41,61	16,24
19	Kalimantan Timur	9,56	39,16	35,73	15,55
20	Kalimantan Selatan	10,95	50,60	23,22	15,23
21	Bali	0,00	55,05	14,86	30,09
22	Nusa Tenggara Barat	2,32	50,67	27,34	19,67
23	Nusa Tenggara Timur	0,31	49,33	33,49	16,88
24	Sulawesi Utara	0,68	46,03	23,11	30,18
25	Gorontalo	0,35	52,97	33,76	12,91
26	Sulawesi Tengah	5,07	43,21	35,16	16,56
27	Sulawesi Barat	7,61	29,67	50,47	12,24
28	Sulawesi Selatan	9,58	33,52	30,81	26,09
29	Sulawesi Tenggara	0,00	50,68	23,14	26,19
30	Maluku	0,57	24,77	31,74	42,92
31	Maluku Utara	2,51	66,00	13,28	18,21
32	Papua	2,30	37,72	35,67	24,31
33	Papua Barat	1,54	45,88	44,92	7,66
Total Indonesia		5,36	52,21	42,43	34,60

Sumber : Subdit Data dan Informasi, Direktorat Bina Program, Bina Marga, Dep. PU

*) Jalan Nasional di Kepulauan Riau belum ditetapkan dengan SK Menteri

Tabel 4.30.1
Rekapitulasi Jumlah Jembatan Nasional Menurut BMS Tahun 2009 (Unit),
Berdasarkan Tahun Dibangun
(Hasil Filterisasi Dengan Ruas Jalan Nasional Menurut Kepmen No.376/KPTS/M/2004)

Status : 5 Januari 2010

No.	Provinsi	Jumlah Jembatan (Unit)					Total
		< 1970	1970 - 1980	1980 - 1990	1990 - 2000	> 2000	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nanggroe Aceh Darussalam	43	367	310	318	13	1.051
2	Sumatera Utara	369	315	195	200	12	1.091
3	Sumatera Barat	74	219	147	179	5	624
4	Riau	6	23	166	115	21	331
5	Kepulauan Riau *)						0
6	Jambi	12	142	126	25	5	310
7	Bengkulu	12	36	143	114	9	314
8	Sumatera Selatan	38	194	204	150	6	592
9	Bangka Belitung	25	28	44	12	1	110
10	Lampung	22	73	65	319	42	521
11	DKI Jakarta		1	33		2	36
12	Banten	109	137	56	31	5	338
13	Jawa Barat	321	328	210	132	14	1.005
14	Jawa Tengah	461	277	304	227	35	1.304
15	D.I. Yogyakarta	8	25	27	47	32	139
16	Jawa Timur	826	169	364	214	3	1.576
17	Kalimantan Barat	179	89	296	44	4	612
18	Kalimantan Tengah	39	97	123	146	2	407
19	Kalimantan Timur	261	73	96	141	19	590
20	Kalimantan Selatan	28	152	159	255	2	596
21	Bali	96	182	53	57		388
22	Nusa Tenggara Barat	46	83	96	87	24	336
23	Nusa Tenggara Timur	62	222	62	239	24	609
24	Sulawesi Utara	75	102	127	218	33	555
25	Gorontalo	36	40	78	169	6	329
26	Sulawesi Tengah	30	180	279	491	98	1.078
27	Sulawesi Barat	9	10	103	69	63	254
28	Sulawesi Selatan	220	240	351	122	17	950
29	Sulawesi Tenggara	146	77	224	175	14	636
30	Maluku	60	110	104	127		401
31	Maluku Utara	21	96	153	87	1	358
32	Papua	158	24	183	256	18	639
33	Papua Barat	18	5	21	79	61	184
Total Indonesia		3.810	4.116	4.902	4.845	591	18.264

Sumber : Subdit Data dan Informasi, Direktorat Bina Program, Bina Marga, Dep. PU

*) Jalan Nasional di Kepulauan Riau belum ditetapkan dengan SK Menteri

Tabel 4.30.2
Rekapitulasi Jumlah Jembatan Nasional Menurut BMS Tahun 2009 (%),
Berdasarkan Tahun Dibangun
(Hasil Filterisasi Dengan Ruas Jalan Nasional Menurut Kepmen No.376/KPTS/M/2004)

Status : 5 Januari 2010

No.	Provinsi	Jumlah Jembatan (%)				
		< 1970	1970 - 1980	1980 - 1990	1990 - 2000	> 2000
1	2	3	4	5	6	7
1	Nanggroe Aceh Darussalam	4,09	34,92	29,50	30,26	1,24
2	Sumatera Utara	33,82	28,87	17,87	18,33	1,10
3	Sumatera Barat	11,86	35,10	23,56	28,69	0,80
4	Riau	1,81	6,95	50,15	34,74	6,34
5	Kepulauan Riau *)					
6	Jambi	3,87	45,81	40,65	8,06	1,61
7	Bengkulu	3,82	11,46	45,54	36,31	2,87
8	Sumatera Selatan	6,42	32,77	34,46	25,34	1,01
9	Bangka Belitung	22,73	25,45	40,00	10,91	0,91
10	Lampung	4,22	14,01	12,48	61,23	8,06
11	DKI Jakarta	0,00	2,78	91,67	0,00	5,56
12	Banten	32,25	40,53	16,57	9,17	1,48
13	Jawa Barat	31,94	32,64	20,90	13,13	1,39
14	Jawa Tengah	35,35	21,24	23,31	17,41	2,68
15	D.I. Yogyakarta	5,76	17,99	19,42	33,81	23,02
16	Jawa Timur	52,41	10,72	23,10	13,58	0,19
17	Kalimantan Barat	29,25	14,54	48,37	7,19	0,65
18	Kalimantan Tengah	9,58	23,83	30,22	35,87	0,49
19	Kalimantan Timur	44,24	12,37	16,27	23,90	3,22
20	Kalimantan Selatan	4,70	25,50	26,68	42,79	0,34
21	Bali	24,74	46,91	13,66	14,69	0,00
22	Nusa Tenggara Barat	13,69	24,70	28,57	25,89	7,14
23	Nusa Tenggara Timur	10,18	36,45	10,18	39,24	3,94
24	Sulawesi Utara	13,51	18,38	22,88	39,28	5,95
25	Gorontalo	10,94	12,16	23,71	51,37	1,82
26	Sulawesi Tengah	2,78	16,70	25,88	45,55	9,09
27	Sulawesi Barat	3,54	3,94	40,55	27,17	24,80
28	Sulawesi Selatan	23,16	25,26	36,95	12,84	1,79
29	Sulawesi Tenggara	22,96	12,11	35,22	27,52	2,20
30	Maluku	14,96	27,43	25,94	31,67	0,00
31	Maluku Utara	5,87	26,82	42,74	24,30	0,28
32	Papua	24,73	3,76	28,64	40,06	2,82
33	Papua Barat	9,78	2,72	11,41	42,93	33,15
Total Indonesia		20,86	22,54	26,84	26,53	3,24

Sumber : Subdit Data dan Informasi, Direktorat Bina Program, Bina Marga, Dep. PU

*) Jalan Nasional di Kepulauan Riau belum ditetapkan dengan SK Menteri

Tabel 4.31.1
Rekapitulasi Panjang Jembatan Nasional Menurut BMS Tahun 2009 (m),
Berdasarkan Tahun Dibangun
(Hasil Filterisasi Dengan Ruas Jalan Nasional Menurut Kepmen No.376/KPTS/M/2004)

Status : 5 Januari 2010

No.	Provinsi	Panjang Jembatan (m)					Total
		< 1970	1970 - 1980	1980 - 1990	1990 - 2000	> 2000	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nanggroe Aceh Darussalam	1.277	4.321	7.054	9.999	331	22.982
2	Sumatera Utara	3.865	3.764	3.435	4.585	309	15.958
3	Sumatera Barat	1.289	2.696	4.518	4.680	92	13.275
4	Riau	603	1.423	3.756	2.912	558	9.252
5	Kepulauan Riau *)						0
6	Jambi	466	1.802	3.688	765	134	6.855
7	Bengkulu	691	583	3.371	4.121	391	9.157
8	Sumatera Selatan	3.445	3.071	5.167	5.577	225	17.485
9	Bangka Belitung	333	655	454	204	202	1.848
10	Lampung	568	1.413	1.177	4.862	1.808	9.828
11	DKI Jakarta		32	859		246	1.137
12	Banten	1.067	1.400	873	1.188	220	4.748
13	Jawa Barat	3.912	5.452	3.827	3.908	499	17.598
14	Jawa Tengah	4.447	4.647	4.371	6.667	1.150	21.282
15	D.I. Yogyakarta	402	707	763	1.803	2.184	5.859
16	Jawa Timur	6.975	2.841	3.963	5.442	43	19.264
17	Kalimantan Barat	1.920	1.868	6.425	2.046	94	12.353
18	Kalimantan Tengah	1.495	1.210	1.932	7.808	35	12.480
19	Kalimantan Timur	2.239	1.267	1.996	4.497	411	10.410
20	Kalimantan Selatan	594	2.311	5.628	4.651	67	13.251
21	Bali	1.042	3.145	1.406	1.433		7.026
22	Nusa Tenggara Barat	746	1.105	1.852	1.445	277	5.425
23	Nusa Tenggara Timur	751	1.973	1.166	4.319	534	8.743
24	Sulawesi Utara	1.692	1.472	2.393	4.180	701	10.438
25	Gorontalo	727	332	1.683	3.087	104	5.933
26	Sulawesi Tengah	263	1.818	3.546	8.801	1.211	15.639
27	Sulawesi Barat	127	179	1.976	2.137	1.731	6.150
28	Sulawesi Selatan	1.836	3.734	4.816	3.950	893	15.229
29	Sulawesi Tenggara	2.089	1.104	2.976	3.195	503	9.867
30	Maluku	2.492	1.329	2.321	3.276		9.418
31	Maluku Utara	278	1.030	2.277	1.349	8	4.942
32	Papua	4.800	644	3.407	6.122	559	15.532
33	Papua Barat	203	33	741	1.995	2.039	5.011
Total Indonesia		52.634	59.361	93.817	121.004	17.559	344.375

Sumber : Subdit Data dan Informasi, Direktorat Bina Program, Bina Marga, Dep. PU

*) Jalan Nasional di Kepulauan Riau belum ditetapkan dengan SK Menteri

Tabel 4.31.2
Rekapitulasi Panjang Jembatan Nasional Menurut BMS Tahun 2009 (%),
Berdasarkan Tahun Dibangun
(Hasil Filterisasi Dengan Ruas Jalan Nasional Menurut Kepmen No.376/KPTS/M/2004)

Status : 5 Januari 2010

No.	Provinsi	Panjang Jembatan (%)				
		< 1970	1970 - 1980	1980 - 1990	1990 - 2000	> 2000
1	2	3	4	5	6	7
1	Nanggroe Aceh Darussalam	5,56	18,80	30,69	43,51	1,44
2	Sumatera Utara	24,22	23,59	21,53	28,73	1,94
3	Sumatera Barat	9,71	20,31	34,03	35,25	0,69
4	Riau	6,52	15,38	40,60	31,47	6,03
5	Kepulauan Riau *)					
6	Jambi	6,80	26,29	53,80	11,16	1,95
7	Bengkulu	7,55	6,37	36,81	45,00	4,27
8	Sumatera Selatan	19,70	17,56	29,55	31,90	1,29
9	Bangka Belitung	18,02	35,44	24,57	11,04	10,93
10	Lampung	5,78	14,38	11,98	49,47	18,40
11	DKI Jakarta	0,00	2,81	75,55	0,00	21,64
12	Banten	22,47	29,49	18,39	25,02	4,63
13	Jawa Barat	22,23	30,98	21,75	22,21	2,84
14	Jawa Tengah	20,90	21,84	20,54	31,33	5,40
15	D.I. Yogyakarta	6,86	12,07	13,02	30,77	37,28
16	Jawa Timur	36,21	14,75	20,57	28,25	0,22
17	Kalimantan Barat	15,54	15,12	52,01	16,56	0,76
18	Kalimantan Tengah	11,98	9,70	15,48	62,56	0,28
19	Kalimantan Timur	21,51	12,17	19,17	43,20	3,95
20	Kalimantan Selatan	4,48	17,44	42,47	35,10	0,51
21	Bali	14,83	44,76	20,01	20,40	0,00
22	Nusa Tenggara Barat	13,75	20,37	34,14	26,64	5,11
23	Nusa Tenggara Timur	8,59	22,57	13,34	49,40	6,11
24	Sulawesi Utara	16,21	14,10	22,93	40,05	6,72
25	Gorontalo	12,25	5,60	28,37	52,03	1,75
26	Sulawesi Tengah	1,68	11,62	22,67	56,28	7,74
27	Sulawesi Barat	2,07	2,91	32,13	34,75	28,15
28	Sulawesi Selatan	12,06	24,52	31,62	25,94	5,86
29	Sulawesi Tenggara	21,17	11,19	30,16	32,38	5,10
30	Maluku	26,46	14,11	24,64	34,78	0,00
31	Maluku Utara	5,63	20,84	46,07	27,30	0,16
32	Papua	30,90	4,15	21,94	39,42	3,60
33	Papua Barat	4,05	0,66	14,79	39,81	40,69
Total Indonesia		15,28	17,24	27,24	35,14	5,10

Sumber : Subdit Data dan Informasi, Direktorat Bina Program, Bina Marga, Dep. PU

*) Jalan Nasional di Kepulauan Riau belum ditetapkan dengan SK Menteri

Tabel 4.32
Monitoring Data IRMS Berdasarkan Roughness (%),
Tahun Anggaran 2010

Status : 18 Agustus 2010

No.	Provinsi	IRI Per Kelompok Kondisi (% terhadap SK 2009)			
		Baik (%)	Sedang (%)	Rusak Ringan (%)	Rusak Berat (%)
1	2	3	4	5	6
1	Nanggroe Aceh Darussalam	62,13	30,34	2,53	5,00
2	Sumatera Utara	17,37	56,77	11,56	13,18
3	Sumatera Barat	28,45	62,51	6,91	2,13
4	Riau	50,83	33,33	7,00	4,22
5	Kepulauan Riau	47,98	31,29	3,29	17,43
6	Jambi	28,52	59,49	8,24	3,75
7	Bengkulu	55,15	37,81	3,85	3,07
8	Sumatera Selatan	82,28	14,69	1,06	0,18
9	Bangka Belitung	88,20	11,54	0,22	0,04
10	Lampung	44,89	42,83	8,67	3,6
11	DKI Jakarta	42,61	54,44	2,88	0,07
12	Banten	14,89	59,44	15,56	10,11
13	Jawa Barat	38,2	52,58	7,25	1,22
14	Jawa Tengah	44,29	51,70	3,82	0,19
15	D.I. Yogyakarta	39,7	34,30	25,91	0,09
16	Jawa Timur	74,74	22,13	1,37	0,2
17	Bali	77,07	16,81	2,98	3,13
18	Kalimantan Barat	21,2	42,14	24,49	12,28
19	Kalimantan Tengah	44,9	18,83	2,83	30,64
20	Kalimantan Timur	20,48	63,66	12,04	3,83
21	Kalimantan Selatan	69,73	27,32	2,62	0,33
22	Sulawesi Utara	68,85	18,87	5,33	6
23	Gorontalo	61,59	34,14	2,59	1,68
24	Sulawesi Tengah	53,57	32,79	8,2	5,18
25	Sulawesi Barat	39,32	23,44	16,17	21,06
26	Sulawesi Selatan	37,84	25,58	5,07	31,51
27	Sulawesi Tenggara	51,47	42,08	3,13	3,32
22	Nusa Tenggara Barat	26,95	55,76	6,15	9,91
23	Nusa Tenggara Timur	58,42	30,88	8,55	2,16
30	Maluku	8,37	74,91	12,48	4,25
31	Maluku Utara	55,90	33,94	5,22	4,93
32	Papua	9,81	37,15	21,75	23,97
33	Papua Barat	21,02	34,48	6,96	37,55

Sumber : Subdit Data dan Informasi, Direktorat Bina Program, Bina Marga, Dep. PU

Kondisi IRI

baik : iri <= 4

sedang : 4 < iri <= 8

r.ringan : 8 < iri <= 12

r. berat : 12 < iri <= 30

t.tembus : iri >= 30

Tabel 4.33
Rekapitulasi Jumlah Jembatan Nasional Menurut BMS Tahun 2009 (%)
Berdasarkan Kondisi Jembatan Secara Umum
(Hasil Filterisasi Dengan Ruas Jalan Nasional Menurut KEPMEN NO.376/KPTS/M/2004)

Status : 5 Januari 2010

No.	Provinsi	Jumlah Jembatan (%)		
		Kondisi Baik (Baik Sekali & Baik)	Kondisi Rusak Ringan	Kondisi Rusak Berat (RB, Kritis & Runtuh)
1	2	3	4	5
1	Nanggroe Aceh Darussalam	59,94	20,93	19,12
2	Sumatera Utara	43,90	45,61	10,49
3	Sumatera Barat	73,40	13,62	12,98
4	Riau	41,09	37,76	21,15
5	Kepulauan Riau *)	0,00	0,00	0,00
6	Jambi	74,52	19,03	6,45
7	Bengkulu	44,90	33,76	21,34
8	Sumatera Selatan	80,74	11,32	7,94
9	Bangka Belitung	63,64	15,45	20,91
10	Lampung	76,96	17,10	5,94
11	DKI Jakarta	0,00	0,00	0,00
12	Banten	71,60	16,57	11,83
13	Jawa Barat	59,30	28,96	11,74
14	Jawa Tengah	83,74	9,51	6,75
15	D.I. Yogyakarta	84,89	7,91	7,19
16	Jawa Timur	68,43	20,39	11,18
17	Bali	78,87	15,72	5,41
18	Kalimantan Barat	76,47	14,71	8,82
19	Kalimantan Tengah	67,57	11,30	21,13
20	Kalimantan Timur	80,00	11,36	8,64
21	Kalimantan Selatan	64,26	13,42	22,32
22	Sulawesi Utara	77,66	13,15	9,19
23	Gorontalo	41,64	33,43	24,92
24	Sulawesi Tengah	65,31	21,89	12,80
25	Sulawesi Barat	93,31	4,72	1,97
26	Sulawesi Selatan	72,32	20,21	7,47
27	Sulawesi Tenggara	56,60	14,78	28,62
28	Nusa Tenggara Barat	69,35	22,92	7,74
29	Nusa Tenggara Timur	71,92	15,76	12,32
30	Maluku	41,15	29,68	29,18
31	Maluku Utara	73,74	12,29	13,97
32	Papua	53,68	17,53	28,79
33	Papua Barat	92,93	5,43	1,63

Sumber : Subdit Data dan Informasi, Direktorat Bina Program, Bina Marga, Dep. PU

*) Jalan Nasional di Kepulauan Riau belum ditetapkan dengan SK Menteri

Tabel 4.34
Pembangunan SPAM IKK, 2005 - 2009

No.	Provinsi	2005		2006		2007		2008		2009 (IKK Pusat)		2009 (IKK Provinsi)	
		Jumlah Lokasi SPAM IKK	Kapasitas (l/det)	Jumlah Lokasi SPAM IKK	Kapasitas (l/det)	Jumlah Lokasi SPAM IKK	Kapasitas (l/det)	Jumlah Lokasi SPAM IKK	Kapasitas (l/det)	Jumlah Lokasi SPAM IKK	Kapasitas (l/det)	Jumlah Lokasi SPAM IKK	Kapasitas (l/det)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Nanggroe Aceh Darussalam	3	40	2	20	2	30	3	40	3	150		
2	Sumatera Utara	4	55	4	50	1	20	3	30	2	40	1	10
3	Sumatera Barat	2	10	5	160	3	60	4	70	1	20	3	50
4	Riau					1	5	3	50			2	20
5	Kepulauan Riau	1	5	1	40			2	40			2	20
6	Jambi	2	50	4	20	1	5	2	30			1	10
7	Bengkulu			2	50	1	50	2	70			1	20
8	Sumatera Selatan	2	10			2	20	3	180			6	110
9	Bangka Belitung			1	20	2	20	2	20			3	50
10	Lampung	1	30	4	90	1	10	3	40	1	10	3	30
11	Banten							2	40	4	110	2	60
12	Jawa Barat					2	40	8	190			10	270
13	Jawa Tengah	5	50	3	55	3	25	4	110			22	508
14	DI Yogyakarta					1	10	2	30	1		4	80
15	Jawa Timur	2	30	8	75	4	70	6	102,5	1		9	265
16	Kalimantan Barat	2	15	1	20	3	30	3	30			4	40
17	Kalimantan Tengah	2	15	2	25			3	30			5	50
18	Kalimantan Selatan	5	60	1	10	3	30	2	30	1	50	1	0
19	Kalimantan Timur	3	25	4	40	5	50	3	40			2	30
20	Sulawesi Utara	2	30	3	40	2	30	2	40	3	30	1	20
21	Gorontalo	2	30	1	20	2	30	2	30	1		2	30
22	Sulawesi Tengah	1	20	2	30	2	20	3	30	3	30	3	20
23	Sulawesi Selatan			2	40	4	130	6	100	2	50		
24	Sulawesi Barat	3	60			4	40	2	20	1	10	7	60
25	Sulawesi Tenggara	3	45	1	10	2	55	2	40	1	20	6	42,5
26	Bali					1	5	3	50	2			
27	Nusa Tenggara Barat					1	50	2	20				
28	Nusa Tenggara Timur					2	40	1	10			4	40
29	Maluku	1	40			1	10	4	36,5	1		1	
30	Maluku Utara	1	10			1	10	2	20			12	60
31	Papua	2	20			1	10	2	10			6	15
32	Papua Barat	3	40	1	20	1	10	2	20	1	10	2	20
Total		52	690	52	835	59	915	93	1.599	29	530	125	1.931

Sumber : Menuju Pencapaian Target MDGs Bidang Air Minum, Hasil Pembangunan SPAM-IKK 2005-2009, Ditjen Cipta Karya, Departemen PU

Tabel 4.35
Program PAMSIMAS dan Target Desa Per Kabupaten/ Kota
Tahun 2008 - 2009

No.	Provinsi	Jumlah		Jumlah Desa/ Kel. Terbangun 2008	Target Desa/ Kel. 2009
		Kabupaten	Kota		
1	2	3	4	5	6
1	Sumatera Barat	11	4	100	195
2	Riau	6	0	51	90
3	Sumatera Selatan	8	0	31	120
4	Banten	2	0	18	30
5	Jawa Barat	5	0	45	75
6	Jawa Tengah	28	2	270	450
7	Kalimantan Selatan	8	0	71	120
8	Nusa Tenggara Timur	10	1	97	165
9	Sulawesi Barat	3	0	9	45
10	Sulawesi Tengah	7	0	60	105
11	Sulawesi Selatan	6	2	68	120
12	Gorontalo	3	0	27	45
13	Maluku	1	0	9	15
14	Maluku Utara	1	1	18	30
15	Papua Barat	1	0	9	15
			8/		
	Total	100	10	883	1.620

Sumber : Hidup Sehat dan Sejahtera dengan Air Minum dan Sanitasi Berkualitas, PAMSIMAS, Ditjen Cipta Karya, Departemen PU

Tabel 4.36
Pencapaian Sasaran RPJM 2005 - 2009 Bidang Cipta Karya
Pengelolaan Air Limbah

No.	Provinsi	Hasil Pelaksanaan								Program		Total	
		2005		2006		2007		2008		2009		Kab/ Kota	Jiwa
		Kab/ Kota	Jiwa	Kab/ Kota	Jiwa	Kab/ Kota	Jiwa	Kab/ Kota	Jiwa	Kab/ Kota	Jiwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Nanggroe Aceh Darussalam	0	0	2	4.867	0	0	1	3.083	5	2.500	8	10.450
2	Sumatera Utara	4	13.333	3	14.667	8	8.892	3	9.973	6	16.783	24	63.648
3	Sumatera Barat	2	10.000	2	24.417	9	4.500	8	26.886	2	6.500	23	72.303
4	Riau	1	3.333	3	9.000	1	4.000	0	0	1	1.250	6	17.583
5	Kepulauan Riau	1	6.667	0	0	2	6.333	0	83	1	1.250	4	14.333
6	Jambi	0	0	3	24.500	2	3.000	1	2.000	2	2.500	8	32.000
7	Sumatera Selatan	1	2.100	2	4.000	2	3.000	3	4.623	3	1.250	11	14.973
8	Bengkulu	1	3.333	2	14.333	1	3.000	0	0	1	4.000	5	24.666
9	Lampung	0	0	2	4.049	2	3.000	2	2.667	3	1.250	9	10.966
10	Bangka Belitung	2	6.667	2	3.248	2	3.000	2	1.500	1	2.250	9	16.665
11	Banten	0	0	5	4.443	4	3.000	3	4.152	2	4.000	14	15.595
12	DKI (Jabodetabek)	0	0	0	0	1	417	1	3.875	3	1.667	5	5.959
13	Jawa Barat (Bandung Raya)	2	5.000	4	7.360	4	20.015	5	56.893	10	38.273	25	127.541
14	Jawa Tengah	3	3.867	4	41.006	7	6.983	12	13.023	10	22.694	36	87.573
15	DI Yogyakarta	3	2.100	1	6.302	3	6.335	4	27.288	16	22.671	27	64.696
16	Jawa Timur (Gerbang Kertasusila)	7	7.733	6	29.297	9	7.500	17	24.253	2	26.667	41	95.450
	Total Wilayah Barat	27	64.133	41	191.489	57	82.975	62	180.299	68	155.505	255	674.401
17	Kalimantan Barat	1	3.333	2	15.003	2	3.000	0	0	1	1.250	6	22.586
18	Kalimantan Tengah	0	0	5	24.235	4	4.024	1	22.250	4	1.250	14	51.759
19	Kalimantan Selatan	1	6.667	3	22.158	2	12.321	3	5.660	4	24.278	13	71.084
20	Kalimantan Timur	2	3.333	3	20.407	4	4.453	2	5.123	3	9.000	14	42.316
21	Sulawesi Utara	2	6.667	3	16.631	1	3.000	1	833	3	1.250	10	28.381
22	Gorontalo	1	3.333	0	2.000	4	4.000	1	2.750	1	2.250	7	14.333
23	Sulawesi Tengah	3	13.333	2	22.100	1	13.000	1	20.000	2	0	9	68.433
24	Sulawesi Selatan	2	6.667	4	6.000	1	3.000	6	6.517	3	4.500	16	26.684
25	Sulawesi Barat	0	0	3	30.867	1	2.000	2	4.007	5	5.250	11	42.124
26	Sulawesi Tenggara	0	0	2	24.650	1	2.000	2	66.311	3	4.000	8	96.961
27	Bali (Sarbagita)	3	106.667	4	196.938	2	140.488	4	3.000	4	61.028	17	508.121
28	Nusa Tenggara Barat	1	133	2	15.333	0	0	5	4.350	2	4.500	10	24.316
29	Nusa Tenggara Timur	0	0	2	4.000	1	3.000	1	1.500	1	1.250	5	9.750
30	Maluku	1	133	2	3.333	0	0	0	0	0	0	3	3.466
31	Maluku Utara	0	0	2	12.500	0	0	0	0	0	0	2	12.500
32	Papua	0	0	2	3.000	0	0	0	0	0	0	2	3.000
33	Papua Barat	2	6.667	2	5.250	0	0	1	1.727	2	2.500	7	16.144
	Total Wilayah Timur	19	156.933	43	424.405	24	194.286	30	144.028	38	122.306	154	1.041.958
	Total	46	221.066	84	615.894	81	277.261	92	324.327	106	277.811	409	1.716.359

Sumber : Menuju Permukiman yang Layak Huni, Bebas Air Limbah, Bersih dari Sampah dan Bebas Genangan, Ditjen Cipta Karya, Departemen PU

Tabel 4.37
Pencapaian Sasaran RPJM 2005 - 2009 Bidang Cipta Karya
Pengelolaan Persampahan

No.	Provinsi	Hasil Pelaksanaan								Program		Total	
		2005		2006		2007		2008		2009		Kab/ Kota	Jiwa
		Kab/ Kota	Jiwa	Kab/ Kota	Jiwa	Kab/ Kota	Jiwa	Kab/ Kota	Jiwa	Kab/ Kota	Jiwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Nanggroe Aceh Darussalam	8	65.000	4	57.601	4	52.400	2	36.717	4	408.571	22	620.289
2	Sumatera Utara	4	123.574	5	28.002	5	150.640	2	67.657	3	357.143	19	727.016
3	Sumatera Barat	3	135.000	4	96.977	4	69.027	4	513.200	4	410.500	19	1.224.704
4	Riau	3	198.600	4	43.506	1	3.440	1	60.171	4	100.000	13	405.717
5	Kepulauan Riau	3	58.480	2	50.000	0	0	3	53.314	3	114.286	11	276.080
6	Jambi	3	33.000	2	28.800	3	2.400	2	54.229	4	171.429	14	289.858
7	Sumatera Selatan	3	35.400	4	45.600	3	2.400	3	64.343	2	142.857	15	290.600
8	Bengkulu	3	30.600	3	31.200	3	9.606	1	75.572	4	85.714	14	232.692
9	Bangka Belitung	3	28.200	3	48.000	2	3.059	2	34.971	3	100.000	13	214.230
10	Lampung	4	45.000	4	212.199	3	106.000	3	85.371	4	114.286	18	562.856
11	Banten	4	25.800	4	190.800	3	41.654	2	72.216	3	142.857	16	473.327
12	DKI (Jabodetabek)	0	0	0	0	1	21.322	4	99.063	1	10.400	6	130.785
13	Jawa Barat (Bandung Raya)	5	53.800	5	438.650	5	378.640	6	553.831	12	714.286	33	2.139.207
14	Jawa Tengah	4	13.950	5	104.971	3	9.600	6	62.000	5	228.571	23	419.092
15	DI Yogyakarta	2	56.400	3	58.969	3	58.986	3	77.086	5	285.714	16	537.155
16	Jawa Timur (Gerbang Kertasusila)	4	56.970	5	115.833	7	474.823	10	1.127.447	8	342.857	34	2.117.930
	Total Wilayah Barat	56	959.774	57	1.551.108	50	1.383.997	54	3.037.188	69	3.729.471	286	10.661.538
17	Kalimantan Barat	4	28.200	4	84.000	3	192.266	2	113.780	5	142.857	18	561.103
18	Kalimantan Tengah	3	35.400	3	75.943	3	2.400	1	42.571	3	114.286	13	270.600
19	Kalimantan Selatan	4	104.198	4	60.508	3	63.730	2	58.446	6	228.571	19	515.453
20	Kalimantan Timur	0	0	4	84.000	3	66.665	4	100.626	4	214.286	15	465.577
21	Sulawesi Utara	3	60.400	3	12.797	3	24.966	4	252.886	3	142.857	16	493.906
22	Gorontalo	2	13.800	3	33.600	3	189.600	2	142.086	3	285.714	13	664.800
23	Sulawesi Tengah	4	50.200	4	24.400	0	0	2	77.371	4	100.000	14	251.971
24	Sulawesi Barat	0	0	0	0	2	10.248	3	253.386	2	285.714	7	549.348
25	Sulawesi Selatan	4	40.200	5	86.400	0	0	2	31.688	3	100.000	14	258.288
26	Sulawesi Tenggara	3	264.600	3	36.000	2	37.260	1	4.800	2	71.429	11	414.089
27	Bali (Sarbagita)	4	35.400	4	41.300	4	523.340	6	173.971	9	885.714	27	1.659.725
28	Nusa Tenggara Barat	0	0	3	91.267	2	14.999	2	235.429	5	642.857	12	984.552
29	Nusa Tenggara Timur	3	40.200	2	50.400	2	3.200	2	7.200	3	157.143	12	258.143
30	Maluku	3	6.600	3	67.200	0	0	2	75.657	3	128.571	11	278.028
31	Maluku Utara	3	37.609	3	22.800	2	95.760	1	42.743	2	71.429	11	270.341
32	Papua	2	11.400	2	64.800	0	0	2	34.469	4	85.714	10	196.383
33	Papua Barat	2	16.200	2	28.800	0	0	2	65.943	3	157.143	9	268.086
	Total Wilayah Timur	44	744.407	52	864.215	32	1.224.434	40	1.713.052	64	3.814.285	232	8.360.393
	Total	100	1.704.181	109	2.415.323	82	2.608.431	94	4.750.240	133	7.543.756	518	19.021.931

Sumber : Menuju Permukiman yang Layak Huni, Bebas Air Limbah, Bersih dari Sampah dan Bebas Genangan, Ditjen Cipta Karya, Departemen PU

Tabel 4.38
Pencapaian Sasaran RPJM 2005 - 2009 Bidang Cipta Karya
Penanganan Drainase

No.	Provinsi	Hasil Pelaksanaan								Program		Total	
		2005		2006		2007		2008		2009		Kab/ Kota	Ha
		Kab/ Kota	Ha	Kab/ Kota	Ha	Kab/ Kota	Ha	Kab/ Kota	Ha	Kab/ Kota	Ha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Nanggroe Aceh Darussalam	6	96	4	120	1	20	0	0	4	450	15	686
2	Sumatera Utara	17	418	4	110	1	50	0	0	1	40	23	618
3	Sumatera Barat	2	9	4	87	1	5	0	0	1	40	8	141
4	Riau	2	32	1	31	1	10	0	0	0	0	4	73
5	Kepulauan Riau	1	12	3	32	1	5	0	0	1	40	6	89
6	Jambi	4	27	3	27	1	10	0	0	1	40	9	104
7	Sumatera Selatan	3	10	4	32	1	3	0	0	0	0	8	45
8	Bengkulu	5	51	3	70	1	5	0	0	1	50	10	176
9	Bangka Belitung	1	14	1	11	1	2	0	0	1	40	4	67
10	Lampung	3	23	3	85	1	20	0	0	0	0	7	128
11	Banten	2	50	2	28	1	8	0	0	0	0	5	86
12	DKI (Jabodetabek)	0	0	0	18	0	0	0	0	2	206	2	224
13	Jawa Barat (Bandung Raya)	3	15	5	67	1	85	0	0	3	40	12	207
14	Jawa Tengah	2	11	4	64	2	35	0	0	3	440	11	550
15	DI Yogyakarta	1	4	1	17	0	0	0	0	1	8	3	29
16	Jawa Timur (Gerbang Kertasusila)	3	17	2	43	2	240	1	11	4	400	12	711
	Total Wilayah Barat	55	789	44	842	16	498	1	11	23	1.794	139	3.934
17	Kalimantan Barat	3	13	7	45	1	25	0	0	0	0	11	83
18	Kalimantan Tengah	4	21	4	72	1	10	0	0	0	0	9	103
19	Kalimantan Selatan	3	10	6	53	1	15	0	0	1	30	11	108
20	Kalimantan Timur	2	43	3	42	1	4	0	0	1	30	7	119
21	Sulawesi Utara	3	33	5	32	1	20	0	0	0	0	9	85
22	Gorontalo	4	75	4	73	1	20	1	40	0	0	10	208
23	Sulawesi Tengah	9	12	7	36	1	20	0	0	0	0	17	68
24	Sulawesi Barat	0	0	6	66	1	10	0	0	2	95	9	171
25	Sulawesi Selatan	4	28	5	80	1	15	0	0	0	0	10	123
26	Sulawesi Tenggara	0	0	6	71	1	5	0	0	1	30	8	106
27	Bali (Sarbagita)	4	91	6	58	2	120	1	20	2	70	15	359
28	Nusa Tenggara Barat	2	33	5	82	1	15	0	0	1	40	9	170
29	Nusa Tenggara Timur	2	35	3	24	1	10	0	0	0	0	6	69
30	Maluku	3	2	4	19	1	20	0	0	0	0	8	41
31	Maluku Utara	1	4	2	24	1	5	0	0	0	0	4	33
32	Papua	3	26	5	55	1	10	0	0	1	40	10	131
33	Papua Barat	3	27	3	71	1	10	0	0	1	40	8	148
	Total Wilayah Timur	50	453	81	903	18	334	2	60	10	375	161	2.125
	Total	105	1.242	125	1.745	34	832	3	71	33	2.169	300	6.059

Sumber : Menuju Permukiman yang Layak Huni, Bebas Air Limbah, Bersih dari Sampah dan Bebas Genangan, Ditjen Cipta Karya, Departemen PU

Tabel 4.39
Pengelolaan Air Limbah, Persampahan, dan Drainase
Tahun 2009

No.	Provinsi	Hasil Pelaksanaan						
		Air Limbah		Persampahan		Drainase		
		Kab/ Kota	Jiwa	Kab/ Kota	Jiwa	Kab/ Kota	Ha	Jiwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nanggroe Aceh Darussalam	5	2.500	4	408.571	5	550	163
2	Sumatera Utara	6	16.783	3	357.143	6	50	25
3	Sumatera Barat	2	6.500	4	410.500	2	50	13
4	Riau	1	1.250	4	100.000	1	0	13
5	Jambi	2	2.500	4	171.429	2	50	13
6	Sumatera Selatan	3	1.250	2	142.857	3	0	25
7	Bengkulu	1	4.000	4	85.714	1	70	10
8	Lampung	3	1.250	4	114.286	3	0	15
9	Bangka Belitung	1	2.250	3	100.000	1	50	13
10	Kepulauan Riau	1	1.250	3	114.286	1	50	13
11	DKI Jakarta	3	1.667	1	10.400	3	250	200
12	Jawa Barat	10	38.273	12	714.286	10	50	19
13	Jawa Tengah	10	22.694	5	228.571	10	450	255
14	DI Yogyakarta	16	22.671	5	285.714	16	8	0
15	Jawa Timur	2	26.667	8	342.857	2	500	418
16	Banten	2	4.000	3	142.857	2	0	0
17	Bali	4	61.028	9	885.714	4	100	38
18	Nusa Tenggara Barat	2	4.500	5	642.857	2	50	0
19	Nusa Tenggara Timur	1	1.250	3	157.143	1	0	0
20	Kalimantan Barat	1	1.250	5	142.857	1	0	18
21	Kalimantan Tengah	4	1.250	3	114.286	4	0	10
22	Kalimantan Selatan	4	24.278	6	228.571	4	50	13
23	Kalimantan Timur	3	9.000	4	214.286	3	50	30
24	Sulawesi Utara	3	1.250	3	142.857	3	0	25
25	Sulawesi Tengah	2	3.500	4	100.000	2	0	0
26	Sulawesi Selatan	3	4.500	3	100.000	5	0	0
27	Sulawesi Tenggara	3	4.000	2	71.429	3	50	13
28	Gorontalo	1	2.250	3	285.714	1	0	25
29	Sulawesi Barat	5	5.250	2	285.714	3	150	25
30	Maluku	0	0	3	128.571	0	0	0
31	Maluku Utara	0	0	2	71.429	0	0	10
32	Irian Jaya Barat	2	2.500	3	157.143	2	50	13
33	Papua	0	0	4	85.714	0	50	13
	Indonesia	106	281.311	133	7.543.756	106	2.678	1.428

Sumber : Laporan Hasil Pembangunan Bidang Cipta Karya 2009, Dirjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum.

Tabel 4.40
Data Sanimas
Tahun 2003-2008

No.	Tahun	Provinsi	Kota/Kabupaten	Pilihan Teknologi	Jumlah Pengguna	
					KK	Jiwa
1	2	3	4	5	6	7
2003						
1		Jawa Timur	Mojokerto	MCK=Biogas		222
			Sidoarjo	MCK=Biogas		164
			Pasuruan	Perpipaan Komunal		400
			Kediri	MCK=Biogas		268
			Blitar	Perpipaan Komunal		85
2		Bali	Denpasar	Perpipaan Komunal		100
	Total	2	6	6		1.239
2004						
3		Jawa Timur	Mojokerto	MCK		300
			Sidoarjo	MCK=Biogas		200
			Pasuruan	MCK=Biogas		375
			Pamekasan	MCK=Biogas		400
				MCK=Biogas		500
			Kediri	MCK=Biogas		300
			Blitar	Perpipaan Komunal		400
4		Bali	Denpasar	Perpipaan Komunal		600
	Total	2	7	8		3.075
2005						
5		Jawa Timur	Pasuruan	MCK		400
			Pamekasan	MCK		400
				MCK		400
			Blitar	Perpipaan		312
			Mojokerto	MCK		400
			Sidoarjo	MCK		350
6		Jawa Tengah	Tegal	MCK		307
			Semarang	MCK		307
			Salatiga	MCK		228
			Surakarta	Perpipaan Komunal		365
7		Bali	Denpasar	Perpipaan Komunal		196
	Total	3	10	11		3.665
2006						
8		Sumatera Utara	Kota Sibolga	MCK Plus	96	350
9		Riau	Kab. Siak	MCK Plus	50	250
			Kab. Palawan	MCK Plus	60	300
10		Sumatera Barat	Kab. Solok	MCK Plus	70	350
			Kab. Dharmasraya	MCK Plus	70	350
11		Sumatera Selatan	Kota Palembang	MCK Plus	197	986
				MCK Plus	12	60
				MCK Plus	73	365
12		Bengkulu	Kota Muko-Muko	MCK Plus	70	350
				MCK Plus	72	361
13		Bangka Belitung	Kab. Pangkal Pinang	MCK Plus	50	188
			Kab. Sungai Selan	MCK Plus	78	365
			Kab. Bangka	MCK Plus	129	577
14		Lampung	Kota Lampung	MCK Plus	150	750

Lanjutan Tabel 4.40

No.	Tahun	Provinsi	Kota/Kabupaten	Pilihan Teknologi	Jumlah Pengguna		
					KK	Jiwa	
1	2	3	4	5	6	7	
15		Banten	Kab. Tangerang	MCK Plus	62	150	
				MCK Plus	120	480	
16	Jawa Barat		Kota Sukabumi	MCK Plus	95	350	
17	Jawa Tengah		Kota Surakarta	MCK Plus	76	265	
				MCK Plus	48	197	
			Kota Semarang	MCK Plus	93	356	
				MCK Plus	123	450	
			Kota Pekalongan	MCK Plus	89	315	
				MCK Plus	90	277	
18	DI Yogyakarta		Kab. Gunungkidul	Pemipaan Komunal	14	70	
19	Jawa Timur		Kab. Nganjuk	MCK Plus	163	652	
				Kab. Jombang	MCK Plus	185	766
					MCK Plus	110	228
				Kota Mojokerto	MCK Plus	40	200
					Kombinasi MCK Plus dan Pemipaan	103	274
				Kota Blitar	Komunal Pemipaan	111	312
				Kota Pasuruan	MCK Plus	89	400
				Kab. Sidoarjo	MCK Plus	96	300
				Kab. Lumajang	MCK Plus	66	196
				Kab. Sumenep	Kombinasi MCK Plus dan Pemipaan	80	400
					MCK Plus	141	490
				Kab. Magetan	MCK Plus	140	560
				Kota Kediri	MCK Plus	111	300
							Kab. Pamekasan
MCK Plus	80	400					
			Kab. Bangkalan	MCK Plus	80	400	
				MCK Plus	113	480	
20	Bali		Kab. Bondowoso	Kombinasi MCK Plus dan Pemipaan	51	256	
				Komunal Pemipaan	130	510	
21	Kalimantan Timur		Kota Denpasar	Komunal Pemipaan	110	450	
				MCK Plus	81	296	
			Kota Bontang	MCK Plus	56	168	
				MCK Plus	44	260	
			Kota Balikpapan	MCK Plus	73	290	
				Pemipaan Komunal	79	395	
22	Kalimantan Selatan		Kota Banjarmasin	MCK Plus	79	395	
				MCK Plus	40	200	
				MCK Plus	120	600	
				Komunal Pemipaan	50	304	
23	Gorontalo		Kab. Gorontalo	MCK Plus	126	504	
				MCK Plus	94	376	
			Kab. Bonebolango	MCK Plus	100	400	
				MCK Plus	140	700	
24	Sulawesi Utara		Kota Bitung	MCK Plus	140	700	
25	Sulawesi Selatan		Kab. Jeneponto	Komunal Pemipaan	70	275	
				Komunal Pemipaan	65	300	
26	Sulawesi Tenggara		Kota Bau-Bau	MCK ++	24	120	
				MCK ++	24	120	
				MCK ++	24	120	

Lanjutan Tabel 4.40

No.	Tahun	Provinsi	Kota/Kabupaten	Pilihan Teknologi	Jumlah Pengguna		
					KK	Jiwa	
1	2	3	4	5	6	7	
27		Nusa Tenggara Timur	Kota Kendari	MCK Plus	124	620	
			Kota Kupang	MCK Plus	142	710	
			Kota Maumere	MCK Plus	51	247	
	Total	20	50	65	5.700	23.886	
	2007						
28		Sumatera Utara	Kota Medan	MCK +	63	300	
				MCK +	68	300	
				MCK +	50	200	
				MCK +	129	645	
			Kota Sibolga	MCK +	82	400	
				Kota Tebing Tinggi	MCK +	60	300
				Kab. Asahan	MCK +	60	300
			Kota Tanjung Balai	MCK +	60	300	
				Kab. Labuhan Batu	MCK +	50	200
				Kota Bukittinggi	MCK ++	100	500
			Kab. Darmasraya	MCK ++	100	500	
				MCK ++	235	1.175	
				Kab. Solok	MCK ++	50	200
				Kota Sawah Lunto	MCK ++	100	500
Kab. Padang Pariaman	MCK ++	100		500			
Kota Payakumbuh	MCK ++	100		500			
Kab. Pesisir Selatan	MCK ++	100		500			
30		Sumatera Selatan	Kota Palembang	MCK ++	100	500	
				MCK +	70	350	
				MCK +	70	350	
				MCK +	70	350	
				MCK +	70	350	
31		Bangka Belitung	Kab. Bangka Selatan	MCK +	100	500	
				MCK +	92	460	
			Kota Pangkal Pinang	MCK +	95	221	
				MCK +	71	355	
				Kab. Bangka Induk	MCK +	103	515
32		Jambi	Kab. Kerinci	MCK +	56	280	
				MCK +	128	640	
				MCK +	91	455	
				MCK +	84	420	
			Kab. Tebo	MCK +	105	400	
				MCK +	85	425	
				MCK +	100	500	
33		Lampung	Kota Lampung	MCK +	100	500	
				MCK +	169	845	
				MCK +	80	400	
				Komunal	95	380	
				MCK +	95	475	
				MCK +	115	575	
34		Banten	Kota Tangerang	MCK +	214	860	
				MCK +	105	400	
			Kab. Serang	MCK ++	46	230	
				MCK ++	53	290	
				MCK +	80	400	

Lanjutan Tabel 4.40

No.	Tahun	Provinsi	Kota/Kabupaten	Pilihan Teknologi	Jumlah Pengguna	
					KK	Jiwa
1	2	3	4	5	6	7
35	Jawa Barat		Kota Bogor	MCK +	125	500
			Kota Sukabumi	MCK +	75	300
			Kota Cirebon	MCK +	75	300
36	Jawa Tengah		Kota Solo	MCK +	79	310
				MCK +	44	156
			Kota Semarang	MCK +	94	197
			Kab. Kendal	Komunal	75	300
			Kota Pekalongan	MCK +	64	250
				MCK +	84	350
			Kota Tegal	MCK +	70	415
			Kab. Brebes	MCK +	70	400
			Kab. Purworejo	MCK +	0	606
			Kab. Magelang	MCK +	63	215
37	DI Yogyakarta		Kota Yogyakarta	Komunal + biogas	95	324
			Kab. Sleman	MCK +	66	284
			Kab. Gunungkidul	MCK +	40	190
				Komunal UKM	7	186
			Kab. Kulonprogo	MCK +	78	318
			Kab. Bantul	Komunal UKM	8	8
38	Jawa Timur		Kota Mojokerto	MCK +	100	350
				MCK +	100	350
			Kab. Sidoarjo	MCK +	100	350
			Kota Pasuruan	MCK +	100	350
			Kab. Jombang	MCK +	95	477
				MCK ++ Komunal	100	500
			Kota Kediri	MCK +	178	688
				MCK +	95	398
			Kota Blitar	MCK +	82	410
			Kab. Malang	MCK +	150	500
				MCK +	125	400
			Kab. Pamekasan	MCK +	70	350
				MCK +	90	450
				MCK +	70	350
				MCK +	133	262
39	Bali		Kab. Blitar	Komunal	77	315
			Kota Denpasar	Komunal	110	500
			Kab. Buleleng	Komunal	58	330
			Kab. Gianyar	Komunal	120	600
			Kab. Tabanan	Komunal	75	375
40	Kalimantan Selatan		Kab. Amuntai	Komunal	58	330
			Kota Banjarmasin	MCK +	130	650
				MCK +	84	420
				MCK +	108	540
41	Kalimantan Timur		Kab. Banjar Baru	MCK +	87	215
			Kota Bontang	Komunal	42	190
				MCK +	54	202
			Kota Tarakan	Komunal + UKM	30	150
				Komunal + UKM	33	200

Lanjutan Tabel 4.40

No.	Tahun	Provinsi	Kota/Kabupaten	Pilihan Teknologi	Jumlah Pengguna	
					KK	Jiwa
1	2	3	4	5	6	7
42		Kalimantan Tengah	Kab. Seruyan	MCK +	53	236
			Kab. Kotawaringin Barat	MCK +	43	200
43		Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Barat	MCK +	116	580
			Kab. Lombok Tengah	MCK +	129	645
			Kab. Lombok Timur	MCK +	151	755
			Kota Bima	MCK +	158	790
44		Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	MCK +	120	600
			Kab. Ende	MCK +	148	740
			Kab. Sikka	MCK +	100	500
				Komunal	120	600
			Kab. Atambua	MCK +	54	270
				Komunal	141	705
45		Sulawesi Selatan	Kota Makassar	Komunal	90	450
				MCK +	90	450
				Komunal	60	300
				MCK +	80	400
46		Sulawesi Tenggara	Kota Kendari	Komunal	80	400
				Komunal	153	765
			Kota Bau-Bau	Komunal	60	250
				Kombinasi MCK dan Pemipaan	60	300
47		Gorontalo	Kota Gorontalo	MCK +	152	760
			Kab. Bone Bolango	MCK +	94	470
			Kab. Boalemo	MCK +	105	420
			Kab. Pohuwato	MCK +	133	665
48		Sulawesi Barat	Kab. Mamuju	Perpipaan	100	500
				Perpipaan	100	500
			Kab. Majene	MCK +	130	650
				MCK +	150	750
Total	2008	22	79	121	10.985	51.208
49		Sumater Utara	Medan	MCK ++	80	400
				MCK +	100	400
			Tebing Tinggi	MCK +	30	140
				Perpipaan	60	260
50		Sumatera Barat	Padang Panjang	MCK ++	100	500
			Sawahlunto	MCK ++	100	500
			Padang (Kota)	MCK ++	100	500
			Tanah Datar (Kab)	MCK ++	100	500
			Solok (Kab)	MCK ++	100	500
			Solok (Kota)	MCK ++	100	500
			Sijunjung	MCK ++	100	500
			Dharmasraya	MCK ++	100	500
51		Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ilir	MCK +	40	160
				MCK +	100	400
				MCK +	35	140
			Lubuk Linggau (Kota)	MCK +	50	200
52		Bangka Belitung	Kab. Bangka	MCK +	100	500
			Kab. Belitung	MCK +	100	500
			Kab. Belitung Timur	MCK +	60	300

Lanjutan Tabel 4.40

No.	Tahun	Provinsi	Kota/Kabupaten	Pilihan Teknologi	Jumlah Pengguna				
					KK	Jiwa			
1	2	3	4	5	6	7			
53		Banten	Tangerang (Kota)	MCK ++	80	400			
			Serang (Kab)	MCK ++	88	408			
54		Jawa Barat		MCK ++	45	284			
			Bogor (Kab)	MCK ++	30	400			
			Bogor (Kota)	MCK ++ & Perpipaan	22	200			
55		Jawa Tengah	Tasikmalaya (Kota)	MCK ++	40	500			
			Semarang (Kota)	MCK ++	80	278			
			Brebes (Kab)	MCK +	90	390			
				MCK +	60	300			
			Tegal (Kota)	MCK ++	70	265			
			Pekalongan (Kota)	MCK ++	55	276			
			Batang (Kab)	MCK ++	154	599			
			Kendal (Kab)	MCK +	63	316			
			Solo/ Surakarta (Kota)	MCK ++ & Perpipaan	33	164			
				MCK ++	61	305			
			Magelang (Kab)	MCK ++ & Perpipaan	148	720			
			Temanggung (Kab)	Komunal (Pengrajin Tahu)	8 Pengrajin, kapasitas 1430 kg/ hr				
			Purworejo (Kab)	Perpipaan	87	367			
				MCK ++	75	375			
			56		DI Yogyakarta	Kebumen (Kab)	MCK ++	37	188
						Banjarnegara (Kab)	MCK ++	129	495
Yogyakarta (Kota)	Perpipaan & <i>Digester</i>	75				200			
Gunung Kidul (Kab)	Perpipaan	49				216			
	Perpipaan	130				653			
	Perpipaan	67				261			
57		Jawa Timur	Sleman (Kab)	MCK ++	71	223			
			Mojokerto (Kota)	MCK ++	70	350			
				MCK ++	70	350			
			Mojokerto (Kab)	MCK ++	59	219			
				MCK ++	850	850			
			Blitar (Kab)	MCK ++ & Perpipaan	130	650			
				MCK ++ & Perpipaan	50	250			
				MCK ++ & Perpipaan	60	300			
			Blitar (Kota)	MCK ++ & Perpipaan	62	313			
			Kediri (Kota)	MCK ++	70	350			
				MCK ++	70	350			
				MCK ++	70	350			
			Pasuruan (Kota)	MCK ++	24	120			
				MCK ++	300	801			
			Jombang (Kab)	MCK ++	90	450			
	MCK ++	70	350						
Sidoarjo (Kab)	MCK ++	70	350						
Pamekasan (Kab)	MCK ++	100	500						
	MCK ++	100	500						
	MCK ++	100	500						
Sumenep (Kab)	MCK ++	70	350						
	MCK ++	125	623						
	MCK ++	70	350						

Lanjutan Tabel 4.40

No.	Tahun	Provinsi	Kota/Kabupaten	Pilihan Teknologi	Jumlah Pengguna	
					KK	Jiwa
1	2	3	4	5	6	7
			Malang (Kab)	MCK ++	100	500
				Perpipaan	50	250
			Nganjuk (Kab)	MCK ++	73	229
				Perpipaan	89	350
			Bondowoso (Kab)	MCK ++	70	350
				MCK ++	200	1.000
				MCK ++	28	140
			Situbondo (Kab)	MCK ++	780	3.900
				MCK ++	580	2.900
			Jember (Kab)	MCK ++	70	350
				MCK ++	70	350
				MCK ++	70	350
			Lumajang (Kab)	MCK ++	50	250
58	Bali		Buleleng (Kab)	Perpipaan	109	399
			Tabanan (Kab)	Perpipaan	163	658
59	Kalimantan Timur		Bontang	MCK +	80	300
				Perpipaan	83	271
60	Kalimantan Selatan		Banjarmasin	MCK +	100	400
			Hulu Sungai Utara (Kab)	MCK ++	180	540
			Hulu Sungai Selatan (Kab)	MCK +	75	375
61	Sulawesi Tenggara		Bau-Bau (Kota)	MCK ++	40	200
				Kombinasi MCK + & Perpipaan	75	375
				Kombinasi MCK + & Perpipaan	64	320
			Kendari (Kota)	Perpipaan	80	305
62	Sulawesi Barat		Mamuju	Perpipaan	100	500
				Perpipaan	100	500
			Majene	Perpipaan	100	500
				MCK +	100	500
63	Sulawesi Selatan		Bone	MCK ++	70	350
				MCK ++	70	350
				MCK ++	70	350
			Palopo	MCK ++	70	350
				MCK ++	70	350
				MCK ++	70	350
			Bulukumba	MCK ++	75	375
			Takalar	Perpipaan	60	300
64	Nusa Tenggara Barat		Lombok Barat (Kab)	MCK ++	109	428
			Lombok Timur (Kab)	MCK ++	225	1.400
				MCK ++	100	500
			Sumbawa Barat (Kab)	Perpipaan	119	810
			Sumbawa (Kab)	MCK ++	200	600
Total		16	69	108	11.061	48.984

Sumber : Kisah Sukses Sanimas di Indonesia, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen PU dan BORDA

Tabel : 4.41
Program 3R (Reuse, Reduce, Recycle)
Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan

No.	Provinsi	Lokasi Kegiatan		
		TA. 2007	TA. 2008	TA. 2009
1	2	3	4	5
1	NA Darussalam			
	Banda Aceh	Perumnas Bundha Suci	Komplek Budha	-
	Kab. Pidie	-	-	1 lokasi
	Kota Langsa	-	-	1 lokasi
2	Sumatera Utara			
	Medan	Perum Madyo Karso	-	2 lokasi
	Binjai	Perumahan Jati Karyo	-	-
	Kec. Medan Labuhan	-	Kel. Sunun; Kel. Saemati	-
	Tebing Tinggi	-	Kel. Bandar Utama	-
3	Sumatera Barat			
	Padang Panjang	Kel. Koto Panjang	Kel. Sembilan Korong	4 lokasi
	Bukit Tinggi	Kel. Birugo	-	-
	Kota Solok	-	Kel. Ekor Lubuk	-
	Padang	-	Kel. Air Tawar Timur	-
4	Sumatera Selatan			
	Palembang	Perumahan BSD	Kel. Bukit Sangkal	1 lokasi
	Lubuk Linggau	-	Kel. Karang Ketuan	-
	Ogan Komering Ilir	-	Ogan Komering Ilir	-
5	Riau			
	Kampar	-	Desa Pandau Jaya	-
	Kota Pekanbaru	-	Kel. Lembah Sari Kel. Simpang Tiga SPMA	1 lokasi
	Dumai	-	-	1 lokasi
	Bengkalis	-	-	1 lokasi
6	Kepulauan Riau			
	Bintan	-	Komplek Bintan Centre	-
	Kab. Bintan	-	Kab. Bintan	1 lokasi
	Karimun	-	Karimun	-
	Tanjung Pinang	-	-	1 lokasi
7	Bangka Belitung			
	Pangkal Pinang	Perumnas Bukit Tepabri	-	-
	Kab. Bangka Barat	-	-	-
	Kab. Bangka Tengah	-	Kampung Tegal Rejo Kampung Dul Koba	-
8	Jambi			
	Kota Jambi	Perumnas Aur Duri	Poltek Kesehatan Jambi Kel. Cempaka Putih	2 lokasi
	Muara Jambi	-	Desa Kasang Puduk	-

Lanjutan Tabel 4.41

No.	Provinsi	Lokasi Kegiatan		
		TA. 2007	TA. 2008	TA. 2009
1	2	3	4	5
9	Bengkulu			
	Bengkulu	Perumnas Lingkar Timur	-	2 lokasi
	Bangka Hulu	-	Kel. Bentiring Permai	-
	Rejang Lebong	-	Kel. Air Putih Baru	-
10	Lampung			
	Bandar Lampung	Desa Sukorejo	-	3 lokasi
	Sukarame	-	Kel. Way Dadi	-
	Kemiling	-	Kel. Beringin Raya	-
11	Banten			
	Serang	Wil Garpan Kaujon	-	1 lokasi
	Pandeglang	-	Kel. Seruni	-
	Cilegon	-	Kel. Sukmajaya	1 lokasi
	Kab. Tangerang	-	-	1 lokasi
12	Jabodetabek			
		Komp. Trikora Halim Perdana Kusuma, Jakarta		
	Kota Depok	-	Kel. Pancoran Mas	
	Kota Bogor	-	Kel. Bulbulak	
	Tanah Tinggi	-	Wil. Kota Tangerang	
	Kota Bekasi	-	Kp. Rawa Pasung	3 lokasi
13	Jawa Barat			
	Cirebon	Perumnas Haria Mukti	-	
	Karawang	-	Komp. Bumi Kosambi Permai	
	Bandung	-	Kel. Lebak Siliwangi	
	Sukabumi	-	Kp. Simagalih; Kp. Cebek	6 lokasi
	Banjar	-	Kel. Balokan; Kel. Hegasari	
14	Jawa Tengah			
	Surakarta	Perumahan Sangkrah	-	
	Semarang	Bulu Lor	Kel. Sampangan	
	Pekalongan	-	Kel. Sukorejo	
	Purwokerto	-	Kel. Berkoh	5 lokasi
15	DI Yogyakarta			
	Yogyakarta	Perum Minomartani Perum Serengah Perum Wirobraian	-	1 lokasi
16	Jawa Timur			
	Sidoarjo	Makarya Binangun	Perum Delta Sari Perum Griya Permata	1 lokasi
	Pasuruan	Pasar Pasuruan	-	1 lokasi
	Malang	-	Kel. Kepanjen	1 lokasi
	Blitar	-	Kel. Wlingi	-
	Kediri	-	Kel. Kaliombo	-
	Trenggalek	-	TPA Srabah	-

Lanjutan Tabel 4.41

No.	Provinsi	Lokasi Kegiatan		
		TA. 2007	TA. 2008	TA. 2009
1	2	3	4	5
	Tulungagung	-	-	1 lokasi
	Kota Probolinggo	-	-	1 lokasi
	Kota Surabaya	-	-	1 lokasi
	Kota Batu	-	-	1 lokasi
17	Gerbang Kertosusilo			
	Surabaya	-	Kembang Kuning	-
	Sonokawijenan	-	Konstruksi Atap TPSI	-
18	Bali			
	Seminyak	Ds. Seminyak	-	
	Bangli	Ds. Babalank	-	
	Klungkung	-	Ds. Getget	
	Tabanan	-	Ds. Granh	3 lokasi
19	Nusa Tenggara Barat			
	Mataram	Lingkungan Marong	-	
	Lombok Barat	-	Desa Betika	2 lokasi
20	Nusa Tenggara Timur			
	Kupang	Perum Liliba	-	
	Sikka	-	Kel. Medawat	
	Waingapu	-	Kel. Kambaiawa	2 lokasi
21	Kalimantan Timur			
	Bontang	Kel. Tajau Indah	Kel. Bontang Kuala Kel. Bontang Baru	
	Kutai	-	Kel. Sukarame Kel. Lao Ipuh	
	Tarakan	-	Kel. Kampon Enam	
	Balikpapan	-	-	1 lokasi
	Samarinda	Karang Asem Ulu Kel. Karang Anyar	-	
22	Kalimantan Selatan			
	Banjarmasin	Perum Kayutangi	-	
	Martapura	-	Kec. Sungai Parit	
	Banjarbaru	-	Komp. Perum Berlina Jaya	2 lokasi
23	Kalimantan Tengah			
	Palangkaraya	Kel. Langkal	Kel. Panarung	1 lokasi
24	Kalimantan Barat			
	Pontianak	Kel. Barito Raya	Kel. Paritokarya	-
	Singkawang	-	Kel. Sungai Belitung	1 lokasi
25	Sulawesi Tenggara			
	Kendari	Andonuhu Bonggala	-	-
26	Sulawesi Utara			
	Kota Tomohon	-	-	1 lokasi
27	Gorontalo			
	Limboto	-	Ds. Hunggalua	-
	Bone	-	Ds. Ulantiba	-

Lanjutan Tabel 4.41

No.	Provinsi	Lokasi Kegiatan		
		TA. 2007	TA. 2008	TA. 2009
1	2	3	4	5
	Gorontalo	-	Kel. Limbau satu	-
	Boalemo	-	-	1 lokasi
28	Sulawesi Tengah			
	Palu	-	Kel. Palupi	1 lokasi
	Donggala	-	Ds. Tanjung Karang	-
	Kota Parigi	-	-	1 lokasi
29	Sulawesi Barat			
	Mamuju	Kel. Mamuju	Kel. Simboro	1 lokasi
	Polewati Mandar	-	Kel. Sidodadi	
30	Sulawesi Timur			
	Kendari	-	Kaw. Wua-Wua Kaw. Poasia	-
31	Sulawesi Selatan			
	Makassar	-	Kel. Sabung Jawa	-
	Palopo	-	-	1 lokasi
32	Maluku			
	Ambon	-	Ds. Ufimesing Ds. Kosie	-
	Laha	-	-	1 lokasi
33	Maluku Utara			
	Kota Ternate	-	Kel. Tefore	1 lokasi
34	Papua			
	Jayapura	-	Kel. Hinekombe	1 lokasi
	Mimika	-	Kel. Yabansari	1 lokasi
35	Papua Barat			
	Manowari	-	Kel. Wasi	-
	Sorong	-	Distrik Sorong Utara	

Sumber : Kisah Sukses Pemanfaatan Sampah, 3R-PU, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum

Tabel 4.42
Pencapaian Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)
Tahun 2003-2008

No.	Tahun Anggaran	Provinsi	Kota/Kabupaten/Lokasi	Twin Block	Type	Jumlah Unit	Peruntukkan
1	2	3	4	5	6	7	8
2003-2004							
1		Kepulauan Riau	Batam, Muka Kuning	2	27	160	Peremajaan Kota
2		Jawa Barat	Cimahi, Cigugur Tengah	2	21	192	Peremajaan Kota
3		Banten	Tangerang, Manis Jaya	1,5	21	144	Peremajaan Kota
4		Jawa Tengah	Surakarta, Begalon	1	21	96	Peremajaan Kota
5		DI Yogyakarta	Yogyakarta, Cokrodirjan (Kali Code)	1	21	72	Peremajaan Kota
6		Jawa Timur	Surabaya, Penjaringan Sari	2	21	192	Peremajaan Kota
			Surabaya, Wonorejo	1	21	96	Peremajaan Kota
			Surabaya, Penjaringan Sari	1	21	96	Peremajaan Kota
			Gresik	1	21	96	Peremajaan Kota
7		Sulawesi Selatan	Makassar, Daya V	1	21	96	Peremajaan Kota
		Sub Total A		13,5		1.240	
2004-2005							
8		Sumatera Utara	Medan, Belawan	1	21	96	Peremajaan Kota
9		DKI Jakarta	Jakarta Utara, Marunda	3	30	300	Kolong Tol
10		Jawa Barat	Depok, Cimanggis	1	21	96	Peremajaan Kota
			Bekasi, Jaya	1	21	96	Peremajaan Kota
			Bogor, Menteng Asri	1	27	80	Peremajaan Kota
			Karawang, Jl. Taruno	1	30	80	Peremajaan Kota
11		DI Yogyakarta	Sleman	1	21	96	Peremajaan Kota
		Sub Total B		9		844	
2005-2006							
12		Sumatera Utara	Tanjung Balai, Sei Raja	1	21	96	Peremajaan Kota
			Medan, USU	1	21	96	Mahasiswa
13		Sumatera Selatan	Palembang, Kasnaryansyah	1	21	96	Peremajaan Kota
14		DKI Jakarta	Jakarta Utara, Marunda	2	30	200	Kolong Tol
15		Jawa Barat	Bogor, Menteng Asri	1	27	80	Peremajaan Kota
			Bandung, Cingised	1	21	96	Peremajaan Kota
			Parung Panjang, Bogor	3	21	288	Peremajaan Kota

Lanjutan Tabel 4.42

No.	Tahun Anggaran	Provinsi	Kota/Kabupaten/Lokasi	Twin Block	Type	Jumlah Unit	Peruntukkan
1	2	3	4	5	6	7	8
16		Jawa Tengah	Semarang, Kaligawe	1	21	96	Peremajaan Kota
			Semarang, UNDIP	1	21	96	Mahasiswa
17		DI Yogyakarta	Yogyakarta, UGM	1	21	96	Mahasiswa
18		Jawa Timur	Sidoarjo, Tambak Sawah	1	21	96	Peremajaan Kota
			Surabaya, Wonorejo	2	21	192	Peremajaan Kota
19		Sulawesi Selatan	Makassar, Marisso	3	21	288	Peremajaan Kota
20		Kalimantan Barat	Entikong	1	21	96	Peremajaan Kota
21		Kalimantan Timur	Nunukan, Kawasan Sedadap	1	21	96	Peremajaan Kota
22		Papua	Jayapura, Dok 9	1	21	96	Peremajaan Kota
			Jayapura, UNCEN	1	21	96	Mahasiswa
	Sub Total C			23		2.200	
	2006-2007						
23		Sumatera Utara	Medan, Belawan	1	21	96	Permukiman Kumuh dan Pekerja
24		Jawa Barat	UNPAD, Sumedang	2	21	192	Asrama Mahasiswa UNPAD
			Bandung, Cingised	1	21	96	Pekerja/ Buruh
25		Jawa Tengah	Semarang, Kaligawe	2	21	192	Kawasan Kumuh Kaligawe
			Surakarta, Begalon	1	21	96	Permukiman Kumuh dan Pekerja
			Sukoharjo	1	21	96	Pekerja/ Buruh
			Cilacap	1	21	96	Kawasan Kumuh dan Nelayan
26		DI Yogyakarta	Yogyakarta, Kali Code	1	21	96	Permukiman Kumuh Bantaran Kali Code
27		Jawa Timur	Surabaya, ITS	4	21	384	Asrama Mahasiswa ITS
28		Kalimantan Selatan	Banjarmasin, Kelayan Selatan	1	21	96	Pekerja/ Buruh
29		Sulawesi Selatan	Makassar, UNHAS	2	21	192	Asrama Mahasiswa UNHAS
30		Sumatera Selatan	Palembang, UNSRI	2	21	192	Asrama Mahasiswa UNSRI
31		Sumatera Utara	Medan, USU	1	21	96	Asrama Mahasiswa USU
			Tanjung Balai	1	21	96	Dampak Peremajaan Kota
32		Sumatera Barat	Padang, UNAND	1	21	96	Asrama Mahasiswa UNAND
33		Jawa Barat	Bandung, ITB	1	21	96	Asrama Mahasiswa ITB
			Depok	2	21	192	Dampak Peremajaan Kota
34		Jawa Tengah	Semarang, UNDIP	2	21	192	Asrama Mahasiswa UNDIP
			Karang Anyar	1	21	96	Pekerja/ Buruh
35		DI Yogyakarta	Yogyakarta, UGM	1	21	96	Asrama Mahasiswa UGM
			Yogyakarta, UMY	3	21	288	Asrama Mahasiswa UMY

Lanjutan Tabel 4.42

No.	Tahun Anggaran	Provinsi	Kota/Kabupaten/Lokasi	Twin Block	Type	Jumlah Unit	Peruntukkan
1	2	3	4	5	6	7	8
36		Jawa Timur	Sidoarjo	2	21	192	Dampak Peremajaan Kota
			Surabaya, Sidotopo	3	21	288	Permukiman Kumuh dan Pekerja
			Gresik	2	21	192	Dampak Peremajaan Kota
37		Sulawesi Utara	Bitung	1	21	96	Permukiman Kumuh dan Pekerja Pelabuhan
38		Sulawesi Selatan	Makassar Kota	1	21	96	Dampak Peremajaan Kota
39		Papua	Jayapura, UNCEN	1	21	96	Asrama Mahasiswa UNCEN
		Sub Total D		42		4032	
		2007					
40		Lampung	Bandar Lampung	1	21	96	Dampak Peremajaan Kota
41		Jawa Tengah	Pekalongan, Krapyak	1	21	96	Pekerja/ Buruh
			Wonosobo, UNSIQ	1	21	96	Asrama Mahasiswa UNSIQ
			Surakarta, UNS	1	21	96	Asrama Mahasiswa UNS
42		DI Yogyakarta	Sleman	1	21	96	Dampak Peremajaan Kota
43		Jawa Barat	Bogor	1	27	80	Dampak Peremajaan Kota
		Sub Total E		6		560	
		2007-2008					
44		Nusa Tenggara Timur	Kupang	0	21	0	Dampak Peremajaan Kota
45		Kalimantan Timur	Samarinda	1	21	96	Dampak Peremajaan Kota
46		Bengkulu	Bengkulu	1	21	96	Dampak Peremajaan Kota
47		Kalimantan Tengah	Palangkaraya	1	21	96	Dampak Peremajaan Kota
48		Jawa Timur	Surabaya, Tanah Merah	2	21	192	Permukiman Kumuh dan Pekerja
49		Sulawesi Selatan	Makassar, UNISMU	2	21	192	Asrama Mahasiswa UNISMU
50		Jawa Tengah	Sukoharjo	2	21	192	Dampak Peremajaan Kota
			Solo, Universitas Muhammadiyah	1	21	96	Asrama Mahasiswa UNMUH
51		Jawa Barat	Bogor, Menteng	1	27	80	Dampak Peremajaan Kota
			Bandung, Cingised	1	21	96	Dampak Peremajaan Kota
52		DI Yogyakarta	Yogyakarta, Tg Panggung	1	21	96	Dampak Peremajaan Kota
53		Jawa Timur	Sidoarjo, Tambakwaru	1	21	96	Dampak Peremajaan Kota
54		Jawa Tengah	Pekalongan, Krapyak	2	21	192	Pekerja/ Buruh
			Karang Anyar, Sroyo	1	21	96	Pekerja/ Buruh
			Cilacap, Tg Kemulyaan	1	21	96	Kawasan Kumuh dan Nelayan
55		DI Yogyakarta	Yogyakarta, Gowongan	1	21	96	Permukiman Kumuh dan Pekerja
56		Lampung	Bandar Lampung, Keteguhan	1	21	96	Dampak Peremajaan Kota

Lanjutan Tabel 4.42

No.	Tahun Anggaran	Provinsi	Kota/Kabupaten/Lokasi	Twin Block	Type	Jumlah Unit	Peruntukkan
1	2	3	4	5	6	7	8
57		Sumatera Utara	Medan, Belawan	1	21	96	Dampak Peremajaan Kota
58		Sulawesi Tenggara	Kendari	1	24	96	Dampak Peremajaan Kota
59		Kalimantan Timur	Tarakan, Boom Panjang	1	24	99	Kawasan Kumuh dan Nelayan
60		Sulawesi Utara	Bitung	0	24	0	Pekerja/ Buruh
61		Sulawesi Tenggara	Bau-Bau, Barata Guru	2	24	198	Dampak Peremajaan Kota
62		Kepulauan Riau	Batam 1 (Sekupang)	2	24	198	Pekerja/ Buruh
			Batam 2 (Sekupang)	2	24	198	Pekerja/ Buruh
63		Sulawesi Selatan	Luwu Timur, Malili	2	21	198	Permukiman Kumuh dan Pekerja
64		Jawa Tengah	Semarang 1 (Kaligawe)	2	24	198	Permukiman Kumuh dan Pekerja
			Semarang 2 (Kaligawe)	2	24	198	Permukiman Kumuh dan Pekerja
65		DKI Jakarta	Komarudin 1	2	30	200	Dampak Peremajaan Kota
			Cipinang Besar Selatan	2	30	200	Dampak Peremajaan Kota
			Pinus Elok 1	2	30	200	Dampak Peremajaan Kota
			Pinus Elok 2	2	30	200	Dampak Peremajaan Kota
			Cakung Barat	2	36	160	Dampak Peremajaan Kota
		Sub Total F		46		4433	
		2008-2009					
66		Nangroe Aceh D	Banda Aceh	2	24	198	Dampak Peremajaan Kota
67		Sumatera Utara	Kota Tebing Tinggi	2	24	198	Dampak Peremajaan Kota
			Kota Medan	2	24	198	Dampak Peremajaan Kota
68		Kepulauan Riau	Kota Batam (Muka Kuning)	2	24	198	Dampak Peremajaan Kota
69		Sumatera Barat	Kota Padang	1	24	99	Dampak Peremajaan Kota
70		Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang	2	24	198	Dampak Peremajaan Kota
71		Banten	Kab. Serang	1	21	96	Dampak Peremajaan Kota
72		Jawa Barat	Kota Bandung Sadang-Serang	1	24	99	Dampak Peremajaan Kota
			Kota Bandung, Cingised	1	24	99	Dampak Peremajaan Kota
			Kab. Cimahi 1 & 2	3	24	297	Dampak Peremajaan Kota
73		Jawa Tengah	Kabupaten Semarang	1	24	99	Dampak Peremajaan Kota
			Kota Surakarta, Kel. Semanggi	2	24	198	Dampak Peremajaan Kota
			Kab. Kudus	2	24	198	Dampak Peremajaan Kota
			Kab. Jepara	1	24	99	Dampak Peremajaan Kota
74		DI Yogyakarta	Kab. Bantul	2	24	198	Dampak Peremajaan Kota
			Kab. Sleman	1	24	99	Dampak Peremajaan Kota

Lanjutan Tabel 4.42

No.	Tahun Anggaran	Provinsi	Kota/Kabupaten/Lokasi	Twin Block	Type	Jumlah Unit	Peruntukkan
1	2	3	4	5	6	7	8
75		Jawa Timur	Kota Surabaya (Kalikedinding)	2	24	198	Dampak Peremajaan Kota
			Kota Surabaya (Penjaringan Sari)	1	24	99	Dampak Peremajaan Kota
			Kota Sidoarjo (Agro)	2	24	198	Dampak Peremajaan Kota
			Kab. Sidoarjo, Ngelom	2	24	198	Dampak Peremajaan Kota
			Kota Probolinggo	1	24	99	Dampak Peremajaan Kota
			Jember	1	24	99	Dampak Peremajaan Kota
76		Nusa Tenggara Barat	Mataram	1	24	99	Dampak Peremajaan Kota
77		Kalimantan Barat	Kota Pontianak, Kel. Sungai Beliang	1	24	99	Dampak Peremajaan Kota
78		Kalimantan Selatan	Banjarmasin	1	21	96	Dampak Peremajaan Kota
79		Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	1	24	99	Dampak Peremajaan Kota
80		Sulawesi Selatan	Kota Makassar, Mariso	2	24	198	Dampak Peremajaan Kota
			Kota Makassar, Daya	1	24	99	Dampak Peremajaan Kota
81		Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka	2	24	198	Dampak Peremajaan Kota
82		Sulawesi Tengah	Kola Palu	1	24	99	Dampak Peremajaan Kota
83		Sulawesi Utara	Kota Manado	1	24	99	Dampak Peremajaan Kota
			Kota Bitung	1	24	99	Dampak Peremajaan Kota
			Kota Bitung	1	24	99	Dampak Peremajaan Kota
84		Nusa Tenggara Timur	Kupang	1	21	96	Dampak Peremajaan Kota
85		Banten	Kota Tangerang	2	24	198	Dampak Peremajaan Kota
86		DKI Jakarta	PTIQ, Jl. Pasar Jumat	1	24	99	Dampak Peremajaan Kota
			DKI, Jl. Komarudin 1 & 2	4	30	400	Dampak Peremajaan Kota
Sub Total G				56		5539	
Total A+B+C+D+E+F+G				195,5		18.848	

Sumber : Rusunawa di Indonesia; Gagasan, perkembangan dan keberlanjutan, 2005-2009, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum

Tabel 4.43
Rekapitulasi Capaian Desa Sasaran
PPIP 2005-2009

No.	Provinsi	2005		2006		2007		2008		2009		Total	
		Kab.	Desa	Kab.	Desa	Kab.	Desa	Kab.	Desa	Kab.	Desa	Kab.	Desa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Nanggroe Aceh Darussalam	13	260	-	-	12	122	9	123	2	25	36	530
2	Sumatera Utara	25	586	-	-	5	48	4	35	-	-	34	669
3	Sumatera Barat	19	386	-	-	11	108	11	139	4	40	45	673
4	Riau	11	285	-	-	2	20	-	-	9	506	22	811
5	Jambi	10	236	-	-	2	24	-	-	5	193	17	453
6	Sumatera Selatan	14	533	-	-	6	64	7	113	11	528	38	1.238
7	Bengkulu	9	348	-	-	8	96	-	-	2	20	19	464
8	Lampung	10	348	-	-	7	87	7	104	7	497	31	1.036
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	146	-	-	5	30	4	10	-	-	16	186
10	Kepulauan Riau	6	95	-	-	1	12	-	-	-	-	7	107
11	DKI Jakarta	1	6	-	-	1	6	1	5	-	-	3	17
12	Jawa Barat	25	573	-	-	16	166	14	223	12	182	67	1.144
13	Jawa Tengah	35	810	-	-	12	156	15	213	11	126	73	1.305
14	DI Yogyakarta	5	118	-	-	3	29	3	10	-	-	11	157
15	Jawa Timur	38	936	8	521	-	-	27	338	13	235	86	2.030
16	Banten	6	166	-	-	3	86	2	26	2	24	13	302
17	Bali	9	166	-	-	1	10	-	-	-	-	10	176
18	Nusa Tenggara Barat	9	367	-	-	7	101	4	10	4	42	24	520
19	Nusa Tenggara Timur	16	888	15	581	-	-	10	101	7	60	48	1.630
20	Kalimantan Barat	12	536	-	-	9	132	6	97	3	45	30	810
21	Kalimantan Tengah	14	474	-	-	6	86	3	31	3	30	26	621
22	Kalimantan Selatan	13	351	-	-	5	76	6	65	5	74	29	566
23	Kalimantan Timur	13	344	-	-	4	52	4	56	3	35	24	487
24	Sulawesi Utara	9	201	-	-	3	95	-	-	3	38	15	334
25	Sulawesi Tengah	10	404	-	-	9	136	1	10	2	25	22	575
26	Sulawesi Selatan	23	680	14	445	-	-	15	138	9	216	61	1.479
27	Sulawesi Tenggara	10	366	8	293	-	-	1	6	4	51	23	716
28	Gorontalo	5	149	-	-	4	56	1	10	2	20	12	235
29	Sulawesi Barat	5	187	-	-	3	49	1	2	2	21	11	259
30	Maluku	8	352	-	-	8	96	3	15	3	44	22	507
31	Maluku Utara	8	302	-	-	5	76	-	-	-	-	13	378
32	Irian Jaya Barat	9	351	-	-	7	70	4	40	-	-	20	461
33	Papua	20	884	-	-	19	200	14	140	4	47	57	1.271
Total		427	12.834	45	1.840	184	2.289	177	2.060	132	3.124	965	22.147

Sumber : Hasil Pelaksanaan PPIP 2005-2009 (Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan/ PPIP), Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen PU, 2009

Tabel 4.44
Pelaksanaan Pengembangan Kawasan
Tahun 2009

No.	Propinsi	Unit	Hasil Pelaksanaan	
			Kawasan Agropolitan	PS Perdesaan (DPP/KTP2D)
1	2	3	4	5
1	Nanggroe Aceh Darussalam	Kawasan	0	1
2	Sumatera Utara	Kawasan	2	1
3	Sumatera Barat	Kawasan	1	2
4	Riau	Kawasan	3	1
5	Jambi	Kawasan	3	1
6	Sumatera Selatan	Kawasan	2	1
7	Bengkulu	Kawasan	2	1
8	Lampung	Kawasan	2	1
9	Bangka Belitung	Kawasan	2	1
10	Kepulauan Riau	Kawasan	1	1
11	DKI Jakarta	Kawasan	0	0
12	Jawa Barat	Kawasan	3	2
13	Jawa Tengah	Kawasan	3	4
14	DI Yogyakarta	Kawasan	2	3
15	Jawa Timur	Kawasan	4	2
16	Banten	Kawasan	1	2
17	Bali	Kawasan	2	1
18	Nusa Tenggara Barat	Kawasan	2	1
19	Nusa Tenggara Timur	Kawasan	1	1
20	Kalimantan Barat	Kawasan	3	1
21	Kalimantan Tengah	Kawasan	1	1
22	Kalimantan Selatan	Kawasan	2	2
23	Kalimantan Timur	Kawasan	1	1
24	Sulawesi Utara	Kawasan	5	3
25	Sulawesi Tengah	Kawasan	3	1
26	Sulawesi Selatan	Kawasan	2	3
27	Sulawesi Tenggara	Kawasan	2	1
28	Gorontalo	Kawasan	1	1
29	Sulawesi Barat	Kawasan	1	2
30	Maluku	Kawasan	1	1
31	Maluku Utara	Kawasan	0	1
32	Irian Jaya Barat	Kawasan	1	1
33	Papua	Kawasan	1	1
Indonesia			60	47

Sumber : Laporan Hasil Pembangunan Bidang Cipta Karya 2009. Dirjen Cipta Karya. Departemen Pekerjaan Umum

Tabel 4.45
Pengelolaan Air Limbah, Persampahan, dan Drainase per Wilayah Tahun 2009

No.	Provinsi	Air Limbah	Persampahan	Drainase
		Jiwa	Jiwa	Jiwa
1	2	3	4	5
	Sumatera	39.533	2.004.786	303
1	Nanggroe Aceh Darussalam	2.500	408.571	163
2	Sumatera Utara	16.783	357.143	25
3	Sumatera Barat	6.500	410.500	13
4	Riau	1.250	100.000	13
5	Jambi	2.500	171.429	13
6	Sumatera Selatan	1.250	142.857	25
7	Bengkulu	4.000	85.714	10
8	Lampung	1.250	114.286	15
9	Bangka Belitung	2.250	100.000	13
10	Kepulauan Riau	1.250	114.286	13
	Jawa & Bali	177.000	2.610.399	930
11	DKI Jakarta	1.667	10.400	200
12	Jawa Barat	38.273	714.286	19
13	Jawa Tengah	22.694	228.571	255
14	DI Yogyakarta	22.671	285.714	0
15	Jawa Timur	26.667	342.857	418
16	Banten	4.000	142.857	0
17	Bali	61.028	885.714	38
	Kalimantan, Sulawesi & NTB	61.028	2.328.571	159
20	Kalimantan Barat	1.250	142.857	18
21	Kalimantan Tengah	1.250	114.286	10
22	Kalimantan Selatan	24.278	228.571	13
23	Kalimantan Timur	9.000	214.286	30
24	Sulawesi Utara	1.250	142.857	25
25	Sulawesi Tengah	3.500	100.000	0
26	Sulawesi Selatan	4.500	100.000	0
27	Sulawesi Tenggara	4.000	71.429	13
28	Gorontalo	2.250	285.714	25
29	Sulawesi Barat	5.250	285.714	25
18	Nusa Tenggara Barat	4.500	642.857	0
	Maluku, Papua & NTT	3.750	600.000	36
19	Nusa Tenggara Timur	1.250	157.143	0
30	Maluku	0	128.571	0
31	Maluku Utara	0	71.429	10
32	Papua Barat	2.500	157.143	13
33	Papua	0	85.714	13
	Indonesia	281.311	7.543.756	1.428

Sumber : Laporan Hasil Pembangunan Bidang Cipta Karya 2009, Dirjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum.

Tabel 4.46
Jumlah Jiwa Terlayani dalam Pencapaian Sasaran RPJM 2005 - 2008 Bidang Cipta Karya,
Pengelolaan Air Limbah

No.	Provinsi	Jumlah Jiwa Terlayani			
		Tahun			
		2005	2006	2007	2008
	Sumatera	45.433	103.081	38.725	50.815
1	Nanggroe Aceh Darussalam	0	4.867	0	3.083
2	Sumatera Utara	13.333	14.667	8.892	9.973
3	Sumatera Barat	10.000	24.417	4.500	26.886
4	Riau	3.333	9.000	4.000	0
5	Kepulauan Riau	6.667	0	6.333	83
6	Jambi	0	24.500	3.000	2.000
7	Sumatera Selatan	2.100	4.000	3.000	4.623
8	Bengkulu	3.333	14.333	3.000	0
9	Lampung	0	4.049	3.000	2.667
10	Bangka Belitung	6.667	3.248	3.000	1.500
	Jawa & Bali	125.367	285.346	184.738	132.484
11	Banten	0	4.443	3.000	4.152
12	DKI (Jabodetabek)	0	0	417	3.875
13	Jawa Barat (Bandung Raya)	5.000	7.360	20.015	56.893
14	Jawa Tengah	3.867	41.006	6.983	13.023
15	DI Yogyakarta	2.100	6.302	6.335	27.288
16	Jawa Timur (Gerbang Kertasusila)	7.733	29.297	7.500	24.253
17	Bali (Sarbagita)	106.667	196.938	140.488	3.000
	NTB, Kalimantan & Sulawesi	43.466	199.384	50.798	137.801
18	Nusa Tenggara Barat	133	15.333	0	4.350
19	Kalimantan Barat	3.333	15.003	3.000	0
20	Kalimantan Tengah	0	24.235	4.024	22.250
21	Kalimantan Selatan	6.667	22.158	12.321	5.660
22	Kalimantan Timur	3.333	20.407	4.453	5.123
23	Sulawesi Utara	6.667	16.631	3.000	833
24	Gorontalo	3.333	2.000	4.000	2.750
25	Sulawesi Tengah	13.333	22.100	13.000	20.000
26	Sulawesi Selatan	6.667	6.000	3.000	6.517
27	Sulawesi Barat	0	30.867	2.000	4.007
28	Sulawesi Tenggara	0	24.650	2.000	66.311
	NTT, Maluku & Papua	6.800	28.083	3.000	3.227
29	Nusa Tenggara Timur	0	4.000	3.000	1.500
30	Maluku	133	3.333	0	0
31	Maluku Utara	0	12.500	0	0
32	Papua Barat	6.667	5.250	0	1.727
33	Papua	0	3.000	0	0
	Indonesia	221.066	615.894	277.261	324.327

Sumber : Menuju Permukiman yang Layak Huni, Bebas Air Limbah, Bersih dari Sampah dan Bebas Genangan, Ditjen Cipta Karya,

Departemen PU

Tabel 4.47
Jumlah Jiwa Terlayani dalam Pencapaian Sasaran RPJM 2005 - 2008 Bidang Cipta Karya,
Pengelolaan Persampahan

No.	Provinsi	Jumlah Jiwa Terlayani			
		Tahun			
		2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6
	Sumatera	752.854	641.885	398.972	1.045.545
1	Nanggroe Aceh Darussalam	65.000	57.601	52.400	36.717
2	Sumatera Utara	123.574	28.002	150.640	67.657
3	Sumatera Barat	135.000	96.977	69.027	513.200
4	Riau	198.600	43.506	3.440	60.171
5	Kepulauan Riau	58.480	50.000	0	53.314
6	Jambi	33.000	28.800	2.400	54.229
7	Sumatera Selatan	35.400	45.600	2.400	64.343
8	Bengkulu	30.600	31.200	9.606	75.572
9	Bangka Belitung	28.200	48.000	3.059	34.971
10	Lampung	45.000	212.199	106.000	85.371
	Jawa & Bali	242.320	950.523	1.508.365	2.165.614
11	Banten	25.800	190.800	41.654	72.216
12	DKI (Jabodetabek)	0	0	21.322	99.063
13	Jawa Barat (Bandung Raya)	53.800	438.650	378.640	553.831
14	Jawa Tengah	13.950	104.971	9.600	62.000
15	DI Yogyakarta	56.400	58.969	58.986	77.086
16	Jawa Timur (Gerbang Kertasusila)	56.970	115.833	474.823	1.127.447
17	Bali (Sarbagita)	35.400	41.300	523.340	173.971
	NTB, Kalimantan & Sulawesi	596.998	588.915	602.134	1.313.069
18	Nusa Tenggara Barat	0	91.267	14.999	235.429
19	Kalimantan Barat	28.200	84.000	192.266	113.780
20	Kalimantan Tengah	35.400	75.943	2.400	42.571
21	Kalimantan Selatan	104.198	60.508	63.730	58.446
22	Kalimantan Timur	0	84.000	66.665	100.626
23	Sulawesi Utara	60.400	12.797	24.966	252.886
24	Gorontalo	13.800	33.600	189.600	142.086
25	Sulawesi Tengah	50.200	24.400	0	77.371
26	Sulawesi Barat	0	0	10.248	253.386
27	Sulawesi Selatan	40.200	86.400	0	31.688
28	Sulawesi Tenggara	264.600	36.000	37.260	4.800
	NTT, Maluku & Papua	112.009	234.000	98.960	226.012
29	Nusa Tenggara Timur	40.200	50.400	3.200	7.200
30	Maluku	6.600	67.200	0	75.657
31	Maluku Utara	37.609	22.800	95.760	42.743
32	Papua Barat	16.200	28.800	0	65.943
33	Papua	11.400	64.800	0	34.469
	Indonesia	1.704.181	2.415.323	2.608.431	4.750.240

Sumber : Menuju Permukiman yang Layak Huni, Bebas Air Limbah, Bersih dari Sampah dan Bebas Genangan, Ditjen Cipta Karya, Departemen PU

Tabel 4.48
Luas Kota yang Dikelola dalam Pencapaian Sasaran RPJM 2005 - 2008 Bidang Cipta Karya,
Penanganan Drainase

No.	Provinsi	Luas Yang Dikelola (Ha)			
		Tahun			
		2005	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6
	Sumatera	692	605	130	0
1	Nanggroe Aceh Darussalam	96	120	20	0
2	Sumatera Utara	418	110	50	0
3	Sumatera Barat	9	87	5	0
4	Riau	32	31	10	0
5	Kepulauan Riau	12	32	5	0
6	Jambi	27	27	10	0
7	Sumatera Selatan	10	32	3	0
8	Bengkulu	51	70	5	0
9	Bangka Belitung	14	11	2	0
10	Lampung	23	85	20	0
	Jawa & Bali	188	295	488	31
11	Banten	50	28	8	0
12	DKI (Jabodetabek)	0	18	0	0
13	Jawa Barat (Bandung Raya)	15	67	85	0
14	Jawa Tengah	11	64	35	0
15	DI Yogyakarta	4	17	0	0
16	Jawa Timur (Gerbang Kertasusila)	17	43	240	11
17	Bali (Sarbagita)	91	58	120	20
	NTB, Kalimantan & Sulawesi	268	652	159	40
18	Nusa Tenggara Barat	33	82	15	0
19	Kalimantan Barat	13	45	25	0
20	Kalimantan Tengah	21	72	10	0
21	Kalimantan Selatan	10	53	15	0
22	Kalimantan Timur	43	42	4	0
23	Sulawesi Utara	33	32	20	0
24	Gorontalo	75	73	20	40
25	Sulawesi Tengah	12	36	20	0
26	Sulawesi Barat	0	66	10	0
27	Sulawesi Selatan	28	80	15	0
28	Sulawesi Tenggara	0	71	5	0
	NTT, Maluku & Papua	94	193	55	0
29	Nusa Tenggara Timur	35	24	10	0
30	Maluku	2	19	20	0
31	Maluku Utara	4	24	5	0
32	Papua Barat	27	71	10	0
33	Papua	26	55	10	0
	Indonesia	1.242	1.745	832	71

Sumber : Menuju Permukiman yang Layak Huni, Bebas Air Limbah, Bersih dari Sampah dan Bebas Genangan, Ditjen Cipta Karya, Departemen PU

Tabel : 4.1
Data Inventarisasi Sungai di Indonesia

No.	Status	Nama Wilayah Sungai	Jml Sungai	Jml DAS	Jumlah D. Irigasi	Jumlah Bendungan	Jml Embung	Jml Embung Potensi	Jml Pos Hujan	Jml Pos Debit	Jml Stasiun Klimatologi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	WS Lintas Negara	Benanain	0	2	36	0	0	0	0	0	0
2	WS Lintas Negara	Noel - Mina	0	5	437	0	0	0	0	5	0
3	WS Lintas Negara	Sesayap	255	13	0	0	0	0	0	0	0
4	WS Lintas Negara	Mamberamo-Tami-Apauvar	136	17	10	0	0	0	0	16	0
5	WS Lintas Negara	Einlanden - Digul - Bikuma	245	8	14	0	0	0	0	4	0
6	WS Strategis Nasional	Meureudu - Baro	18	1	0	0	0	0	0	1	0
7	WS Strategis Nasional	Jambo Aye	19	1	135	0	0	0	0	1	0
8	WS Strategis Nasional	Toba - Asahan	127	1	43	0	0	0	0	0	0
9	WS Strategis Nasional	Woyla - Seunagan	26	1	0	0	0	0	0	4	0
10	WS Strategis Nasional	Tripa - Bateue	32	1	108	0	0	0	0	1	0
11	WS Strategis Nasional	Belawan - Ular - Padang	81	1	0	0	0	0	0	13	0
12	WS Strategis Nasional	Batang Angkola-Batang Gadis	204	1	53	0	0	0	0	20	0
13	WS Strategis Nasional	Siak	158	1	92	0	0	0	0	2	0
14	WS Strategis Nasional	Reteh	0	1	14	0	0	0	0	0	0
15	WS Strategis Nasional	Pulau Batam - Pulau Bintan	0	1	0	0	0	0	0	0	0
16	WS Strategis Nasional	Anai-Kuranji-Arau-Mangau-Antokan	12	1	568	0	0	0	0	9	0
17	WS Strategis Nasional	Sugihan	37	1	1	0	0	0	0	0	0
18	WS Strategis Nasional	Banyuasin	0	1	10	0	0	0	18	0	0
19	WS Strategis Nasional	Way Seputih - Way Sekampung	61	1	762	1	0	0	0	18	0
20	WS Strategis Nasional	Pemali - Comal	0	1	1202	1	0	0	0	13	0
21	WS Strategis Nasional	Jratun Seluna	81	1	2299	0	0	0	0	11	0
22	WS Strategis Nasional	Serayu - Bogowonto	83	10	3256	0	0	0	172	22	5
23	WS Strategis Nasional	Brantas	0	1	5402	4	0	0	0	14	0
24	WS Strategis Nasional	Bali - Penida	399	1	886	0	0	0	26	60	6
25	WS Strategis Nasional	Pulau Lombok	32	1	242	0	0	0	7	25	0
26	WS Strategis Nasional	Aesesa	0	1	384	0	0	0	60	0	0
27	WS Strategis Nasional	Kapuas	327	1	115	0	0	0	9	10	0
28	WS Strategis Nasional	Pawan	169	1	172	0	0	0	12	1	0
29	WS Strategis Nasional	Seruyan	0	1	4	0	0	0	0	0	0
30	WS Strategis Nasional	Kahayan	31	1	0	0	0	0	0	2	0
31	WS Strategis Nasional	Mahakam	494	1	60	5	0	0	0	3	0
32	WS Strategis Nasional	Sangihe Talaud	0	1	11	0	0	0	0	0	0

Lanjutan Tabel 4.1

No.	Status	Nama Wilayah Sungai	Jml Sungai	Jml DAS	Jumlah D. Irigasi	Jumlah Bendungan	Jml Embung	Jml Embung Potensi	Jml Pos Hujan	Jml Pos Debit	Jml Stasiun Klimatologi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	WS Strategis Nasional	Tondano - Likupang	147	1	111	0	0	0	0	11	0
34	WS Strategis Nasional	Paguyaman	34	1	39	0	0	0	0	5	0
35	WS Strategis Nasional	Parigi - Poso	72	1	161	0	0	0	0	11	0
36	WS Strategis Nasional	Laa - Tambalako	35	1	88	0	0	0	0	2	0
37	WS Strategis Nasional	Walanae - Cenranae	36	1	664	1	0	0	26	44	9
38	WS Strategis Nasional	Jeneberang	48	1	728	2	0	0	24	25	8
39	WS Strategis Nasional	Pulau Buru	0	1	14	0	0	0	0	0	0
40	WS Strategis Nasional	Pulau Ambon - Pulau Seram	0	1	19	0	0	0	0	0	0
41	WS Strategis Nasional	Kepulauan Kei - Aru	0	1	29	0	0	0	0	1	0
42	WS Strategis Nasional	Kepulauan Yamdena - Wetar	0	1	2	0	0	0	0	14	0
43	WS Lintas Provinsi	Alas - Singkil	57	5	0	0	0	0	0	0	1
44	WS Lintas Provinsi	Batang Natal - Batang Batahan	0	2	0	0	0	0	0	0	0
45	WS Lintas Provinsi	Rokan	168	13	0	0	0	0	0	4	0
46	WS Lintas Provinsi	Kampar	258	5	0	4	0	0	0	5	0
47	WS Lintas Provinsi	Indragiri	156	8	78	0	0	0	0	8	0
48	WS Lintas Provinsi	Batanghari	65	19	124	0	0	0	26	13	0
49	WS Lintas Provinsi	Musi	21	6	105	0	0	0	8	45	0
50	WS Lintas Provinsi	Mesuji - Tulang Bawang	75	8	0	0	0	0	41	13	0
51	WS Lintas Provinsi	Teramang - Ipuh	22	8	0	0	0	0	0	6	0
52	WS Lintas Provinsi	Nasal - Padang Guci	0	10	0	0	0	0	0	0	0
53	WS Lintas Provinsi	Kepulauan Seribu	0	1	0	0	0	0	0	0	0
54	WS Lintas Provinsi	Cidanau-Ciujung-Cidurian-Cisadane-Ciliwung-Citarum	227	6	912	7	0	0	0	45	0
55	WS Lintas Provinsi	Citanduy	137	10	2	0	0	0	0	8	0
56	WS Lintas Provinsi	Cimanuk - Cisanggarung	40	9	286	0	0	0	0	12	0
57	WS Lintas Provinsi	Progo - Opak - Serang	21	6	131	0	8	8	53	19	1
58	WS Lintas Provinsi	Bengawan Solo	206	12	5535	9	0	0	34	46	3
59	WS Lintas Provinsi	Jelai - Kendawangan	0	2	15	0	0	0	0	0	0
60	WS Lintas Provinsi	Barito - Kapuas	153	11	440	0	0	0	62	26	0
61	WS Lintas Provinsi	Dumoga - Sangkup	0	7	114	0	0	0	0	0	0
62	WS Lintas Provinsi	Limboto - Bulango - Bone	31	3	3	0	0	0	0	10	0
63	WS Lintas Provinsi	Randangan	0	5	0	0	0	0	0	0	0
64	WS Lintas Provinsi	Palu - Lariang	96	8	0	0	0	0	0	4	0
65	WS Lintas Provinsi	Kaluku - Karama	47	5	218	0	0	0	3	3	1
66	WS Lintas Provinsi	Pompeangan - Larona	102	11	0	2	0	0	4	16	0

Lanjutan Tabel 4.1

No.	Status	Nama Wilayah Sungai	Jml Sungai	Jml DAS	Jumlah D. Irigasi	Jumlah Bendungan	Jml Embung	Jml Embung Potensi	Jml Pos Hujan	Jml Pos Debit	Jml Stasiun Klimatologi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	WS Lintas Provinsi	Sadang	55	15	0	1	0	0	12	26	4
68	WS Lintas Provinsi	Lasolo - Sampara	9	8	0	0	0	0	0	8	0
69	WS Lintas Provinsi	Omba	137	5	7	0	0	0	0	9	0
70	WS Lintas Kab/Kota, Dlm Prov.	Krueng Aceh	21	4	0	1	0	0	0	4	0
71	WS Lintas Kab/Kota, Dlm Prov.	Pase - Peusangan	30	6	91	0	0	0	0	2	0
72	WS Lintas Kab/Kota, Dlm Prov.	Tamiang - Langsa	11	5	161	0	0	0	0	9	0
73	WS Lintas Kab/Kota, Dlm Prov.	Teunom - Lambesoi	0	7	248	0	0	0	0	0	0
74	WS Lintas Kab/Kota, Dlm Prov.	Krueng Baru - Kluet	0	2	292	0	0	0	0	0	0
75	WS Lintas Kab/Kota, Dlm Prov.	Wampu - Besitang	88	7	321	0	0	0	0	2	0
76	WS Lintas Kab/Kota, Dlm Prov.	Bah Bolon	22	8	186	0	0	0	0	10	0
77	WS Lintas Kab/Kota, Dlm Prov.	Barumun - Kualuh	33	4	94	0	0	0	0	13	0
78	WS Lintas Kab/Kota, Dlm Prov.	Pulau Nias	0	16	121	0	0	0	0	0	0
79	WS Lintas Kab/Kota, Dlm Prov.	Sibundong - Batang Toru	0	5	156	0	0	0	0	0	0
80	WS Lintas Kab/Kota, Dlm Prov.	Silaut - Tarusan	23	6	216	0	0	0	0	8	0
81	WS Lintas Kab/Kota, Dlm Prov.	Masang - Pasaman	0	13	309	0	0	0	0	0	0
82	WS Lintas Kab/Kota, Dlm Prov.	Pangabuan - Lagan	0	2	78	0	0	0	0	0	0
83	WS Lintas Kab/Kota, Dlm Prov.	Pulau Bangka	0	1	34	0	0	0	0	0	0
84	WS Lintas Kab/Kota, Dlm Prov.	Pulau Belitung	0	1	11	0	0	0	0	0	0
85	WS Lintas Kab/Kota, Dlm Prov.	Semangka	44	7	14	0	0	0	0	2	0
86	WS Lintas Kab/Kota, Dlm Prov.	Air Bengkulu - Alas Talo	27	9	286	0	0	0	55	34	0
87	WS Lintas Kab/Kota, Dlm Prov.	Sebelat - Ketahun - Lais	21	16	156	0	0	0	0	4	0
88	WS Lintas Kab/Kota, Dlm Prov.	Ciliman - Cibungur	366	2	759	0	0	0	0	11	0
89	WS Lintas Kab/Kota, Dlm Prov.	Cibaliung - Cisawarna	0	2	0	0	0	0	0	0	0
90	WS Lintas Kab/Kota, Dlm Prov.	Cisadea - Cibareno	29	4	58	0	0	0	0	8	0
91	WS Lintas Kab/Kota, Dlm Prov.	Ciwulan - Cilaki	0	9	8	0	0	0	0	7	0
92	WS Lintas Kab/Kota, Dlm Prov.	Brodi - Kuto	0	10	0	0	0	0	0	0	0
93	WS Lintas Kab/Kota, Dlm Prov.	Welang - Rejoso	0	2	33	0	0	0	0	0	0
94	WS Lintas Kab/Kota, Dlm Prov.	Pekalen - Sampean	0	2	301	1	0	0	0	14	0
95	WS Lintas Kab/Kota, Dlm Prov.	Baru - Bajulmati	0	2	1541	0	0	0	0	0	0
96	WS Lintas Kab/Kota, Dlm Prov.	Bondoyudo - Bedadung	0	2	0	0	0	0	0	0	0
97	WS Lintas Kab/Kota, Dlm Prov.	Kepulauan Madura	0	10	235	0	0	0	0	4	0
98	WS Lintas Kab/Kota, Dlm Prov.	Sumbawa	44	10	0	0	0	0	8	14	0
99	WS Lintas Kab/Kota, Dlm Prov.	Bima Dompu	0	6	111	0	0	0	0	0	0
100	WS Lintas Kab/Kota, Dlm Prov.	Pulau Sumba	31	5	200	0	0	0	0	0	0

Lanjutan Tabel 4.1

No.	Status	Nama Wilayah Sungai	Jml Sungai	Jml DAS	Jumlah D. Irigasi	Jumlah Bendungan	Jml Embung	Jml Embung Potensi	Jml Pos Hujan	Jml Pos Debit	Jml Stasiun Klimatologi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	WS Lintas Kab/Kota, Dlm Prov.	Wae Jamal	0	4	117	0	0	0	0	0	0
102	WS Lintas Kab/Kota, Dlm Prov.	Flotim - Lembata - Alor	181	6	89	0	0	0	0	1	0
103	WS Lintas Kab/Kota, Dlm Prov.	Mempawah	62	1	171	0	0	0	0	1	0
104	WS Lintas Kab/Kota, Dlm Prov.	Sambas	0	1	0	0	0	0	13	1	0
105	WS Lintas Kab/Kota, Dlm Prov.	Cengal - Batulicin	136	5	0	0	0	0	0	3	0
106	WS Lintas Kab/Kota, Dlm Prov.	Kayan	147	7	292	0	0	0	0	0	0
107	WS Lintas Kab/Kota, Dlm Prov.	Berau - Kelai	92	6	0	1	0	0	0	0	0
108	WS Lintas Kab/Kota, Dlm Prov.	Karangan	52	5	49	0	0	0	0	0	0
109	WS Lintas Kab/Kota, Dlm Prov.	Kendilo	0	5	0	0	0	0	0	0	0
110	WS Lintas Kab/Kota, Dlm Prov.	Poigar - Ranoyapo	0	2	0	0	0	0	0	0	0
111	WS Lintas Kab/Kota, Dlm Prov.	Lambunu - buol	78	9	5	0	0	0	0	5	0
112	WS Lintas Kab/Kota, Dlm Prov.	Bongka - Mantawa	88	2	28	0	0	0	0	13	0
113	WS Lintas Kab/Kota, Dlm Prov.	Poleang - Roraya	5	13	25	0	0	0	0	7	0
114	WS Lintas Kab/Kota, Dlm Prov.	Towari - Lasusua	10	8	21	0	0	0	0	3	0
115	WS Lintas Kab/Kota, Dlm Prov.	Pulau Buton	0	6	36	0	0	0	0	0	0
116	WS Lintas Kab/Kota, Dlm Prov.	Pulau Muna	0	6	0	0	0	0	0	0	0
117	WS Lintas Kab/Kota, Dlm Prov.	Halmahera Selatan	0	1	52	0	0	0	0	0	0
118	WS Lintas Kab/Kota, Dlm Prov.	Kepulauan Sula - Obi	0	2	2	0	0	0	0	0	0
119	WS Lintas Kab/Kota, Dlm Prov.	Wapoga - Mimika	0	14	18	0	0	0	0	0	0
120	WS Lintas Kab/Kota, Dlm Prov.	Wapoga - Mimika	0	17	2	0	0	0	0	0	0
121	WS Dalam Kabupaten/ Kota	Pulau Simeulue	0	1	65	0	0	0	0	0	0
122	WS Dalam Kabupaten/ Kota	Bengkalis Rupert	96	2	0	0	0	0	0	0	0
123	WS Dalam Kabupaten/ Kota	Kepulauan Natuna - Anambas	0	1	14	0	0	0	11	2	0
124	WS Dalam Kabupaten/ Kota	Kepulauan Karimun	0	1	25	0	0	0	0	0	0
125	WS Dalam Kabupaten/ Kota	Kepulauan Lingga - Singkep	0	1	0	0	0	0	0	0	0
126	WS Dalam Kabupaten/ Kota	Pulau Siberut - Pagai - Sipora (Kepulauan Mentawai)	0	11	6	0	0	0	0	0	0
127	WS Dalam Kabupaten/ Kota	Wiso - Gelis	0	11	0	0	0	0	0	0	0
128	WS Dalam Kabupaten/ Kota	Kepulauan Karimunjawa	0	1	0	0	0	0	0	0	0
129	WS Dalam Kabupaten/ Kota	Mentaya	0	1	0	0	0	0	1	0	0
130	WS Dalam Kabupaten/ Kota	Katingan	0	1	38	0	0	0	0	1	0
131	WS Dalam Kabupaten/ Kota	Pulau Laut	0	11	0	0	0	0	0	0	0
132	WS Dalam Kabupaten/ Kota	Kepulauan Banggai	0	1	8	0	0	0	0	0	0
133	WS Dalam Kabupaten/ Kota	Halmahera Utara	0	1	0	0	0	0	0	9	0

Sumber : http://www.pu.go.id/satminkal/index.asp?Site_id=10306

Tabel : 4.2
Daftar Danau dan Situ Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2009

No.	Provinsi	Jenis		Luas (Km ²)	Volume Tampung (juta m ³)
		Danau	Situ		
1	2	3	4	5	6
1	Nanggroe Aceh Darussalam	8	-	5.798,00	242.000,00
2	Sumatera Utara	8	95	736,00	3.350.900,00
3	Sumatera Barat	59	-	408,11	5.961.356,00
4	Riau	32	-	137,00	-
5	Jambi	14	-	5.000,00	-
6	Sumatera Selatan	16	1	21.432,00	262,00
7	Bengkulu	7	-	309,00	2.100.000,00
8	Lampung	45	-	97,00	5.884.790,00
9	Bangka Belitung	-	555	28,00	72,22
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	49	25,00	-
12	Jawa Barat	10	162	3456,5	-
13	Jawa Tengah	1	34	-	1,69
14	DI Yogyakarta	-	135	1,13	7,04
15	Jawa Timur	11	1	-	-
16	Banten	26	53	21538,73	2902
17	Bali	4	15	25,72	1024,35
18	Nusa Tenggara Barat	11	-	30,65	25
19	Nusa Tenggara Timur	35	26	26	995612
20	Kalimantan Barat	55	-	305,9	-
21	Kalimantan Tengah	48	-	195,43	-
22	Kalimantan Selatan	3	-	-	-
23	Kalimantan Timur	23	-	59250	1300
24	Sulawesi Utara	28	7	5	100000
25	Sulawesi Tengah	38	-	418,77	-
26	Sulawesi Selatan	16	-	871,71	40424,9
27	Sulawesi Tenggara	15	-	263	749632
28	Gorontalo	2	-	-	-
29	Sulawesi Barat	16	-	881,71	40424,9
30	Maluku	3	-	-	-
31	Maluku Utara	1	-	-	-
32	Irian Jaya Barat	-	-	-	-
33	Papua	26	1	2448,79	-
Indonesia		561,00	1.134,00	123.689,15	19.470.734,10

Sumber : http://www.pu.go.id/satminkal/index.asp?Site_id=10306

Direkap tanggal 21 September 2010

Tabel 4.3
Jumlah Rawa Berdasarkan Provinsi Di Indonesia

No.	Provinsi	Kabupaten	Jumlah Rawa
1	2	3	4
1	Nanggroe Aceh Darussalam	Aceh Besar	11
		Aceh Barat	8
		Aceh Selatan	4
		Aceh Timur	27
		Aceh Utara	14
		AcehTengah	1
		Kota Banda Aceh	3
		Pidie	19
		Bireun	8
		Aceh Selatan	1
		Aceh Singkil	1
	Sub Total		97
2	Sumatera Utara	Mandailing Natal	6
		Tapanuli Tengah	28
		Deliserdang	14
		Karo	1
		Labuhan Batu	29
		Langkat	25
		Tapanuli Selatan	10
		Tapanuli Utara	1
		Asahan	3
		Serdang Bedagai	6
	Sub Total		123
3	Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	6
		Pesisir Selatan	7
		Swahlunto / Sinjungjung	4
		Padangpariaman	8
		Agam	12
		Limapuluhkoto	2
		Pasaman	26
	Sub Total		65
4	Riau	Siak	8
		Kota Pekanbaru	3
		Kota Dumai	5
		Kuantan Singingi	2
		Kampar	11
		Pelalawan	33
		Indragiri Hulu	36
		Rokan Hilir	81
		Bengkalis	98
Indragiri Hilir	70		
	Sub Total		347

Lanjutan Tabel 4.3

No.	Provinsi	Kabupaten	Jumlah Rawa
1	2	3	4
5	Jambi	Batanghari	12
		Sarolangun	5
		Bungo	4
		Kerinci	2
		Tanjungjabung Timur	51
		Tanjungjabung Barat	9
		Muarojambi	6
		Sub Total	89
6	Sumatera Selatan	Ogan Ilir	59
		Ogan Komering Ilir	18
		Muaraenim	8
		Musibanyuasin	64
		Banyuasin	20
		Ogan Komering Ulu Timur	5
		Kota Palembang	1
		Sub Total	175
7	Bengkulu	Lebong*	2
		Kaur	4
		Seluma	14
		Bengkulu Utara	15
		Muko-Muko	7
		Rejanglebong	1
		Bengkulu Selatan	3
		Sub Total	46
8	Lampung	Tanggamus	9
		Lampung Barat	3
		Lampung Selatan	11
		Lampung Utara	3
		Lampung Tengah	1
		Sub Total	27
9	Bangka Belitung	Bangka	10
	Sub Total		10
10	Kepulauan Riau	-	-
11	DKI Jakarta	-	-
12	Jawa Barat	-	-
13	Jawa Tengah	-	-
14	DI Yogyakarta	-	-
15	Jawa Timur	-	-
16	Banten	Kota Cilegon	1
		Tangerang	22
		Sub Total	23
17	Bali	-	-
18	Nusa Tenggara Timur	-	-
19	Nusa Tenggara Barat	-	-

Lanjutan Tabel 4.3

No.	Provinsi	Kabupaten	Jumlah Rawa
1	2	3	4
20	Kalimantan Barat	Bengkayang	3
		Kota Singkawang	9
		Kapuas Hulu	5
		Ketapang	24
		Sambas	79
		Pontianak	73
	Sub Total		193
21	Kalimantan Tengah	Seruyan	13
		Kotawaringin Timur	61
		Katingan	39
		Pulangpisau	29
		Kapuas	55
		Sukamara	15
		Kotawaringin Barat	15
		Kota Palangkaraya	2
		Gunungmas	6
		Barito Timur	11
		Barito Selatan	6
		Barito Utara	9
	Sub Total		261
22	Kalimantan Selatan	Hulusungai Tengah	5
		Balangan	3
		Banjar	24
		Kotabaru	67
		Hulusungai Utara	9
		Tapin	13
		Hulusungai Selatan	7
		Tabalong	33
		Tanahlaut	62
		Baritokuala	19
	Sub Total		242
23	Kalimantan Timur	Kutai Kertanegara	17
		Kutai Barat	11
		Pasir	33
		Penajam Paser Utama	8
		Kutai Timur	7
		Kota Bontan	2
		Berau	14
		Kota Samarinda	4
		Kota Balikpapan	3
		Malinau	5
		Nunukan	4
Bulungan	10		
	Sub Total		118
24	Sulawesi Utara	-	-

Lanjutan Tabel 4.3

No.	Provinsi	Kabupaten	Jumlah Rawa
1	2	3	4
25	Sulawesi Tengah	Banggai	4
		Poso	8
	Sub Total		12
26	Sulawesi Selatan	-	-
27	Sulawesi Tenggara	Wakatobi	11
		Bombana	4
		Kolaka Utara	2
		Kolaka	7
		Konawe Selatan	7
		Buton	3
		Muna	6
		Kendari	4
	Sub Total		44
28	Gorontalo	Boalemo	5
	Sub Total		5
29	Sulawesi Barat	-	-
30	Maluku	-	-
31	Maluku Utara	-	-
32	Papua Barat	-	-
33	Papua	Merauke	27
		Sorong	3
		Fak-Fak	1
		Manokwari	1
		Yapen	1
		Jayapura	1
		Supiori	1
	Sub Total		35
	Indonesia		1.912

Sumber : http://www.pu.go.id/satminkal/index.asp?Site_id=10306

Direkap tanggal 21 September 2010

Tabel 4.4
Jumlah Air Tanah Berdasarkan Provinsi Di Indonesia

No.	Provinsi	Lokasi Air Tanah (Kabupaten)	Banyak Sumur
1	2	3	4
1	Nanggroe Aceh Darussalam	-	-
2	Sumatera Utara	-	-
3	Sumatera Barat	-	-
4	Riau	-	-
5	Jambi	-	-
6	Sumatera Selatan	-	-
7	Bengkulu	-	-
8	Lampung	Lampung Barat	1
		Waykanan	9
		Lampung Utara	6
		Lampung Selatan	55
		Lampung Tengah	41
		Tulangbawang	12
		Lampung Timur	2
		Tanggamus	2
	Sub Total		128
9	Bangka Belitung	-	-
10	Kepulauan Riau	-	-
11	DKI Jakarta	-	-
12	Jawa Barat	-	-
13	Jawa Tengah	Sragen	69
		Boyolali	1
		Blora	56
		Pati	10
		Purworejo	10
		Cilacap	7
		Kebumen	10
		Tegal	3
		Brebes	2
		Pemalang	1
		Kudus	8
		Jepara	1
		Grobogan	2
		Klaten	6
	Sub Total		186
14	DI Yogyakarta	Gunung Kidul	59
	Sub Total		59
15	Jawa Timur	-	-
16	Banten	-	-
17	Bali	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	59
		Dompu	48
		Bima	62

Lanjutan Tabel 4.4

No.	Provinsi	Lokasi Air Tanah (Kabupaten)	Banyak Sumur
1	2	3	4
		Lombok Barat	112
		Lombok Timur	152
		Lombok Tengah	16
	Sub Total		449
19	Nusa Tenggara Timur	-	-
20	Kalimantan Barat	Bengkayang	12
		Sambas	2
		Sintang	4
		Landak	1
		Pontianak	1
	Sub Total		20
21	Kalimantan Tengah	Kapuas	15
		Kotawaringin Timur	4
	Sub Total		19
22	Kalimantan Selatan	-	-
23	Kalimantan Timur	-	-
24	Sulawesi Utara	-	-
25	Sulawesi Tengah	Donggala	96
		Morowali	121
		Banggai	13
		Poso	10
		Parigimoutong	13
		Kulawi	1
		Kodya Palu	13
		Tojounauna	6
		Luwuk	2
	Sub Total		275
26	Sulawesi Selatan	-	-
27	Sulawesi Tenggara	-	-
28	Gorontalo	Gorontalo	89
		Bonebolango	5
		Pohuwato	2
		Boalemo	25
	Sub Total		121
29	Sulawesi Barat	-	-
30	Maluku	-	-
31	Maluku Utara	-	-
32	Irian Jaya Barat	-	-
33	Papua	-	-
	Indonesia		1.257

Sumber : http://www.pu.go.id/satminkal/index.asp?Site_id=10306

Direkap tanggal 28 Januari 2010 oleh Pusdata

Tabel 4.5
Inventarisasi Bendungan Berdasarkan Provinsi di Indonesia
Tahun 2010

No.	Nama Provinsi	Jumlah Bendungan	Luas Muka Air (MA) Waduk (Ha)			Kapasitas (juta m3)	Luas Layanan
			MA Banjir	MA Normal	MA Minimum		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nanggroe Aceh Darussalam	9	0,00	259,00	97,00	158,99	5.655,50
2	Sumatra Utara	4	0,00	1.118,40	0,00	2.880,89	0,00
3	Sumatra Barat	5	11,36	11,36	11,36	0,78	0,00
4	Riau	1	0,00	1.240,00	0,00	1.045,00	0,00
5	Jambi	-	-	-	-	-	-
6	Sumatra Selatan	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	1	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00
8	Lampung	26	54.198,00	25.022,20	2.538,00	1.325,86	112.000,00
9	Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	5	0,00	2.515,98	0,00	82,00	0,00
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	22	80.362,00	19.792,77	2.816,00	4.277,27	332.089,64
13	Jawa Tengah	52	141.006,34	119.679,07	11.740,29	2.939,89	220.174,00
14	DI Yogyakarta	2	180,00	159,00	37,50	22,37	3.550,00
15	Jawa Timur	102	5.031,86	5.629,01	2.004,79	789,24	132.989,00
16	Banten	14	4.327,00	0,00	0,00	2,35	41.659,00
17	Bali	9	559,00	471,00	161,20	481,89	5.670,00
18	Nusa Tenggara Barat	44	2.048,96	1.066,28	242,70	2.156,83	26.237,55
19	Nusa Tenggara Timur	12	0,00	0,00	0,00	4,01	1.370,00
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	1	9.200,00	3.200,00	0,00	600,00	30.000,00
23	Kalimantan Timur	19	6.184,92	4.362,17	1.991,88	1.087,90	2.001,50
24	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Selatan	12	20.862,00	18.614,05	2.396,12	414,30	66.666,00
27	Sulawesi Tenggara	6	0,00	0,00	0,00	0,00	27.550,00
28	Gorontalo	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-
30	Maluku	6	0,00	24,00	0,00	0,34	0,00
31	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-
32	Papua Barat	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-

Sumber : http://www.pu.go.id/satminkal/index.asp?Site_id=10306

Subdit Data dan Informasi, Direktorat Bina Program, Ditjen Sumber Daya Air
 Direkap tanggal 20-21 September 2010 oleh Pusdata

Tabel 4.6
Jumlah Embung Potensi Berdasarkan Provinsi Di Indonesia

No.	Provinsi	Kabupaten	Jumlah Embung Potensi
1	2	3	4
1	Nanggroe Aceh Darussalam	-	-
2	Sumatera Utara	Tobasamosir	1
		Tapanuli Selatan	34
		Asahan	10
		Nias	3
		Tapanuli Tengah	15
	Sub Total		63
3	Sumatera Barat	-	-
4	Riau	Indragiri Hulu	1
		Siak	1
		Kota Pekanbaru	2
		Kuantan Singingi	2
		Bengkalis	1
		Indragiri Hilir	1
	Sub Total		8
5	Jambi	-	-
6	Sumatera Selatan	-	-
7	Bengkulu	-	-
8	Lampung	Lampung Selatan	13
		Tanggamus	9
		Lampung Barat	8
	Sub Total		30
9	Bangka Belitung	-	-
10	Kepulauan Riau	Natuna	2
	Sub Total		2
11	DKI Jakarta	-	-
12	Jawa Barat	-	-
13	Jawa Tengah	Rembang	19
		Blora	5
		Wonogiri	31
		Pekalongan	1
	Sub Total		56
14	DI Yogyakarta	Sleman	21
		Kulonprogo	9
		Gunung Kidul	4
	Sub Total		34
15	Jawa Timur	Tuban	25
		Nganjuk	1
		Sidoarjo	1
		Ponorogo	2
		Madiun	1
		Bojonegoro	19

Lanjutan Tabel 4.6

No.	Provinsi	Kabupaten	Jumlah Embung Potensi
1	2	3	4
		Bangkalan	1
		Lamongan	164
		Gresik	32
		Sub Total	246
16	Banten	-	-
17	Bali	Bangli	2
		Jembrana	8
		Gianyar	2
		Klungkung	1
		Buleleng	4
		Karangasem	5
		Badung	4
		Tabanan	3
		Sub Total	29
18	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat	7
		Lombok Tengah	190
		Lombok Timur	132
		Sumbawa	49
		Dompu	21
		Bima	22
		Sub Total	421
19	Nusa Tenggara Timur	Kupang	22
		Timor Tengah Selatan	11
		Toimor Tengah Utara	11
		Belu	14
		Alor	17
		Kupang	23
		Lembata	9
		Flores Timur	6
		Sikka	13
		Ende	7
		Ngada	7
		Sumba Timur	18
		Sumba Barat	7
		Sub Total	165
20	Kalimantan Barat	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-
22	Kalimantan Selatan	-	-
23	Kalimantan Timur	-	-
24	Sulawesi Utara	-	-
25	Sulawesi Tengah	Kodya Palu	6
		Morowali	3
		Banggai	3
		Banggai Kepulauan	3
		Poso	2
		Sub Total	17

Lanjutan Tabel 4.6

No.	Provinsi	Kabupaten	Jumlah Embung Potensi
1	2	3	4
26	Sulawesi Selatan	Maros	3
		Gowa	3
		Takalar	4
		Jeneponto	6
		Bantaeng	5
		Bulukumba	5
		Bone	6
		Barru	5
		Enrekang	6
		Soppeng	5
		Wajo	4
		Sidenreng Rappang	12
		Sinjai	10
		Sub Total	
27	Sulawesi Tenggara	Kendari	9
		Kolaka	1
		Sub Total	10
28	Gorontalo	-	-
29	Sulawesi Barat	Maros	3
		Gowa	3
		Mamuju Utara	4
		Mamuju	6
		Mamasa	5
		Polewalimamasa	5
		Bone	6
		Barru	5
		Enrekang	6
		Soppeng	5
		Wajo	4
		Sidenreng Rappang	12
		Sinjai	10
		Sub Total	
30	Maluku	Maluku Tengah	13
	Sub Total		13
31	Maluku Utara	-	-
32	Irian Jaya Barat	-	-
33	Papua	Supiori	8
		Paniai	8
		Sorong	8
		Sub Total	24
	Indonesia		1.266

Sumber : <http://sda.pu.go.id/list.php?page=embungpotensi>

Direkap tanggal 27 Januari 2010 oleh Pusdata

Tabel 4.7
Jumlah Embung Berdasarkan Provinsi Di Indonesia

No.	Provinsi	Kabupaten	Jumlah Embung
1	2	3	4
1	Nanggroe Aceh Darussalam	Pidie	9
		Aceh Tenggara	1
		Kota Subulussalam	1
		Aceh Tengah	1
		Aceh Utara	2
		Bireun	5
	Sub Total		19
2	Sumatera Utara	-	-
3	Sumatera Barat	Padangpariaman	1
		Limapuluhkoto	5
		Agam	4
		Pesisir Selatan	2
		Tanahdatar	5
		Swahlunto	4
		Dharmasraya	3
		Solok	3
			Sub Total
4	Riau	-	-
5	Jambi	-	-
6	Sumatera Selatan	-	-
7	Bengkulu	-	-
8	Lampung	Lampung Selatan	13
		Lampung Barat	1
		Lampung Tengah	7
		Tulangbawang	15
		Lampung Utara	6
		Waykanan	7
	Sub Total		49
9	Bangka Belitung	Kota Pangkalpinang	1
	Sub Total		1
10	Kepulauan Riau	Kota Batam	7
	Sub Total		7
11	DKI Jakarta	-	-
12	Jawa Barat	-	-
13	Jawa Tengah	Brebes	29
		Wonogiri	46
		Blora	5
		Pemalang	34
		Tegal	23
		Semarang	5
		Demak	5
		Kudus	1
		Pati	42
	Jepara	1	

Lanjutan Tabel 4.7

No.	Provinsi	Kabupaten	Jumlah Embung
1	2	3	4
		Boyolali	6
		Karanganyar	1
		Purworejo	26
		Cilacap	22
		Rembang	22
		Banyumas	6
		Kebumen	1
	Sub Total		275
14	DI Yogyakarta	Gunung Kidul	2
		Kulonprogo	1
		Sleman	10
	Sub Total		13
15	Jawa Timur	Pacitan	2
	Sub Total		2
16	Banten	-	-
17	Bali	Karangasem	1
	Sub Total		1
18	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah	62
		Lombok Timur	37
		Lombok Barat	8
		Sumbawa	24
		Dompu	8
		Lombok Utara	2
		Bima	7
	Sub Total		148
19	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Utara	57
		Timor Tengah Selatan	62
		Sikka	16
		Ende	16
		Ngada	27
		Lembata	1
		Manggarai	2
		Belu	23
		Sumba Timur	11
		Sumba Barat	13
		Reotendo	1
		Alor	2
		Kupang	86
	Sub Total		317
20	Kalimantan Barat	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-
22	Kalimantan Selatan	-	-
23	Kalimantan Timur	-	-
24	Sulawesi Utara	-	-
25	Sulawesi Tengah	-	-

Lanjutan Tabel 4.7

No.	Provinsi	Kabupaten	Jumlah Embung
1	2	3	4
26	Sulawesi Selatan	Bone	2
		Wajo	4
		Sidrap	5
		Jeneponto	9
		Soppeng	2
		Pare-Pare	1
		Bulukumba	3
		Selayar	3
		Maros	4
		Gowa	1
		Takalar	8
		Bantaeng	3
		Baruu	3
		Enrekang	4
		Luwu Timur	2
		Tator	1
Polman	1		
Sinjai	1		
	Sub Total		57
27	Sulawesi Tenggara	Kolaka	2
		Konawe Selatan	16
		Wakatobi	1
		Bombana	1
	Sub Total		20
28	Gorontalo	-	-
29	Sulawesi Barat	Bone	2
		Wajo	4
		Sidrap	5
		Mamuju	9
		Soppeng	2
		Pare-Pare	1
		Polewalimamasa	3
		Majene	3
		Maros	4
		Gowa	1
		Mamuju Utara	8
		Mamasa	3
		Barru	3
		Enrekang	4
		Luwu Timur	2
		Tator	1
Polman	1		
Sinjai	1		
	Sub Total		57
30	Maluku	Maluku Tenggara Barat	34
	Sub Total		34

Lanjutan Tabel 4.7

No.	Provinsi	Kabupaten	Jumlah Embung
1	2	3	4
31	Maluku Utara	-	-
32	Papua Barat	-	-
33	Papua	Supiori	8
		Sorong	13
	Sub Total		21
	Indonesia		1.048

Sumber : <http://sda.pu.go.id/list.php?page=embung>

Direkap tanggal 27 Januari 2010 oleh Pusdata

Tabel 4.8
Jumlah Bendung Berdasarkan Provinsi Di Indonesia
Tahun 2010

No.	Provinsi	Kabupaten	Jumlah Bendung
1	2	3	4
1	Nanggroe Aceh Darussalam	Aceh Besar	6
		Aceh Barat	2
		Pidie	4
		Bireun	2
		Aceh Selatan	2
		Aceh Utara	3
		Aceh Timur	2
		Aceh Tenggara	2
		Aceh Tengah	1
	Sub Total		24
2	Sumatera Utara	-	-
3	Sumatera Barat	-	-
4	Riau	-	-
5	Jambi	-	-
6	Sumatera Selatan	-	-
7	Bengkulu	-	-
8	Lampung	-	-
9	Bangka Belitung	-	-
10	Kepulauan Riau	-	-
11	DKI Jakarta	-	-
12	Jawa Barat	-	-
13	Jawa Tengah	Demak	2
		Jepara	1
		Kota Surakarta	1
		Purworejo	14
		Wonosobo	1
		Banyumas	1
	Sub Total		20
14	DI Yogyakarta	Kulonprogo	11
		Gunung Kidul	2
		Sleman	2012
	Sub Total		2025
15	Jawa Timur	Magetan	4
		Ponorogo	4
		Jombang	1
		Kota Surabaya	2
		Situbondo	2
	Sub Total		13
16	Banten	Lebak	62
		Serang	11
		Kota Cilegon	1
		Kota Tangerang	3

Lanjutan Tabel 4.8

No.	Provinsi	Kabupaten	Jumlah Bendung
1	2	3	4
		Pandeglang	166
	Sub Total		243
17	Bali	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram	6
		Lombok Barat	40
		Lombok Tengah	27
		Lombok Timur	118
		Sumbawa	28
		Dompu	15
		Bima	25
	Sub Total		259
19	Nusa Tenggara Timur	-	-
20	Kalimantan Barat	Sintang	18
	Sub Total		18
21	Kalimantan Tengah	Barito Selatan	5
		Barito Utara	5
	Sub Total		10
22	Kalimantan Selatan	-	-
23	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	4
		Malinau	1
		Bulungan	6
		Kota Balikpapan	1
		Pasir	2
		Kutai Kartanegara	5
	Sub Total		19
24	Sulawesi Utara	-	-
25	Sulawesi Tengah	Donggala	44
		Parigimoutong	35
		Poso	35
		Banggai Kepulauan	26
		Buol	24
	Sub Total		164
26	Sulawesi Selatan	-	-
27	Sulawesi Tenggara	-	-
28	Gorontalo	-	-
29	Sulawesi Barat	-	-
30	Maluku	-	-
31	Maluku Utara	-	-
32	Papua Barat	-	-
33	Papua	Merauke	1
	Sub Total		1
	Indonesia		2.796

Sumber : http://www.pu.go.id/satminkal/index.asp?Site_id=10306

Direkap tanggal 25 Januari 2010 oleh Pusdata

Tabel 4.9
Hasil-hasil Pembangunan Bidang Sumber Daya Air
Tahun 2005-2009

No.	Nama Provinsi	Jenis Pembangunan	Lokasi	Keterangan
1	2	3	4	5
1	NAD	Bendungan Keuliling	± 35 km dari pusat kota Banda Aceh ke arah Medan, Desa Baj Sukon, Kecamatan Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar	Memenuhi kebutuhan irigasi di Krueng Aceh Extention dan Krueng Jreue seluas 3.159 Ha. Menunjang peningkatan areal sawah tadah hujan menjadi sawah beririgasi teknis, yaitu : a. Di Keuliling Hilir 1.053 Ha b. Di Keuliling Hulu 578 Ha. Luas daerah tangkapan air : 38 km ² . Tampungannya efektif : 12.900.000 m ³ . Tinggi Bendungan : 25 m. Panjang Bendungan : 689 m. Genangan Bendungan : 260 Ha.
2	Sumatera Utara	Pengendalian Banjir Medan	Tujuh kecamatan di Kabupaten Deli Serdang, yaitu : Pancur Batu, Nambo Rambe, Patumbak, Deli Tua, Labuhan Deli, Percut Sei Tuan, dan Pantai Labu	Melindungi areal seluas 906 km ² , mengurangi kerugian, mengamankan daerah industri, permukiman, dan transportasi. Normalisasi sungai sepanjang 34.420 m dan pembangunan bendung. Perlindungan jembatan di 3 lokasi dan pembangunan 20 buah jembatan. Pembuatan pintu air di 6 lokasi, gorong-gorong di 7 lokasi, serta pemasangan pipa drainase di 27 lokasi.
3	Sumatera Barat	Peningkatan Jaringan Irigasi Panti Rao	± 196 km arah utara Kota Padang, Kecamatan Panti, Padang Gelugur, Rao Selatan	Meningkatkan intensitas tanam dari 152 % jadi 200 % atau dapat melebihi dua kali tanam dalam 1 tahun. Meningkatkan hasil produksi dari 3,2 hingga 5 ton/Ha.
		Irigasi Batanghari	Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya	Bangunan irigasi : 450. Saluran Primer : 7,29 km. Saluran Sekunder : 60,97 km. Saluran Drainase : 56,27 km. Jaringan Tersier & Sawah : 13,953 Ha.
4	Riau	Pengendalian Banjir di Sungai Siak Rokan	Pekanbaru	Pembangunan pompa banjir dan pengamanan tebing Sungai Siak Rokan.
5	Jambi	Pengendalian Banjir di Sungai Batang Merao	Kabupaten Kerinci	Pembuatan tanggul banjir Sungai Batang Merao sepanjang 3.000 m.

Lanjutan Tabel 4.9

No.	Nama Provinsi	Jenis Pembangunan	Lokasi	Keterangan
1	2	3	4	5
6	Sumatera Selatan	Peningkatan Jaringan Irigasi Komerling	Sungai Komerling dan hulu Danau Ranau	Mengairi lahan pertanian seluas 75.000 Ha.
		Rehabilitasi Rawa Pasang Surut Air Sugihan Kiri	Kabupaten Banyuasin	Rehabilitasi pintu air dan saluran SPD sepanjang 11.550 m, serta saluran SPU sepanjang 11.550 m. Produksi pangan meningkat dari 4 menjadi 5 ton/Ha.
		Peningkatan Jaringan Rawa Telang I & II	Kecamatan Muba II & Talang Kelapa, Kabupaten Bayuasin	Mendongkrak produksi padi masyarakat dari 2-4 ton/Ha menjadi 5-7 ton/Ha. Luas areal sawah sebesar 26.680 Ha. Luas sawah 14.848 Ha.
7	Bengkulu	Pengamanan Pantai Air Pungkur-Air Dikit	Kabupaten Muko-Muko	Mengamankan sarana infrastruktur vital seperti jalan dan permukiman sepanjang 1,1 km di sekitar Pantai Air Pungkur-Air Dikit.
8	Bangka Belitung	Pengamanan Pantai Batu Belubang	Kabupaten Bangka Tengah	Pembangunan talud sepanjang 1.000 m.
9	Lampung	Peningkatan Jaringan Irigasi Komerling		Mengairi lahan pertanian seluas 50.000 Ha.
		Pengamanan Pantai Way Penet	Kabupaten Lampung Timur	Pembuatan bangunan pelindung pantai untuk melindungi permukiman penduduk sebanyak 750 KK & infrastruktur vital lainnya.
10	Kepulauan Riau	Konservasi Pulau Nipa	Perbatasan Indonesia dengan Singapura dan Malaysia, sebelah barat laut dari Pelabuhan Sekupang di Batam	Pembuatan tanggul laut di sekeliling pulau dengan elevasi + 5,2 m sepanjang 4,3 km. Penimbunan pulau dibagi 3 zona, 15 Ha Zona Utara, 12 Ha Zona Hutan Bakau, & 16 Ha Zona Selatan.
11	DKI Jakarta	Banjir Kanal Timur	Melintasi Jakarta Timur hingga Jakarta Utara	Sepanjang 23,5 km sebagai pengendali banjir di wilayah Jakarta dan kawasan konservasi air.
		Banjir Kanal Barat	Pintu Air Manggarai melintasi Pusat Provinsi DKI Jakarta hingga Muara Angke	Pengendali banjir dengan daerah tangkapan air seluas 453 km ² , dan panjang 18 km.
12	Jawa Barat	Pembangunan Bendungan Jatigede	Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang	Mengairi areal irigasi seluas 90.000 Ha. Menyediakan air bersih dengan kapasitas 3.500 lt/dt Menghasilkan listrik 690 GWH per tahun. Tinggi bendungan : 110 m. Kapasitas tampung : 980 juta m ³ . Panjang bendungan 1.715 m.
		Arboretum Mata Air Cimanuk	Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut	Memiliki koleksi sebanyak ±8.000 pohon. Luas 10 Ha pada kawasan perbukitan di ketinggian 1.200 m di atas permukaan laut.
13	Jawa Tengah	GN-KPA (Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air) Sub DAS Keduang	Sub Daerah Aliran Sungai Keduang, Wilayah Sungai Bengawan Solo	Pembangunan check-dam di Kali Keduang, bangunan terjun, pengamanan tebing, dan terasering di 9 desa.

Lanjutan Tabel 4.9

No.	Nama Provinsi	Jenis Pembangunan	Lokasi	Keterangan
1	2	3	4	5
14	DI Yogyakarta	Pembangunan Embung Tambakboyo	Desa Tambakboyo, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman	Pembangunan 20 buah check-dam di 9 desa (tahun 2009). Sarana konservasi sumber air dan penyedia air baku dengan volume tampungan hingga 400.000 m ³ , dan luas genangan 7,8 Ha. Tinggi 9 m dan lebar 25 m.
		Sabo Dam Kali Kuning	Desa Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman	Pengendali sedimen jika terjadi banjir lahar dingin dari Gunung Merapi dengan daya tampung sedimen hingga 191.700 m ³ . Panjang 114 m dan tinggi 14,5 m.
		Jaringan Air Tanah Bribin	Kabupaten Gunung Kidul	Sungai Bawah Tanah Bribin dengan potensi debit sebesar 750 liter/detik. Memenuhi kebutuhan air bersih penduduk sebanyak ±79.000 jiwa atau sekitar 6.000 kepala keluarga.
15	Jawa Timur	Sabo Dam Gunung Kelud	Kabupaten Kediri dan Blitar	Pembangunan 3 bangunan check-dam dan 2 bangunan dam konsolidasi di Kali Lekso dengan volume tampungan 3,2 juta m ³ . Perbaiki 1 buah dam konsolidasi di Kali Semut dan 2 check-dam di Kali Badak dengan volume tampungan 4 juta m ³ .
		Pembangunan Bendungan Kedung Brubus	Kabupaten Madiun	Memenuhi kebutuhan air baku bagi ±22 ribu jiwa penduduk sekitar. Kapasitas tampung : 2,03 juta m ³ . Tinggi bendungan : 20 m. Lebar bendungan : 8 m. Panjang bendungan : 146 m.
16	Bali	Pengamanan Pantai Bali	Kawasan Pantai Sanur, Kuta, Padanggalak, dan Pura Tanah Lot	Mencegah hilangnya tanah bangunan akibat abrasi, melindungi kawasan permukiman, hotel, jalan raya, tempat peribadatan, dan mendukung pengembangan pariwisata.
		Bendungan Telaga Tunjung	Kabupaten Tabanan	Memenuhi kebutuhan irigasi untuk areal seluas 1.335 Ha. Penyedia air untuk Desa Brembeng (26,5 Ha) sebesar 24 liter/detik. Penyedia air untuk Kecamatan Selemadeg, Kerambitan, dan Tabanan sebesar 46 liter/detik. Tinggi bendungan : 33 m. Kapasitas tampung : 1.261.000 m ³ . Luas area tangkapan : 81,5 km ² . Luas genangan : 16,5 Ha.

Lanjutan Tabel 4.9

No.	Nama Provinsi	Jenis Pembangunan	Lokasi	Keterangan
1	2	3	4	5
17	Banten	Rehabilitasi Situ Cikedal	Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang	Luas 22 Ha, untuk peningkatan pemanfaatan sumber daya air dan pemeliharaan preventif.
18	Nusa Tenggara Barat	Pembangunan Embung Tibu Kuning	Dusun Berambang, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat	Peningkatan intensitas tanam dari 150% (83 Ha) menjadi 200% (235 Ha). Pemenuhan kebutuhan air untuk tambak tradisional seluas 20 Ha. Pemenuhan kebutuhan air baku sebesar 2 liter/detik untuk pelayanan ±2000 jiwa. Pemenuhan kebutuhan irigasi seluas 235 Ha. Kapasitas tampung : 1,25 juta m ³ . Luas tampung : 23,01 Ha. Tinggi : 20 m. Panjang puncak : 170 m.
		Pembangunan Jaringan Air Baku Batu Bulan	Dusun Semongkat, Kabupaten Sumbawa	Penyedia air baku dengan kapasitas 160 lt/dt Lebar bendung : 20 m. Tinggi mercu : 1,25 m. Jaringan pipa transmisi : 16.356 km.
		Daerah Irigasi Nangakara	Kabupaten Dompu	Luas : 1.065 Ha. Terdiri dari DI Sorinangka kiri (347 Ha), DI Sorinomo kanan (223 Ha) dan kiri (190 Ha), serta DI Nangkara kanan (305 Ha). Meningkatkan intensitas tanam padi dan palawija hingga 200%. Tiga bendung pemasok air : a. Sorinangka (lebar 18,5 m; tinggi 1,75 m) b. Sorinomo (lebar 18,5 m; tinggi 2,35 m) c. Nangkara (lebar 26,9 m; tinggi 1,2 m).
19	Nusa Tenggara Timur	Pembangunan Embung Danau Tua	Kabupaten Rote Ndao	Panjang mercu : 3,2 m. Tinggi mercu : 5,5 m. Kapasitas tampung : 1,81 juta m ³ . Luas daerah genangan : 102 Ha.
		Rehabilitasi Embung Lokojange	Kabupaten Sumba Barat	Tinggi : 14,8 m. Luas genangan : 9,9 Ha. Kapasitas tampung : 405.000 m ³ . Panjang mercu : 178 m. Lebar mercu : 6 m.

Lanjutan Tabel 4.9

No.	Nama Provinsi	Jenis Pembangunan	Lokasi	Keterangan
1	2	3	4	5
20	Kalimantan Barat	Pemecah Gelombang & Bangunan Pengamanan Pantai Pontianak-Singkawang	Pantai Pontianak, Singkawang	Melindungi kawasan pantai dan permukiman di sekitarnya seluas 75 Ha dari abrasi. Meliputi pembangunan pemecah gelombang sepanjang 755 m setinggi 2,3 m. Bangunan sepanjang 755 m terdapat di 4 lokasi : a. Desa Penibungan 135 m b. Desa Malikian 100 m c. Belakang Pasar Semudun 316 m d. Belakang Pasar Sei Kuyit 204 m.
21	Kalimantan Tengah	Rehabilitasi Jaringan Rawa Unit Tatas	Kabupaten Kapuas	Meningkatkan intensitas tanam dari 38,7% menjadi 69,5%. Luas areal tanam meningkat dari 900 Ha menjadi 4032 Ha. Luas potensial lahan : 5.800 Ha. Luas fungsional : 4.032 Ha.
22	Kalimantan Selatan	Peningkatan Jaringan Irigasi Amandit	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pembangunan bendung setinggi 3,2 m dan panjang 47,8 m. Saluran utama sepanjang 26.852 km dengan 129 unit bangunan. Saluran sekunder sepanjang 49.784 km dengan 158 unit bangunan. Mengairi daerah irigasi seluas 5.500 Ha.
		Rehabilitasi Polder Rawa Alabio	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Pembuatan 1 buah pintu intake, saluran primer pemberi 8.200 m, sekunder pemberi 9,7 m, tersier pemberi 33,1 m, primer pembuang 30,8 m, sekunder pembuang 13 m, tersier pembuang 25.682 m, 5 unit pompa pemberi berkapasitas 2,5 m ³ /detik. Mengairi daerah irigasi seluas 6.000 Ha. Meningkatkan hasil produksi dari 2,15 menjadi 5 ton/Ha. Meningkatkan intensitas tanam menjadi 200%.
23	Kalimantan Timur	Bendungan Pengendali Banjir I, II dan III	Kecamatan Balikpapan Selatan	Bendali I : Tinggi : 6,5 m ; Panjang : 194,2 m Luas genangan : 16,53 Ha Kapasitas tampung : 191.491 m ³ . Bendali II : Tinggi : 12 m ; Panjang : 158,12 m Luas genangan : 73,49 Ha Kapasitas tampung : 351.524 m ³ .

Lanjutan Tabel 4.9

No.	Nama Provinsi	Jenis Pembangunan	Lokasi	Keterangan
1	2	3	4	5
		Bendungan Manggar	Kecamatan Balikpapan Utara	<p>Bendali III : Panjang : 134,66 m ; Luas genangan : 18,6 Ha Kapasitas tampung : 341.524 m³. Meningkatkan produksi air baku dari 500 menjadi 900 lt/dt Luas DAS Manggar 50.000 km². Kapasitas tampung : 14,2 juta m³. Luas genangan 403 Ha. Panjang : 350 m. Tinggi : 1,5 m. Elevasi puncak : 13,4 m.</p>
		Normalisasi Sungai Karang Mumus	Kota Samarinda	<p>Sungai Karang Mumus memiliki panjang 15 km dan DAS seluas 322,2 km². Pengadaan & pemancangan sheet pile sepanjang 46 m & tiang pancang sedlm 31 m Pekerjaan beton struktur K-225 untuk continuous dead end, diafragma, walling beam, dan capping beam.</p>
24	Sulawesi Utara	Bendung Sangkub	Kecamatan Sangkub dan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow	<p>Mengairi daerah irigasi seluas 3.601 Ha. Lebar : 100 m. Tinggi : 4,5 m. Panjang saluran primer : 21.935 m.</p>
		Pengamanan Pantai Teluk Tahuna	Kabupaten Sangihe	<p>Pembangunan pengaman sepanjang 480 m tahun 2008. Pembangunan pengaman sepanjang 200 m tahun 2009.</p>
25	Sulawesi Tengah	Jaringan Irigasi Parigi	±30 km ke arah timur dari kota Palu, Kab. Donggala	Mengairi DI Parigi seluas 192,8 Ha.
26	Sulawesi Selatan	Bendungan Ponre-Ponre	Kabupaten Bone	<p>Meningkatkan lahan irigasi teknis seluas 4.411 Ha. Daerah tangkapan : 78 km². Tinggi : 55 m. Volume : 480.000 m³. Luas genangan : 295 Ha.</p>
		Revitalisasi Pantai Losari	Pesisir barat Kota Makassar	<p>Reklamasi P. Losari Makassar sepanjang 950 m Areal seluas 106.821 m² diratakan dan dipadatkan</p>

Lanjutan Tabel 4.9

No.	Nama Provinsi	Jenis Pembangunan	Lokasi	Keterangan
1	2	3	4	5
		Sabo Dam Bawakaraeng	Gunung Bawakaraeng di Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa	Pembangunan 2 bangunan jembatan, 2 bangunan serbaguna & konsolidasi, 2 bangunan dam konsolidasi, & 7 bangunan sabo dam
		Peningkatan Jaringan Suplesi Rawa Tambak Malili	Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur	Pembuatan saluran primer pembawa sepanjang 4.649 m, primer pembuang sepanjang 5.748 m dan sekunder pembawa sepanjang 3.345 m. Pembangunan jembatan sepanjang 102 m dan jalan produksi sepanjang 3.500 m. Luas potensial : ±2.000 Ha. Luas efektif : 1.000 Ha.
27	Sulawesi Tenggara	Pemb. Jaringan Irigasi Air Tanah Konawe Sel.	Kabupaten Konawe Selatan	Mengairi sawah seluas 320 Ha di Basala & Lipumasagena
28	Gorontalo	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Wonosari	±90 km dari Kota Gorontalo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo	Luas daerah irigasi 223 Ha dengan pembangunan jaringan irigasi air tanah dan 9 unit rumah pompa.
29	Sulawesi Barat	Pembangunan Jaringan Rawa Tambak Budong-Budong	Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju	Mendukung produksi kolam tambak yang sudah dimanfaatkan oleh ±352 KK sejak 25 tahun lalu. Luas potensial : 1.500 Ha. Luas fungsional : 1.500 Ha. Dengan saluran suplai sepanjang 7.363 m dan drainase sepanjang 5.102 m, diharapkan dapat meningkatkan intensitas produksi menjadi 2 kali setahun.
30	Maluku	Pembangunan Bendung Way Geren	Desa Way Geren, Kecamatan Wae Apo, Kab. Buru	Lebar bendung : 70 m. Memiliki 2 buah penguras (kanan dan kiri) serta 2 buah intake, yaitu intake kiri yang berkapasitas 4,3 m ³ /detik dan intake kanan 3.8 m ³ /detik. Meningkatkan luas fungsional dari 750 Ha menjadi 3892 Ha. Meningkatkan hasil pertanian dari 2,5 menjadi 5 ton/Ha.
31	Maluku Utara	Pengamanan Pantai Daeo	Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Halmahera Utara	Meningkatkan intensitas tanam per th dari 150% jadi 300%. Pembangunan tembok penahan ombak sepanjang 200 m (tahun 2007), 300 m (tahun 2008), dan 440 m (tahun 2009).
		Pembangunan Daerah Irigasi Kobe	Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah	Luas daerah irigasi : 1.082 Ha. Lebar mercu pelimpah : 57 m. Tinggi mercu bendung : 3,6 m. Saluran primer : 266,61 m. Saluran sekunder : 17.690 m.

Lanjutan Tabel 4.9

No.	Nama Provinsi	Jenis Pembangunan	Lokasi	Keterangan
1	2	3	4	5
32	Papua Barat	Perkuatan Tebing dan pengendalian Banjir Sungai Waisai	Kabupaten Raja Ampat	Panjang perkuatan tebing : 2.106 m.
		Pengamanan Pantai Waisai dan Samat	Kabupaten Raja Ampat	Panjang konstruksi pengamanan 1000 m di Pantai Waisai dan 212 m di Pantai Samat.
33	Papua	Pembangunan Bendung Kalibumi	Kabupaten Nabire	Mengairi daerah irigasi seluas 6.400 Ha (Jaringan Kalibumi Kanan 4.400 Ha dan Jaringan Kalibumi Kiri 2.000 Ha). Lebar bendung : 60 m.
		Pengamanan Pantai Bosnik	Kabupaten Biak Numfor	Panjang konstruksi pengamanan mencapai 1.765 m
		Daerah Rawa Tanah Miring	Tanah Miring, Kabupaten Merauke	Pembangunan jaringan seluas 400 Ha tahun 2006.
		Peningkatan Jaringan Daerah Rawa Kurik	Distrik Kurik, Kabupaten Merauke	Meningkatkan produksi pertanian, meningkatkan taraf hidup petani, menunjang program permukiman, meningkatkan lapangan kerja, dan pemberdayaan desa tradisional.

Sumber : Kinerja 2005-2009, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Departemen Pekerjaan Umum, 2009

Tabel 4.10
Data Bencana (Banjir & Tanah Longsor) dan Bangunan Sumber Daya Air
(Status Bencana 1 November 2009 - 30 April 2010)

No.	Provinsi	Frekuensi Bencana (banjir + tanah longsor)	Luas Wilayah Terendam (Ha)	Jumlah Bangunan Terendam (unit)	Bangunan SDA (buah)
1	2	3	4	5	6
1	N A D	10	582	6.197	60
2	Sumatera Utara	32	1.421	6.560	107
3	Sumatera Barat	21	543	1.816	91
4	Sumatera Selatan	15	15.541	11.729	17
5	Riau	13	1.702	22.923	33
6	Kepulauan Riau	0	0	0	12
7	Jambi	18	2.392	12.434	14
8	Bengkulu	1	100	125	8
9	Lampung	9	426	4.998	120
10	Bangka Belitung	2	26	207	556
11	DKI Jakarta	25	48	8.035	49
12	Banten	30	33.963	26.550	336
13	Jawa Barat	94	14.742	70.507	194
14	Jawa Tengah	79	7.902	21.037	382
15	D.I.Y.	2	0	12	2.175
16	Jawa Timur	94	6.600	31.600	129
17	Kalimantan Timur	8	199	7.975	61
18	Kalimantan Tengah	6	2	909	58
19	Kalimantan Barat	2	0	20	73
20	Kalimantan Selatan	18	4.836	44.086	4
21	Bali	3	0	17	29
22	NTB	0	0	0	462
23	NTT	11	43	948	390
24	Sulawesi Selatan	15	354	3.280	85
25	Sulawesi Tengah	5	338	1.132	184
26	Sulawesi Tenggara	3	0	91	41
27	Gorontalo	1	2	308	5
28	Sulawesi Utara	3	0	216	35
29	Sulawesi Barat	3	262	499	73
30	Maluku	3	101	275	43
31	Maluku Utara	1	0	32	1
32	Papua	2	10	27	49
33	Papua Barat	1	0	0	0
Total		530	92.135	284.545	5.876

Sumber : Posko Bencana Kementerian PU & http://www.pu.go.id/satminkal/index.asp?Site_id=10306

Tabel : 4.49
Daftar Status Perda RTRW di Indonesia

No.	Provinsi	Total Wilayah	Jumlah Perda RTRW									Keterangan
			Lingkup			Proses Revisi RTRW		Proses Persetujuan Substansi		Mendapat Persetujuan Substansi	Perda RTRW	
			Prov	Kab	Kota	Belum Revisi	Proses Revisi	Rekomendasi Provinsi	Persetujuan di BKPRN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Bali	10	1	8	1	-	4	3	2	-	-	1 Perda No.16/2009 (Prov. Bali)
2	Banten	9	1	4	4	-	4	-	5	-	-	-
3	Bengkulu	11	1	9	1	-	8	2	1	-	-	-
4	DI Yogyakarta	6	1	4	1	-	1	1	2	-	-	2 Perda No.2/2010 (Prov. DIY) Perda No.2/2010 (Kota Yogyakarta)
5	DKI Jakarta	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
6	Gorontalo	7	1	5	1	-	2	3	2	-	-	-
7	Jambi	12	1	9	2	-	11	-	1	-	-	-
8	Jawa Barat	27	1	17	9	-	7	16	1	1	-	2 Perda No.19/2008 (Kab. Bogor) Perda No.3/2008 (Kab. Bandung)
9	Jawa Tengah	36	1	29	6	-	7	23	5	-	-	1 Perda No.6/2010 (Prov. JaTeng)
10	Jawa Timur	39	1	29	9	-	7	8	16	5	-	3 Perda No.10/2009 (Kab. Bangkalan) Perda No.9/2009 (Kab. Sidoarjo) Perda No.2/2010 (Kota Probolinggo)
11	Kalimantan Barat	15	1	12	2	-	15	-	-	-	-	-
12	Kalimantan Selatan	14	1	11	2	-	10	3	1	-	-	-
13	Kalimantan Tengah	15	1	13	1	1	13	-	1	-	-	-
14	Kalimantan Timur	15	1	10	4	-	13	1	1	-	-	-
15	Kep. Babel	8	1	6	1	-	7	1	-	-	-	-
16	Kep. Riau	8	1	5	2	-	4	3	1	-	-	-
17	Lampung	15	1	12	2	-	12	1	-	1	-	1 Perda No.1/2010 (Prov. Lampung)
18	Maluku	12	1	9	12	-	1	1	8	2	-	-
19	Maluku Utara	10	1	7	2	-	3	4	2	1	-	-
20	NA Darussalam	24	1	18	5	-	20	3	-	-	-	1 Perda No.4/2009 (Kota Banda Aceh)
21	Nusa Tenggara B	11	1	8	2	-	9	1	-	-	-	1 Perda No.3/2010 (Prov. NTB)
22	Nusa Tenggara T	22	1	20	1	1	13	1	3	2	-	2 Perda No.19/2008 (Kab. T. Tengah Utara) Perda No.13/2008 (Kab. Flores Timur)
23	Papua	30	1	28	1	3	17	5	3	-	-	2 Perda No.13/2009 (Kab. Nabire) Perda No.21/2009 (Kab. Jayapura)
24	Papua Barat	12	1	10	1	-	3	8	-	1	-	-

Lanjutan Tabel 4.49

No.	Provinsi	Total Wilayah	Jumlah Perda RTRW									Keterangan		
			Lingkup			Proses Revisi RTRW		Proses Persetujuan Substansi		Mendapat Persetujuan Substansi	Perda RTRW			
			Prov	Kab	Kota	Belum Revisi	Proses Revisi	Rekomendasi Provinsi	Persetujuan di BKPRN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
25	Riau	13	1	10	2	-		9		3	1	-	-	
26	Sulawesi Barat	6	1	5	-	-		5	-		1	-	-	
27	Sulawesi Selatan	25	1	21	3		16	7		1	-			1 Perda No.9/2009 (Prov. Sulsel)
28	Sulawesi Tengah	12	1	10	1	-		10	-		2	-	-	
29	Sulawesi Tenggara	13	1	10	2		2	9		1	1	-	-	
30	Sulawesi Utara	16	1	11	4	-		12		3	1	-	-	
31	Sumatera Barat	20	1	12	7	-		17		1	1	-	-	
32	Sumatera Selatan	16	1	11	4	-		14		1	-	1	-	
33	Sumatera Utara	34	1	25	8	-		26		5	3	-	-	

Sumber : http://www.pu.go.id/satminkal/index.asp?Site_id=10303

Tabel : 4.50
Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau

No.	Pulau	Provinsi	Kota	Fungsi Kota	Jenis Pelayanan	
1	2	3	4	5	6	
1	Sumatera	NAD	Lhokseumawe	PKN	Jasa Pemerintahan, Industri, Pertanian, Pertambangan, Perikanan, Perdagangan, dan Perkebunan	
			Sabang	PKW/ PKSN	Jasa Pemerintahan, Pelayanan administrasi pelintas batas negara <i>transshipment point</i> , Perdagangan, Pertanian, Perikanan, dan Pariwisata	
			Banda Aceh	PKW	Jasa Pemerintahan serta Pusat Pelayanan Sekunder Pertanian, Pariwisata, Perikanan, Perdagangan dan Industri	
			Langsa	PKW	Jasa Pemerintahan, Industri, Pertanian, Pertambangan, Perikanan dan Perkebunan	
			Takengon	PKW	Jasa Pemerintahan, Pertanian, Pariwisata dan Kehutanan	
			Meulaboh	PKW	Jasa Pemerintahan, Pertanian, Perikanan, Pertambangan dan Perkebunan	
			Sumatera Utara	Medan	PKN/ PKSN	Jasa Pemerintahan, Pelayanan administrasi pelintas batas negara <i>transshipment point</i> , Industri, Perkebunan, Perdagangan, Pariwisata, Peternakan, Perikanan dan Pertanian
				Tebingtinggi	PKW	Jasa Pemerintahan, Pertanian dan Perdagangan
				Sidikalang	PKW	Jasa Pemerintahan, Perkebunan, Pertanian dan Peternakan
				Pematang Siantar	PKW	Jasa Pemerintahan, Perkebunan, Pertanian, Industri, Perdagangan dan Pariwisata
				Balige	PKW	Jasa Perkebunan, Pertanian, Industri dan Pariwisata
				Rantau Prapat	PKW	Jasa Pemerintahan, Perkebunan, Kehutanan, Pertanian dan Industri
				Kisaran	PKW	Jasa Pemerintahan, Perkebunan, Kehutanan, Pertanian Perikanan dan Industri
				Sibolga	PKW	Jasa Pemerintahan, Perikanan, Pertambangan, Pariwisata dan Industri
		Padang Sidempuan		PKW	Jasa Pemerintahan, Perkebunan, Pertambangan, Pertanian dan Industri	
		Gunung Sitoli		PKW	Jasa Pemerintahan, Pariwisata, Perikanan dan Pertambangan	
		Sumatera Barat	Tanjung Balai	PKSN	Pelayanan administrasi pelintas batas negara, perdagangan jasa dan <i>transshipment point</i>	
			Padang	PKN	Jasa Pemerintahan, Perdagangan, Industri, Perikanan, Pertanian dan Pariwisata	
			Pariaman	PKW	Jasa Pemerintahan, Perikanan, Pertanian, Pariwisata dan Pariwisata	
			Bukittinggi	PKW	Jasa Pemerintahan, Perkebunan, Pariwisata dan Pertanian	
			Muarasiberut	PKW	Jasa Pemerintahan, Pertanian, Pariwisata, Perdagangan dan Perikanan	
			Sawahlunto	PKW	Jasa Pemerintahan, Pertambangan, Pertanian, Perkebunan dan Pariwisata	
		Riau	Pekanbaru	PKN	Jasa Pemerintahan, Jasa dan Perdagangan, Industri, Perkebunan dan Pertambangan	
			Dumai	PKN/PKSN	Jasa Pemerintahan, Pelayanan administrasi pelintas batas negara, <i>transshipment Point</i> Industri, Pertambangan, Perkebunan, Perdagangan dan Perikanan	
			Bangkinang	PKW	Jasa Industri, Perkebunan, Pertanian dan Pertambangan	
			Siak Sri Indrapura	PKW	Jasa Pemerintahan, Industri, Perkebunan, Pertanian dan Pertambangan	
			Bengkalis	PKW	Jasa Pemerintahan, Industri, Pertambangan, Perkebunan dan Perikanan	
			Bagan Siapi-api	PKW	Jasa Pemerintahan, Industri, Perdagangan, Perikanan dan Budidaya Kelautan	
			Tembilahan	PKW	Jasa Pemerintahan, Perkebunan, Pertanian, Industri, Perikanan dan Kehutanan	
			Rengat	PKW	Jasa Pemerintahan, Perkebunan, Pertanian, Industri dan Perikanan	
			Pasir Pangarayan	PKW	Jasa Pemerintahan, Industri Migas dan Perkebunan	
			Taluk Kuantan	PKW	Jasa Pemerintahan, Perkebunan, Industri	

Lanjutan Tabel 4.50

No.	Pulau	Provinsi	Kota	Fungsi Kota	Jenis Pelayanan
1	2	3	4	5	6
		Kep. Riau	Batam	PKN/PKSN	Jasa Pemerintahan, Pelayanan administrasi pelintas batas negara transshipment point, Industri, Perdagangan dan jasa, Perikanan dan Pariwisata
			Ranai	PKSN	Pelayanan Administrasi Pelintas Batas Negara, Perdagangan-Jasa dan transshipment Point
			Tanjung Pinang	PKW/PKSN	Jasa Pemerintahan, Pelayanan administrasi pelintas batas negara, transshipment point, pertanian, Kelautan, Pariwisata dan Industri
			Tanjung Balai Karimun	PKW	Jasa Pemerintahan, Pertanian, Kelautan, Pariwisata dan Industri
			Tarempa (Kawasan Natuna)	PKW	Jasa Pemerintahan, Pertanian, Kelautan, Pariwisata dan Industri
			Daik Lingga (Kawasan Natuna)	PKW	Jasa Pemerintahan, Pertanian, Kelautan, Pariwisata dan Industri
			Dabo/ Singkep	PKW	Jasa Pemerintahan, Pertanian, Kelautan, Pariwisata dan Industri
			Jambi	Jambi	PKN
		Muara Bulian		PKW	Jasa Pemerintahan, Perkebunan, Pertanian Tanaman Pangan, Pertambangan dan Industri
		Muara Bungo		PKW	Jasa Pemerintahan, Perkebunan, Pertanian Tanaman Pangan, Pariwisata dan Kehutanan
		Sarolangun		PKW	Jasa Pemerintahan, Perkebunan, Industri Pengolahan, Pertambangan
		Sumatera Selatan	Kuala Tungkal	PKW	Jasa Pemerintahan, Perdagangan, Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Industri Pengolahan dan Perikanan
			Palembang	PKN	Jasa Pemerintahan, Pertanian, Industri, Pertambangan, Perikanan dan Perdagangan
			Muara Enim	PKW	Jasa Pemerintahan, Pertanian, Pertambangan dan Perkebunan
			Lahat	PKW	Jasa Pemerintahan, Pertanian, Pertambangan dan Perkebunan
			Lubuk Linggau	PKW	Jasa Pemerintahan, Perdagangan dan Jasa, Pertanian, Perkebunan dan Industri
			Sekayu	PKW	Jasa Pemerintahan, Pertanian, Pertambangan dan Kehutanan
			Kayu Agung	PKW	Jasa Pemerintahan, Pertanian dan Perkebunan
			Baturaja	PKW	Jasa Pemerintahan, Pertanian, Industri dan Pariwisata
			Prabumulih	PKW	Jasa Pemerintahan, Perkebunan, Pertambangan
			Bengkulu	Bengkulu	PKW
		Manna		PKW	Jasa Pemerintahan, Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Industri
		Muko Muko		PKW	Jasa Pemerintahan Perkebunan, Perikanan, Pariwisata Pertambangan
		Bangka Belitung	Pangkal Pinang	PKW	Jasa Pemerintahan, Perdagangan, Perkebunan, Perikanan, Industri dan Pariwisata
			Tanjung Pandan	PKW	Jasa Pemerintahan, Perkebunan, Industri, Perikanan dan Pariwisata
			Muntok	PKW	Jasa Pemerintahan, Perdagangan, Perikanan, Perkebunan
			Manggar	PKW	Jasa Pemerintahan, Pariwisata dan Pertambangan
		Lampung	Bandar Lampung	PKN	Jasa Pemerintahan, Perkebunan, Pariwisata, Industri, Perdagangan dan Perikanan
			Metro	PKW	Jasa Pemerintahan, Perkebunan, Industri, dan Tanaman Pangan
			Kalianda	PKW	Jasa Pemerintahan, Perkebunan, Pariwisata, Perikanan dan Pertanian Tanaman Pangan
			Kota Agung	PKW	Jasa Pemerintahan, Perkebunan, Pertanian Tanaman Pangan dan Pariwisata
			Menggala	PKW	Jasa Pemerintahan, Pertanian, Perkebunan, Agro Industri dan Peternakan
			Kotabumi	PKW	Jasa Pemerintahan, Perdagangan, Pertanian, Industri dan Perkebunan
			Liwa	PKW	Jasa Pemerintahan, Pertanian dan Perkebunan

Lanjutan Tabel 4.50

No.	Pulau	Provinsi	Kota	Fungsi Kota	Jenis Pelayanan
1	2	3	4	5	6
2	Jawa, Bali	Banten	Serang	PKN	Jasa Pemerintahan, perdagangan dan Industri
			Cilegon	PKW	Jasa Pemerintahan, Industri Manufaktur dan Pengolahan serta Pariwisata bahari
			Pandeglang	PKW	Jasa Pemerintahan, Pertanian dan Pariwisata Budaya
			Rangkas Bitung	PKW	Jasa Pemerintahan, Pertanian dan Pariwisata
			Labuan	PKW	Jasa Pemerintahan, Pertanian lahan basah dan Pariwisata bahari dan wisata alam
			Malingping	PKW	Jasa Pemerintahan, Perikanan tambak, Agro-industri dan Pariwisata Bahari
		Jawa Barat-DKI	Metropolitan Jabodetabek	PKN	Jasa Pemerintahan, Keuangan Perdagangan dan Industri
			Metropolitan Bandung	PKN	Jasa Pemerintahan, Pendidikan, Jasa Perdagangan, Pariwisata dan Industri
			Cirebon	PKN	Jasa Pemerintahan, Jasa Pertanian, Perkebunan, Perikanan serta Industri Manufaktur dan Pengolahan
			Pangandaran	PKN	Pusat Pemerintahan, Pariwisata, Perkebunan, Perikanan dan Perikanan Tangkap
			Cianjur	PKW	Jasa Pemerintahan, Pertanian agropolitan, Perdagangan dan Jasa
			Sukabumi	PKW	Jasa Pemerintahan, Pertanian, Perkebunan dan Pariwisata
			Kadipaten	PKW	Jasa Pemerintahan, Perkebunan dan Pertanian tanaman pangan
			Palabuhan Ratu	PKW	Jasa Pemerintahan, Pertanian lahan basah, Industri Perikanan dan Kerajinan Tangan, Pertambangan (emas) dan Pariwisata Bahari
			Purwakarta-Cikampek	PKW	Jasa Pemerintahan, Industri
			Tasikmalaya	PKW	Jasa Pemerintahan, Perikanan Budidaya, Industri Pengolahan dan Pertanian Tanaman Pangan
			Sumedang	PKW	Jasa Pemerintahan dan Pertanian Tanaman Pangan
			Indramayu	PKW	Jasa Pemerintahan, Perkebunan dan Pertanian Tanaman Pangan
			Kuningan	PKW	Jasa Pemerintahan, Perkebunan dan Pertanian Tanaman Pangan
		Jawa Tengah	Semarang	PKN	Jasa Perdagangan, Pemerintahan, Industri Dan Pertanian
			Surakarta	PKN	Jasa Pemerintahan, Perdagangan Dan Pertanian
			Cilacap	PKN	Jasa Pemerintahan, Perikanan Tangkap Dan Pariwisata Bahari
			Boyolali	PKW	Jasa Pemerintahan, Pertanian Dan Agroindustri
			Magelang	PKW	Jasa Pemerintahan, Pertanian Industri Pengolahan Dan Pariwisata
			Salatiga	PKW	Jasa Pemerintahan, Pertanian Industri Dan Pariwisata Alam
			Tegal	PKW	Jasa Pemerintahan, Pertanian Tanaman Pangan ,Industri Dan Perikanan
			Pekalongan	PKW	Jasa Pemerintahan, Pertanian Tanaman Pangan, Industri Pengolahan, Pertambangan Dan Perikanan
			Kudus	PKW	Jasa Pemerintahan, Perdagangan Dan Aneka Industri (Rokok)
			Purwokerto	PKW	Jasa Pemerintahan, Pertanian Tanaman Pangan, Kehutanan Dan Pariwisata Alam
			Kroya	PKW	Jasa Pemerintahan Dan Pertanian Lahan Basah
			Kebumen	PKW	Jasa Pemerintahan Dan Pertanian
			Puworejo	PKW	Jasa Pemerintahan, Pertanian Lahan Basah D An Pariwisata Bahari
			Wonosobo	PKW	Jasa Pemerintahan, Pertanian Lahan Basah, Perkebunan Dan Pariwisata Alam
			Kartosuro	PKW	Jasa Pemerintahan Dan Pertanian Lahan Basah
			Klaten	PKW	Pusat Pelayanan Tersier, Jasa Pemerintahan, Pertanian, Industri Pengolahan Dan Pariwisata

Lanjutan Tabel 4.50

No.	Pulau	Provinsi	Kota	Fungsi Kota	Jenis Pelayanan
1	2	3	4	5	6
			Cepu	PKW	Jasa Pemerintahan Dan Perkebunan Tanaman Tahunan
			Juana-Pati	PKW	Jasa Pemerintahan, Perikanan Dan Pertanian Lahan Basah
			Ambarawa	PKW	Jasa Pemerintahan Dan Pertanian Lahan Basah
		D.I Yogyakarta	Yogyakarta	PKN	Jasa Pemerintahan, Pendidikan, Pariwisata ,Industri Dan Pertanian
			Bantul	PKW	Jasa Pemerintahan, Pertanian, Industri Dan Pariwisata
			Sleman	PKW	Jasa Pemerintahan, Pertanian, Industri Dan Pariwisata
		Jawa Timur	Metropolitan Gerbangkertosusila	PKN	Jasa Pemerintahan, Perdagangan Dan Industri
			Jombang	PKW	Jasa Pemerintahan Dan Pertanian
			Malang	PKW	Jasa Pemerintahan, Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Kehutanan Dan Pariwisata
			Probolinggo	PKW	Jasa Pemerintahan, Pertanian Dan Industri
			Pasuruan	PKW	Jasa Pemerintahan, Pertanian, Industri Dan Pariwisata
			Tuban	PKW	Jasa Pemerintahan, Perikanan, Industri Dan Pertanian
			Tulung Agung	PKW	Jasa Pemerintahan, Kehutanan Dan Pertanian
			Kediri	PKW	Jasa Pemerintahan, Pertanian, Industri Dan Pariwisata Alam
			Situbondo	PKW	Jasa Pemerintahan, Pertanian, Industri Dan Pariwisata
			Madiun	PKW	Jasa Pemerintahan, Pertanian, Perkebunan, Perikanan Dan Industri
			Banyuwangi	PKW	Jasa Pemerintahan, Pertanian, Perikanan Dan Perkebunan
			Sumenep	PKW	Jasa Pemerintahan Dam Pertanian Lahan Kering
			Sampang	PKW	Jasa Pemerintahan, Pertanian Tanaman Pangan, Perikanan Tangkap Dan Perikanan Tambak
		Bali	Denpasar	PKN	Jasa Pemerintahan, Pariwisata Dan Pertanian
			Semarapura	PKW	Jasa Pariwisata Alam Dan Budaya Serta Pertanian Lahan Basah
			Negara	PKW	Jasa Pariwisata Alam Dan Budaya Serta Pertanian Lahan Basah
			Singaraja	PKW	Jasa Pariwisata Alam Dan Budaya,Serta Pertanian Tanaman Pangan
3	Kalimantan	Kalimantan Barat	Pontianak	PKN	Jasa Pemerintahan, Perkebunan, Perdagangan, Agro Industri, Kehutanan, Industri Pengolahan Hasil Hutan, Perikanan Tambak, Pariwisata Serta Pertambangan Galian Logam
			Mempawah	PKW	Jasa Pemerintahan, Pertanian Pangan, Perikanan, Perkebunan Dan Pertambangan
			Singkawang	PKW	Jasa Pemerintahan, Industri, Pertanian, Perkebunan, Perikanan Dan Pertambangan
			Ketapang	PKW	Jasa Pemerintahan, Pertanian, Perkebunan, Perikanan Tambak, Kehutanan, Industri Pengolahan Hasil Hutan Dan Pertambangan Bahan Galian Logam
			Sanggau	PKW	Jasa Pemerintahan,Pertanian,Tanaman Pangan,Perkebunan,Perikanan,Kehutanan Dan Pertambangan Bahan Galian Logam
			Sintang	PKW	Jasa Pemerintahan,Pertanian Tanaman Pangan,Perkebunan Dan Pertambangan Bahan Galian Logam
			Putussibau	PKW	Jasa Pemerintahan,Pertanian,Kehutanan Dan Pariwisata
			Sekadau	PKW	Jasa Pemerintahan,Kehutanan Dan Perkebunan
			Ngabang	PKW	Jasa Pemerintahan Dan Perkebunan
			Nanga Pinoh	PKW	Jasa Pemerintahan,Perkebunan Dan Kehutanan
			Aruk	PKSN	Pelayanan Administrasi Pelintas Batas Negara,Perdagangan-Jasa Dan Transshipment
			Jasa	PKSN	Pelayanan Administrasi Pelintas Negara,Perdagangan-Jasa Dan Transshipment Point

Lanjutan Tabel 4.50

No.	Pulau	Provinsi	Kota	Fungsi Kota	Jenis Pelayanan
1	2	3	4	5	6
			Jagoibabang	PKSN	Pelayanan Administrasi Pelintas Batas Negara,Perdagangan-Jasa Dan Transshipment Point
			Nangabadau	PKSN	Pelayanan Administrasi Pelintas Batas Negara,Perdagangan-Jasa Dan Transshipment Point
			Entikong	PKSN	Pelayanan Administrasi Pelintas Batas Negara,Perdagangan-Jasa Dan Transshipment Point
		Kalimantan Tengah	Palangka Raya	PKN	Jasa Pemerintahan, Perdagangan Pertanian Dan Pertambangan Galian Logam
			Sampit	PKW	Jasa Pemerintahan, Perikanan, Perkebunan, Pertanian Serta Pertambangan
			Pangkalanbun	PKW	Jasa Pemerintahan, Industri Pengolahan Kayu, Perkebunan, Perikanan Tangkap Serta Pertambangan
			Buntok	PKW	Jasa Pemerintahan, Industri Pengolahan Kayu Dan Perkebunan
			Muarateweh	PKW	Jasa Pemerintahan,Pertanian, Perkebunan,Industri Pengolahan Kayu Dan Pertambangan Batubara
			Kuala Kapuas	PKW	Jasa Pemerintahan Dan Pertanian Tanaman Pangan
		Kalimantan Selatan	Banjarmasin	PKN	Jasa Pemerintahan, Perkebunan, Pertambangan Dan Industri
			Amuntai	PKW	Jasa Pemerintahan, Perkebunan Dan Industri Pengolahan Hasil Hutan
			Martapura	PKW	Jasa Pemerintahan, Perkebunan Dan Industri Pertambangan Batubara
			Marabahan	PKW	Jasa Pemerintahan, Permukiman Dan Perkebunan
			Kotabaru	PKW	Jasa Pemerintahan, Perikanan, Kehutanan Hasil Kayu Dan Industri Pariwisata Bahari Dan Pertambangan Batubara, Minyak Bumi Dan Gas
		Kalimantan Timur	Balikpapan	PKN	Jasa Pemerintahan, Pariwisata, Industri Pengolahan, Pertambangan Mineral Dan Gas Bumi
			Samarinda	PKN	Jasa Pemerintahan, Pariwisata Industri Pengolahan Batubara Dan Minyak Serta Pariwisata Bahari
			Bontang	PKN	Jasa Pemerintahan, Perdagangan, Pertambangan Dan Perdagangan
			Long Pahangai	PKSN	Pelayanan Administrasi Pelintas Batas Negara, Perdagangan-Jasa Dan Transshipment Point
			Tanlumbis	PKW	Pelayanan Administrasi Lintas Batas Negara, Kehutanan Dan Transshipment Point
			Tanjung Redep	PKW	Jasa Pemerintahan, Industri, Perkebunan Dan Pertambangan
			Sangata	PKW	Jasa Pemerintahan ,Industri Perkebunan Dan Pertambangan
			Sungai Nyamuk	PKW	Pelayanan Administrasi Pelintas Batas Negara Dan Transshipment Point
			Sangasanga	PKW	Jasa Pemerintahan, Pertambangan Batubara, Perikanan, Pariwisata Bahari Dan Kehutanan
			Tanjung Selor	PKW	Jasa Pemerintahan, Industri Dan Pertambangan Batubara
			Malinau	PKW	Jasa Pemerintahan Dan Perkebunan
			Tanah Grogot	PKW	Jasa Pertambangan Batubara Dan Pendukung Sektor Kehutanan
			Sendawar	PKW	Jasa Perkebunan Dan Pertambangan Batubara
			Tenggarong	PKW	Jasa Pemerintahan Dan Perkebunan
			Penajam	PKW	Jasa Pemerintahan, Perikanan Dan Perkebunan
			Nunukan	PKSN	Pelayanan Administrasi Pelintas Batas Negara,Perdagangan-Jasa Dan Transshipment Point
			Simanggaris	PKSN	Pelayanan Administrasi Pelintas Batas Negara,Perdagangan-Jasa Dan Transshipment Point
			Long Midang	PKSN	Pelayanan Administrasi Pelintas Batas Negara,Perdagangan-Jasa Dan Transshipment Point
			Long Pahanghai	PKSN	Pelayanan Administrasi Pelintas Batas Negara,Perdagangan-Jasa Dan Transshipment Point
4	Sulawesi	Sulawesi Utara	Manado-Bitung	PKN	Jasa Pemerintahan, Perdagangan, Industri, Pertanian, Perkebunan, Pariwisata Dan Perhubungan
			Tomohon	PKW	Jasa Pemerintahan, Perkebunan Dan Pariwisata
			Kotamobagu	PKW	Jasa Pemerintahan, Pertanian Dan Pariwisata

Lanjutan Tabel 4.50

No.	Pulau	Provinsi	Kota	Fungsi Kota	Jenis Pelayanan
1	2	3	4	5	6
			Tondano	PKW	Jasa Pemerintahan, Pertanian, Perkebunan Dan Pariwisata
			Tahunu	PKSN	Administrasi Pelintas Batas Negara, Perdagangan-Jasa Dan Transshipment Point
			Melonguane (P)	PKSN	Administrasi Pelintas Batas Negara, Perdagangan-Jasa Dan Transshipment Point
	Gorontalo		Gorontalo	PKN	Jasa Pemerintahan, Perdagangan, Perikanan, Industri Dan Pariwisata
			Isimu	PKW	Jasa, Perdagangan, Pertanian Dan Kehutanan
			Marisa	PKW	Jasa Pemerintahan, Pertambangan Dan Pariwisata
			Kwandang	PKW	Jasa Pemerintahan, Perkebunan Dan Kehutanan
	Sulawesi Tengah		Palu	PKN	Jasa Pemerintahan Sekunder dan Perdagangan
			Toli-toli	PKW	Jasa Pemerintahan, Perkebunan, Pertanian dan Pelabuhan
			Buol	PKW	Jasa Pemerintahan, Pertanian, Perkebunan dan Perikanan
			Poso	PKW	Jasa Pemerintahan, Pariwisata serta Perdagangan dan jasa
			Luwuk	PKW	Jasa Pemerintahan, Pariwisata dan Perdagangan
			Kolonedale	PKW	Jasa Pemerintahan, Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Pertambangan dan Perdagangan
			Donggala	PKW	Jasa Pemerintahan, Pertanian dan Perkebunan
	Sulawesi Selatan		Metro Makassar-Maros-Sungguminasa-Takalar (Maminasata)	PKN	Jasa, Pemerintahan, Pertanian, Perkebunan, Pariwisata, Perikanan, Perhubungan, Keuangan, Perdagangan dan Industri
			Mamuju	PKW	Jasa Pemerintahan, Perikanan, Pertanian, Perkebunan, Pariwisata dan Perdagangan
			Pare-Pare	PKW	Jasa Pemerintahan, Perikanan, Pertanian, Perkebunan, Pariwisata Industri, dan Perdagangan
			Barru	PKW	Jasa Pemerintahan, Perikanan, Pariwisata, Pertanian dan Perdagangan
			Pangkajene	PKW	Pusat pelayanan sekunder, jasa pemerintahan, perikanan, pariwisata dan perdagangan
			Jeneponto	PKW	Jasa Pemerintahan, Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Peternakan
			Palopo	PKW	Jasa Pemerintahan, Perdagangan, Perkebunan dan Pertanian
			Watampone	PKW	Jasa Pemerintahan, Perdagangan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan
			Bulukumba	PKW	Jasa Pemerintahan, Pertanian, Pariwisata, Perikanan, Perkebunan dan Industri
	Sulawesi Tenggara		Kendari	PKN	Jasa Pemerintahan, Perkebunan, Pariwisata, Perdagangan dan Perikanan
			Unaaha	PKW	Jasa Pemerintahan dan Perkebunan
			Raha	PKW	Jasa Pemerintahan, Perkebunan dan Perikanan
			Kolaka	PKW	Jasa Pemerintahan, Perikanan, Kehutanan dan Perdagangan
			Baubau	PKW	Jasa Pemerintahan, Perkebunan, Pariwisata dan Perikanan
			Lasolo	PKW	Jasa Pemerintahan, Pertambangan dan Pariwisata
			Rarowatu	PKW	Jasa Pemerintahan dan Pertanian

Sumber : http://www.pu.go.id/satminkal/index.asp?Site_id=10303 (Lampiran II : Rancangan Peraturan Presiden Tentang RTR Pulau Strategi Pengembangan Sistem Pusat Permukiman di Pulau)

Catatan : PKN : Pusat Kegiatan Nasional

PKW : Pusat Kegiatan Wilayah

PKSN : Pusat Kegiatan Strategis Nasional

Tabel : 4.51
Kawasan Andalan Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2008

No.	Provinsi	Kawasan Andalan	Sektor Unggulan
1	2	3	4
1	Nanggroe Aceh Darussalam	Banda Aceh dan Sekitarnya Lhokseumawe dan Sekitarnya Pantai Barat Selatan Laut Lhokseumawe-Medan & Sekitarnya	pertanian, pariwisata, industri, perikanan laut industri, pertanian, pertambangan, perikanan, perkebunan pertanian, perikanan, pertambangan, perkebunan perikanan, pertambangan
2	Sumatera Utara	Perkotaan Metropolitan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro) Pematang Siantar dan Sekitarnya Rantau Prapat-Kisaran Tapanuli dan Sekitarnya Nias dan Sekitarnya Laut Lhokseumawe-Medan & Sekitarnya Laut Selat Malaka dan Sekitarnya Laut Nias dan Sekitarnya	industri, perkebunan, pariwisata, pertanian, perikanan perkebunan, pertanian, industri, pariwisata perkebunan, kehutanan, pertanian, perikanan, industri perkebunan, pertambangan, perikanan laut, pertanian, industri, pariwisata pariwisata, perkebunan, perikanan perikanan, pertambangan perikanan, pertambangan
3	Sumatera Barat	Padang Pariaman dan Sekitarnya Agam-Bukit Tinggi (PLTA Kuto Panjang) Mentawai dan Sekitarnya Solok dan Sekitarnya (Danau Kembar Di Atas/ Di Bawah-PIP Danau Singkarak-Lubuk Alung-Ketaping)	industri, perikanan laut, pertanian, pariwisata, perikanan perkebunan, pariwisata, pertanian pertanian, perikanan
4	Riau	Laut Mentawai, Siberut dan Sekitarnya Pekanbaru dan Sekitarnya Duri-Dumai dan Sekitarnya Rengat-Kuala Enok-Taluk Kuantan-Pangkalan Kerinci Ujung Batu-Bagan Batu Laut Selat Malaka dan Sekitarnya	pertambangan, pertanian, perkebunan, pariwisata, industri perikanan laut, pariwisata industri, perkebunan, pertanian, pertambangan industri, perkebunan, perikanan perkebunan, pertanian, industri, kehutanan industri migas, perkebunan perikanan, pertambangan
5	Kepulauan Riau	Zona Batam-Tanjung Pinang & Sekitarnya Natuna dan Sekitarnya Laut Batam dan Sekitarnya Laut Natuna dan Sekitarnya	kelautan, pariwisata, industri, perikanan pertambangan, perikanan laut perikanan, pertambangan, pariwisata perikanan laut, pertambangan, pariwisata
6	Jambi	Muara Bulian Timur Jambi dan Sekitarnya Muara Bungo dan Sekitarnya	perkebunan, pertanian, pertambangan, industri, perikanan, pariwisata perkebunan, pertanian, kehutanan
7	Sumatera Selatan	Muara Enim dan Sekitarnya Lubuk Linggau dan Sekitarnya Palembang dan Sekitarnya Laut Bangka dan Sekitarnya	pertanian, pertambangan, perkebunan pertanian, perkebunan, industri pertanian, industri, pertambangan, kehutanan, perikanan perikanan, pariwisata
8	Bengkulu	Bengkulu dan Sekitarnya Manna dan Sekitarnya Laut Bengkulu	pertanian, industri, perkebunan, perikanan, pariwisata pertanian, perkebunan, perikanan, industri, pariwisata perikanan, pariwisata
9	Bangka Belitung	Bangka Belitung Laut Bangka dan Sekitarnya	pertanian, perkebunan, industri, pariwisata, perikanan pertanian, perkebunan, industri, pariwisata perikanan, pariwisata
10	Lampung	Bandar Lampung-Metro Mesuji dan Sekitarnya	perkebunan, pariwisata, industri, pertanian, perikanan pertanian, perkebunan, industri

Lanjutan Tabel 4.51

No.	Provinsi	Kawasan Andalan	Sektor Unggulan
1	2	3	4
11	DKI Jakarta	Kotabumi dan Sekitarnya Liwa-Krui Laut Krakatau dan Sekitarnya Perkotaan Jakarta Laut Pulau Seribu	pertanian, perkebunan, perikanan pertanian, perkebunan, perikanan laut perikanan, pertambangan, pariwisata industri, pariwisata, perikanan, perdagangan, jasa perikanan, pertambangan, pariwisata
12	Banten	Bojonegara-Merak-Cilegon Laut Krakatau dan Sekitarnya	industri, pariwisata, pertanian, perikanan, pertambangan perikanan, pertambangan, pariwisata
13	Jawa Barat	Bogor-Puncak-Cianjur (Bopunjur dan Sekitarnya) Sukabumi dan Sekitarnya Purwakarta, Subang, Karawang (Purwasuka) Cekungan Bandung Cirebon-Indramayu-Majalengka-Kuningan (Ciayumaja Kuning) dan Sekitarnya Priangan Timur-Pangandaran	pertanian, pariwisata, industri, perikanan perikanan, pertanian, pariwisata, perkebunan pertanian, industri, pariwisata, perikanan industri, pertanian, pariwisata, perkebunan pertanian, industri, perikanan, pertambangan
14	Jawa Tengah	Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten (Subosuko-Wonosraten) Kedung Sepur (Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Purwodadi) Bregas Juwana, Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Blora (Wanarakuti)	industri, pariwisata, pertanian pertanian, industri, pariwisata, perikanan pertanian, kehutanan, industri, perikanan pertanian, industri, pertambangan, perikanan
15	Daerah Istimewa Yogyakarta	Jawa Tengah Selatan (Purwokerto, Kebumen, Cilacap dan Sekitarnya) Borobudur dan Sekitarnya Laut Karimun Jawa dan Sekitarnya Laut Cilacap dan Sekitarnya Yogyakarta dan Sekitarnya	pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, perikanan pariwisata perikanan, pertambangan, pariwisata perikanan laut, pertambangan, pariwisata pariwisata, pertanian, industri, perikanan
16	Jawa Timur	Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan (Gerbangkertosusila) Malang dan Sekitarnya Probolinggo-Pasuruan-Lumajang Tuban-Bojonegoro Kediri-Tulung Agung-Biltar Situbondo-Bondowoso-Jember Madiun dan Sekitarnya Banyuwangi dan Sekitarnya Madura dan Kepulauan Laut Madura dan Sekitarnya	pertanian, perikanan, industri, pariwisata pertanian, industri, pertambangan, perkebunan, pariwisata, perikanan pariwisata, industri, perkebunan, pertanian, perikanan, pertambangan pertanian, perkebunan, industri, perikanan, pariwisata perkebunan, pertanian, industri, pariwisata, perikanan laut pertanian, industri, perikanan, perkebunan, pariwisata perikanan, pertanian pertanian, perkebunan, industri, pariwisata, perikanan perikanan, pertambangan, pariwisata
17	Bali	Singaraja dan Sekitarnya (Bali Utara) Denpasar-Ubud-Kintamani (Bali Selatan) Laut Bali dan Sekitarnya	pariwisata, pertanian, perikanan pariwisata, pertanian, industri, perikanan perikanan, pertambangan, pariwisata
18	Nusa Tenggara Barat	Lombok dan Sekitarnya Bima Sumbawa dan Sekitarnya Laut Selat Lombok dan Sekitarnya	perikanan, pertambangan, pariwisata, industri, pertambangan pertanian, industri, pariwisata, perikanan pertanian, pariwisata, industri, pertambangan, perikanan perikanan laut, pariwisata

Lanjutan Tabel 4.51

No.	Provinsi	Kawasan Andalan	Sektor Unggulan
1	2	3	4
19	Nusa Tenggara Timur	Kupang dan Sekitarnya Maumere-Ende Komodo dan Sekitarnya Ruteng-Bajawa Sumba Laut Flores Laut Sawu dan Sekitarnya Laut Sumba dan Sekitarnya	pertanian, industri, pariwisata, perikanan laut, pertambangan kehutanan, pariwisata, industri, perikanan, pertanian, perkebunan pariwisata, pertanian, perkebunan, industri, perikanan perkebunan, perikanan, pertambangan, pariwisata, pertanian pertanian, pariwisata, perkebunan perikanan, pariwisata perikanan, pertambangan, pariwisata perikanan, pariwisata
20	Kalimantan Barat	Pontianak dan Sekitarnya Singkawang dan Sekitarnya Ketapang dan Sekitarnya Kapuas Hulu dan Sekitarnya Sanggau Laut Pontianak dan Sekitarnya Laut Ketapang dan Sekitarnya	pertanian, industri, perikanan, pariwisata pertanian, industri, perkebunan, perikanan pertanian, industri, perkebunan, perikanan, kehutanan pertanian, kehutanan, perkebunan pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan perikanan, pariwisata perikanan, pariwisata
21	Kalimantan Tengah	Sampit - Pangkalan Bun Buntok Muarateweh Kuala Kapuas Laut Kuala Pembuang	pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, industri, pariwisata pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata pertanian, perkebunan, pertambangan, kehutanan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan perikanan, pertambangan, pariwisata
22	Kalimantan Selatan	Kandangan dan Sekitarnya Banjarmasin Raya dan Sekitarnya Batulicin Laut Pulau Laut	pertanian, perkebunan, pariwisata pertanian, perkebunan, pariwisata pertanian, industri, perkebunan, pariwisata, perikanan perkebunan, kehutanan, pertanian, industri, pariwisata, perikanan perikanan, pertambangan
23	Kalimantan Timur	Tanjung Redeb dan Sekitarnya Sangkuriang, Sangata, & Muara Wahau (Sasamawa) Tarakan, Tanjung Salas, Nunukan, Pulau Bunyu, dan Malinau (Tatapanbuma) dan Sekitarnya Bontang-Samarinda-Tenggarong, Balikpapan Penajam dan Sekitarnya (Bonsamtebajam) Laut Bontang-Tarakan dan Sekitarnya	industri, kehutanan, pertambangan, pariwisata, perikanan industri, perikanan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, perikanan laut, pariwisata perikanan, pariwisata, perkebunan, kehutanan, pertambangan, industri industri, perkebunan, pertambangan, kehutanan, perikanan, pariwisata perikanan, pertambangan, pariwisata
24	Gorontalo	Gorontalo Marisa Laut Tomini dan Sekitarnya	perikanan, pertambangan, pariwisata pertanian, perikanan, perkebunan, pertambangan pertanian, perkebunan, perikanan perikanan, pariwisata
25	Sulawesi Utara	Manado dan Sekitarnya Dumoga-Kotamobagu dan Sekitarnya (Bolaang Mongondow) Laut Bunaken dan Sekitarnya	perikanan laut, pariwisata, industri, pertambangan pertanian, perkebunan, perikanan
26	Sulawesi Tengah	Laut Batutoli dan Sekitarnya Poso dan Sekitarnya Toli-Toli dan Sekitarnya Kolonedale dan Sekitarnya Palu dan Sekitarnya Laut Teluk Tolo Kepulauan Banggai dan Sekitarnya	perikanan, pertambangan, pariwisata pertanian, perikanan, pariwisata, perkebunan, industri pertambangan, perkebunan, perikanan, pertanian, pariwisata pertanian, perikanan, pariwisata, perkebunan, agroindustri, pertambangan pertambangan, perikanan, industri, pertanian, perkebunan, pariwisata perikanan, pariwisata

Lanjutan Tabel 4.51

No.	Provinsi	Kawasan Andalan	Sektor Unggulan
1	2	3	4
27	Sulawesi Selatan	Mamminasata dan Sekitarnya (Makassar, Maros, Sungguminasa, Gowa, Takalar) Palopo dan Sekitarnya Bulukumba-Watampone Pare-Pare dan Sekitarnya Laut Kapoposang dan Sekitarnya Laut Teluk Bone dan Sekitarnya Laut Singkarang-Takabonerate dan Sekitarnya Laut Selat Makassar	pariwisata, industri, pertanian, agroindustri, perikanan pariwisata, perkebunan, pertanian, perikanan pertanian, perkebunan, agroindustri, pariwisata, perikanan, perdagangan agroindustri, pertanian, perikanan, perkebunan perikanan, pertambangan, pariwisata perikanan, pertambangan, pariwisata perikanan, pertambangan, pariwisata perikanan, pariwisata
28	Sulawesi Barat	Mamuju dan Sekitarnya	perkebunan, pertanian, kehutanan, agroindustri, perikanan
29	Sulawesi Tenggara	Asesolo/ Kendari Kapolimu-Patikala Muna-Buton Mowedong/ Kolaka Laut Asera Lasolo Laut Kapontori-Lasalimu dan Sekitarnya Luat Tiworo dan Sekitarnya	agroindustri, pertambangan, perikanan, perkebunan, pertanian, industri, pariwisata agroindustri, pertambangan, perikanan, perkebunan, pertanian, kehutanan, pariwisata agroindustri, pertambangan, perikanan, perkebunan, pertanian perikanan, pariwisata perikanan, pertambangan, pariwisata perikanan, pertambangan, pariwisata
30	Maluku	Seram Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar Buru Laut Banda dan Sekitarnya Laut Arafuru dan Sekitarnya	pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, pariwisata perikanan, pertanian, kehutanan, perkebunan, industri perkebunan, perikanan, pertanian, pariwisata perikanan, pertambangan, pariwisata perikanan laut, pertambangan, pariwisata
31	Maluku Utara	Ternate, Tidore, Sidangoli, Sofifi, Weda dan Sekitarnya Bacan-Halmahera Selatan Kepulauan Sula Laut Halmahera dan Sekitarnya	perkebunan, perikanan laut, industri, pertambangan, pariwisata perkebunan, pertanian perkebunan, kehutanan, industri, pertambangan, perikanan perikanan laut, pertambangan, pariwisata
32	Papua Barat	Bintuni Fak-Fak (Bomberai) dan Sekitarnya Sorong dan Sekitarnya Laut Raja Ampat Bintuni	pertanian, perkebunan, pertambangan, perikanan pertanian, perkebunan, perikanan, industri, pertambangan kehutanan, pertambangan, perikanan laut, industri perikanan, pertambangan, pariwisata
33	Papua	Timika (Tembagapura) dan Sekitarnya Biak Nabire dan Sekitarnya (Aran Moswaren, dan Legare) Merauke dan Sekitarnya Memberamo-Lereh (Jayapura) dan Sekitarnya Wamena dan Sekitarnya Laut Teluk Cendrawasih - Biak dan Sekitarnya Laut Jayapura - Sarmi	pertambangan, kehutanan, industri, pariwisata, pertanian, perkebunan, perikanan pariwisata, perikanan, industri, pertambangan, perkebunan, kehutanan pertanian, perkebunan, pertambangan industri, kehutanan, perkebunan, perikanan, pertanian industri, pertanian, perkebunan, pertambangan, kehutanan, perikanan pertanian, perkebunan perikanan, pertambangan, pariwisata perikanan, pariwisata

Sumber : http://www.pu.go.id/satminkal/index.asp?site_id=10303 (Lampiran IX Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor : 26 Tahun 2008

Tanggal : 10 Maret 2008)

Tabel : 4.52
Penetapan Kawasan Strategis Nasional

No.	Provinsi	Kawasan Strategis	Tahapan Pengembangan
1	2	3	4
1	Nanggroe Aceh Darussalam	Industri Lhokseumawe	I/A/2
		Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	I/A/2
		Pengembangan Ekonomi Terpadu Banda Aceh Darussalam	I/A/2
		Ekosistem Leuser	I/B/1
		Perbatasan Laut RI termasuk 2 pulau kecil terluar (pulau Rondo dan Berhala) dengan negara India/ Thailand/ Malaysia	I/E/2
2	Sumatera Utara	Perbatasan Negara termasuk 19 pulau kecil terluar (Pulau Simeulucut, Salaut Besar, Raya, Rusa, Benggala, Simuk, Wunga, Sibarubaru, Sinyaunyu, Enggano, Mega, Batu Kecil, Deli, Manuk, Nusa Kambangan, Barung, Sekel, Panehan, dan Sophialouisa) yang berhadapan dengan laut lepas	I/E/2
		Perbatasan Laut RI termasuk 2 pulau kecil terluar (pulau Rondo dan Berhala) dengan negara India/ Thailand/ Malaysia	I/E/2
		Perkotaan Medan - Binjai - Deli Serdang - Karo (Mebidangro)	I/A/1
		Danau Toba dan Sekitarnya	I/B/1
		Perbatasan Negara termasuk 19 pulau kecil terluar (Pulau Simeulucut, Salaut Besar, Raya, Rusa, Benggala, Simuk, Wunga, Sibarubaru, Sinyaunyu, Enggano, Mega, Batu Kecil, Deli, Manuk, Nusa Kambangan, Barung, Sekel, Panehan, dan Sophialouisa) yang berhadapan dengan laut lepas	I/E/2
3	Sumatera Barat	Stasiun Pengamat Dirgantara Kototabang	I/D/2
		Hutan Lindung Bukit Batabuh	I/B/1
		Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat	I/B/1
		Perbatasan Negara termasuk 19 pulau kecil terluar (Pulau Simeulucut, Salaut Besar, Raya, Rusa, Benggala, Simuk, Wunga, Sibarubaru, Sinyaunyu, Enggano, Mega, Batu Kecil, Deli, Manuk, Nusa Kambangan, Barung, Sekel, Panehan, dan Sophialouisa) yang berhadapan dengan laut lepas	I/E/2
4	Riau	Hutan Lindung Bukit Batabuh	I/B/1
		Hutan Lindung Mahato	I/B/1
		Perbatasan Laut RI termasuk 20 pulau kecil terluar (Pulau Sentut, Tokong Malang Biru, Damar, Mangkai, Tokong Nanas, Tokong Belayar, Tokong Boro, Semiun, Sebetul, Sekatung, Senua, Subi Kecil, Kepala, Batu Mandi, Iyu Kecil, Karimun Kecil, Nipa, Pelampong, Batu Berhanti, dan Nongsa) dengan negara Malaysia/ Vietnam/ Singapura	I/D/2
		Taman Nasional Bukit Tigapuluh	I/B/1
5	Kepulauan Riau	Perbatasan Laut RI termasuk 20 pulau kecil terluar (Pulau Sentut, Tokong Malang Biru, Damar, Mangkai, Tokong Nanas, Tokong Belayar, Tokong Boro, Semiun, Sebetul, Sekatung, Senua, Subi Kecil, Kepala, Batu Mandi, Iyu Kecil, Karimun Kecil, Nipa, Pelampong, Batu Berhanti, dan Nongsa) dengan negara Malaysia/ Vietnam/ Singapura	I/D/2
		Batam, Bintan, Karimun	I/A/2

Lanjutan Tabel 4.52

No.	Provinsi	Kawasan Strategis	Tahapan Pengembangan
1	2	3	4
6	Jambi	Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat	I/B/1
		Taman Nasional Berbak	I/B/1
		Taman Nasional Bukit Tigapuluh	I/B/1
		Taman Nasional Bukit Duabelas	I/B/1
7	Sumatera Selatan	Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat	I/B/1
8	Bengkulu	Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat	I/B/1
		Perbatasan Negara termasuk 19 pulau kecil terluar (Pulau Simeulucut, Salaut Besar, Raya, Rusa, Bengkulu, Simuk, Wunga, Sibarubaru, Sinyaunyah, Enggano, Mega, Batu Kecil, Deli, Manuk, Nusa Kambangan, Barung, Sekel, Panehan, dan Sophialouisa) yang berhadapan dengan laut lepas	I/E/2
9	Lampung	Selat Sunda	III/A/2
		Perbatasan Negara termasuk 19 pulau kecil terluar (Pulau Simeulucut, Salaut Besar, Raya, Rusa, Bengkulu, Simuk, Wunga, Sibarubaru, Sinyaunyah, Enggano, Mega, Batu Kecil, Deli, Manuk, Nusa Kambangan, Barung, Sekel, Panehan, dan Sophialouisa) yang berhadapan dengan laut lepas	I/E/2
10	DKI Jakarta	Instalasi Lingkungan dan Cuaca	I/D/2
		Fasilitas Pengolahan Data dan Satelit	I/D/2
		Perkotaan Jabodetabek-Punjur termasuk Kepulauan Seribu	I/A/1
11	Banten	Selat Sunda	III/A/2
		Perkotaan Jabodetabek-Punjur termasuk Kepulauan Seribu	I/A/1
		Taman Nasional Ujung Kulon	I/B/1
		Perbatasan Negara termasuk 19 pulau kecil terluar (Pulau Simeulucut, Salaut Besar, Raya, Rusa, Bengkulu, Simuk, Wunga, Sibarubaru, Sinyaunyah, Enggano, Mega, Batu Kecil, Deli, Manuk, Nusa Kambangan, Barung, Sekel, Panehan, dan Sophialouisa) yang berhadapan dengan laut lepas	I/E/2
12	Jawa Barat	Perkotaan Jabodetabek-Punjur termasuk Kepulauan Seribu	I/A/1
		Perkotaan Cekungan Bandung	I/A/1
		Fasilitas Uji Terbang Roket Pamengpeuk	I/D/1
		Stasiun Pengamat Dirgantara Pamengpeuk	I/D/2
		Stasiun Pengamat Dirgantara Tanjung Sari	I/D/2
		Stasiun <i>Telecomand</i>	I/D/2
		Stasiun Bumi Penerima Satelit Mikro	I/D/2
		Pangandaran - Kalipuncang - Segara Anakan - Nusakambangan (Pacangsanak)	I/B/1
		Perbatasan Negara termasuk 19 pulau kecil terluar (Pulau Simeulucut, Salaut Besar, Raya, Rusa, Bengkulu, Simuk, Wunga, Sibarubaru, Sinyaunyah, Enggano, Mega, Batu Kecil, Deli, Manuk, Nusa Kambangan, Barung, Sekel, Panehan, dan Sophialouisa) yang berhadapan dengan laut lepas	I/E/2

Lanjutan Tabel 4.52

No.	Provinsi	Kawasan Strategis	Tahapan Pengembangan
1	2	3	4
13	Jawa Tengah	Pangandaran - Kalipuncang - Segara Anakan - Nusakambangan (Pacangsanak) Perkotaan Kendal - Demak - Ungaran - Salatiga - Semarang - Purwodadi (Kedung Sepur) Borobudur dan Sekitarnya Candi Prambanan Taman Nasional Gunung Merapi	I/B/1 I/A/1 I/B/2 I/B/2 I/B/1
		Perbatasan Negara termasuk 19 pulau kecil terluar (Pulau Simeulucut, Salaut Besar, Raya, Rusa, Benggala, Simuk, Wunga, Sibarubaru, Sinyaunyu, Enggano, Mega, Batu Kecil, Deli, Manuk, Nusa Kambangan, Barung, Sekel, Panehan, dan Sophialouisa) yang berhadapan dengan laut lepas	I/E/2
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	Taman Nasional Gunung Merapi	I/B/1
15	Jawa Timur	Perkotaan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan (Gerbangkertosusila) Stasiun Pengamat Dirgantara Watukosek	I/A/1 I/D/2
		Perbatasan Negara termasuk 19 pulau kecil terluar (Pulau Simeulucut, Salaut Besar, Raya, Rusa, Benggala, Simuk, Wunga, Sibarubaru, Sinyaunyu, Enggano, Mega, Batu Kecil, Deli, Manuk, Nusa Kambangan, Barung, Sekel, Panehan, dan Sophialouisa) yang berhadapan dengan laut lepas	I/E/2
16	Bali	Perkotaan Denpasar - Badung - Gianyar - Tabanan (Sarbagita)	I/A/1
17	Nusa Tenggara Barat	Pengembangan Ekonomi Terpadu Bima Taman Nasional Komodo Gunung Rinjani	I/A/2 I/B/1 I/B/1
		Perbatasan Negara termasuk 19 pulau kecil terluar (Pulau Simeulucut, Salaut Besar, Raya, Rusa, Benggala, Simuk, Wunga, Sibarubaru, Sinyaunyu, Enggano, Mega, Batu Kecil, Deli, Manuk, Nusa Kambangan, Barung, Sekel, Panehan, dan Sophialouisa) yang berhadapan dengan laut lepas	I/E/2
18	Nusa Tenggara Timur	Pengembangan Ekonomi Terpadu Mbay Perbatasan Darat RI dengan negara Timor Leste Perbatasan Laut RI termasuk 5 pulau kecil terluar (Pulau Alor, Batek, Dana, Ndana, dan Mangudu) dengan negara Timor Leste/ Australia	I/A/2 I/E/2 I/E/2
19	Kalimantan Barat	Pengembangan Ekonomi Terpadu Khatulistiwa Stasiun Pengamat Dirgantara Pontianak Taman Nasional Betung Kerihun	I/A/2 I/D/2 I/B/1
20	Kalimantan Tengah	Perbatasan Darat RI dan Jantung Kalimantan (<i>Heart of Borneo</i>) Perbatasan Darat RI dan Jantung Kalimantan (<i>Heart of Borneo</i>) Pengembangan Ekonomi Terpadu Daerah Aliran Sungai Kahayan Kapuas dan Barito	I/E/2 I/E/2 I/A/2
21	Kalimantan Selatan	Taman Nasional Tanjung Puting Pengembangan Ekonomi Terpadu Batulicin	I/B/1 I/A/2

Lanjutan Tabel 4.52

No.	Provinsi	Kawasan Strategis	Tahapan Pengembangan
1	2	3	4
22	Kalimantan Timur	Perbatasan Darat RI dan Jantung Kalimantan (<i>Heart of Borneo</i>)	I/E/2
		Pengembangan Ekonomi Terpadu Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan	I/A/2
23	Sulawesi Utara	Perbatasan Laut RI termasuk 18 pulau kecil terluar (Pulau Sebatik, Gosong Makasar, Maratua, Sambit, Lingian, Salando, Dolangan, Bangkit, Mantewaru, Makalehi, Kawalusu, Kawio, Marore, Batu Bawaikang, Miangas, Marampit, Intata, dan Kakarutan) dengan negara Malaysia dan Philipina	I/E/2
		Perbatasan Laut RI termasuk 18 pulau kecil terluar (Pulau Sebatik, Gosong Makasar, Maratua, Sambit, Lingian, Salando, Dolangan, Bangkit, Mantewaru, Makalehi, Kawalusu, Kawio, Marore, Batu Bawaikang, Miangas, Marampit, Intata, dan Kakarutan) dengan negara Malaysia dan Philipina	I/E/2
24	Sulawesi Tengah	Pengembangan Ekonomi Terpadu Manado - Bitung	I/A/2
		Konservasi dan Wisata Daerah Aliran Sungai Tondano	I/B/1
25	Sulawesi Selatan	Perbatasan Laut RI termasuk 18 pulau kecil terluar (Pulau Sebatik, Gosong Makasar, Maratua, Sambit, Lingian, Salando, Dolangan, Bangkit, Mantewaru, Makalehi, Kawalusu, Kawio, Marore, Batu Bawaikang, Miangas, Marampit, Intata, dan Kakarutan) dengan negara Malaysia dan Philipina	I/E/2
		Pengembangan Ekonomi Terpadu Batui	I/A/2
26	Sulawesi Tenggara	Poso dan Sekitarnya	I/C/1
		Kritis Lingkungan Balingara	I/B/1
27	Maluku	Kritis Lingkungan Buol-Lambunu	I/B/1
		Perkotaan Makassar - Maros - Sungguminasa - Takalar (Mamminasata)	I/A/1
28	Maluku Utara	Pengembangan Ekonomi Terpadu Parepare	I/A/2
		Toraja dan Sekitarnya	I/C/1
29	Papua Barat	Stasiun Bumi Sumber Alam Parepare	I/D/2
		Soroako dan Sekitarnya	I/D/2
27	Maluku	Pengembangan Ekonomi Terpadu Buton, Kolaka, dan kendari	I/A/2
		Taman Nasional Rawa Aopa - Watumohai dan Rawa Tinondo	I/B/1
28	Maluku Utara	Pengembangan Ekonomi Terpadu Seram	I/A/2
		Laut Banda	I/D/1
28	Maluku Utara	Perbatasan Laut RI termasuk 20 pulau kecil terluar (Pulau Ararkula, Karaweira, Panambulai, Kultubai Utara, Kultubai Selatan, Karang, Enu, Batu Goyang, Larat, Asutubun, Selaru, Batarkusu, Masela, Miatimiarang, Leti, Kisar, Wetar, Liran, Kolepon, dan Laag) dengan negara Timor Leste/ Australia	I/E/2
		Perbatasan Laut RI termasuk 8 pulau kecil terluar (Pulau Jiew, Budd, Fani, Miossu, Fanildo, Bras, Bepondi, dan Liki) dengan negara Palau	I/E/2
29	Papua Barat	Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat	I/B/1
		Perbatasan Laut RI termasuk 8 pulau kecil terluar (Pulau Jiew, Budd, Fani, Miossu, Fanildo, Bras, Bepondi, dan Liki) dengan negara Palau	I/E/2

Lanjutan Tabel 4.52

No.	Provinsi	Kawasan Strategis	Tahapan Pengembangan
1	2	3	4
30	Papua	Perbatasan Laut RI termasuk 20 pulau kecil terluar (Pulau Ararkula, Karaweira, Panambulai, Kultubai Utara, Kultubai Selatan, Karang, Enu, Batu Goyang, Larat, Asutubun, Selaru, Batarkusu, Masela, Miatimiarang, Leti, Kisar, Wetar, Liran, Kolepon, dan Laag) dengan negara Timor Leste/ Australia	I/E/2
		Perbatasan Laut RI termasuk 8 pulau kecil terluar (Pulau Jiew, Budd, Fani, Miossu, Fanildo, Bras, Bepondi, dan Liki) dengan negara Palau	I/E/2
		Pengembangan Ekonomi Terpadu Biak	I/A/2
		Stasiun Bumi Satelit Cuaca dan Lingkungan	I/D/2
		Stasiun <i>Telemetry Tracking and Command</i> Wahana Peluncur Satelit	I/D/2
		Timika	I/D/2
		Taman Nasional Lorentz	I/B/1
		Konservasi Keanekaragaman Hayati Teluk Bintuni	I/B/1
		Perbatasan Darat RI dengan negara Papua Nugini	I/E/2

Sumber : http://www.pu.go.id/satminkal/index.asp?site_id=10303 (Lampiran X : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor : 26 Tahun 2008

Tanggal : 10 Maret 2008)

Keterangan :

I - IV : Tahapan Pengembangan

A : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Dengan Sudut Kepentingan Ekonomi

A/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan

A/2 : Pengembangan/Peningkatan kualitas kawasan

B : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Dengan Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup

B/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan

B/2 : Pengembangan/Peningkatan kualitas kawasan

C : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Dengan Sudut Kepentingan Sosial Budaya

C/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan

C/2 : Pengembangan/Peningkatan kualitas kawasan

D : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Dengan Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumberdaya alam dan Teknologi Tinggi

D/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan

D/2 : Pengembangan/Peningkatan kualitas kawasan

E : Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Dengan Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan

E/1 : Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan

E/2 : Pengembangan/Peningkatan kualitas kawasan

Tabel : 4.53
Penetapan Kawasan Lindung Nasional

No.	Provinsi	Kawasan Lindung	Tahapan Pengembangan		
1	2	3	4		
1	Nanggroe Aceh Darussalam	Suaka Margasatwa Rawa Singkil	I/B/2		
		Cagar Alam Hutan Pinus Jhanto	I/B/3		
		Taman Nasional Gunung Leuser	I/A/4		
		Taman Hutan Raya Cut Nyak Dien (Pocut Meurah Intan)	II/B/5		
		Taman Wisata Alam Laut Pulau Weh	I/A/6		
		Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Banyak	II/A/6		
		Taman Wisata Alam Laut Perairan Pulau Pinang, Siumat, dan Simanaha (Pisisi)	I/A/6		
		Taman Wisata Alam Laut Sabang	I/B/6		
		Taman Buru Lingga Isaq	I/F		
		2	Sumatera Utara	Suaka Margasatwa Karang Gading & Langkat Timur Laut	II/B/2
Suaka Margasatwa Barumun	I/B/2				
Suaka Margasatwa Siranggas	II/B/2				
Suaka Margasatwa Dolok Surungan	II/B/2				
Cagar Alam Dolok Sibual-buali	II/A/3				
Cagar Alam Dolok Sipirok	I/A/3				
Cagar Alam Lubuk Raya	II/B/3				
Cagar Alam Sei Ledong	II/B/3				
Taman Nasional Gunung Leuser	I/A/4				
Taman Nasional Batang Gadis	II/A/4				
Taman Hutan Raya Bukit Barisan	I/B/5				
Taman Wisata Alam Holiday Resort	I/B/6				
Taman Buru Pulau Pini	I/F				
3	Sumatera Barat			Suaka Margasatwa Pagai Selatan	II/B/2
		Cagar Alam Rimbo Panti Reg. 75	II/B/3		
		Cagar Alam Lembah Anai	I/B/3		
		Cagar Alam Batang Pangean I	II/B/3		
		Cagar Alam Batang Pangean II Reg. 49	III/B/3		
		Cagar Alam Arau Hilir	II/B/3		
		Cagar Alam Melampah Alahan Panjang	I/B/3		
		Cagar Alam Gunung Sago	II/B/3		
		Cagar Alam Maninjau Utara Dan Selatan	II/B/3		
		Cagar Alam Gunung Singgalang Tandikat	I/B/3		
		Cagar Alam Gunung Merapi	I/B/3		
		Cagar Alam Air Putih	III/B/3		
		Cagar Alam Barisan I	II/B/3		
		Cagar Alam Air Terusan	II/B/3		
		Taman Nasional Siberut	II/A/4		
		Taman Nasional Kerinci Seblat	I/A/4		
		Taman Hutan Raya Dr. M. Hatta	II/B/5		
		Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Pieh	II/B/6		
		4	Riau	Suaka Margasatwa Kerumutan	II/B/2
				Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar/ Danau Pulau Bawah	I/B/2
Suaka Margasatwa Bukit Rimbang-Bukit Baling	III/B/2				
Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil	II/B/2				
Suaka Margasatwa Balai Raja	II/B/2				
Suaka Margasatwa Tasik Besar/Tasik Metas	II/B/2				
Suaka Margasatwa Tasik Serkap/Tasik Sarang Burung	II/B/2				
Suaka Margasatwa Pusat Pelatihan Gajah	II/B/2				
Suaka Margasatwa Tasik Tanjung Padang	II/B/2				
Suaka Margasatwa Tasik Belat	II/B/2				
Suaka Margasatwa Bukit Batu	II/B/2				
Cagar Alam Bukit Bungkok	I/B/3				
Taman Nasional Teso Nilo	I/A/4				
Taman Nasional Bukit Tiga Puluh	I/A/4				
Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim (Minas)	II/B/5				
Taman Wisata Alam Sungai Dumai	I/A/6				
5	Jambi			Cagar Alam Kelompok Hutan Bakau Pantai Timur	I/A/3
				Cagar Alam Cempaka	II/B/3
		Cagar Alam Sungai Batara	III/B/3		
		Taman Nasional Bukit Tiga Puluh	I/A/4		
		Taman Nasional Bukit Dua Belas	I/A/4		
		Taman Nasional Berbak	I/A/4		

Lanjutan Tabel 4.53

No.	Provinsi	Kawasan Lindung	Tahapan Pengembangan
1	2	3	4
		Taman Nasional Kerinci Seblat	I/A/4
		Taman Hutan Raya Thaha Saifuddin	II/B/5
6	Sumatera Selatan	Taman Wisata Alam Sungai Bengkal	II/B/6
		Suaka Margasatwa Gumai Pasemah	II/B/2
		Suaka Margasatwa Gunung Raya	I/B/2
		Suaka Margasatwa Isau-Isau Pasemah	II/B/2
		Suaka Margasatwa Bentayan	I/B/2
		Suaka Margasatwa Dangku	II/B/2
		Suaka Margasatwa Padang Sugihan	II/B/2
		Taman Nasional Kerinci Seblat	I/A/4
7	Bengkulu	Taman Nasional Sembilang	II/A/4
		Cagar Alam Danau Dusun Besar Reg. 61	III/B/3
		Cagar Alam Air Ketebat Danau Tes Reg. 57	II/B/3
		Cagar Alam Teluk Klowe Reg. 96	III/B/3
		Taman Nasional Kerinci Seblat	I/A/4
		Taman Nasional Bukit Barisan Selatan	I/A/4
		Taman Hutan Raya Raja Lelo	II/B/5
		Taman Wisata Alam Bukit Kaba	II/B/6
		Taman Wisata Alam Pantai Panjang - Pulau Baai	I/B/6
		Taman Wisata Alam Laut Enggano	II/B/6
		Taman Buru Semidang Bukit Kabu	II/F
		Taman Buru Gunung Nanu'ua	II/F
8	Lampung	Cagar Alam Laut Pulau Anak Krakatau	I/A/3
		Taman Nasional Bukit Barisan Selatan	I/A/4
		Taman Nasional Way Kambas	I/A/4
		Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman	I/B/5
		Taman Wisata Alam Laut Lampung Barat	I/B/6
9	Bangka Belitung	Cagar Alam G. Lalang, G. Menumbing, G. Maras, G. Mangkol, G. Permisian, Jening Mendayung	I/B/3
10	Kepulauan Riau	Taman Wisata Alam Laut Perairan Belitung	II/B/6
		Taman Nasional Laut Anambas	II/B/4
		Taman Wisata Alam Muka Kuning (Batam)	I/B/6
11	DKI Jakarta	Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu	I/A/4
12	Jawa Barat	Suaka Margasatwa Cikpeuh	II/B/2
		Suaka Margasatwa Gunung Sawal	II/B/2
		Cagar Alam Gunung Tangkuban Perahu	I/A/3
		Cagar Alam Leuweung Sancang	II/B/3
		Cagar Alam Gunung Tilu	II/B/3
		Cagar Alam Gunung Papandayan	I/B/3
		Cagar Alam Gunung Burangrang	I/B/3
		Cagar Alam Kawah Kamojang	II/B/3
		Cagar Alam Gunung Simpang	II/B/3
		Cagar Alam Laut Leuweung Sancang	II/B/3
		Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango	I/A/4
		Taman Nasional Halimun - Salak	I/A/4
		Taman Nasional Gunung Ciremai	I/A/4
		Taman Wisata Alam Gunung Tampomas	I/B/6
		Taman Wisata Alam Laut Cijulang	I/A/6
		Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi	II/F
13	Jawa Tengah	Cagar Alam Gunung Celering	I/B/3
		Cagar Alam Geologi Karangsembung	II/B/3
		Taman Nasional Gunung Merapi	I/A/4
		Taman Nasional Gunung Merbabu	I/A/4
		Taman Nasional Laut Karimun Jawa	I/B/4
		Taman Wisata Alam Laut Daerah Pantai Ujungnegoro-Roban	I/B/6
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	Taman Nasional Gunung Merapi	I/A/4
15	Jawa Timur	Suaka Margasatwa Dataran Tinggi Yang	I/B/2
		Suaka Margasatwa Pulau Bawean	I/B/2
		Cagar Alam Pulau Nusa Barong	II/B/3
		Cagar Alam Kawah Ijen Merapi Ungup-Ungup	II/B/3
		Taman Nasional Alas Purwo	I/A/4
		Taman Nasional Baluran	II/A/4
		Taman Nasional Bromo Tengger-Semeru	I/A/4
		Taman Nasional Meru Betiri	I/A/4
		Taman Hutan Raya R. Suryo	I/B/5

Lanjutan Tabel 4.53

No.	Provinsi	Kawasan Lindung	Tahapan Pengembangan
1	2	3	4
16	Banten	Cagar Alam Rawa Danau	II/B/3
		Cagar Alam Gunung Tukung Gede	I/B/3
		Taman Nasional Halimun - Salak	I/A/4
		Taman Nasional Ujung Kulon	I/A/4
17	Bali	Taman Wisata Alam Pulau Sangiang	I/A/6
		Cagar Alam Batukahu I/II/III	I/B/3
		Taman Nasional Bali Barat	I/A/4
		Taman Hutan Raya Ngurah Rai	I/B/5
		Taman Wisata Alam Sangeh	I/B/6
18	Nusa Tenggara Barat	Taman Wisata Alam Danau Buyan Dan Danau Tamblingan	I/B/6
		Taman Wisata Alam Laut Buleleng	I/A/6
		Suaka Margasatwa Gunung Tambora Selatan	I/B/2
		Cagar Alam Toffo Kota Lambu	II/A/3
		Cagar Alam Pulau Sangiang	I/A/3
		Cagar Alam Gunung Tambora Selatan	I/B/3
		Cagar Alam Pulau Panjang	II/B/3
		Cagar Alam Jereweh (Sekongkang)	II/B/3
		Taman Nasional Gunung Rinjani	I/A/4
		Taman Hutan Raya Nurasaka	I/A/5
		Taman Wisata Alam Bangko Bangko	II/B/6
		Taman Wisata Alam Tanjung Tanpa	II/B/6
		Taman Wisata Alam Danau Rawa Taliwang	II/B/6
		Taman Wisata Alam Laut Gili Meno, Gili Ayer, Gili Trawangan	I/B/6
		Taman Wisata Alam Laut Pulau Moyo	I/B/6
		Taman Wisata Alam Laut Pulau Satonda	II/B/6
		Taman Wisata Alam Laut Gilin Sulat dan Gili Lawang	II/A/6
		Taman Wisata Alam Laut Pulau Gili Banta	II/A/6
		Taman Buru Gunung Tambora Selatan	I/F
		Taman Buru Pulau Moyo	I/F
19	Nusa Tenggara Timur	Suaka Alam Laut Sawu	I/B/1
		Suaka Margasatwa Perhatu	III/B/2
		Suaka Margasatwa Kateri	III/B/2
		Suaka Margasatwa Harlu	III/B/2
		Suaka Margasatwa Ale Asisio	II/B/2
		Cagar Alam Riung	II/B/3
		Cagar Alam Maubesi (RTK. 189)	II/B/3
		Cagar Alam Way Wuul/ Mburak	II/B/3
		Cagar Alam Watu Ata	II/B/3
		Cagar Alam Wolo Tadho	II/B/3
		Cagar Alam Tambora	I/A/3
		Cagar Alam Gunung Mutis	II/B/3
		Taman Nasional Kelimutu	I/A/4
		Taman Nasional Laiwangi-Wanggameti	II/A/4
		Taman Nasional Manupeu - Tanah Daru	II/A/4
		Taman Nasional Komodo	I/A/4
		Taman Nasional Laut Komodo	I/A/4
		Taman Nasional Laut Selat Pantar	II/A/4
		Taman Hutan Raya Prof. Ir. Herman Yohannes	I/A/5
		Taman Wisata Alam Tuti Adagae	II/B/6
		Taman Wisata Alam Kemang Beleng	II/B/6
		Taman Wisata Alam Pulau Besar	II/B/6
		Taman Wisata Alam Pulau Menipo	II/B/6
		Taman Wisata Alam Ruteng	I/B/6
		Taman Wisata Alam Egon Illimedo	II/B/6
		Taman Wisata Alam Laut Teluk Kupang	I/A/6
		Taman Wisata Alam Laut Gugus Pulau Teluk Maumere	I/A/6
		Taman Wisata Alam Laut Tujuh Belas Pulau Riung	III/B/6
		Taman Buru Dataran Bena	II/F
		Taman Buru Pulau Rusa	I/F
Taman Buru Pulau Ndana	II/F		
20	Kalimantan Barat	Suaka Alam Laut Sambas	I/B/1
		Cagar Alam Mandor	II/B/3
		Cagar Alam Gunung Raya Pasi	I/B/3
		Cagar Alam Muara Kendawangan	II/B/3
		Cagar Alam Niyut-Penrisen	I/B/3

Lanjutan Tabel 4.53

No.	Provinsi	Kawasan Lindung	Tahapan Pengembangan
1	2	3	4
21	Kalimantan Tengah	Cagar Alam Laut Kepulauan Karimata	I/B/3
		Taman Nasional Betung Kerihun	I/A/4
		Taman Nasional Danau Sentarum	I/A/4
		Taman Nasional Gunung Palung	II/A/4
		Taman Nasional Bukit Baka - Bukit Raya	I/A/4
		Taman Wisata Alam Belimbing	II/B/6
		Taman Wisata Alam Asuansang	II/B/6
		Taman Wisata Alam Dungan	II/B/6
		Taman Wisata Alam Gunung Melintang	I/B/6
		Taman Wisata Alam Bukit Kelam Komplek	II/B/6
		Taman Wisata Alam Laut Bengkayang	II/B/6
		Suaka Margasatwa Lamandau	I/B/2
		Cagar Alam Bukit Sapat Hawung	II/B/3
		Cagar Alam Bukit Tangkiling	II/B/3
		Cagar Alam Pararawen I/II	I/B/3
22	Kalimantan Selatan	Taman Nasional Bukit Baka - Bukit Raya	I/A/4
		Taman Nasional Tanjung Puting	I/A/4
		Taman Nasional Sebangau	I/A/4
		Taman Wisata Alam Tanjung Keluang/ Teluk Keluang	II/B/6
		Suaka Margasatwa Pleihari Martapura	I/B/2
		Suaka Margasatwa Kuala Lupak	II/B/2
		Cagar Alam Teluk Kelumpang, Selat Laut, Selat Sebuku	I/B/3
		Cagar Alam Teluk Pamukan	II/B/3
		Cagar Alam Sungai Lulan Dan Sungai Bulan	I/B/3
		Cagar Alam Teluk Pamukan	I/B/3
23	Kalimantan Timur	Taman Hutan Raya Sultan Adam	II/B/5
		Taman Wisata Alam Pleihari Tanah Laut	II/B/6
		Taman Wisata Alam Laut P. Laut Barat-Selatan & P. Sembilan	II/B/6
		Suaka Alam Laut Pulau Sebatik	I/B/1
		Cagar Alam Muara Kaman Sedulang	II/B/3
		Cagar Alam Padang Luwai	II/B/3
		Cagar Alam Teluk Apar	I/B/3
		Cagar Alam Teluk Adang	I/B/3
		Taman Nasional Kayan Mentarang	I/A/4
		Taman Nasional Kutai	I/A/4
24	Sulawesi Utara	Taman Hutan Raya Bukit Suharto	I/B/6
		Taman Wisata Alam Laut Berau	II/B/6
		Suaka Alam Laut Sidat	II/B/1
		Suaka Alam Laut Selat Lembeh-Bitung	I/B/1
		Suaka Margasatwa Gunung Manembo-nembo	II/B/2
		Suaka Margasatwa Karakelang Utara-Selatan	I/B/2
		Cagar Alam Gunung Ambang	I/B/3
		Cagar Alam Dua Saudara	II/B/3
		Cagar Alam Tangkoko Batu Angus	II/B/3
		Taman Nasional Bogani Nani Wartabone	I/A/4
25	Sulawesi Tengah	Taman Nasional Laut Bunaken	I/A/4
		Suaka Margasatwa Tanjung Santigi	I/B/2
		Suaka Margasatwa Pati Pati	II/B/2
		Suaka Margasatwa Lombuyan I/II	II/B/2
		Suaka Margasatwa Bangkiriang	II/B/2
		Suaka Margasatwa Pinjan/ Tanjung Matop	II/B/2
		Cagar Alam Morowali	I/B/3
		Cagar Alam Pangi Binangga	II/B/3
		Cagar Alam Pamona	II/B/3
		Cagar Alam Gunung Tinombala	I/B/3
		Cagar Alam Gunung Sojol	II/B/3
		Cagar Alam Gunung Dako	II/B/3
		Cagar Alam Tanjung Api	II/B/3
		Taman Nasional Lore Lindu	I/A/4
		Taman Nasional Laiut Kepulauan Banggai	II/B/4
Taman Hutan Raya Poboya Paneki (Palu)	III/B/5		
Taman Wisata Alam Bancea	II/B/6		
Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Togean dan P. Batudaka	I/A/6		
Taman Buru Landusa Tomata	II/F		

Lanjutan Tabel 4.53

No.	Provinsi	Kawasan Lindung	Tahapan Pengembangan		
1	2	3	4		
26	Sulawesi Selatan	Suaka Margasatwa Komara	II/B/2		
		Cagar Alam Faruhumpenai	II/B/3		
		Cagar Alam Kalaena	II/B/3		
		Taman Nasional Bantimurung - Bulusaraung	II/A/4		
		Taman Nasional Laut Taka Bonerate	I/A/4		
		Taman Hutan Raya Bontobahari	II/B/5		
		Taman Wisata Alam Danau Matano	II/B/6		
		Taman Wisata Alam Danau Mahalona	II/B/6		
		Taman Wisata Alam Danau Towuti	I/B/6		
		Taman Wisata Alam Malino	II/B/6		
		Taman Wisata Alam Cani Sirenrang	II/B/6		
		Taman Wisata Alam Lejja	II/B/6		
		Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Kapoposang	I/B/6		
		Taman Buru Komara	II/F		
Taman Buru Bangkala	II/F				
27	Sulawesi Tenggara	Suaka Margasatwa Buton Utara	II/B/2		
		Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo	II/B/2		
		Suaka Margasatwa Tanjung Peropa	II/B/2		
		Suaka Margasatwa Lambusango	III/B/2		
		Taman Nasional Rawa Aopa - Watumohai	I/A/4		
		Taman Nasional Laut Kepulauan Wakatobi	I/A/4		
		Taman Hutan Raya Murhum	II/B/5		
		Taman Wisata Alam Mangolo	II/B/6		
		Taman Wisata Alam Laut Telok Lasolo	II/B/6		
		Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Padamarang	II/B/6		
		Taman Wisata Alam Laut Selat Tiworo	II/B/6		
Taman Wisata Alam Laut Liwutongkidi (Buton)	II/B/6				
Taman Buru Padang Mata Osu	III/F				
28	Gorontalo	Suaka Margasatwa Nantu	II/B/2		
		Cagar Alam Panua	II/B/3		
		Cagar Alam Tanjung Panjang	II/B/3		
		Taman Nasional Bogani Nani Wartabone	I/A/4		
29	Sulawesi Barat	Suaka Margasatwa Mampie Lampoko	II/B/2		
		Suaka Margasatwa Pulau Baun	II/B/2		
30	Maluku	Suaka Margasatwa Pulau Kobror	I/B/2		
		Suaka Margasatwa Tanimbar	I/B/2		
		Suaka Margasatwa Laut Pulau Kassa	III/B/2		
		Cagar Alam Pulau Nustaram	II/B/3		
		Cagar Alam Pulau Nuswotar	II/B/3		
		Cagar Alam Masbait	II/B/3		
		Cagar Alam Daab	II/B/3		
		Cagar Alam Pulau Larat	I/B/3		
		Cagar Alam Bekau Huhun	II/B/3		
		Cagar Alam Tafermaar	II/B/3		
		Cagar Alam Gunung Sahuwai	II/B/3		
		Cagar Alam Masarete	II/B/3		
		Cagar Alam Tanjung Sial	II/B/3		
		Cagar Alam Laut Kepulauan Aru Tenggara	I/B/3		
		Cagar Alam Laut Banda	I/B/3		
		Taman Nasional Manusela	I/A/4		
		Taman Wisata Alam Laut Laut Banda	I/B/6		
		Taman Wisata Laut Pulau Kasa	II/B/6		
		Taman Wisata Alam Laut Pulau Marsegu dan Sekitarnya	II/B/6		
		Taman Wisata Alam Laut Pulau Pombo	II/B/6		
		31	Maluku Utara	Cagar Alam Tobalai	II/B/3
				Cagar Alam Pulau Seho	II/B/3
				Cagar Alam Gunung Sibela	II/B/3
				Cagar Alam Lifamatola	II/B/3
				Cagar Alam Pulau Obi	I/B/3
				Cagar Alam Taliabu	II/B/3
				Taman Nasional Aketajawe - Lolobata	I/A/4
32	Papua Barat	Suaka Alam Laut Kaimana	II/B/1		
		Suaka Margasatwa Tanjung Muhrani - Sidei - Wibain I - II	I/B/2		
		Suaka Margasatwa Pulau Venu	II/B/2		
		Suaka Margasatwa Laut Kepulauan Raja Ampat	I/B/2		

Lanjutan Tabel 4.53

No.	Provinsi	Kawasan Lindung	Tahapan Pengembangan
1	2	3	4
33	Papua	Suaka Margasatwa Laut Pulau Sabuda dan Pulau Tataruga	II/B/2
		Suaka Margasatwa Laut Kepulauan Panjang	II/B/2
		Cagar Alam Pulau Waigeo Barat	I/B/3
		Cagar Alam Pulau Batanta Barat	II/B/3
		Cagar Alam Pegunungan Arfak	II/B/3
		Cagar Alam Pulau Salawati Utara	II/B/3
		Cagar Alam Biak Utara	I/A/3
		Cagar Alam Tamrau Selatan	II/B/3
		Cagar Alam Pegunungan Yapen Tengah	II/B/3
		Cagar Alam Pulau Supriori	I/B/3
		Cagar Alam Pegunungan Wondiboy	II/B/3
		Cagar Alam Pulau Waigeo Timur	I/B/3
		Cagar Alam Pulau Misool	II/B/3
		Cagar Alam Pulau Kofiau	II/B/3
		Cagar Alam Laut Pantai Sausapor	II/B/3
		Cagar Alam Teluk Bintuni	I/B/3
		Cagar Alam Pegunungan Fak Fak	I/B/3
		Cagar Alam Pegunungan Kumawa	II/B/3
		Cagar Alam Tamrau Utara	II/B/3
		Cagar Alam Tanjung Wiay	II/B/3
		Cagar Alam Wagura Kote	II/B/3
		Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih	I/A/4
		Taman Wisata Alam Beriat	III/B/6
		Taman Wisata Alam Klamono	III/B/6
		Taman Wisata Alam Laut Distrik Abun, Sorong	II/B/6
		Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Padaido	II/B/6
		Suaka Margasatwa Pulau Dolok	II/B/2
		Suaka Margasatwa Jayawijaya	II/B/2
		Suaka Margasatwa Mamberamo Foja	II/B/2
		Suaka Margasatwa Danau Bian	II/B/2
		Suaka Margasatwa Anggromeos	II/B/2
		Suaka Margasatwa Komolon	II/B/2
		Cagar Alam Cycloops	II/B/3
Cagar Alam Enarotali	II/B/3		
Cagar Alam Bupul/ Kumbe	II/B/3		
Cagar Alam Pegunungan Wayland	II/B/3		
Taman Nasional Lorentz	I/A/4		
Taman Nasional Wasur	I/A/4		
Taman Wisata Alam Teluk Youtefa	II/B/6		

Sumber : http://www.pu.go.id/satminkal/index.asp?Site_id=10303 (Lampiran VIII : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor : 26 Tahun 2008

Tanggal : 10 Maret 2008)

Keterangan :

I - IV : Tahapan Pengembangan

A : Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung Nasional

A/1 : Suaka Alam Laut

A/2 : Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut

A/3 : Cagar Alam dan Cagar Alam Laut

A/4 : Taman Nasional dan Taman Nasional Laut

A/5 : Taman Hutan Raya

A/6 : Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut

B : Pengembangan Pengelolaan Kawasan Lindung Nasional

B/1 : Suaka Alam Laut

B/2 : Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut

B/3 : Cagar Alam dan Cagar Alam Laut

B/4 : Taman Nasional dan Taman Nasional Laut

B/5 : Taman Hutan Raya

B/6 : Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut

C : Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Hutan Lindung Nasional

C/1 : Kawasan Resapan Air

D : Pengembangan Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Nasional

E : Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Taman Buru Nasional

F : Pengembangan Pengelolaan Kawasan Taman Buru Nasional



BAB V

DATA GENDER KEMENTERIAN PU

Pembangunan Nasional pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik laki-laki, perempuan, anak perempuan, anak laki-laki, mereka yang memiliki kebutuhan khusus, manusia usia lanjut, remaja putri dan putra, anak usia dini. Hasil pembangunan di Indonesia yang belum termanfaatkan secara setara oleh kaum laki-laki dan perempuan menunjukkan masih ada kesenjangan, yang mengindikasikan masih besarnya perbedaan manfaat yang diterima oleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki.

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Secara umum tujuan PUG adalah memastikan apakah perempuan dan laki-laki diperlakukan adil dan setara dalam memperoleh Akses, Kontrol, Partisipasi dan memperoleh Manfaat (AKPM) yang sama atas pembangunan.

PUG di lingkungan Kementerian PU diupayakan melalui implementasi tugas dan fungsinya, yaitu : penyediaan prasarana dan sarana dasar pekerjaan umum yang meliputi kebijakan dan strategi penataan ruang dan pembangunan kawasan, serta pembinaan bidang penataan ruang; pembinaan dan penyediaan jalan dan jembatan; pembinaan dan penyediaan air baku, air irigasi, serta pengembangan daerah rawa dan pengendalian banjir; pembinaan dan penyediaan perumahan dan permukiman; pembinaan dan penyediaan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan, seperti air bersih, persampahan, drainase dan sanitasi.

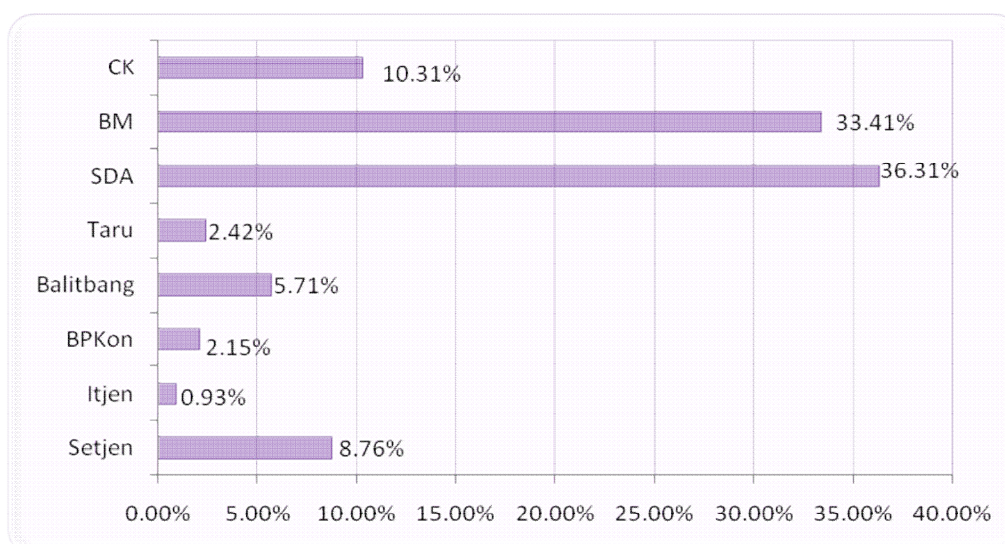


5.1 Komposisi PNS dan CPNS Kementerian PU

5.1.1 Analisis Per Satminkal PU

Penetapan kebutuhan PNS Kementerian PU disesuaikan dengan prioritas pemenuhan pegawai yang mengutamakan pada bidang tugas pelayanan teknis bidang ke-PU-an. Gambar 5.1 menunjukkan grafik jumlah PNS dan CPNS sampai bulan April 2010, yang menunjukkan jumlah tertinggi ada di satminkal Sumber Daya Air (36,31%), disusul Bina Marga (33,41%). Adapun jumlah paling sedikit berada di Inspektorat Jenderal, yakni 0,93%.

**Gambar 5.1 Prosentase PNS dan CPNS Kementerian PU (%)
April 2010**

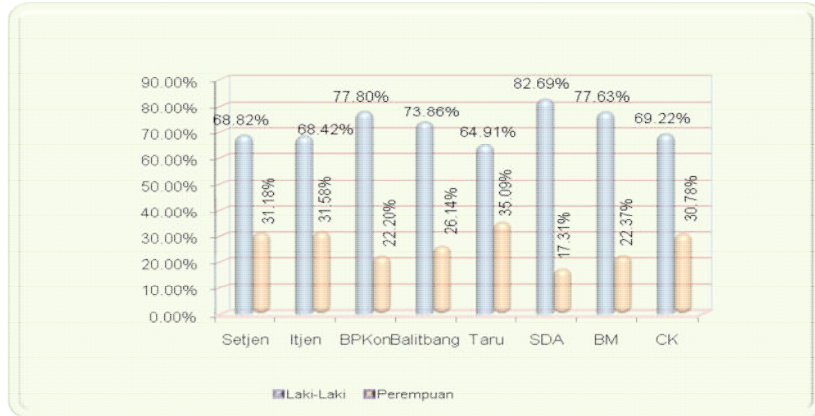


Sumber : Biro Kepegawaian, Kementerian PU

Dari jumlah pegawai Kementerian PU yang ada di Gambar 5.1, maka dapat dipilah menurut laki-laki dan perempuan, seperti yang terlihat di Gambar 5.2. Jumlah pegawai laki-laki mendominasi di tiap Satminkal Kementerian PU dengan tingkat tertinggi di Direktorat Jenderal SDA (82,69%). Diantara pegawai perempuan di tiap Satminkal Kementerian PU, yang mempunyai jumlah terbesar adalah Direktorat Penataan Ruang (35,09%), sedangkan yang terkecil ada di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (17,31%).



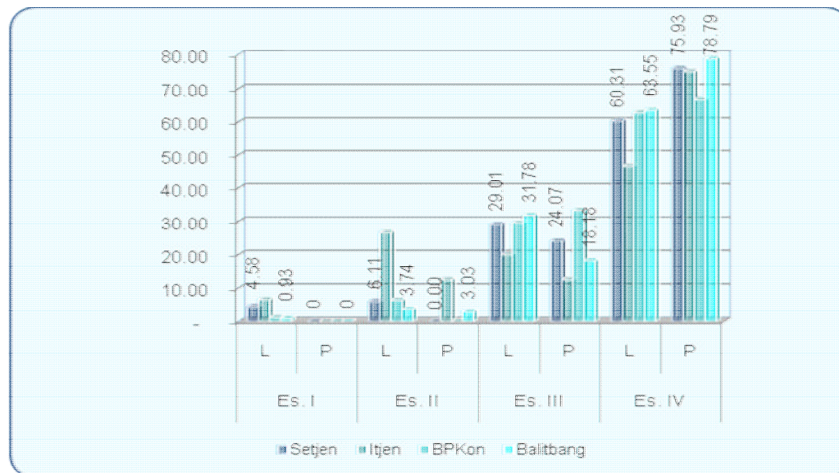
Gambar 5.2 Prosentase Pegawai Kementerian PU menurut Jenis Kelamin (%) per Satminkal, April 2010



Sumber : Biro Kepegawaian, Kementerian PU

Jumlah dan komposisi Pejabat PU akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses mutasi pegawai/ reorganisasi. Pada kondisi April 2010, di Kementerian PU, khususnya di Satminkal Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan (SIB) terdapat dominasi kaum laki-laki di tingkat Pejabat Eselon I. Tingkat partisipasi perempuan baru muncul di kelompok Pejabat Eselon II, III dan IV (Gambar 5.3. Dari pejabat perempuan di SIB, jumlah terbesar ada di Eselon IV dengan nilai tertinggi di Balitbang (78,79%).

Gambar 5.3 Prosentase Pejabat Kementerian PU di SIBB (%) Menurut Jenis Kelamin April 2010

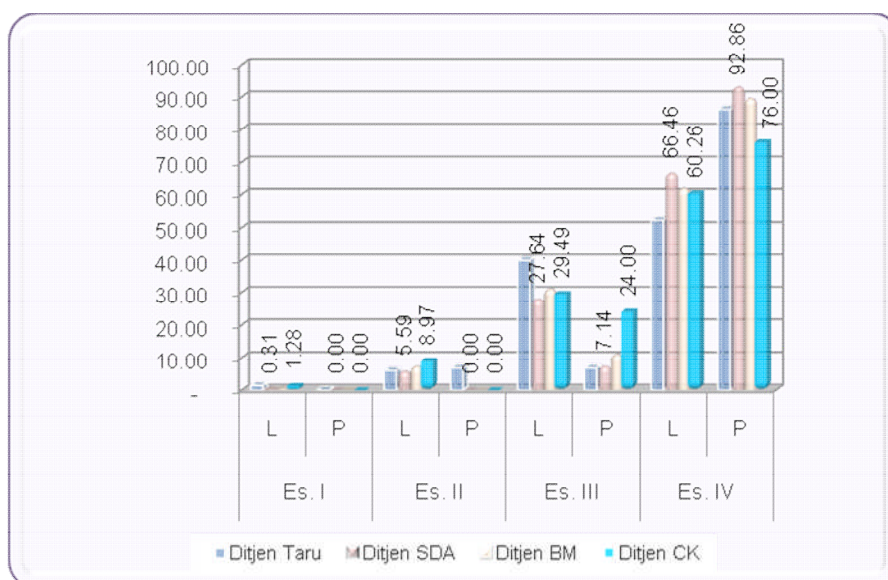


Sumber : Biro Kepegawaian, Kementerian PU



Pejabat Kementerian PU pada Direktorat Jenderal, untuk Eselon I lebih didominasi kaum laki-laki, sedangkan kaum perempuan paling tinggi di Eselon IV di tiap Direktorat Jenderal. Dari seluruh pejabat perempuan dan laki-laki di Direktorat Jenderal, Eselon IV Direktorat Jenderal Sumber Daya Air paling banyak jumlahnya (masing-masing 92,86% dan 66,46%), yang bisa dilihat di Gambar 5.4.

Gambar 5.4 Prosentase Pejabat Kementerian PU di Ditjen (%) Menurut Jenis Kelamin per Satminkal, April 2010



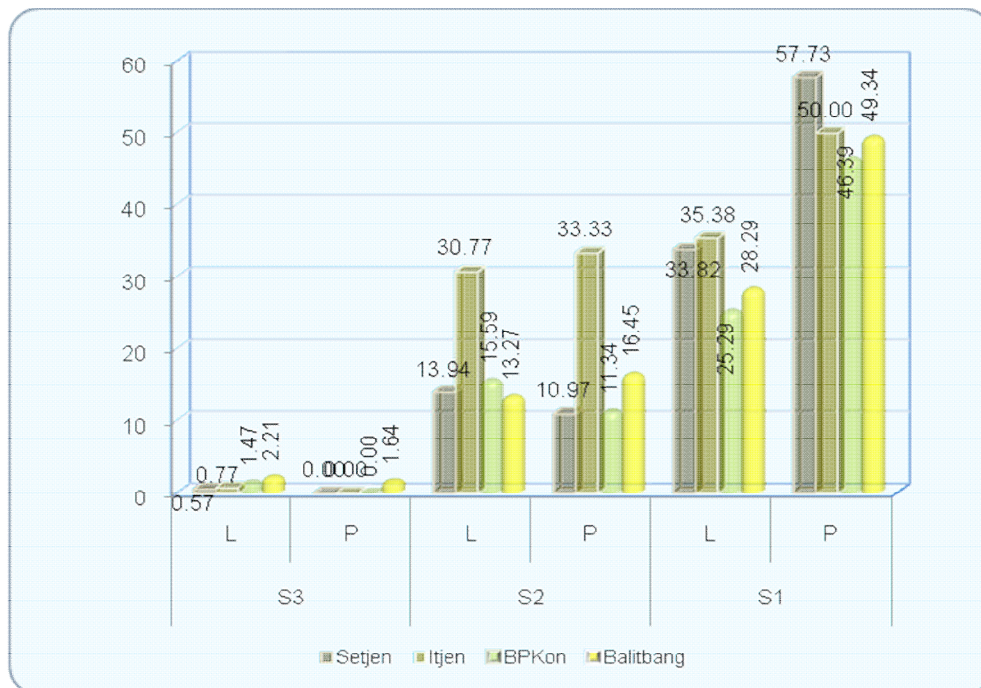
Sumber : Biro Kepegawaian, Kementerian PU

Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu negara adalah tersedianya cukup sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Merujuk pada faktor tersebut, maka melalui jalur pendidikan Kementerian PU secara konsisten berupaya meningkatkan SDM pegawainya. Dari total pegawai PU yang berpendidikan Sarjana, jumlah terbanyak adalah Sarjana S1 baik kaum perempuan dan laki-laki. Gambar 5.5 juga menunjukkan, bahwa dari jumlah pegawai perempuan tingkat pendidikan Sarjana S1 yang terdapat di SIB, paling banyak di Sekretariat Jenderal (57,73%). Di sisi tingkat pendidikan Sarjana S3, dapat dianalisa pada Gambar 5.5, bahwa sebagian dari mereka



adalah kaum laki-laki, kecuali di Balitbang ada 1,64% pegawai perempuan yang sampai pendidikan S3. Merujuk tingkat pendidikan S2 pada Gambar 5.5, menunjukkan bahwa jumlah pegawai perempuan dan laki-laki hampir sama, dan Inspektorat Jenderal memiliki jumlah tertinggi untuk pegawai S2 baik laki-laki maupun perempuan.

Gambar 5.5 Prosentase Pegawai Kementerian PU di SIBB (%) Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Sarjana per Satminkal, April 2010

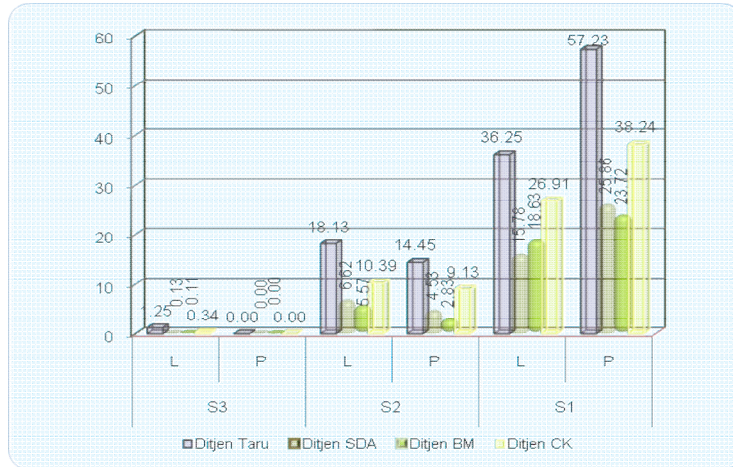


Sumber : Biro Kepegawaian, Kementerian PU

Di Direktorat Jenderal PU, jumlah pegawai paling banyak di tingkat pendidikan Sarjana S1. Berdasarkan Gambar 5.6, dari jumlah pegawai perempuan dan laki-laki dengan tingkat pendidikan Sarjana, paling tinggi S1 di Direktorat Jenderal Penataan Ruang, dengan komposisi laki-laki 36,25% dan perempuan 57,23%. Demikian pula di tingkat pendidikan Sarjana S2, dengan komposisi laki-laki sebesar 18,13% dan perempuan sebesar 14,45%.



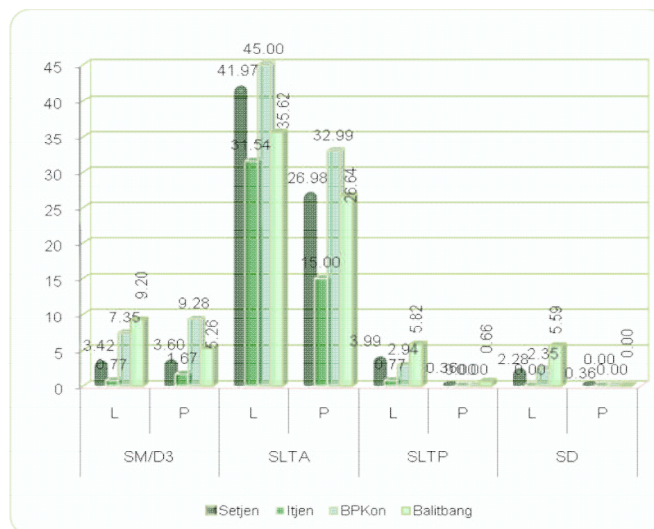
Gambar 5.6 Prosentase Pegawai Kementerian PU di Ditjen (%) Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Sarjana per Satminkal, April 2010



Sumber : Biro Kepegawaian, Kementerian PU

Beberapa pegawai di Kementerian PU juga menyebar di tingkat pendidikan Sarjana Muda/ Diploma 3 kebawah. Keadaan tersebut dapat dilihat di Gambar 5.7 dan 5.8. Jumlah pegawai terbanyak di SIB adalah yang tingkat pendidikan SLTA, dimana Badan Pembinaan Konstruksi menempati urutan paling atas dengan komposisi 45% laki-laki dan 32,99% perempuan (Gambar 5.7).

Gambar 5.7 Prosentase Pegawai Kementerian PU di SIBB (%) Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Diploma ke bawah per Satminkal, April 2010

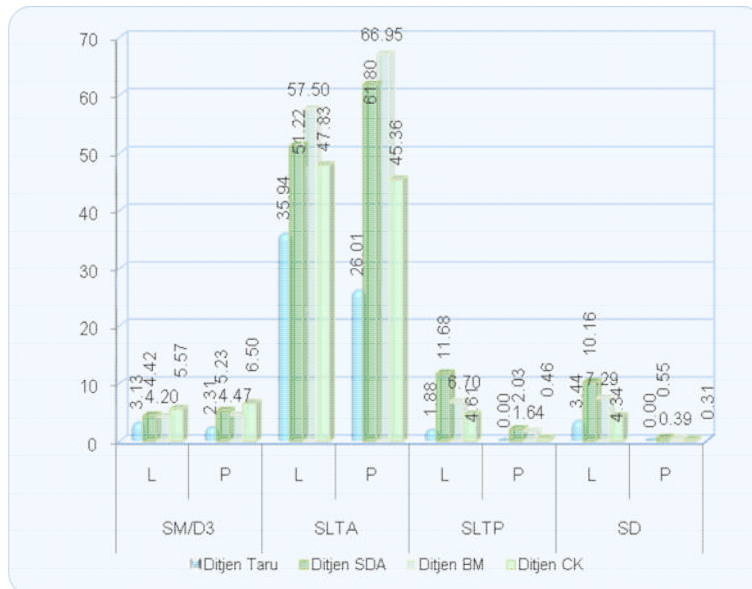


Sumber : Biro Kepegawaian, Kementerian PU



Prosentase pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA juga terbanyak di Direktorat Jenderal Kementerian PU. Untuk jumlah pegawai berpendidikan SLTA yang terbanyak berasal dari Direktorat Jenderal Bina Marga dengan komposisi 57,50% laki-laki dan 66,95% perempuan (Gambar 5.8). Pegawai yang tingkat pendidikannya SD masih ada baik laki-laki maupun perempuan, kecuali pegawai perempuan di Direktorat Jenderal Penataan Ruang.

Gambar 5.8 Prosentase Pegawai Kementerian PU di Ditjen (%) Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Diploma ke bawah per Satminkal, April 2010



Sumber : Biro Kepegawaian, Kementerian PU

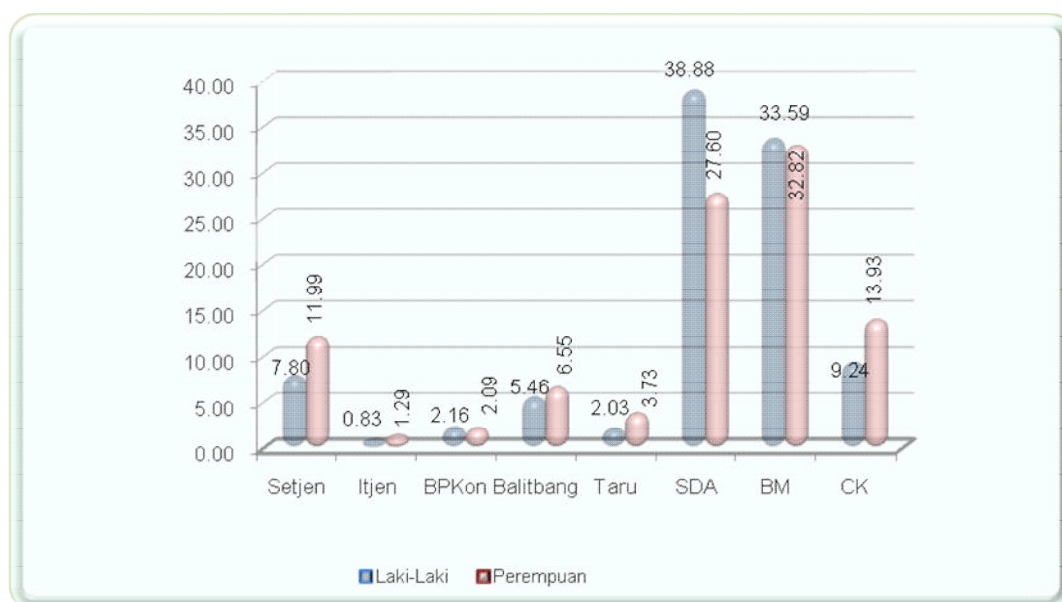
5.1.2 Analisis Keseluruhan PU

Gambaran mengenai profil gender Kementerian PU menurut sebarannya penting dilakukan sebagai langkah awal untuk melakukan program penguatan khususnya mengenai manajemen yang mempertimbangkan aspek perbedaan gender. Harapannya adalah laki-laki dan perempuan nantinya dapat bersinergi dalam bekerja, terutama yang berkaitan dengan perilaku manajemen.



Profil gender pada Gambar 5.9 menunjukkan komposisi jumlah laki-laki dan perempuan per satminkal terhadap jumlah laki-laki dan perempuan seluruh Kementerian PU (%). Dari sebaran tersebut bisa dikatakan, bahwa prosentase laki-laki di Ditjen SDA paling besar diantara laki-laki seluruh Kementerian PU (38,88%). Sedangkan untuk perempuan prosentase terbesar berada di Ditjen Bina Marga (32,82%). Prosentase terkecil baik perempuan maupun laki-laki terdapat di Inspektorat Jenderal (Itjen).

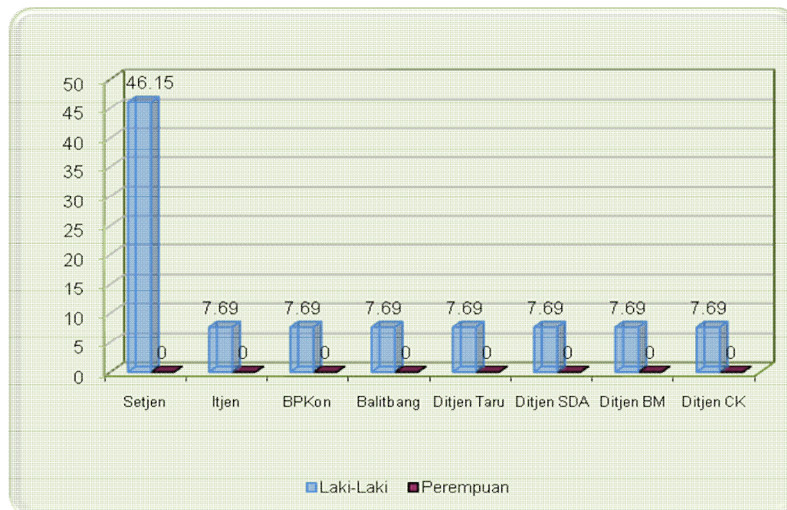
Gambar 5.9 Sebaran Prosentase Pegawai Kementerian PU Menurut Jenis Kelamin (%) April 2010



Jika ditinjau dari segi jabatan, Gambar 5.10 menghasilkan temuan empiris, yakni, peran perempuan dalam pembuatan keputusan di Kementerian PU masih sangat lemah dibanding laki-laki, artinya keputusan strategis masih didominasi oleh laki-laki. Diantara pejabat eselon I laki-laki, maka pejabat eselon I laki-laki di Sekretariat Jenderal paling tinggi persentasenya (46,15%). oleh siapapun. Akses dan kontrol yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki secara adil, merupakan faktor-faktor penting dalam merencanakan dan melakukan analisis proyek yang berbasis gender.

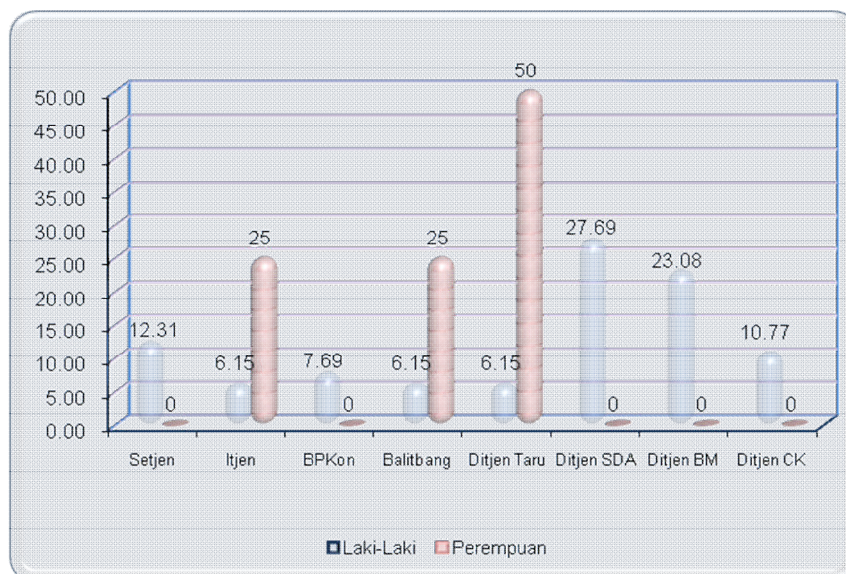


Gambar 5.10 Sebaran Prosentase Pejabat Eselon I Kementerian PU Menurut Jenis Kelamin (%), April 2010



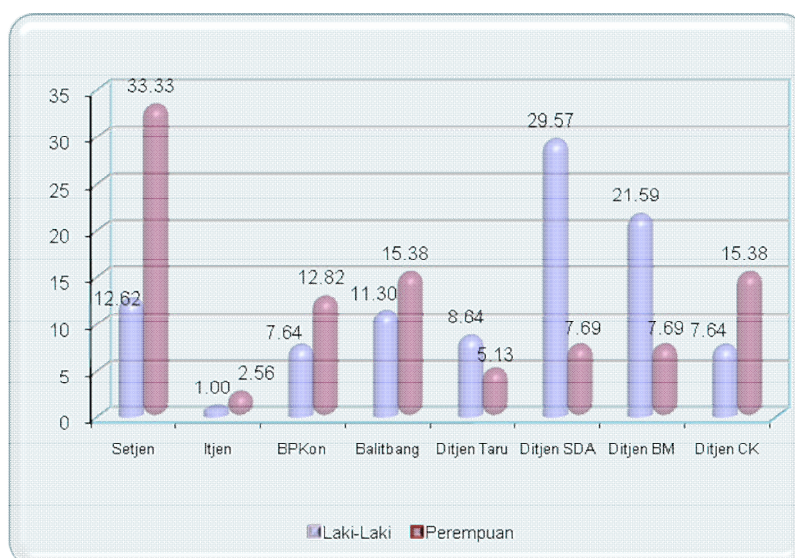
Di Kementerian PU, fungsi dan peran perempuan mulai ada dalam jabatan eselon II. Pada Gambar 5.11, dari seluruh pejabat eselon II perempuan di PU, prosentase tertinggi berada di Ditjen Penataan Ruang (50%). Sedangkan prosentase tertinggi pejabat eselon II laki-laki berada di Ditjen SDA (27,69%).

Gambar 5.11 Sebaran Prosentase Pejabat Eselon II Kementerian PU Menurut Jenis Kelamin (%), April 2010

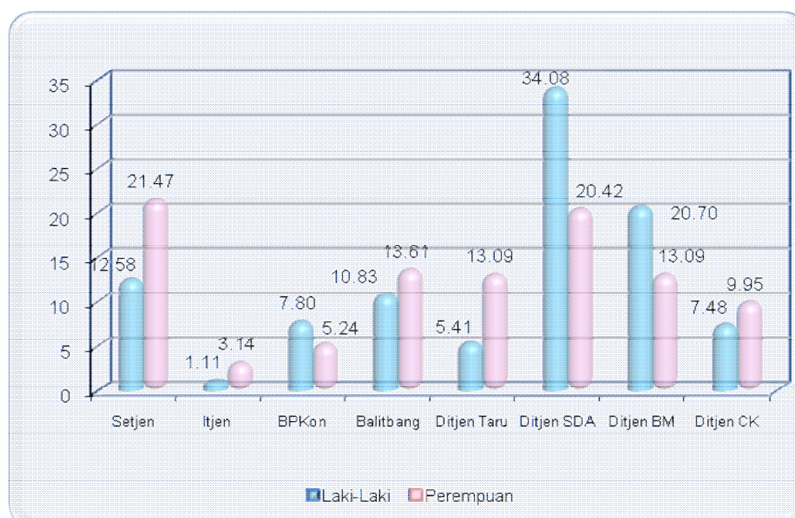


Di tingkat eselon III dan IV, kontribusi perempuan telah memegang peranan penting di Kementerian PU. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.12 dan Gambar 5.13, dimana peran perempuan sebagai pengambil kebijakan, perencana, dan pelaksana sudah ada di tiap satminkal. Prosentase pejabat eselon III dan IV perempuan tertinggi di Setjen (33,33% dan 21,47%).

Gambar 5.12 Sebaran Prosentase Pejabat Eselon III Kementerian PU Menurut Jenis Kelamin (%), April 2010



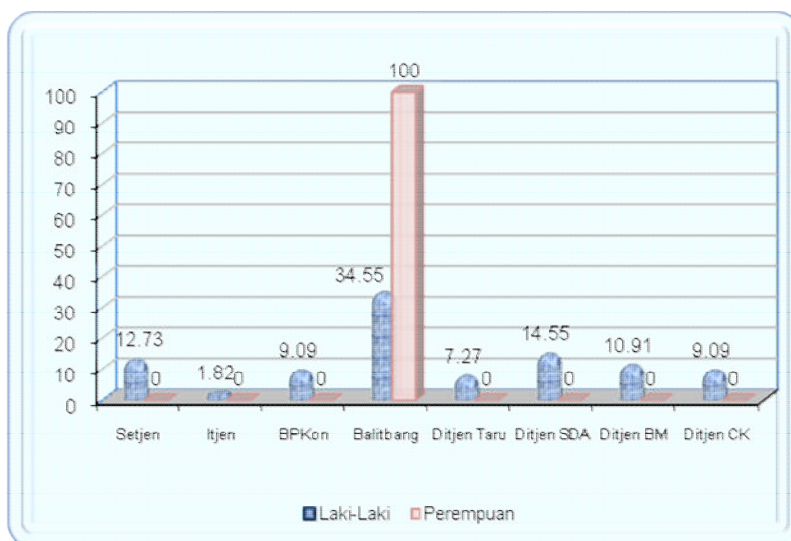
Gambar 5.13 Sebaran Prosentase Pejabat Eselon IV Kementerian PU Menurut Jenis Kelamin (%), April 2010



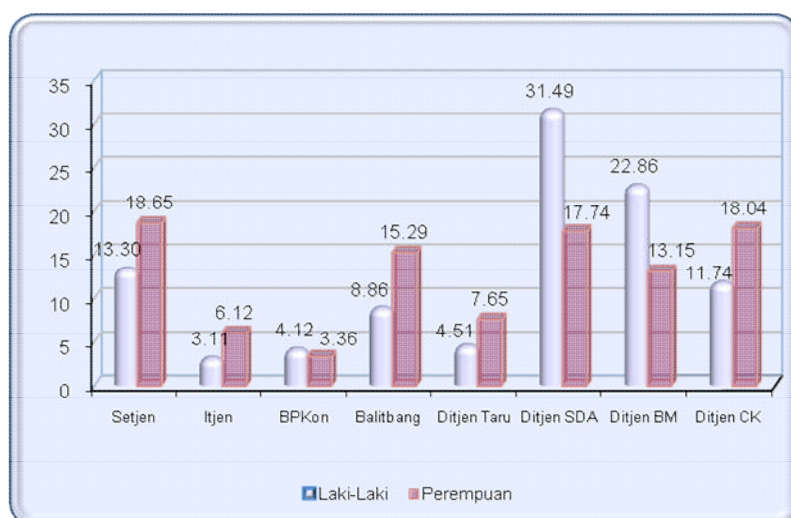


Jika ditinjau dari pendidikan S3, prosentase laki-laki ada di setiap satminkal, tetapi untuk perempuan hanya ada di Balitbang (Gambar 5.14). Sedangkan untuk pendidikan S2, prosentase laki-laki dan perempuan sudah ada di tiap satminkal (Gambar 5.15).

Gambar 5.14 Sebaran Prosentase Pegawai Tingkat Pendidikan S3 Kementerian PU Menurut Jenis Kelamin (%), April 2010

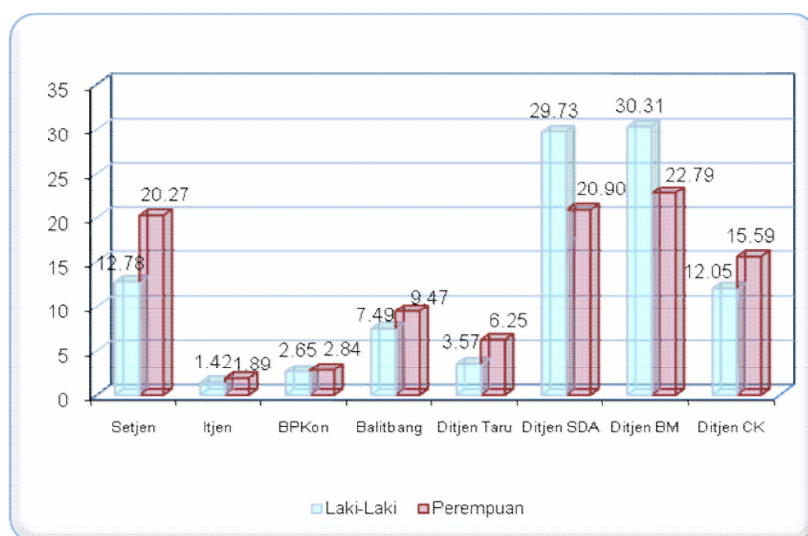


Gambar 5.15 Sebaran Prosentase Pegawai Tingkat Pendidikan S2 Kementerian PU Menurut Jenis Kelamin (%), April 2010

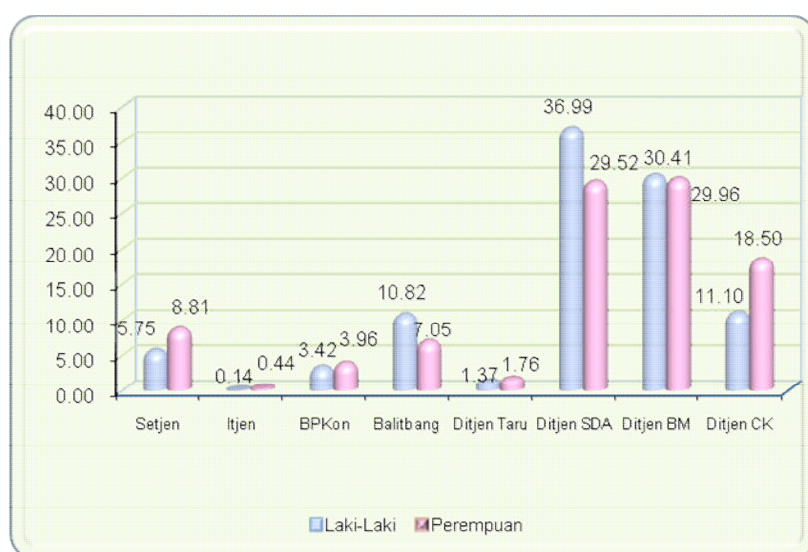


Sebaran prosentase pegawai yang berpendidikan S1 hampir di tiap satminkal lebih menonjol perempuan dibandingkan laki-laki, kecuali di Ditjen SDA dan Bina Marga (Gambar 5.16). Demikian pula halnya untuk prosentase pegawai berpendidikan SM/ D3 dengan penambahan di Balitbang (Gambar 5.17).

Gambar 5.16 Sebaran Prosentase Pegawai Tingkat Pendidikan S1 Kementerian PU Menurut Jenis Kelamin (%), April 2010



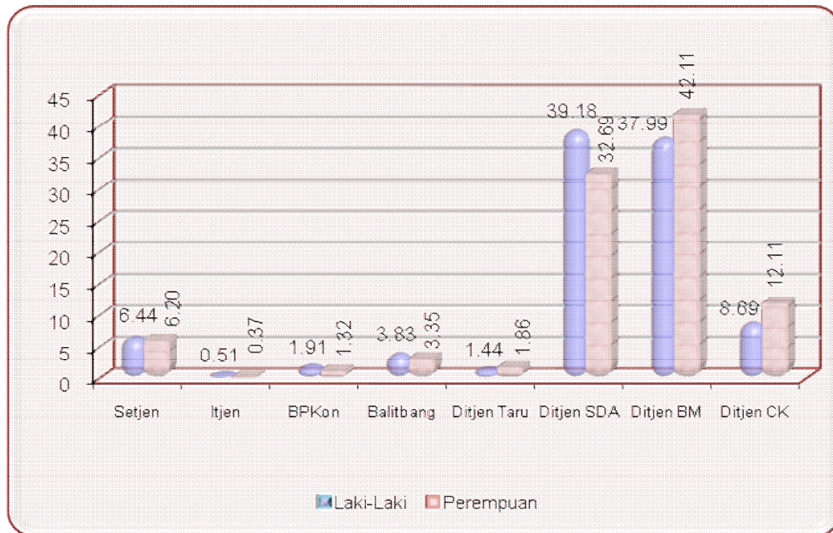
Gambar 5.17 Sebaran Prosentase Pegawai Tingkat Pendidikan SM/ D3 Kementerian PU Menurut Jenis Kelamin (%), April 2010



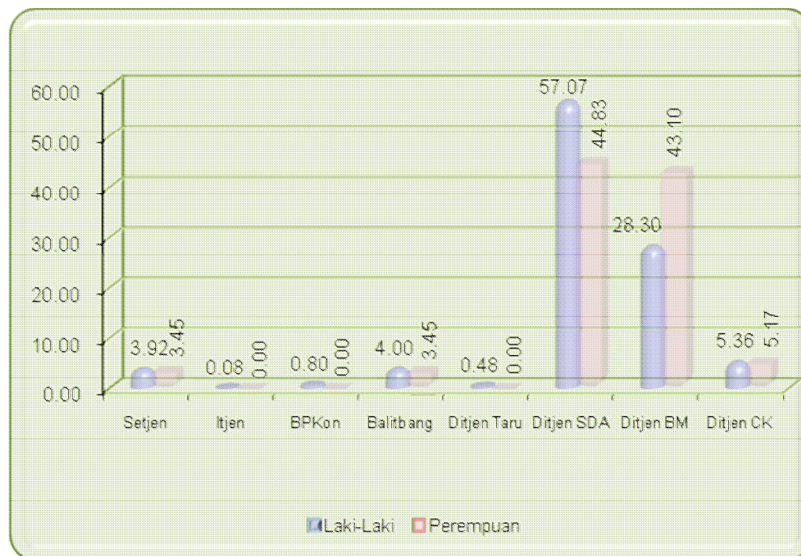


Pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA paling banyak di Ditjen SDA dan Bina Marga baik laki-laki maupun perempuan, adapun paling sedikit terdapat di Itjen (Gambar 5.18). Kondisi yang sama juga terjadi pada pegawai di tingkat pendidikan SLTP (Gambar 5.19).

Gambar 5.18 Sebaran Prosentase Pegawai Tingkat Pendidikan SLTA Kementerian PU Menurut Jenis Kelamin (%), April 2010



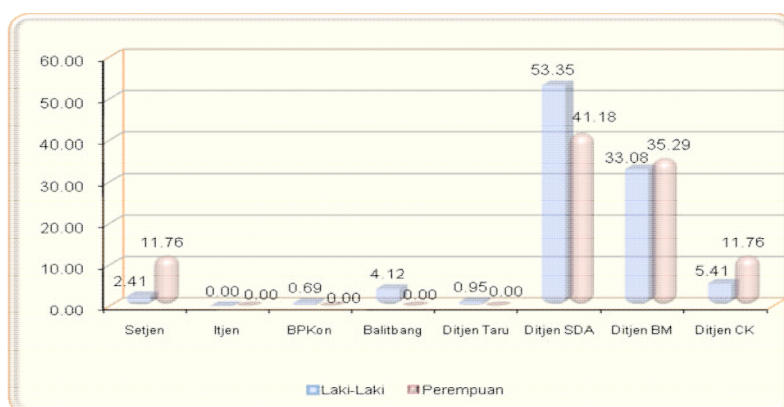
Gambar 5.19 Sebaran Prosentase Pegawai Tingkat Pendidikan SLTP Kementerian PU Menurut Jenis Kelamin (%), April 2010





Pegawai berpendidikan SD sudah tidak ada lagi diltjen, tapi masih banyak di Ditjen SDA dan Bina Marga. Adapun pegawai perempuan lulusan SD sudah tidak ada di Itjen, BP Konstruksi, Balitbang, dan Ditjen Penataan Ruang (Gambar 5.20).

Gambar 5.20 Sebaran Prosentase Pegawai Tingkat Pendidikan SD Kementerian PU Menurut Jenis Kelamin (%), April 2010



5.2 Komposisi Peserta Pelatihan di Kementerian PU

Pembinaan keahlian Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani sektor PU perlu lebih ditingkatkan lagi, karena dalam beberapa tahun terakhir ini dirasakan penguasaan keilmuan dan teknologi di sektor PU oleh para penyelenggara ke-PU-an dirasakan semakin berkurang. Dalam rangka pengembangan teknologi pembelajaran dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Kementerian PU, maka terdapat beberapa jenis pelatihan, diantaranya bidang konstruksi serta bidang teknologi informasi dan komunikasi. Dengan pelatihan ini diharapkan para peserta bisa menerapkan serta menginformasikan pada pegawai yang lain di lingkungan kerjanya tentang ilmu yang didapat selama proses pembelajaran. Hal tersebut untuk peningkatan kemampuan peserta dan memantapkan tugas, fungsi, dan peran peserta itu sendiri. Selain itu, agar proses transformasi keahlian tersebut dapat berjalan dengan baik.

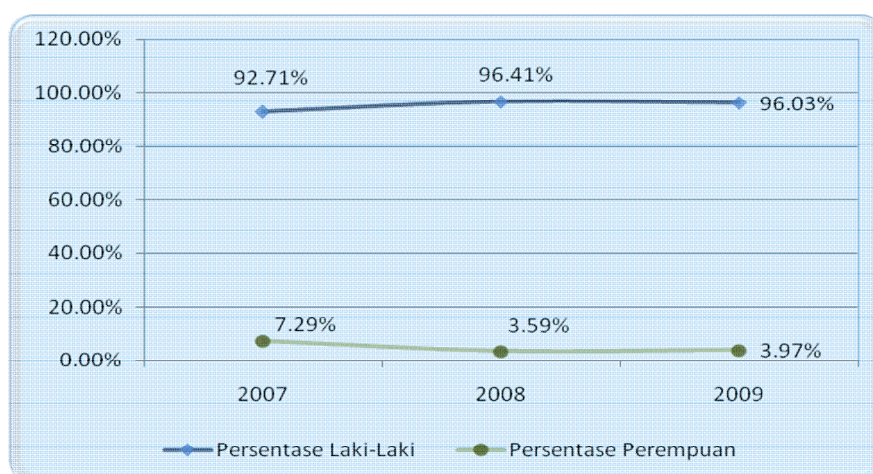


5.2.1 Bidang Konstruksi

Dalam rangka meningkatkan kinerja institusi dan mendukung pembangunan nasional dalam penyediaan dan pelayanan infrastruktur bidang pekerjaan umum serta pelaksanaan otonomi daerah melalui peningkatan profesionalisme aparatur bidang ke-PU-an, maka Kementerian Pekerjaan Umum melalui Badan Pembinaan Konstruksi memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Keahlian Konstruksi bidang Pekerjaan Umum. Untuk partisipasi perempuan dalam program tersebut, jika melihat fenomena pada Gambar 5.21, lebih banyak peserta laki-laki dibandingkan perempuan.

Jumlah peserta pelatihan konstruksi di Kementerian PU dari tahun 2007-2009 lebih didominasi kaum laki-laki dibandingkan perempuan. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.21, yang menunjukkan pada rentang waktu tiga tahun itu jumlah peserta perempuan tidak mencapai 10%, bahkan cenderung menurun. Dalam kegiatan pelatihan konstruksi yang berlangsung selama tiga tahun ini, deviasi peserta laki-laki dan perempuan sangat besar, untuk itu masih perlu ditingkatkan lagi peran perempuan terhadap program tersebut.

Gambar 5.21 Prosentase Peserta Pelatihan Konstruksi Menurut Jenis Kelamin (%), Tahun 2007 – 2009



Sumber : Badan Pembinaan Konstruksi, Kementerian PU



5.2.2 Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Teknologi Informasi dan Komunikasi secara umum adalah semua teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan (akuisisi), pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Pemahaman TIK yang demikian ini mencakup semua perangkat keras, perangkat lunak, kandungan isi, dan infrastruktur computer maupun (tele)komunikasi.

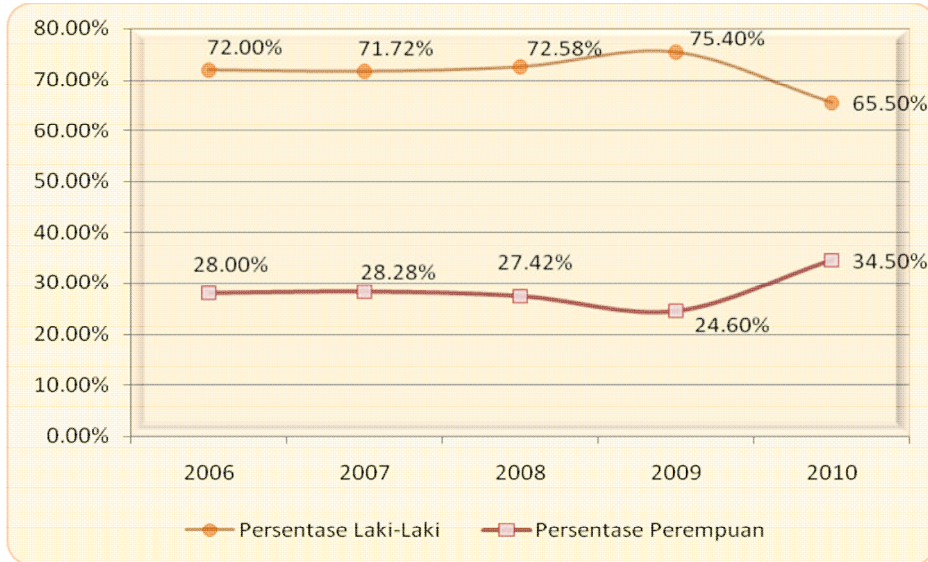
Dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian PU, diperlukan upaya peningkatan kemandirian dan keunggulan, yang salah satunya adalah dengan mengembangkan sistem pelatihan untuk membentuk keahlian dan ketrampilan pegawai dalam bidang teknologi yang strategis serta mengantisipasi timbulnya kesenjangan keahlian sebagai akibat kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Inisiatif Pusdata menyelenggarakan pelatihan di bidang TIK adalah sebagai salah satu upaya melakukan penyebaran informasi ke Balai/ Satker/ SNVT yang tersebar di seluruh Indonesia, merupakan wujud dari kesadaran untuk mengoptimalkan pendayagunaan teknologi dalam membantu proses pembelajaran masyarakat.

Seiring dengan kebijakan pemerintah tentang *e-Government*, maka program pelatihan TIK yang diselenggarakan Pusdata dimulai sejak tahun 2006-2010 dan untuk jumlah pesertanya dapat diilustrasikan pada Gambar 5.22. Komposisi peserta pelatihan dari tahun 2006-2009 hampir sama untuk laki-laki (3/4) dan perempuan (1/4), sedangkan mulai tahun 2010 komposisi berubah untuk laki-laki (2/3) dan perempuan (1/3).

Pelaksanaan pelatihan ini tiap tahun diadakan empat sampai lima angkatan di berbagai provinsi yang berbeda. Provinsi yang telah dipakai sebagai tempat penyelenggaraan pelatihan TIK ini, antara lain Sumatera Utara, Bali, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, DI Yogyakarta, Jawa Barat, dan DKI Jakarta.



Gambar 5.22 Prosentase Peserta Pelatihan TIK Menurut Jenis Kelamin (%), Tahun 2006 – 2010



Sumber : Pusdata, Kementerian PU

5.3 Komposisi Pengguna PU-net (Hasil Survei)

Meski populasi pengguna internet meningkat dengan pesat, tapi proporsi pengguna perempuan masih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini bisa dilihat pada Gambar 5.23, yaitu perbandingan pengguna PU-net tahun 2005 dan 2010 yang menunjukkan pengguna laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Dibandingkan tahun 2005, ternyata pengguna PU-net perempuan tahun 2010 meningkat, dari 34,21% menjadi 36,36%.

Kementerian PU telah mengembangkan portal PU-net (www.pu.go.id), yang mana melalui portal ini masyarakat (internal dan eksternal di Kementerian PU) dapat mengakses berbagai informasi. Untuk mengetahui sejauh mana website PU-net dikenal masyarakat tersebut, maka beberapa analisis data dari hasil kuesioner disajikan pada Gambar 5.23 dan 5.24 sebagai berikut :



Gambar 5.23 Prosentase Pengguna PU-net di Kementerian PU Menurut Jenis Kelamin (%), Tahun 2005 dan 2010*

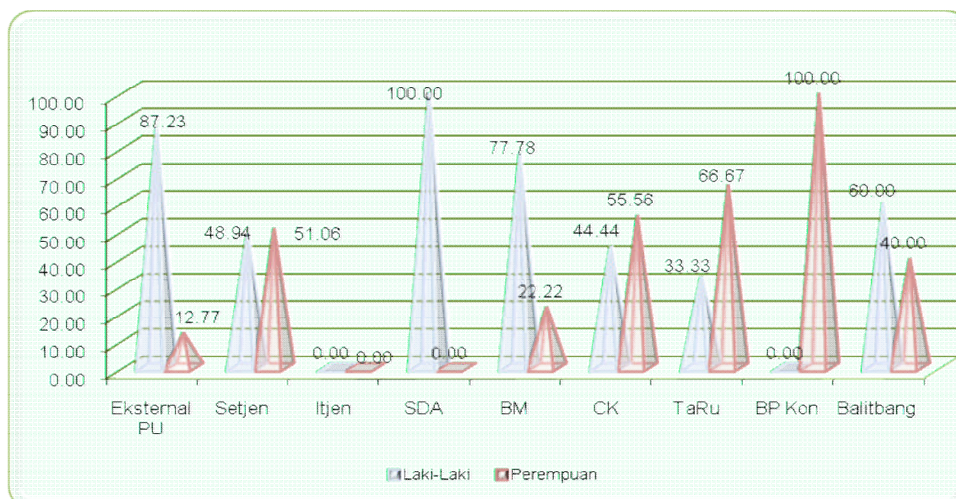


Sumber : Pusdata, Kementerian PU

Catatan : * Status sampai dengan 13 Agustus 2010

Dari kuisisioner yang disebarakan di biding room Pusdata, dapat diketahui bahwa pengguna PU-net dari luar PU sebagian besar adalah kaum laki-laki. Adapun pengguna PU-net dari internal PU untuk Direktorat Jenderal SDA semuanya laki-laki, dan di Badan Pembinaan Konstruksi semuanya perempuan.

Gambar 5.24 Prosentase Pengguna PU-net Menurut Jenis Kelamin dan Satminkal (%), Tahun 2010*

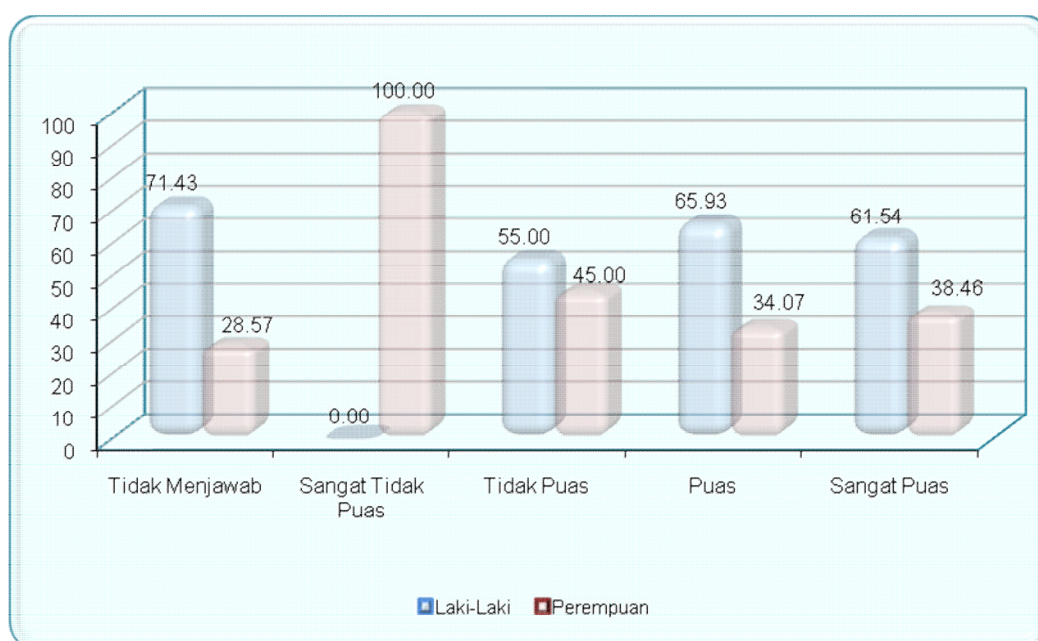


Sumber : Pusdata, Kementerian PU

Catatan : * Status sampai dengan 13 Agustus 2010

Jika ditinjau dari tingkat kepuasan para pengguna PU-net terhadap web site PU-net, maka Gambar 5.25 menunjukkan bahwa pengguna perempuan tingkat kepuasannya lebih rendah dibandingkan pengguna laki-laki. Hal ini bisa dilihat pada tingkat sangat tidak puas, pengguna perempuan paling dominan, dan pada tingkat sangat puas, pengguna perempuan lebih sedikit (38,46%).

Gambar 5.25 Prosentase Pengguna PU-net Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Kepuasan (%), Tahun 2010*



Sumber : Pusdata, Kementerian PU

Catatan : * Status sampai dengan 13 Agustus 2010